

**PENGEMBANGAN MODEL AKREDITASI
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH**



Oleh:
MARJUKI
NIM 07701261004

Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar Doktor Pendidikan

PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

MARJUKI: *Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).* **Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.**

Penelitian ini bertujuan: (1) mengembangkan model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel, dan (2) menilai keefektifan model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan. Pengembangan model dilakukan melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD). Validasi instrumen dilakukan oleh pakar, sedangkan validasi prosedur dilakukan oleh peserta FGD. Validitas isi instrumen ditentukan dengan cara menghitung indeks koefisien Aiken's V, sedangkan estimasi reliabilitas instrumen ditentukan dengan teknik *intraclass correlation coefficient* (ICC) menggunakan SPSS. Validasi prosedur dilakukan dengan cara menghitung rerata skor hasil penilaian peserta FGD. Uji coba dilakukan untuk mengetahui keefektifan model yang dikembangkan. Subjek coba berasal dari 6 SMA berjumlah 42 orang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Keefektifan model ditentukan dengan cara menghitung rerata skor hasil penilaian praktisi.

Hasil pengembangan diperoleh model akreditasi SMA/MA yang diberi nama model akreditasi SMART. Kesimpulan tentang model akreditasi SMART sebagai berikut: (1) memiliki karakteristik sebagai model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel; (2) instrumen yang digunakan memiliki validitas isi sebesar 0,81 dan termasuk kategori sangat baik dan reliabilitas sebesar 0,75 dan termasuk kategori baik; (3) prosedur yang digunakan memiliki validitas sebesar 3,16 dan termasuk kategori baik; dan (4) keefektifan model sebesar 3,40 dan termasuk kategori baik dan dapat digunakan.

Kata kunci: *model akreditasi, instrumen akreditasi, dan prosedur akreditasi.*

ABSTRACT

MARJUKI: *Developing An Accreditation Model of Secondary School (SMA/MA). Dissertation. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2016.*

This study aims is: (1) to develop an accreditation model of SMA/MA which is effective, efficient and accountable, and (2) evaluate the effectiveness of the model being developed.

This research is research and development (R & D). The development model was done through focus group discussion (FGD). The validation of the instrument was done by experts, while the validation of the procedure was performed by the FGD participants. The content validity of the instrument was determined by calculating the coefficient index Aiken's V, while the estimated reliability of the instrument was determined by using the intraclass correlation coefficient (ICC) using SPSS. The validation procedure was done by calculating the mean score of the assessment results of FGD. The try out was conducted to determine the effectiveness of the developed model. The subject of the try out from 6 SMA total 42 person comprised school principals, teachers, and administrative personnel. The effectiveness of the model was determined by calculating the average score of practitioners assessment.

The accreditation model developed is named SMART accreditation models. Conclusions on the SMART accreditation models are: (1) it has the characteristics of the accreditation models of secondary school, which are effective, efficient, and accountable; (2) the instrument used has content validity 0.81, which is in a very good category and reliability 0.75, which is in a good category; (3) the procedure used has the validity 3.16, which is in a good category; and (4) the effectiveness of the model is 3.40, which is in a good category and can be used.

Keywords: *accreditation models, accreditation instruments, accreditation procedures*

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN MODEL AKREDITASI
SEKOLAH MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH

MAHJUKI
NIM 07700261084

Dipertahankan di depan Dewan Pengaji Disertasi
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Tanggal: 2 Agustus 2016

DEWAN PENGUJI

Dr. Sugito, M.A.
(Ketua Pengaji)

FX. Sudarsono, Ph.D.
(Sekretaris Pengaji)

Prof. Djurnani Mardapi, Ph.D.
(Promotor Pengaji)

Prof. Dr. Dadun Kartawiguna, M.Pd.
(Kopromotor Pengaji)

Dr. Haryanto, M.Pd., M.T.
(Pengaji)

Prof. Dr. Sudarwan Darma, M.Pd.
(Pengaji)

23/8/16

23/8/2016

23/8/16

23/8/2016

13/8/2016

23/8/2016

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Berkas,

Dr. Moch. Beari Tripono
NP. 19560216 198600 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada:

1. Ibu Sa'adah Ridwan, M.Pd. selaku Kepala LPMP Provinsi Bengkulu yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk melanjutkan studi S-3 di Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta; Direktur, Asisten Direktur I, Asisten Direktur II, Dosen, serta Staf pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan layanan akademik yang baik sejak awal studi hingga penyelesaian studi;
3. Bapak Prof. Djemari Mardapi, Ph.D. dan Bapak Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus sebagai Promotor dan Kopromotor yang telah memberikan bimbingan akademik, kontribusi ide/pemikiran, arahan, inspirasi, dorongan, motivasi sejak awal studi hingga penulisan disertasi ini selesai;
4. Bapak Prof. Suyata, Ph.D.; Bapak Sumarno, Ph.D.; dan Bapak FX. Sudarsono, Ph.D. selaku Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan atas gagasan/ide dan saran pada tahap awal penulisan disertasi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd. (Guru Besar Universitas Bengkulu); Bapak Soeharto, M.SOE., Ed.D. (Anggota BAN-S/M); dan Ibu Dr. Heri Retnawati, M.Si. (Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta) selaku pakar yang telah memvalidasi instrumen dan memberikan saran perbaikan pada tahap pengembangan model dalam penelitian disertasi ini;

6. Bapak Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.S. selaku *reviewer* yang telah memberikan saran perbaikan dalam penulisan disertasi ini sebelum diujikan.
7. Dewan Penguji Ujian Hasil Penelitian Disertasi: Bapak Prof. Dr. Muhyadi; Bapak FX. Sudarsono, Ph.D.; Bapak Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.; Bapak Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd.; Bapak Dr. Heryanto, M.Pd.; M.T.; dan Bapak Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd. yang telah memberikan saran perbaikan dalam penulisan disertasi ini;
8. Dewan Penguji Ujian Akhir Disertasi: Bapak Dr. Sugito, M.A.; Bapak FX. Sudarsono, Ph.D.; Bapak Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.; Bapak Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd.; Bapak Dr. Heryanto, M.Pd., M.T.; dan Bapak Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd. yang telah memberikan penguatan dan saran perbaikan dalam penulisan disertasi ini;
9. Anggota dan Asesor pada BAP-S/M Provinsi Bengkulu yang telah memberikan informasi dan data terkait akreditasi pada tahap studi pendahuluan dan tahap pengembangan model dalam penelitian disertasi ini;
10. Anggota dan Asesor pada BAP-S/M Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan data pada tahap pengembangan model dalam penelitian disertasi ini;
11. Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Administrasi di SMA Negeri 5 Bengkulu, SMA Negeri 7 Bengkulu, SMA Negeri 10 Bengkulu, SMA Negeri 3 Bengkulu, SMA Negeri 1 Kabawetan Kepahiang, dan SMA Negeri 9 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 yang telah memberikan data sekolahnya pada saat uji coba model dan telah memberikan penilaian terhadap model yang dikembangkan dalam penelitian disertasi ini;
12. Rekan Mahasiswa S-3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Angkatan 2007 atas kebersamaan selama kuliah dan telah menjadi bagian dari proses akademik sejak awal studi hingga penyelesaian studi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung berupa saran dan masukan dalam penulisan disertasi ini.

Ucapan terima penulis sampaikan kepada istri Siti Wasilah dan anak-anak: Taufiq Unggul Raharja, S.Si.; Hana Hanifa, S.P.; Nuha Nabila; Daris Haidar Labib; dan menantu pertama Elfa Mega Prima Putri, S.Si. serta cucu pertama Hamizan Fatullah Rasyid yang telah menginspirasi, bersabar, dan telah mengikhhlaskan sebagian waktu kebersamaan yang hilang terutama saat penulis menyelesaikan disertasi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ayahnda Ngadiran dan Ibunda Ngatiah yang telah memberikan do'a dan restu sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam karya disertasi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kepada pembaca yang budiman kiranya berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dikemudian hari penulis dapat membuat karya tulis lain yang lebih baik lagi.

Yogyakarta, 27 Juli 2016

Penulis,

Marjuki
NIM 07701261004

PERNYATAAN KEASLIAN

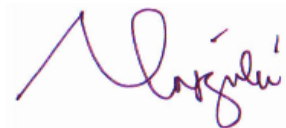
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Marjuki
Nomor Induk Mahasiswa : 07701261004
Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Lembaga Asal : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Juli 2016

Yang membuat pernyataan,



Marjuki
NIM 07701261004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Pengembangan	12
F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan	12
G. Manfaat Pengembangan	13
1. Pengembangan Teori	13
2. Aplikasi.....	13
H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori	15
1. Pengertian Akreditasi Sekolah.....	15
2. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Akreditasi Sekolah	21
3. Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi dalam Akreditasi Sekolah	25
4. Evaluasi dalam Konteks Akreditasi Sekolah.....	32
5. Kaitan antara Evaluasi Mutu Sekolah dan Akreditasi Sekolah	37
6. Akreditasi sebagai Bentuk Penjaminan Mutu Pendidikan	41
7. Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan.....	58

8. Kriteria Mutu Satuan Pendidikan	94
9. Model Akreditasi Sekolah/Madrasah BAN-S/M.....	95
B. Kajian Penelitian yang Relevan	102
C. Kerangka Pikir	113
D. Pertanyaan Penelitian.....	122
BAB III METODE PENELITIAN.....	123
A. Model Pengembangan	123
B. Prosedur Pengembangan	125
1. Studi Permasalahan	127
2. Perencanaan Pengembangan.....	127
3. Pengembangan Produk Model Akreditasi	128
C. Uji Coba Produk.....	130
1. Desain Uji Coba	131
2. Subjek Coba.....	134
3. Teknik dan Instrumen Pengumpul Data	135
4. Teknik Analisis Data	136
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	140
A. Hasil Pengembangan Produk Awal	140
1. Hasil Pengembangan Komponen Standar Akreditasi.....	147
2. Hasil Pengembangan Instrumen Akreditasi	154
3. Hasil Pengembangan Prosedur Akreditasi	172
B. Hasil Uji Coba Produk.....	174
1. Hasil Uji Coba Tahap 1	174
2. Hasil Uji Coba Tahap 2	179
C. Revisi Produk.....	184
D. Kajian Produk Akhir	185
E. Keterbatasan Penelitian	185
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	186
A. Simpulan Tentang Produk.....	186
B. Saran Pemanfaatan Produk	187
C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut.....	188
DAFTAR PUSTAKA	189

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Gambaran Pelaksanaan Akreditasi di SMA/MA	8
Tabel 2. Kualifikasi Kemampuan Lulusan SMA/MA	63
Tabel 3. Tingkat Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah.....	71
Tabel 4. Kompetensi Inti Tingkat Kelas X-XI SMA/MA.....	73
Tabel 5. Kompetensi Inti Tingkat Kelas XII SMA/MA	73
Tabel 6. Komponen Akreditasi dan Acuan Regulasinya	98
Tabel 7. Bobot Komponen dan Bobot Butir Instrumen Akreditasi SMA/MA ...	100
Tabel 8. Skor Tertimbang Maksimum Akreditasi SMA/MA	101
Tabel 9. Contoh Penghitungan Nilai Akhir Akreditasi SMA/MA.....	102
Tabel 10. Komponen Akreditasi dan Acuan Regulasinya	121
Tabel 11. Model Research & Development (Modifikasi).....	124
Tabel 12. SMA Sasaran Uji Coba Model Akreditasi SMA/MA Tahap 1.....	131
Tabel 13. Distribusi Konsep Model Akreditasi SMA/MA	132
Tabel 14. SMA Sasaran Uji Coba Model Akreditasi SMA/MA Tahap 2.....	132
Tabel 15. Distribusi Model Akreditasi SMA/MA Hasil Revisi Ke-1	134
Tabel 16. Subjek Coba pada Uji Coba Model Akreditasi SMA/MA.....	134
Tabel 17. Instrumen Pengumpulan Data.....	135
Tabel 18. Teknik Analisis Data pada Tahap Pengembangan.....	136
Tabel 19. Teknik Analisis Data pada Tahap Uji Coba.....	138
Tabel 20. Kriteria Penilaian Keefektifan Model	139

Tabel 21. Aspek-aspek Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA	145
Tabel 22. Perubahan Nama Komponen Akreditasi SMA/MA.....	148
Tabel 23. Acuan Regulasi dalam Model Akreditasi BAN-S/M.....	148
Tabel 24. Acuan Regulasi dalam Model Akreditasi Pengembangan.....	149
Tabel 25. Validitas Isi Instrumen Akreditasi SMA/MA	151
Tabel 26. Hasil Analisis Anova dari Ketiga Rater	153
Tabel 27. Interclass Correlation Coefficient (ICC).....	153
Tabel 28. Kisi-kisi Instrumen Akreditasi SMA/MA.....	154
Tabel 29. Kriteria Bobot Butir Jawaban	169
Tabel 30. Bobot Setiap Standar Akreditasi	170
Tabel 31. Hasil Validasi Prosedur Akreditasi	174
Tabel 32. Kriteria Validasi Prosedur Akreditasi	174
Tabel 33. SMA Sasaran Uji Coba Tahap 1	175
Tabel 34. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 5 Kota Bengkulu.....	176
Tabel 35. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 7 Kota Bengkulu.....	176
Tabel 36. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 10 Kota Bengkulu.....	176
Tabel 37. Keefektifan Model pada Uji Coba Tahap 1	177
Tabel 38. Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif	178
Tabel 39. Kriteria Keefektifan Model.....	178
Tabel 40. SMA Sasaran Uji Coba Tahap 2	179
Tabel 41. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 5 Kota Bengkulu.....	180
Tabel 42. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 7 Kota Bengkulu.....	180
Tabel 43. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 10 Kota Bengkulu.....	181

Tabel 44. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 3 Kota Bengkulu.....	181
Tabel 45. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 9 Kota Yogyakarta.....	181
Tabel 46. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 1 Kabawetan Kab. Kepahiang	182
Tabel 47. Keefektifan Model Akreditasi SMA/MA pada Uji Coba Tahap 2	183
Tabel 48. Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif	183
Tabel 49. Kriteria Keefektifan Model.....	184

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Siklus Pendidikan.....	31
Gambar 2. Hubungan Antara Kelompok Layanan dan Penggunaanya	40
Gambar 3. Proses Penjaminan Mutu Pendidikan.....	47
Gambar 4. Skema Global Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.....	60
Gambar 5. Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah Model BAN-S/M.....	97
Gambar 6. Model Penilaian Mutu Satuan Pendidikan Terpadu.....	116
Gambar 7. Kerangka Pikir Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA.....	118
Gambar 8. Bagan Hubungan Antar Standar-Standar dalam SNP	119
Gambar 9. Substansi Penjaminan Mutu Berdasarkan 8 SNP.....	120
Gambar 10. Prosedur Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA.....	126
Gambar 11. Alur Uji Coba Model Akreditasi SMA/MA.....	130
Gambar 12. Model Analisis Interaktif	137

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara Studi Permasalahan.....	196
Lampiran 2. Angket Pendapat Praktisi Tentang Akreditasi SMA/MA.....	203
Lampiran 3. Pendapat Praktisi Tentang Pelaksanaan Akreditasi SMA/MA.....	205
Lampiran 4. Bahan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Tahap 1.....	206
Lampiran 5. Lembar Telaah Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA	221
Lampiran 6. Bahan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Tahap 2.....	222
Lampiran 7. Lembar Telaah Pengembangan Instrumen Akreditasi SMA/MA ..	248
Lampiran 8. Lembar Validasi Indikator, Teknik Penilaian, dan Bukti Fisik.....	253
Lampiran 9. Data Hasil Validasi Instrumen Akreditasi	276
Lampiran 10. Penilaian tentang Tingkat Kepentingan Indikator Kunci	278
Lampiran 11. Lembar Validasi Prosedur Akreditasi SMA/MA	280
Lampiran 12. Data Validasi Prosedur Akreditasi SMART.....	281
Lampiran 13. Lembar Penilaian Keefektifan Model Akreditasi SMART	282
Lampiran 14. Penilaian Keefektifan Model Akreditasi SMART Uji Coba 1	283
Lampiran 15. Penilaian Keefektifan Model Akreditasi SMART Uji Coba 2	284
Lampiran 16. Surat Keterangan dari BAP-S/M Bengkulu	286
Lampiran 17. Surat Keterangan dari BAP-S/M D.I. Yogyakarta	287
Lampiran 18. Surat Keterangan dari SMAN 3 Kota Bengkulu	288
Lampiran 19. Surat Keterangan dari SMAN 10 Kota Bengkulu	289
Lampiran 20. Surat Keterangan dari SMAN 7 Kota Bengkulu	290

Lampiran 21. Surat Keterangan dari SMAN 3 Kota Bengkulu	291
Lampiran 22. Surat Keterangan dari SMAN 7 Kota Bengkulu	292
Lampiran 23. Surat Keterangan dari SMAN 10 Kota Bengkulu	293
Lampiran 24. Surat Keterangan dari SMAN 5 Kota Bengkulu	294
Lampiran 25. Surat Keterangan dari SMAN 10 Kota Bengkulu	295
Lampiran 26. Surat Keterangan dari SMAN 9 Kota Yogyakarta	296
Lampiran 27. Surat Keterangan dari SMAN 1 Kabawetan.....	297

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tolok ukur atau parameter mutu pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 19, 2005). Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi, pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan,

peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah (Depdiknas, 2002: 3). Namun demikian, upaya tersebut sampai sekarang belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan seharusnya berfokus pada bagaimana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Menurut Mardapi (2003: 8), usaha peningkatan mutu pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan mutu pembelajaran dan mutu sistem penilaian. Meningkatnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang terkait dengan mutu pembelajaran adalah mutu kompetensi lulusan. Parameter mutu kompetensi lulusan adalah standar kompetensi lulusan. Pemenuhan terhadap standar kompetensi lulusan tergantung dari upaya pemenuhan terhadap standar-standar mutu pendidikan lainnya.

Kegiatan sistemik dan terpadu dalam upaya pemenuhan standar-standar mutu pendidikan disebut penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: (1) standar pelayanan minimal, (2) standar nasional pendidikan, dan (3) standar mutu pendidikan di atas SNP (Permendiknas Nomor 63, 2009). Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Penjelasan mengenai evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 57, 58, 59, 60, dan 61 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-undang, 2003) sebagaimana berikut. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dapat dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sertifikasi diberikan kepada peserta didik berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

Akreditasi terhadap satuan pendidikan merupakan evaluasi terhadap capaian atas standar-standar mutu yang ditetapkan mengacu pada standar nasional pendidikan. Hasil penilaian akreditasi sekolah/madrasah adalah penetapan status akreditasi atau pengakuan atas pencapaian/pemenuhan standar-standar yang ditetapkan. Objek penilaian dalam akreditasi sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mencakup berbagai aspek atau komponen. Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap satuan atau program pendidikan (Depdiknas, 2007: 1).

Perkembangan sistem akreditasi sekolah di Indonesia telah mengalami perubahan sejak tahun 2003. Sebelum tahun 2003, akreditasi sekolah diperlakukan secara diskriminatif. Akreditasi hanya diberlakukan bagi sekolah

swasta saja, sedangkan sekolah negeri tidak diakreditasi. Terbentuknya lembaga akreditasi mandiri yakni Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) pada tahun 2003 dan kemudian berubah menjadi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) pada tahun 2005, merupakan awal babak baru akreditasi sekolah. Sekolah/madrasah baik negeri maupun swasta harus diakreditasi dan diperlakukan secara adil.

Akreditasi pada dasarnya prinsipnya merupakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kinerja sekolah. Objek evaluasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan karakteristik sekolah antara lain melalui informasi tentang kondisi fisik sekolah, kurikulum yang digunakan, ketenagaan, latar belakang sosial ekonomi peserta didik, dan peran masyarakat. Agar informasi tentang karakteristik sekolah bersifat komprehensif, maka objek yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat statis tetapi juga pada hal-hal yang bersifat dinamis seperti proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran, layanan bimbingan dan konseling, dan pemanfaatan fasilitas yang ada di sekolah/madrasah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Sumarno (2000: 4-5) yang menyatakan bahwa dalam era desentralisasi dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, idealnya akreditasi sekolah/madrasah menggunakan sistem penilaian yang sederhana, namun mempresentasikan hal-hal yang substantif dan bukan sekedar administratif.

Pelaksanaan akreditasi, hasil akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah hingga saat ini belum sepenuhnya memenuhi

harapan para pemangku kepentingan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan akreditasi sekolah. Sebagian pihak sekolah memandang bahwa akreditasi sebagai sebuah beban. Akreditasi dipandang sebagai sebuah pekerjaan berat karena persiapannya membutuhkan kerja ekstra karena harus mempersiapkan bukti-bukti fisik yang diperlukan.

Hasil analisis terhadap penyelenggaraan akreditasi sekolah berdasarkan data dan informasi yang dihimpun melalui wawancara dan catatan pengalaman peneliti saat menjadi asesor akreditasi SMA/MA, dapat dikemukakan beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan akreditasi sekolah. Ditinjau dari aspek prosedur: (a) akreditasi belum dipandang oleh pihak sekolah/madrasah sebagai suatu kebutuhan; (b) hasil akreditasi umumnya tidak ditindaklanjuti untuk keperluan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan; dan (c) pihak sekolah/madrasah cenderung hanya mengejar target peroleh status akreditasi.

Ditinjau dari aspek instrumen yang digunakan: (a) butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi belum seluruhnya merupakan indikator kunci yang tepat mengukur kelayakan sekolah/madrasah berdasarkan standar mutu yang ditetapkan; (b) butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi cenderung hanya menghendaki bukti-bukti yang bersifat administratif; dan (c) terdapat komponen penilaian penting yang belum terakomodir dalam instrumen akreditasi.

Ditinjau dari aspek pelaksanaan visitasi: (a) waktu visitasi yang hanya 2 hari menyebabkan asesor tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi secara

cermat, teliti, dan menyeluruh; (b) belum ada instrumen baku yang digunakan untuk keperluan validasi dan verifikasi data dapat mengakibatkan penilaian antara asesor yang satu dengan yang lain bervariasi; dan (c) asesor kesulitan melakukan validasi dan verifikasi apabila ada indikasi pihak sekolah/madrasah kurang jujur dengan cara memanipulasi kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hasil kajian terhadap data akreditasi SMA/MA di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa dari sebanyak 26 SMA/MA yang telah diakreditasi diperoleh informasi: sebanyak 12 SMA/MA (46,15 %) terakreditasi A, sebanyak 9 SMA/MA (34,62 %) terakreditasi B, dan sebanyak 5 SMA/MA (19,23 %) terakreditasi C. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SMA/MA (53,85 %) di Kota Bengkulu belum memenuhi kriteria mutu berdasarkan standar yang ditetapkan. Masih banyaknya SMA/MA yang belum terakreditasi A dapat dipersepsikan bahwa akreditasi belum mendorong pihak sekolah/madrasah untuk melakukan perbaikan dan mengupayakan peningkatan mutu pendidikan.

Indikasi adanya permasalahan terkait akreditasi sekolah/madrasah pernah muncul di media masa. Sebagai contoh, opini dari kepala sekolah yang dimuat pada Harian Lampung Pos tanggal 27 Januari 2005 dengan judul “Menyoal Akreditasi Sekolah/madrasah”. Dalam opini tersebut dinyatakan bahwa: (1) pelaksanaan akreditasi dinilai kurang objektif, (2) kemampuan asesor yang ditugaskan melaksanakan visitasi masih bervariasi, dan (3) masih ada pihak sekolah/madrasah yang sekedar ingin memperoleh peringkat akreditasi.

Pendapat senada seperti dimuat di Harian Solo Pos tanggal 23 Agustus 2007 yang berjudul “Akreditasi Benarkah Demi Peningkatan Mutu Pendidikan?”. Penulis artikel mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap proses evaluasi dalam akreditasi yang telah dilaksanakan. Ia berpendapat, mungkin saja secara ‘*de jure*’ hasil penilaian akreditasi sekolah/madrasah merupakan bentuk pengakuan terhadap kelayakan/mutu sekolah/madrasah, tetapi secara ‘*de facto*’ belum tentu masyarakat menerima bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah yang bermutu.

Aswandi selaku Ketua BAP-S/M Kalimantan Barat meneruskan informasi yang disampaikan oleh Umaedi (Ketua BAN-S/M) pada saat mengikuti rapat koordinasi laporan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tahun 2009. Beberapa permasalahan akreditasi sekolah/madrasah antara lain: (a) belum ditegakkan sepenuhnya prinsip-prinsip akreditasi dalam proses penilaian kelayakan sekolah/madrasah, (b) masih terdapat asesor yang belum memahami standar nasional pendidikan dan perangkat akreditasi yang digunakan, (c) masih ditemukan asesor yang kurang teliti saat melakukan verifikasi dan validasi data, dan (d) belum adanya penilaian kinerja bagi asesor.

Aswandi (2009: 1) juga menyampaikan pengalamannya bahwa: (a) akreditasi belum berjalan secara efektif, (b) rekomendasi hasil akreditasi belum digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan sekolah, (c) kurang tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan akreditasi terutama dalam memilih waktu yang tepat dengan memperhatikan kondisi alam dan geografis dan hari libur sekolah.

Untuk mengetahui gambaran keterlaksanaan penyelenggaraan akreditasi pada jenjang SMA/MA, peneliti melakukan survei awal dengan melibatkan 45 responden dari unsur kepala sekolah, guru, dan staf. Survei dilakukan di 5 SMA/MA di Kota Yogyakarta yaitu: SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Yogyakarta, SMA Negeri 9 Yogyakarta, MA Negeri 2 Yogyakarta, dan SMA Pembangunan Yogyakarta. Rangkuman pelaksanaan akreditasi di SMA/MA disajikan seperti terlihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Gambaran Pelaksanaan Akreditasi di SMA/MA

Aspek	Pendapat Responden		
	Baik	Cukup	Kurang
Kesiapan SMA/MA untuk diakreditasi	Baik 62,22 %	Cukup 26,67 %	Kurang 11,11 %
Kemudahan dalam pengisian instrumen akreditasi	Mudah 75,56 %	Cukup Mudah 24,44 %	Sulit 0,00 %
Kemudahan dalam pengisian instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung	Mudah 68,89 %	Cukup Mudah 31,11 %	Sulit 0,00 %
Kemampuan asesor melakukan verifikasi dan validasi data pada saat visitasi	Baik 77,78 %	Cukup 22,22 %	Kurang 0,00 %
Kepatuhan asesor dalam mentaati semua norma, tata krama, dan tata tertib pelaksanaan akreditasi	Baik 71,11 %	Cukup 28,89 %	Kurang 0,00 %
Kepatuhan pihak sekolah/madrasah dalam mentaati semua norma, tata krama, dan tata tertib pelaksanaan akreditasi	Baik 75,56 %	Cukup 24,44 %	Kurang 0,00 %
Rekomendasi dari asesor yang ditindaklanjuti oleh pihak sekolah/madrasah	Semua Ditindaklanjuti 40,00 %	Sebagian Ditindaklanjuti 35,56 %	Tidak Ada Tindaklanjut 24,44 %

Sumber: Marjuki (2009). Survei keterlaksanaan akreditasi SMA/MA di Yogyakarta.

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh informasi bahwa: (1) ada sebanyak 37,78 % responden berpendapat bahwa sekolahnya kurang siap diakreditasi; (2) ada

sebanyak 24,44 % responden yang menyatakan agak kesulitan dalam mengisi instrumen akreditasi; (3) ada sebanyak 31,11 % responden yang menyatakan agak kesulitan mengisi instrumen pengumpul data dan informasi pendukung; (4) ada sebanyak 22,22 % responden menilai kemampuan asesor dalam melakukan verifikasi dan validasi data masih kurang; (5) ada sebanyak 28,89 % responden menilai bahwa asesor kurang mematuhi norma, tata krama, dan tata terib pelaksanaan akreditasi; (6) ada sebanyak 24,44 % responden menilai pihak sekolah/madrasah kurang mematuhi norma, tata krama, dan tata terib pelaksanaan akreditasi; dan (7) ada sebanyak 60 % responden mengaku rekomendasi hasil akreditasi belum ditindaklanjuti oleh pihak sekolah/madrasah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa implementasi model akreditasi BAN-S/M khususnya untuk jenjang SMA/MA ditemukan beberapa permasalahan. Adanya permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa model akreditasi BAN-S/M masih kurang efektif, kurang efisien, dan kurang akuntabel. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian dalam rangka mengembangkan model akreditasi BAN-S/M menjadi model akreditasi yang lebih baik yakni model akreditasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan terkait implementasi model akreditasi sekolah/madrasah yang ada (model akreditasi BAN-S/M) untuk jenjang SMA/MA sebagai berikut:

1. Penilaian kelayakan sekolah/madrasah melalui akreditasi belum sepenuhnya mampu mendorong dan memotivasi pihak sekolah/madrasah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan;
2. Sekolah/madrasah yang akan diakreditasi masih ditentukan berdasarkan kuota sehingga terkesan bahwa akreditasi bukan merupakan kebutuhan pihak sekolah/madrasah;
3. Pada saat pihak sekolah/madrasah mengisi instrumen akreditasi cenderung mengisi atau memilih opsi jawaban A atau B lebih dahulu, setelah itu baru mengisi instrumen pengumpul data dan informasi pendukung;
4. Sebelum dilakukan visitasi terhadap sekolah/madrasah yang akan diakreditasi, selalu dijumpai kasus ada pihak sekolah/madrasah yang tidak lengkap dalam mengisi instrumen pengumpul data dan informasi pendukung;
5. Verifikasi dan analisis kelayakan data hasil isian instrumen akreditasi oleh pihak sekolah/madrasah sebelum dilakukan visitasi, umumnya hanya mengacu pada opsi jawaban yang dipilih oleh pihak sekolah/madrasah dan hasil *skoring* yang seharusnya juga berdasarkan hasil analisis isian data dan informasi pendukung yang diisikan oleh pihak sekolah/madrasah;
6. Sebagian asesor ada kurang maksimal dalam melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga data yang diperoleh ditengarai kurang objektif dan kurang valid;
7. Terdapat butir pernyataan dalam instrumen akreditasi yang memerlukan bukti fisik yang saling tumpang tindih;

8. Terdapat beberapa butir pertanyaan dalam instrumen akreditasi yang menimbulkan perbedaan persepsi dalam pengisian data antara pihak sekolah dengan asesor, hal disebabkan adanya petunjuk teknis yang kurang jelas;
9. Bukti-bukti pemenuhan standar yang diminta dalam instrumen akreditasi lebih dominan hanya berupa dokumen fisik yang bersifat administratif;
10. Belum ada instrumen verifikasi dan validasi yang terstandar sehingga asesor bekerja sesuai kemampuan masing-masing;
11. Hasil akreditasi belum sepenuhnya dijadikan sebagai rujukan dalam memilih sekolah/madrasah yang bermutu;
12. Masih ada opini yang muncul di media masa yang menilai bahwa pelaksanaan dan hasil kreditasi kurang objektif;
13. Ada sebagian asesor yang belum sepenuhnya mematuhi norma, tata krama, dan tata tertib pelaksanaan akreditasi;
14. Ada sebagian sekolah/madrasah yang belum sepenuhnya mematuhi norma, tata krama, dan tata tertib pelaksanaan akreditasi;
15. Belum terosialisasinya secara luas bahwa bahwa akreditasi sekolah/madrasah berfungsi sebagai bentuk penjaminan mutu secara eksternal.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan dengan mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian disertasi ini, maka pengembangan model akreditasi dibatasi pada permasalahan yang terkait dengan prosedur dan instrumen akreditasi yang digunakan. Model akreditasi dengan prosedur yang tepat dan instrumen yang

sederhana namun dapat menghasilkan data yang akurat, objektif, dan bersifat komprehensif diasumsikan akan dapat digunakan untuk keperluan penilaian mutu sekolah/madrasah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah: “Bagaimana mengembangkan model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel?”

E. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengembangkan model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Menilai keefektifan model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan.

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

Produk yang dikembangkan diberi nama Model Akreditasi SMART. Spesifikasi produk yang dikembangkan adalah: (1) berisi panduan penggunaan untuk keperluan: akreditasi SMA/MA; evaluasi mutu SMA/MA; dan pemetaan mutu SMA/MA; (2) berisi prosedur akreditasi yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan penilaian untuk keperluan akreditasi SMA/MA; evaluasi mutu SMA/MA; atau pemetaan mutu SMA/MA; (3) berisi instrumentasi akreditasi terdiri dari yaitu instrumen isian data akreditasi SMA/MA; instrumen capaian standar akreditasi SMA/MA; dan petunjuk teknis pengisian instrumen isian data akreditasi SMA/MA; dan penskoran dan penilaian akreditasi SMA/MA.

G. Manfaat Pengembangan

1. Pengembangan Teori

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau acuan dalam pengembangan teori atau model evaluasi bidang pendidikan khususnya model penilaian atau model evaluasi mutu satuan pendidikan yang bersifat komprehensif dengan melibatkan *judgment professional*.

2. Aplikasi

- a. Satuan pendidikan jenjang SMA/MA, dapat menggunakan instrumen dalam model akreditasi SMART untuk keperluan evaluasi diri sekolah (EDS) secara berkala dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.
- b. Para penyelenggara pendidikan dapat menggunakan model akreditasi SMART untuk keperluan evaluasi mutu SMA/MA yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.
- c. LPMP, dapat menggunakan model akreditasi SMART untuk keperluan pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA/MA.
- d. BAN-S/M, dapat mengadopsi, mengadaptasi, atau memodifikasi model akreditasi SMART untuk keperluan pengembangan model akreditasi BAN-S/M jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sudah ada.
- e. Pakar pendidikan, praktisi evaluasi pendidikan, dan para peneliti dapat memanfaatkan model akreditasi SMART sebagai bahan kajian dan rujukan untuk keperluan penelitian sejenis lebih lanjut.

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

Model akreditasi SMART diasumsikan dapat digunakan untuk menilai mutu SMA/MA secara terpadu melalui akreditasi, evaluasi mutu, dan pemetaan mutu. Penilaian mutu SMA/MA dengan menggunakan model akreditasi SMART diasumsikan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Akreditasi dilakukan secara berkala setiap 5 tahun oleh lembaga akreditasi, evaluasi mutu dapat dilakukan secara berkala setiap tahun oleh dinas pendidikan/kantor kemenag/yayasan penyelenggara pendidikan, dan pemetaan mutu dapat dilakukan secara berkala setiap tahun oleh LPMP. Sinergi pelaksanaan akreditasi, evaluasi mutu, dan pemetaan mutu secara terpadu dengan menggunakan model akreditasi SMART diasumsikan akan mendorong dan memotivasi pihak sekolah/madrasah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Terpenuhinya standar-standar akreditasi dalam model akreditasi SMART ini mengindikasikan adanya peningkatan mutu pendidikan. Dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa dengan penerapan model akreditasi SMART dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Keterbatasan dalam melakukan pengembangan model akreditasi SMA/MA antara lain: (1) dalam tahap pengembangan model hanya melibatkan praktisi akreditasi dari BAP-S/M Provinsi Bengkulu dan praktisi akreditasi dari BAP-S/M Daerah Istimewa Yogyakarta dan (2) uji coba belum dilakukan dalam skala nasional. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti, target waktu penyelesaian studi, tenaga yang tersedia, dan biaya yang harus dikeluarkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Pengertian Akreditasi Sekolah

Akreditasi dan asesmen adalah dua proses yang sangat penting dalam mempertahankan mutu satuan pendidikan (Patil dan Pudlowski, 2005: 49). Dalam proses akreditasi biasanya diawali dengan proses asesmen atau penilaian. Hasil asesmen tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam memberikan legalitas berupa status akreditasi. Asesmen dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, atau pemangku kepentingan lainnya untuk berbagai keperluan. Tujuan utama asesmen terhadap satuan pendidikan adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu ke arah yang lebih baik.

Pagliarulo (1996: 1114-1115) berpendapat bahwa akreditasi adalah proses dimana suatu organisasi mengenali institusinya mencakup kecakapan-kecakapan yang dimiliki berdasarkan standar tertentu. Makna akreditasi tersebut hampir sama dengan pengertian akreditasi yang diberlakukan di sekolah-sekolah. Selaras dengan pendapat Pagliarulo, akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan sekolah yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik (Depdiknas, 2004: 3).

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga mandiri dan profesional (Depdiknas, 2007b: 1). Dalam proses akreditasi, sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan pada keseluruhan kondisi sekolah sebagai sebuah institusi belajar. Meskipun beragam perbedaan dimungkinkan terjadi antar sekolah, tetapi sekolah dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria atau standar-standar tertentu.

Dalam *Accreditation Handbook*, COA (2008: 3) definisi akreditasi dirumuskan sebagai berikut:

Accreditation is defined as verifying that the program sponsor in question has demonstrated that, when judged as a whole, it meets or exceeds the Commission's adopted Common and Program Standards as selected by the program sponsor pursuant to the options listed in the Accreditation Framework. The program sponsor (including its credential programs) is judged to be effective in preparing educators and is demonstrating overall quality in its programs and general operations. The status of Accreditation can be achieved even if there are one or two Common standards identified as met with concerns or one or more areas of concern are identified within credential programs.

Akreditasi didefinisikan sebagai lembaga yang memverifikasi bahwa program tersebut setelah melalui penilaian secara menyeluruh menunjukkan telah memenuhi atau melebihi standar umum dan standar program yang ditetapkan. Program yang akreditasi yang dinilai efektif dalam mempersiapkan pendidik dan menunjukkan mutu secara keseluruhan terhadap program-program umum yang ditetapkan. Status akreditasi dapat dicapai meskipun tidak semua standar dipenuhi.

Akreditasi merupakan alat regulasi agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahannya serta mampu melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Selain itu, akreditasi juga merupakan penilaian yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi sekolah yang memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan. Dengan kata lain, akreditasi mempunyai dua makna yaitu: (a) makna proses, akreditasi sebagai acuan perbaikan dan peningkatan mutu, dan (b) makna hasil, akreditasi merupakan pengakuan bahwa sekolah telah memenuhi standar tertentu.

Penilaian terhadap mutu sekolah perlu dilakukan dengan menggunakan standar-standar mutu pendidikan. Adanya standar-standar mutu pendidikan akan mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pengembangan sekolah dan dapat memberikan arah yang jelas bagi sekolah untuk melakukan evaluasi diri guna dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan berusaha meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam rangka mencapai mutu yang diharapkan.

Pagliarulo (1996: 1114-1115) juga mengemukakan bahwa ada tiga aspek dalam akreditasi: (1) proses akreditasi diselenggarakan oleh suatu organisasi atau lembaga eksternal, (2) unit yang diakreditasi dapat berupa program studi atau satuan pendidikan, dan (3) standar-standar tertentu harus ditentukan terlebih dulu. Dari pendapat Pagliarulo tersebut dapat dikatakan bahwa proses akreditasi melibatkan kegiatan evaluasi dan *judgment* dari suatu lembaga yang independen. *Judgment* yang diberikan oleh sebuah lembaga akreditasi terhadap satuan

pendidikan yang diakreditasi merupakan bentuk pengakuan eksternal berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengakuan oleh pihak eksternal dapat digunakan untuk mempromosikan satuan pendidikan dan dapat digunakan sebagai bentuk jaminan mutu pendidikan.

Proses aktual dalam pelaksanaan akreditasi adalah observasi langsung. Pagliarulo (1996: 1116-1117) mengemukakan ada empat proses akreditasi yaitu: (1) evaluasi diri (*self-study*), (2) penyusunan laporan evaluasi diri, (3) telaah hasil laporan evaluasi diri, dan (4) penilaian dan penetapan oleh lembaga akreditasi. Keempat proses tersebut evaluasi diri merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh pihak yang akan diakreditasi. Evaluasi diri merupakan alat untuk mengenali diri sendiri guna mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki sesuai kondisi yang ada.

Proses evaluasi yang dikemukakan Pagliarulo ternyata mirip dengan prosedur evaluasi dalam model akreditasi sekolah BAN-S/M. Dalam proses akreditasi menurut model akreditasi sekolah BAN-S/M terdiri dari lima tahapan, yaitu: (1) tahap evaluasi diri yang dilakukan oleh pihak sekolah, (2) tahap penyusunan laporan evaluasi diri, (3) tahap validasi terhadap laporan evaluasi diri, (4) tahap visitasi ke sekolah, dan (5) tahap penetapan status akreditasi (Depdiknas, 2007b: 15).

Penilaian dalam proses akreditasi sekolah didasarkan pada hasil evaluasi diri (*self-evaluation*) yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini, evaluasi diri merupakan salah satu metode yang digunakan dalam kegiatan evaluasi.

Metode evaluasi diri adalah evaluasi yang ditujukan kepada diri sendiri. Dalam konsep ini yang dimaksud dengan evaluasi diri adalah sekolah secara internal menilai dirinya sendiri baik mengenai kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan karakteristik lain yang dimiliki dengan menggunakan instrumen evaluasi diri.

Menurut Priestley (1982: 86), evaluasi diri merupakan metode evaluasi yang memanfaatkan penilaian diri sendiri untuk melihat perilaku actual yang ditetapkan. Evaluasi diri dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Smither (1988: 331) mengemukakan bahwa evaluasi diri merupakan proses mengevaluasi diri baik kinerja, *skill*, atau atribut lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam melaksanakan penilaian, kegiatan seleksi, dan untuk pengembangan. Dengan kata lain, evaluasi diri tidak hanya ditujukan untuk mengukur ketercapaian tetapi dapat juga digunakan untuk mendiagnosis keunggulan, kelemahan, dan upaya melakukan perbaikan dan peningkatan diri.

Pristley (1982: 86) menyatakan bahwa evaluasi diri dapat digunakan sebagai alat interopeksi diri guna melakukan pengembangan diri. Smither (1988: 333) juga menyatakan ada enam manfaat dari evaluasi diri, yaitu: (1) dapat meningkatkan kesadaran diri, (2) memberikan data untuk penilaian kinerja, (3) memupuk penerimaan proses penilaian kinerja, (4) mengembangkan personalia, (5) mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personalia, dan (6) memberikan kontribusi terhadap intervensi balikan.

Istilah akreditasi dalam kontek penjamin mutu pendidikan dapat diartikan sebagai evaluasi eksternal. ECA (2005: 4) mendefinisikan akreditasi sebagai suatu

keputusan mandiri dan formal yang diperoleh dari suatu lembaga mandiri berdasarkan standar tertentu. ECA menyatakan:

Accreditation is achieved through a multi-step process (self evaluation/ documentation submitted by the unit undergoing accreditation; external assessment by independent experts; the accreditation decision). The accreditation decision depends upon a quality assessment based on internationally accepted quality standards. The final decision of the accreditation procedure itself is authoritative in nature, has been determined by an external process, and results in a “yes” or “no” judgment with a limited validity.

Berdasarkan definisi ECA dapat dijelaskan bahwa proses akreditasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari evaluasi diri (*self-evaluation*), penyiapan berbagai dokumen yang perlu diajukan menjalani akreditasi, penilaian eksternal oleh tim asesmen yang independen, dan penetapan keputusan akreditasi. Keputusan akreditasi tergantung pada penilaian mutu berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Keputusan akhir dari sebuah proses atau prosedur akreditasi yang berwibawa perlu dilakukan secara wajar meskipun diakui bahwa validitas terhadap hasil penilaian itu masih terbatas.

Proses akreditasi perlu dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kegiatan evaluasi diri perlu dilakukan oleh satuan pendidikan secara berkala dan berkelanjutan, tidak hanya dilakukan pada saat akan diakreditasi saja. Akreditasi sekolah merupakan salah bentuk evaluasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan secara profesional. Akreditasi sekolah merupakan evaluasi untuk menentukan kelayakan sekolah

secara komprehensif berdasarkan standar-standar yang ditetapkan. Dalam hal ini, akreditasi mempunyai dua makna yakni akreditasi yang bermakna proses dan akreditasi yang bermakna hasil.

Akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dilakukan agar sekolah mengetahui kekuatan dan kelemahannya untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan sekolah dan melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil adalah hasil penilaian kelayakan sekolah diwujudkan dalam bentuk pengakuan bahwa sekolah telah memenuhi standar-standar mutu yang ditetapkan dalam bentuk pemberian sertifikat yang menyatakan status atau peringkat akreditasi sekolah.

Berdasarkan pengertian dan definisi akreditasi sekolah seperti telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan bahwa akreditasi sekolah adalah proses evaluasi secara eksternal yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen terhadap program atau satuan pendidikan. Ada empat unsur penting dalam akreditasi sekolah, yaitu: standar-standar atau kriteria yang digunakan dalam akreditasi telah ditetapkan terlebih dulu, akreditasi merupakan bentuk pengakuan mutu dari suatu lembaga akreditasi, akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas, akreditasi dapat digunakan sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan, dan hasil akreditasi akan berdampak pada peningkatan mutu lulusan.

Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Akreditasi Sekolah

Dalam Undang-undang Tahun 2003 Nomor 20 pada BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 ayat 1 disebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan

kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sebagai salah satu kegiatan evaluasi eksternal tentang kelayakan dan kinerja sekolah, akreditasi sekolah pada dasarnya merupakan bentuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Melalui proses akreditasi, setiap satuan pendidikan dituntut untuk dapat memenuhi standar-standar mutu pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan. Sekolah harus dapat memenuhi standar-standar kelayakan dan kinerja sekolah agar dapat dinilai sebagai sekolah yang layak atau sekolah yang terstandar. Kelayakan sekolah inilah pada hakekatnya merupakan bentuk jaminan mutu yang berarti sekolah akan mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu atau sanggup menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu.

Dalam buku pedoman pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah yang dikeluarkan oleh BAN-S/M tahun 2007 disebutkan bahwa akreditasi sekolah bertujuan untuk: (1) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, (2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan (3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

Ada tiga fungsi akreditasi yang dirumuskan oleh BAN-S/M yaitu untuk: (1) pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya, (2) akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan (3) pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

Adapun manfaat hasil akreditasi sekolah yang dirumuskan oleh BAN-S/M sebagai berikut: (1) membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan, (2) membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya, (3) acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah, (4) umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah, (5) motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional, dan (6) sebagai bahan informasi bagi

sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

Selain manfaat-manfaat seperti tersebut di atas, akreditasi sekolah juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Bagi kepala sekolah, hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah sekolah.

Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didiknya. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah baik. Oleh karena itu, guru selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah.

Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuannya. Sedangkan bagi peserta didik, hasil akreditasi juga menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang baik, dan harapannya, sertifikat dari sekolah/madrasah yang terakreditasi merupakan bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang bermutu.

Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi dalam Akreditasi Sekolah

Istilah evaluasi erat kaitannya dengan istilah pengukuran dan penilaian. Pengukuran dan penilaian merupakan dua istilah yang kadang terasa kabur dan kurang jelas bedanya. Demikian juga penggunaan istilah penilaian dan evaluasi yang kadang mempunyai makna yang hampir sama yakni penilaian dapat bermakna evaluasi dan sebaliknya evaluasi dapat bermakna penilaian.

Kajian istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi dibedakan sebagai berikut. Huitt (1996: 1) memberikan konsep yang berbeda antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses kuantifikasi data. Penilaian adalah proses pengumpulan data untuk memahami sebuah isu atau objek secara lebih baik. Evaluasi adalah proses membandingkan antara data yang ada dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Stanley dan Hopkins (1978: 3) membedakan istilah penilaian dan evaluasi. Evaluasi digunakan dalam konteks yang lebih luas dan dapat dilaksanakan baik secara eksternal maupun internal. Penilaian digunakan dalam konteks yang lebih sempit dan umumnya dilaksanakan secara internal. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan yang menentukan keberadaan nilai,

seperti berhasil dan tidak berhasil terhadap objek yang dievaluasi atau dinilai sesuai dengan tolok ukur atau kriteria tertentu. Perbedaan penggunaan antara penilaian dan evaluasi terletak pada lingkupnya, yaitu penilaian difokuskan pada kinerja tertentu, sedangkan evaluasi menjangkau kinerja yang lebih luas.

Mardapi (2008: 1) menyatakan bahwa penilaian mencakup semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok. Proses penilaian meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian suatu program. Dalam konteks ini, penilaian dapat berkaitan dengan semua proses pendidikan, antara lain: kurikulum, sarana dan prasarana, administrasi, metode pembelajaran, dan peserta didik.

Mardapi (2008: 8) juga mengemukakan bahwa evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan mutu, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Semua program kegiatan menggunakan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan program yang telah dicapai, mengetahui Keefektifan dan efisiensi program yang sedang berjalan dan memperoleh informasi untuk penetapan kegiatan berikutnya.

Dalam melaksanakan evaluasi biasanya terdapat kegiatan penilaian terhadap sesuatu yang akan dievaluasi. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang suatu proses dan hasil sebuah program sehingga menjadi sebuah informasi yang bermakna untuk keperluan pengambilan keputusan (Mardapi, 2003: 3). Berdasarkan pendapat

Mardapi tersebut, dapat dikatakan bahwa agar diperoleh sebuah informasi yang bermakna maka diperlukan sejumlah data.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui penilaian, setelah dianalisis dan ditafsirkan maka akan dihasilkan sebuah informasi yang bermakna. Informasi yang bermakna inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam penilaian sebuah program, yang dikumpulkan bukan informasi melainkan sejumlah data. Data yang dikumpulkan tidak akan menjadi sebuah informasi yang bermakna apabila tidak diadakan proses analisis dan penafsiran terhadap data-data yang diperoleh. Evaluasi merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang bermakna. Sebagai sebuah proses, dalam pelaksanaan evaluasi selain terdapat kegiatan penilaian juga terdapat kegiatan pengukuran.

Griffin dan Nix (1991: 15) mengatakan “*Measurement, assessment, and evaluation are hierarchical. The comparison of observasi with the criteria is measurement, the interpretation and description of evidence is an assessment, and the judgment of the value of implication of the behavior is an evaluation.* Griffin dan Nix mengatakan bahwa pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan sebuah hirarki. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara hasil observasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian adalah kegiatan menginterpretasi dan mendeskripsikan hasil pengukuran berdasarkan bukti-bukti yang ada. Evaluasi adalah *judgment* atas implikasi perilaku berdasarkan hasil penilaian.

Berdasarkan pendapat dari Griffin dan Nix dan dipadukan dengan pendapat Mardapi, dapat dikemukakan bahwa melalui pengukuran akan diperoleh sejumlah data. Data yang diperoleh melalui observasi sudah tentu bukan asal data, melainkan data yang berdasarkan kriteria tertentu. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dilakukan penilaian apakah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Interpretasi atau penafsiran hasil penilaian selanjutnya dideskripsikan sehingga menjadi sebuah informasi yang bermakna. Informasi yang bermakna dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Implikasi dari keputusan yang ditetapkan antara lain apakah suatu program yang dievaluasi itu perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau bahkan harus dihentikan.

Evaluasi merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan baik untuk keperluan pengawasan, pengendalian mutu, penjaminan mutu ataupun untuk keperluan peningkatan mutu pendidikan. Brady (1992: 236) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut: "*Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*". Evaluasi adalah sebuah proses menyajikan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang bermakna sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pendapat Brady, dapat dimaknai bahwa sebuah proses pengumpulan informasi, tetapi informasi itu tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengambilan keputusan, maka proses itu bukan merupakan evaluasi. Suatu proses dapat disebut evaluasi apabila proses itu dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan proses pengumpulan informasi, McNeil (1990: 241) mengatakan “*Evaluation should collected information about the goals of subject, its strategies and plans, the process of implementation, and the outcomes and impacts*”. Informasi yang dikumpulkan melalui evaluasi adalah tentang tujuan-tujuan program yang ada kaitanya dengan strategi dan perencanaan, proses implementasi, dan hasil serta dampaknya. Berdasarkan pendapat McNeil tersebut dapat dikatakan bahwa pengumpulan informasi dalam proses evaluasi menyangkut aspek input, proses, hasil, dan dampak dari sebuah program yang direncanakan apakah telah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Chaerun (2009: 77-78) membedakan antara keputusan dengan pertimbangan. Keputusan diambil berdasarkan adanya informasi bermakna dari hasil evaluasi melalui proses kajian ilmiah berdasarkan analisis dan interpretasi data secara sistematis. Pertimbangan biasanya hanya merupakan hasil penafsiran penilaian terhadap kondisi yang ada saat ini untuk prediksi perancangan dim masa yang akan datang. Dalam hal ini, implikasi dari pertimbangan tidak menuntut adanya suatu tindakan lebih lanjut. Berbeda halnya dengan keputusan, implikasi dari keputusan yang diambil melalui evaluasi menuntut adanya tindakan lebih lanjut. Dengan kata lain, keputusan yang diambil melalui kegiatan evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan.

Keputusan yang diambil dalam proses evaluasi harus didasarkan pada tujuan evaluasi yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan evaluasi seperti telah diuraikan di atas adalah upaya mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan data dan

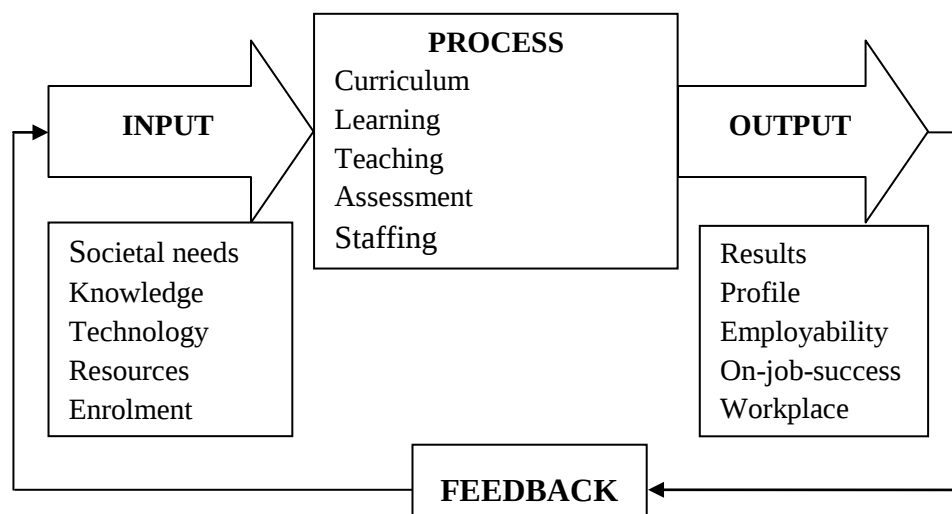
menyajikannya dalam bentuk informasi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, tujuan evaluasi adalah untuk keperluan *judgment* terhadap suatu program.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses kuantifikasi data melalui kegiatan membandingkan antara hasil observasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan pengukuran akan diperoleh sejumlah data. Penilaian adalah proses pengumpulan data berdasarkan bukti-bukti tentang pencapaian suatu standar yang telah ditetapkan atau kegiatan menginterpretasi dan mendeskripsikan data hasil pengukuran berdasarkan bukti-bukti yang ada. Evaluasi adalah proses membandingkan antara data yang ada dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan menghasilkan informasi yang bermanfaat atau bermakna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Evaluasi merupakan *judgment* atas implikasi perilaku berdasarkan hasil penilaian. Implikasi dari keputusan yang diambil menuntut adanya tindakan lebih lanjut.

Konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam akreditasi sekolah merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling terkait satu dengan lainnya. Pengukuran adalah prosedur kuantifikasi terhadap objek yang dinilai atau dievaluasi dengan menggunakan alat ukur atau instrumen. Penilaian adalah proses pengumpulan dan interpretasi data hasil pengukuran yang disesuaikan dengan kondisi nyata melalui pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian suatu program. Selanjutnya evaluasi adalah proses pengambilan keputusan atau

judgment dengan menggunakan acuan data hasil penilaian dan pengukuran, berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

Evaluasi dalam akreditasi sekolah dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan mutu, kinerja, dan produktivitas satuan pendidikan. Ada tiga hal penting dalam proses akreditasi sekolah agar hasilnya dapat meningkatkan mutu pendidikan, yaitu: masukan, proses, dan keluarannya. Akreditasi merupakan proses evaluasi yang penting dalam rangka mempertahankan mutu pendidikan (Patil, 2005: 49-58). Ada tiga tahapan proses pendidikan, yaitu: masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*output*). Oleh karena itu, evaluasi dalam proses akreditasi perlu dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek-aspek input, proses, dan hasil. Bagan siklus mutu pendidikan seperti Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Bagan Siklus Pendidikan
Sumber: Patil dan Pudlowski (2005: 50)

Input pendidikan berkaitan dengan berbagai komponen, termasuk intake peserta didik, kebutuhan masyarakat, pengetahuan, teknologi, sumber daya, proses penerimaan calon peserta didik, pembiayaan, dan kriteria kelayakan peserta

didik. Proses pendidikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: desain kurikulum, cara belajar peserta didik, metode pembelajaran yang digunakan, fasilitas pembelajaran, metode penilaian, dan pelayanan staf. Hasil pendidikan adalah komponen yang terkait dengan unsur-unsur: prestasi akademik, profil kemampuan profesional, keberhasilan dalam pekerjaan, dan kinerjanya di masyarakat. Namun demikian umumnya cara yang paling tradisional untuk mengukur mutu pendidikan melalui evaluasi proses dan hasil.

Dalam akreditasi sekolah, proses yang lebih dominan adalah kegiatan penilaian. Penilaian dalam akreditasi sekolah merupakan proses pengumpulan data berdasarkan bukti-bukti pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan. Penilaian dalam proses akreditasi sekolah dapat menghasilkan sebuah informasi yang bermakna apabila dilakukan secara objektif, valid, dan terpercaya.

Evaluasi dalam Konteks Akreditasi Sekolah

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat apakah program telah direncanakan tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan apakah efisien dalam pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (*value judgment*).

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, evaluasi mutu satuan pendidikan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh satuan dan penyelenggara pendidikan. Satuan dan para penyelenggara pendidikan harus dapat memberikan data dan informasi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang berkepentingan langsung tentang berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

Data dan informasi yang baik dan akurat bukan hanya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan lebih lanjut. Data dan informasi seperti itu dapat dihimpun dan diperoleh melalui suatu proses evaluasi. Melalui evaluasi akan ditemukan keunggulan, kelemahan, kendala, dan keberhasilan suatu program yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan program selanjutnya.

Badrun Kartowagiran (2006: 1), mengatakan evaluasi adalah suatu metode untuk mengetahui dan menilai Keefektifan suatu program dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai dalam bentuk informasi, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan. Model evaluasi yang akan digunakan sangat tergantung dari tujuan yang ingin dicapai lembaga, tahapan program yang akan dievaluasi, dan jenis keputusan yang akan diambil.

Beberapa pengertian atau definisi evaluasi pendidikan dapat dikemukakan dari pendapat para pakar pendidikan sebagai berikut. *Joint Committee on Standard Evaluation* dalam Stufflebeam dan Shinkfield (1985: 3) memberikan definisi evaluasi sebagai berikut: “*evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of some object*”. Evaluasi adalah penilaian sistematis dari suatu objek yang bernilai atau memiliki kebaikan.

Definisi evaluasi menurut Stark dan Thomas (1994: 12) adalah: “*evaluation is the process of ascertaining the decision of concern, selecting appropriate information, and collecting and analyzing information in order to report summary data useful to decision makers in selecting among alternatives*”. Evaluasi adalah proses untuk memastikan suatu keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi dalam rangka memberikan laporan data secara singkat yang berguna dalam memilih diantara berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan.

Stufflebeam (1971: 71) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut: “*Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*”. Evaluasi adalah proses untuk menggambarkan, mendapatkan, dan memberikan informasi alternatif yang berguna dalam pengambilan keputusan. Worthen dan Sander (1973: 20) mengemukakan evaluasi sebagai proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Evaluasi juga sebagai proses kegiatan membandingkan data kinerja (*performance*) dengan tujuan.

Selanjutnya Kaufman dan Thomas (1980: 9) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi perbedaan antara hasil yang ada dengan hasil yang diharapkan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kearah yang lebih baik.

Secara formal ada enam fungsi evaluasi pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Worthen dan Sanders (1987: 21), yaitu: (1) menyiapkan dasar untuk membuat keputusan dan kebijakan, (2) melakukan penilaian hasil belajar, (3) melakukan evaluasi kurikulum, (4) melaksanakan akreditasi sekolah, (5) monitoring penggunaan dana masyarakat, dan (6) memperbaiki materi dan program pendidikan. Tujuan utama dari evaluasi pendidikan adalah upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, evaluasi program pendidikan dapat diartikan sebagai evaluasi hasil belajar dan evaluasi sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai di akhir program yang telah ditentukan. Evaluasi pendidikan dalam arti yang lebih luas dimaksudkan sebagai upaya membandingkan kinerja berbagai dimensi program yang dikembangkan dengan standar atau kriteria untuk sampai pada suatu *judgment* mengenai program yang dievaluasi tersebut.

Evaluasi program pendidikan dalam arti luas berpandangan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karakteristik peserta didik, lingkungan, tujuan program, sarana dan fasilitas yang digunakan, dan prosedur atau mekanisme pelaksanaan program. Glass

(1971: 104) menyebut evaluasi program pendidikan dalam arti luas ini sebagai *educational system evaluation model*. Model ini menekankan pentingnya program sebagai suatu keseluruhan yang dijadikan objek evaluasi, tanpa membatasi pada aspek hasil yang dicapai saja. Dengan kata lain, disamping mengevaluasi hasil yang dicapai, dimensi-dimensi dari program yang berpengaruh terhadap hasil yang dicapai juga perlu dievaluasi.

Ada empat hal penting terkait dengan evaluasi program pendidikan. *Pertama*, evaluasi ditujukan pada berbagai dimensi dari program yang dikembangkan sehingga evaluasi perlu dilakukan secara komprehensif. *Kedua*, evaluasi merupakan perbandingan antara kinerja dengan standar atau kriteria. *Ketiga*, evaluasi tidak hanya berakhir pada deskripsi mengenai keadaan program, tetapi menuntut *judgment* dari hasil evaluasi. *Keempat*, hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan program secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang evaluasi sebagaimana di uraikan di atas dapat dikemukakan bahwa akreditasi sekolah erat kaitannya dengan evaluasi program pendidikan. Proses akreditasi sekolah pada intinya merupakan evaluasi program pendidikan, karena dalam akreditasi juga terdapat: (1) proses pengumpulan data dan informasi, (2) kegiatan melakukan analisis data informasi, dan (3) membandingkannya dengan standar atau tujuan yang ditetapkan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi merupakan upaya atau langkah-langkah strategis dalam rangka pengambilan keputusan, demikian halnya dengan akreditasi sekolah. Dalam akreditasi sekolah juga terdapat proses evaluasi yang mencakup: (a) pengumpulan data yang tepat, (b) membandingkan data dengan kriteria atau tolok ukur tertentu, dan (c) membuat keputusan berdasarkan data.

Model evaluasi yang lazim diterapkan untuk keperluan akreditasi sekolah adalah model evaluasi *professional judgment*. Asumsi dasar yang digunakan adalah “*Best evaluation is the expert opinion of qualified professional*” (Arcraft, 2005: 133). Evaluasi terbaik adalah pendapat ahli profesional yang memenuhi syarat. Evaluasi model *personal judgment* ini memfokuskan perhatian pada proses pendidikan dengan menggunakan pertimbangan profesional dan pengembangan standar-standar untuk program pendidikan. Model evaluasi *personal judgment* dapat disebut model SAVE yaitu: *Self-study*, *Visitation*, *Annual report*, dan *Evaluation panel*.

Kaitan antara Evaluasi Mutu Sekolah dan Akreditasi Sekolah

Melakukan penilaian mutu sekolah sama halnya dengan melakukan evaluasi mutu sekolah yakni harus dilakukan dengan prinsip-prinsip dan standar-standar tertentu. *The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation* (Stufflebean & Shinkfield, 2007: 90-92) memberikan standar-standar dalam melaksanakan evaluasi program sekolah yaitu: manfaat (*utility*), kelayakan (*feasibility*), kesopanan (*propriety*), dan ketepatan (*accuracy*).

Evaluasi mutu sekolah harus dilakukan secara komprehensif yakni menyangkut semua aspek yang terlibat dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Thorndike, Cuningham, dan Hagen (1991: 58) menyatakan bahwa tujuan dan kegunaan evaluasi pada pendidikan diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut: (a) pengajaran, (b) hasil belajar, (c) diagnosis dan usaha-usaha perbaikan, (d) penempatan, (e) seleksi, (f) bimbingan dan konseling, (g) kurikulum, dan (h) penilaian kelembangaan. Agar keputusan yang diambil melalui evaluasi merupakan keputusan yang tepat, maka evaluasi mutu satuan pendidikan harus dirumuskan berdasarkan komponen-komponen dan indikator-indikator yang tepat.

Eddy Sutadji (2009: 54) menyatakan bahwa evaluasi terhadap mutu satuan pendidikan memerlukan kajian yang menyangkut komponen-komponen, indikator-indikator, dan kriteria yang digunakan. Acuan yang dapat digunakan untuk menilai mutu satuan pendidikan antara lain model sekolah efektif, model sekolah bermutu, dan model determinan mutu pendidikan.

Edmons (1979: 15-27) menyampaikan lima karakteristik sekolah efektif, yaitu: (1) kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran, (2) pemahaman yang mendalam terhadap pembelajaran, (3) iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya proses pembelajaran, (4) adanya harapan bahwa semua peserta didik minimal akan menguasai kompetensi dasar atau ilmu pengetahuan tertentu, dan (5) penilaian yang didasarkan pada hasil pengukuran hasil belajar.

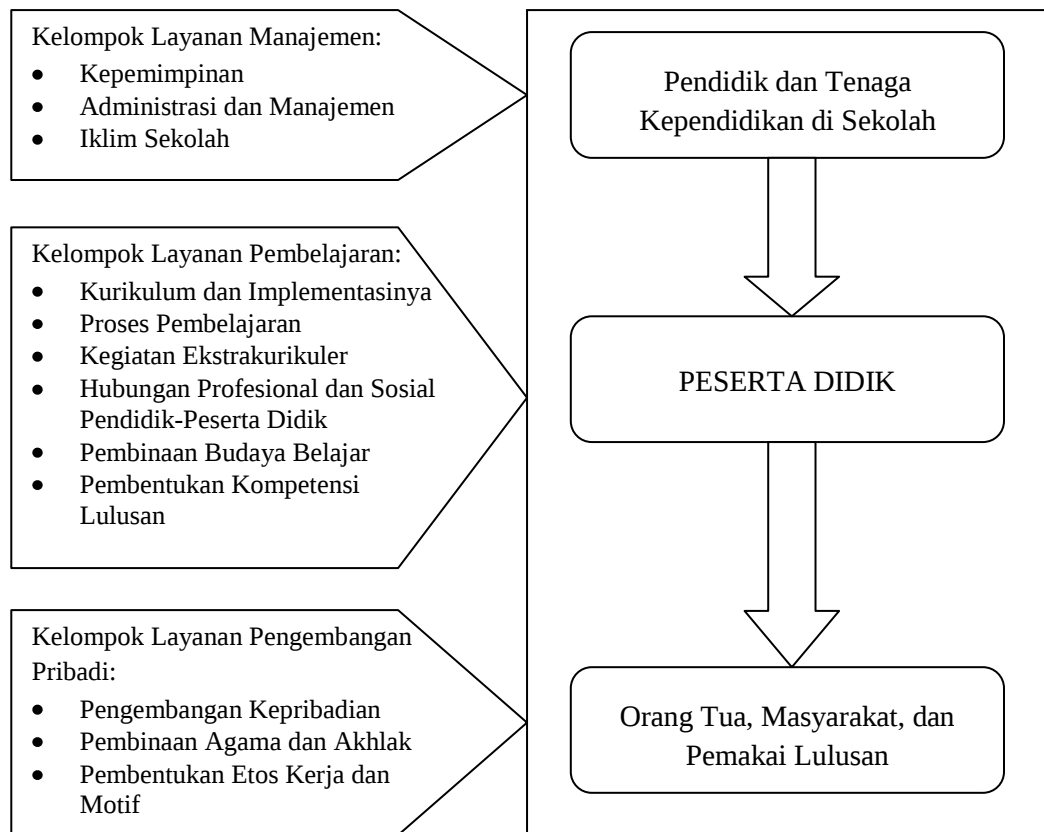
Selanjutnya Mackenzie (1983: 5-17) mengidentifikasi tiga dimensi sekolah efektif, yaitu: (1) kepemimpinan, (2) keefektifan dan efisiensi, dan (3) sarana pendukung. Selain itu, Glover dan Sue (2002: 8) juga menyatakan bahwa ciri sekolah efektif adalah: (a) etos kerja sekolah yang baik, (b) pengelolaan kelas yang baik, (c) harapan guru yang tinggi, (d) guru sebagai model keteladanan yang positif, (e) perlakuan terhadap siswa yang positif, (f) kondisi kinerja guru dan siswa yang baik, (g) adanya tanggung jawab siswa, (h) adanya kegiatan bersama antara guru dan siswa. Selain itu, salah satu ciri model sekolah bermutu adalah adanya pengembangan budaya mutu sekolah. Salah satu aspek penting dalam keberhasilan mengembangkan budaya mutu sekolah adalah guru.

Dalam model sekolah bermutu, peran guru adalah kunci penting. Guru harus berperan sebagai manajer yang efektif. Sebagai seorang manajer, guru harus mampu mengelola kelas sehingga menjadikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Kegiatan pembelajaran yang efektif akan mendorong berkembangnya budaya mutu sekolah. Lebih lanjut Glasser (1992: 152) menyatakan bahwa membangun mutu sekolah tidaklah sekedar eksak, harus diingat bahwa membangun mutu pendidikan berhubungan dengan manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa akreditasi sekolah pada dasarnya merupakan bentuk evaluasi mutu sekolah yang dilakukan secara komprehensif. Dalam akreditasi sekolah, hal-hal yang dinilai atau dievaluasi menyangkut semua aspek yakni terkait dengan pemenuhan standar-standar akreditasi seperti yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi sekolah akan menjadi

cerminan mutu sekolah. Sekolah bermutu adalah sekolah yang mampu memberikan layanan yang sesuai atau melebihi harapan pengguna.

Layanan yang harus diberikan kepada pengguna dapat dikategorikan dalam tiga kelompok layanan, yaitu kelompok layanan manajemen, kelompok layanan pembelajaran, dan kelompok layanan pengembangan kepribadian. Oleh karena itu, evaluasi mutu satuan pendidikan harus diarahkan pada tersedianya layanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Hubungan antara kelompok layanan dan penggunaannya dapat dijelaskan seperti terlihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Hubungan Antara Kelompok Layanan dan Penggunaanya
Sumber: Kebijakan Akreditasi Sekolah (Depdiknas, 2004: 111)

Berdasarkan Gambar 2, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah lebih banyak berkepentingan dengan kelompok layanan manajemen, peserta didik lebih banyak berkepentingan dengan kelompok layanan pembelajaran, sedangkan orang tua, masyarakat, dan pemakai lulusan lebih banyak berkepentingan dengan kelompok layanan pengembangan pribadi peserta didik. Fokus utama dari pemberian layanan itu adalah peserta didik, sehingga apabila layanan-layanan yang diberikan itu memenuhi atau melebihi harapan peserta didik, maka akan memberi dampak terhadap harapan dan kepuasan orang tua, masyarakat, dan pemakai lulusan.

Akreditasi sebagai Bentuk Penjaminan Mutu Pendidikan

Mengacu pada *Total Quality Management (TQM)*, konsep penjaminan mutu (*quality assurance*) memegang peran sentral dalam hal memastikan bahwa dari sisi perencanaan, proses produksi/layanan jasa, serta pasca produksi tidak ada penyimpangan (*zero deffect*) dari baku mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada konsep penjaminan mutu tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki kepedulian yang tinggi terhadap mutu pendidikan. Dalam implementasinya, peningkatan mutu pendidikan perlu diimbangi dengan terciptanya sistem penjaminan mutu yang dilakukan pada setiap lini, termasuk penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan.

Penjaminan mutu merupakan proses sebelum dan selama proses produksi atau penyediaan jasa, yang menitik beratkan pada “jaminan” bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu

merupakan strategi *pencegahan* agar dalam produksinya atau proses peyediaan jasa tidak ada proses yang tidak berguna. Dengan memakai istilah Crosby dalam Sallis (2007: 111-112), tujuan adanya penjaminan mutu adalah *zero deffect*. Penjaminan mutu berkaitan dengan konsistensi produk dengan spesifikasinya atau mendapatkan segala sesuatunya *right first time and every time*. Mutu barang/jasa dijamin oleh produsen/penyedia jasa melalui adanya sistem penjaminan mutu, yang menjamin seberapa tepat produksi dilakukan dan mengacu pada standar apa produksi tersebut dibuat. Sistem penjaminan mutu pada akhirnya bermuara pada upaya peningkatan terus menerus (*quality improvement*), untuk memberi layanan yang memuaskan pengguna.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, sekolah dituntut untuk melaksanakan pelayanan pendidikan yang bermutu. Kriteria mutu layanan pendidikan adalah satuan pendidikan melaksanakan standar pelayanan minimal. Mutu layanan pendidikan merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Berdasarkan peraturan perundangan, dalam konteks mutu pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan "spesifikasi" yang harus dicapai oleh penyedia jasa (satuan pendidikan). Bila merujuk konsep *TQM*, maka mutu yang ingin dicapai melalui sistem penjaminan mutu adalah "mutu yang sesuai spesifikasi" yakni mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Standar-standar mutu pendidikan dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan setelah melalui uji publik, standar-standar tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, standar-standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pada hakikatnya juga merupakan standar-standar mutu pendidikan menurut pengguna.

Sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional, sistem penjaminan mutu di sekolah mengacu pada sistem yang telah dirumuskan pemerintah, dengan penekanan bahwa SNP merupakan standar minimal yang harus dicapai secara bertahap oleh tiap satuan pendidikan. Sekolah dapat merumuskan sebuah sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan ciri khasnya. Dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, perbaikan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kelayakan dan kinerja sekolah. Penilaian terhadap kelayakan dan kinerja perlu dilakukan secara terus menerus dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan mutu sekolah secara berkesinambungan.

Dalam konteks manajemen mutu, semua fungsi manajemen diarahkan untuk memberikan kepuasan kepada penggunanya. Hal ini dimaksudkan agar

penyelenggaraan pendidikan dapat memberi jaminan kepada para penggunanya bahwa pendidikan yang diberikan adalah pendidikan yang bermutu. Mutu menunjukkan sifat yang menggambarkan derajat baiknya suatu produk. Menurut Sallis (2007: 51-54), ada dua konsep mutu, yakni mutu yang bersifat absolut dan mutu yang bersifat relatif. Dalam konsep mutu absolut, penilaian derajat baiknya produk ditentukan berdasar standar atau kriteria yang ditetapkan oleh produsen atau lembaga. Sedangkan dalam konsep relatif, penilaian derajat baiknya produk ditentukan oleh pengguna yang memanfaatkan produk yang dihasilkan.

Paradigma mutu telah berubah dari yang semula berorientasi pada produsen bergeser kepada pengguna. Mutu suatu produk bukan semata-mata ditentukan oleh produsen melainkan juga ditentukan oleh pengguna. Keterlibatan pengguna dalam menentukan mutu suatu produk dapat dilakukan dengan cara produsen mempertimbangkan harapan dan kebutuhan pengguna terhadap produk-produk yang dihasilkan, apakah memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka. Suatu produk dikatakan bermutu apabila memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan dan harapan pengguna. Dengan kata lain, indikator mutu dapat ditentukan dari seberapa besar tingkat kepuasan pengguna.

Dalam implementasinya, mutu suatu produk tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan budaya kerja dari setiap individu dalam sebuah organisasi. Sasaran yang dituju dari manajemen mutu adalah memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja agar produk yang dihasilkan mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam bidang pendidikan, manajemen mutu

merupakan cara dalam mengatur semua sumberdaya pendidikan, yang diarahkan agar semua orang yang terlibat didalamnya melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan jasa yang sesuai atau memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam hal ini, kemampuan manajerial yang baik dari seorang pimpinan mutlak diperlukan.

Upaya pengelolaan mutu dalam bentuk penjaminan mutu, menjamin bahwa semua aspek yang terkait dengan proses produksi memenuhi atau mencapai standar mutu tertentu sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Dalam penerapan penjaminan mutu tidak lagi diperlukan adanya pengendalian mutu setelah produk dihasilkan, melainkan semua sumber daya dan faktor yang terkait dengan proses produksi dikelola agar terjamin dihasilkan produk atau luaran yang bermutu.

Praktik penyelenggaraan pendidikan dapat dianalogikan dengan proses produksi dari sebuah industri jasa. Satuan pendidikan atau sekolah dapat dipandang sebagai lembaga yang memproduksi atau menjual jasa (*service*) kepada para pengguna atau *stakeholder* pendidikan. Dalam hal ini, pengguna pendidikan meliputi pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah, sedangkan pengguna eksternal dapat dipilah menjadi pengguna primer, sekunder, dan tersier. Pengguna eksternal primer adalah peserta didik; pengguna eksternal sekunder adalah pemerintah, orang tua, dan masyarakat; dan pengguna eksternal tersier adalah

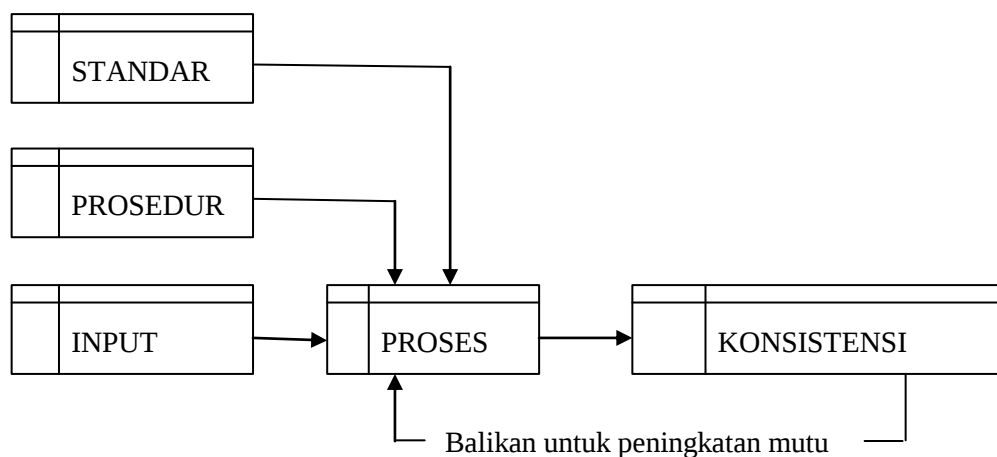
lembaga atau institusi pendidikan pada jenjang berikutnya atau pemakai lulusan dan dunia usaha.

Dengan mengacu pada konsep layanan pada pengguna, maka mutu sekolah dapat ditentukan dari seberapa besar para pengguna baik internal maupun eksternal merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Dengan kata lain, sekolah bermutu adalah sekolah yang pelaksanaan pendidikannya atau pelayanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan para penggunanya. Jadi, apakah suatu sekolah dapat memberikan layanan yang sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan penggunanya merupakan pertanyaan kunci dalam menilai mutu suatu sekolah.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu. Tenner dan Toro (1992: 78) mengemukakan bahwa manajemen mutu itu sendiri merupakan suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka: (1) memenuhi kebutuhan pengguna secara konsisten, dan (2) mencapai peningkatan mutu secara terus menerus dalam setiap aspek organisasi. Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumber daya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Apabila terjadi kekeliruan maka segera dilakukan perbaikan sehingga dapat dihindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Jadi, selain

evaluasinya perlu dilaksanakan secara terus menerus, perbaikannya juga dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus.

Dalam penerapan penjaminan mutu, proses yang terjadi menggambarkan semua kegiatan yang menjamin produk yang dihasilkan telah melalui proses yang dijanjikan. Proses penjaminan mutu dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan standar dan prosedur terutama yang terkait dengan proses produksi, dalam rangka memproses masukan (*input*) agar menghasilkan luaran (*output*) atau produk yang dapat memenuhi atau melebihi harapan pengguna secara konsisten. Selanjutnya derajat kekonsistenan luaran dengan berbagai standar yang dijanjikan merupakan balikan untuk perbaikan. Agar masukan dan luaran bersifat baku, maka perlu ditetapkan standar untuk masukan dan luaran tersebut. Proses penjaminan mutu ini dapat digambarkan seperti tampak pada Gambar 3 di berikut ini.



Gambar 3. Proses Penjaminan Mutu Pendidikan
Sumber: Sallis (2005: 34)

Logika sebagaimana diterapkan dalam manajemen produksi seperti bagan di atas juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan. Penjaminan mutu

pendidikan merupakan sistem pemantauan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memenuhi tuntutan pencapaian mutu baku dan member jaminan kepada stakeholder dengan memfokuskan penilaian pada pengembangan pendidikan di sekolah dan pertanggungjawabannya. Penilaian yang berhasil akan menunjukkan keseimbangan di antara proses pengembangan dan proses akuntabilitas. Kedua fokus penilaian ini mengindikasikan pentingnya dukungan (melalui strategi pengembangan) dan pentingnya tekanan (melalui proses akuntabilitas) dalam perubahan maupun perbaikan sekolah secara efektif.

Penilaian terhadap sekolah/madrasah dalam rangka penjaminan mutu menjadi sangat penting dan fundamental sebagai akibat dari diberikannya otonomi dalam pengelolaan sekolah (manajemen berbasis sekolah). Dengan adanya akuntabilitas lokal sekolah maka proses penilaian yang lebih memuaskan sangat diperlukan untuk menjamin dicapainya standar dan harapan masyarakat. Keberhasilan penerapan konsep penjaminan mutu dalam bidang industri telah menyebabkan banyak pengelola organisasi, termasuk organisasi pendidikan untuk menerapkan konsep dan prinsip-prinsipnya, dengan modifikasi sesuai dengan kepentingan. Selain dalam bidang pendidikan pun dalam penerapannya memerlukan berbagai perubahan. Menurut Herman dan Herman (1995: 14-18), perubahan itu harus dilakukan dalam tiga elemen yaitu filosofi, tujuan, dan proses.

Tujuan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah memproduksi jasa yang didistribusikan kepada semua pengguna baik internal maupun eksternal (utamanya pengguna primer). Setiap aktifitas yang menjadi jasa yang diproduksi

harus diberikan dalam tingkatan mutu yang lebih tinggi. Proses pendidikan, mau tidak mau harus mempedulikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna eksternal. Balikan dari pengguna eksternal ini harus menjadi dasar dalam menentukan derajat mutu jasa yang diproduksi. Untuk mencapai derajat mutu yang diinginkan itu, sekolah hanya menggunakan sumber daya manusia yang terdidik dan baik, serta sistem dan pengembangan produksi jasa yang memiliki nilai tambah yang memungkinkan pengguna memperoleh kepuasan yang tinggi.

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu pendidikan. Bagi setiap lembaga atau lembaga, konsep mutu adalah agenda utama. Meningkatkan mutu merupakan tugas paling penting. Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Namun demikian, ada sebagian orang menganggap bahwa mutu sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Persepsi tentang mutu bisa berbeda-beda. Dalam kaitan ini, meskipun konsep penjaminan mutu bermula dari manajemen dalam bidang industri. Namun konsep ini dapat diterapkan dalam bidang pendidikan karena pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan dapat dianalogikan dengan proses yang terjadi dalam industri.

Dalam penerapan konsep penjaminan mutu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan diarahkan agar mampu memberikan jaminan bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan itu memenuhi atau bahkan melebihi harapan para pelanggannya atau stakeholdernya, baik pengguna internal maupun pengguna eksternal. Dengan kata lain, manajemen mutu pendidikan dapat mengacu pada

konsep kepuasan pengguna sebagai sasaran utama. Dalam konteks pendidikan, yang termasuk pengguna dalam adalah pengelola pendidikan itu sendiri, seperti dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Sedangkan pengguna luar adalah masyarakat, pemerintah, dan dunia industri. Suatu lembaga pendidikan disebut bermutu apabila antara pengguna dalam dan pengguna luar telah terjalin kepuasan atas jasa pendidikan yang diberikan.

Sallis (2007: 63-64), menyatakan bahwa untuk memposisikan lembaga pendidikan sebagai industri jasa, maka harus memenuhi standar mutu. Secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan sebelumnya (mutu sesungguhnya) dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna (mutu persepsi). Dalam konteks akreditasi sekolah, standar mutu sekolah dapat diukur dengan kriteria standar nasional pendidikan. Sedangkan mutu persepsi dapat diukur dari tingkat akuntabilitas hasil akreditasi sekolah. Apabila tingkat akuntabilitas publik tinggi maka diasumsikan mutu pendidikan telah dicapai berdasar kriteria yang ditetapkan. Dengan kata lain, hasil akreditasi sekolah dapat dijadikan sebagai jaminan mutu pendidikan.

Tenner dan De Toro (2007: 626) mengemukakan bahwa manajemen mutu merupakan suatu cara dalam mengelola sebuah organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka: (1) memenuhi kebutuhan pengguna secara konsisten, (2) mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Tujuan utama dari penjaminan

mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan cara mengusahakan agar setiap prosedur yang dilaksanakan, setiap sumber daya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Proses penjaminan mutu dilakukan dengan terlebih dulu menetapkan standard an prosedur terutama yang terkait dengan proses produksi, dalam rangka memproses *input* agar menghasilkan *output* yang memenuhi atau melebihi harapan pengguna secara konsisten.

Dalam konteks pendidikan, konsep penjaminan mutu dalam manajemen mutu pendidikan merupakan sistem pemantauan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memenuhi tuntutan pencapaian mutu yang baku dan member jaminan kepada masyarakat dengan memfokuskan penilaian pada pengembangan pendidikan di sekolah dan akuntabilitasnya. Penilaian yang berhasil akan menunjukkan keseimbangan diantara proses pengembangan dan proses akuntabilitas. Penerapan penjaminan mutu pendidikan secara formal telah dilakukan melalui sistem akreditasi. Akreditasi dilakukan baik terhadap lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, negeri ataupun swasta.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ada tiga maksud utama dilaksanakannya evaluasi terhadap satuan pendidikan. *Pertama*, untuk kepentingan pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsure yang terkait, dengan

mengacu pada standar yang ditetapkan secara nasional. *Kedua*, untuk kepentingan akuntabilitas, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat, apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan atau keinginan mereka. *Ketiga*, untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan mutu, yakni sebagai dasar bagi pihak terkait, baik sekolah, pemerintah, maupun masyarakat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan mutu sekolah.

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memenuhi tuntutan pencapaian mutu yang baku dan memberi jaminan kepada masyarakat dengan memfokuskan penilaian pada pengembangan pendidikan di sekolah dan akuntabilitasnya. Selain sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan, akreditasi sekolah juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Istilah akuntabilitas (*accountability*) dalam dunia pendidikan masih relatif baru. Akuntabilitas diterapkan pada semua aspek pendidikan, mulai dari penyusunan program pengajaran sampai pada pengelolaan lembaga pendidikan. Gorton (1976: 7) mengemukakan bahwa akuntabilitas lembaga pendidikan merupakan aspek yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan rumusan perilaku hasil pendidikan yang akan dicapai (*behavioral objectives*) tetapi juga harus bertanggung jawab untuk mencapainya.

Raham (1998: 2) menghubungkan evaluasi dan sukses sekolah. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa publik menuntut tinjauan ulang mutu

pendidikan untuk memastikan bahwa pajak yang diinvestasikan untuk pendidikan mempunyai dampak besar pada hasil belajar peserta didik. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa menemukan makna sistem evaluasi sekolah yang sesuai yang dapat menjelaskan hubungan antara penilaian dan tanggungjawab sekolah. Akuntabilitas adalah kewajiban atau tanggung jawab untuk menunjukkan keefektifan.

Akuntabilitas proses pembelajaran dipengaruhi antara lain oleh kompetensi guru dalam penguasaan materi pelajaran, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat. Akuntabilitas hasil pembelajaran dipengaruhi oleh kerjasama dan partisipasi yang baik antar guru, peserta didik, kompetensi atau kemampuan manajerial kepala sekolah, peran serta masyarakat, luas cakupan dan keterukuran tujuan yang akan dicapai, sistem evaluasi pembelajaran yang diterapkan, dan peluang yang dimiliki guru untuk berkreativitas dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Tanggapan masyarakat terhadap hasil pendidikan dilakukan berdasarkan pemilikan dan pemahaman informasi tentang hasil pendidikan.

Caldwel dan Spink (1992: 11) membahas akuntabilitas pendidikan dari sudut proses penyediaan informasi kepada orang lain, baik untuk kalangan sendiri (intern) maupun pihak luar (ekstern) sehingga mereka bisa membuat justifikasi tentang fenomena yang ada di lembaga pendidikan tersebut, terutama tentang pencapaian tujuan, kepekaan lembaga terhadap kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat lokal maupun masyarakat luas, dan masalah keuangan. Ada

beberapa informasi yang perlu disampaikan pihak lembaga pendidikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yaitu tujuan pendidikan dan pengajaran yang sudah ditetapkan untuk dicapai oleh lembaga pendidikan, program yang disusun untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, cara mengukur kemajuan program dan kemajuan hasil belajar peserta didik, prestasi umum yang telah dicapai, strategi, prioritas, dan standar yang dipilih untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, dana dari berbagai sumber yang sudah diterima serta penggunaannya, usaha yang dilakukan untuk mendiagnosis, dan memperbaiki program dan kegiatan yang tidak mencapai hasil yang memuaskan.

Menurut Newmann (1997: 3), akuntabilitas adalah refleksi hubungan antara penyelia layanan dan pelindung (*patron*) atau penyandang dana yang mempunyai kewenangan untuk memberi penghargaan atau hukuman, atau menunjuk penyelia layanan lain yang dinilai lebih baik. Kriteria tertentu dapat ditetapkan untuk mengukur kinerja penyelia layanan. Akuntabilitas suatu lembaga pendidikan meliputi empat hal, yaitu: (1) kinerja organisasi, (2) standar mutu dan keberhasilan dibandingkan lembaga lain, (3) konsekuensi terhadap keberhasilan atau kegagalan, dan (4) laporan kepada lembaga pembuat justifikasi.

Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai permintaan dari luar yang tidak bermaksud membatasi lembaga untuk berhubungan baik dengan pihak luar. Dalam hal ini, sasaran akuntabilitas adalah pertanggungjawaban lembaga terhadap kepentingan masyarakat luas. Hostrop (1983: 1) mengemukakan tuntutan

akuntabilitas, khusus akuntabilitas kinerja tenaga kependidikan semakin kuat mengingat sekitar 75 persen dana pendidikan terserap untuk tenaga pengajar.

Justifikasi otonomi sekolah adalah kinerja sekolah dalam memberi layanan pendidikan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, yaitu sesuai dengan kriteria dan aturan serta arif dalam menggunakan sumber-sumber yang disediakan secara resmi yang disertai adanya bukti-bukti bahwa sumber-sumber tersebut dipakai untuk kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Justifikasi akuntabilitas ditentukan berdasarkan otonomi dan tanggungjawab. Akuntabilitas dapat diterima jika berdasarkan catatan dan laporan yang menunjukkan bahwa tujuan telah dicapai melalui proses yang dikembangkan secara rasional, dievaluasi secara kritis, dan disertai bukti-bukti yang bisa diterima pihak luar bahwa prosedur berjalan efektif dan nyata.

Akuntabilitas memerlukan ketersediaan bukti bahwa otonomi telah digunakan secara bertanggung jawab. Untuk dapat menyatakan kinerja yang bertanggung jawab selalu memerlukan evaluasi kritis dan masuk akal. Dalam konteks ini, tuntutan akan tanggungjawab untuk menunjukkan kinerja yang disertai bukti-bukti dan penilaian kritis oleh pihak luar tentang kebijakan yang dibuat, kegiatan yang dilaksanakan, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan diolah oleh sebuah lembaga evaluasi independen.

Menentukan mutu pendidikan yang dapat diterima oleh kedua pihak yaitu lembaga pendidikan (sekolah) dan stakeholder memang tidak mudah, tetapi tetap harus selalu diupayakan. Konsep mutu bisa bersifat relatif karena berbeda sudut

pandang antara pihak penghasil (sekolah) dan pengguna (*stakeholder*). Nilai mutu bisa saja berubah dikarenakan perkembangan IPTEK yang terus berkembang, berarti tuntutan mutu juga terus berkembang.

Audit kinerja dan akreditasi sekolah yang bertujuan untuk mengukur kelayakan sekolah belum tentu memuaskan semua pihak. Secara konseptual bisa saja hasil penilaian akreditasi sekolah dapat digunakan sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan dan akuntabilitas publik. Namun demikian tidak semua dari mereka yang berkepentingan dengan sekolah (*stakeholder*) dapat menerima hasil penilaian tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai apakah suatu sekolah dinilai layak atau tidak layak dalam arti yang lebih luas dan hasil penilaian tersebut berimplikasi dengan mutu pendidikan, maka proses evaluasi atau penilaian kelayakan sekolah perlu melibatkan segenap komponen warga sekolah.

Srikanthan & Dalrymple (2003: 127) mengemukakan ada empat kelompok *stakeholder*. Pertama, *providers* yang terdiri dari penyandang dana pendidikan (pemerintah, yayasan, donator, dan sebagainya), termasuk masyarakat secara umum. Kelompok *providers* cenderung memaknai mutu sebagai *value of money*, yang artinya tingkat pengembalian modal dan investasi dari pengelolaan dana pendidikan menjadi perhatian yang utama. Mereka adalah kelompok *where the funding authorities are looking for good return on investment*. Kedua, *user of products* (pengguna produk) yakni peserta didik. Yang dimaksud produk pendidikan adalah proses pembelajaran, bimbingan dan konseling, bimbingan kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Ketiga, *user of outputs* (pengguna

luaran atau lulusan) yaitu jenjang pendidikan yang lebih tinggi, organisasi, lembaga, dan dunia kerja pada umumnya. *Keempat, the employees of the sector* yaitu semua pihak yang bekerja pada sektor pendidikan, mencakup pendidik dan tenaga kependidikan.

Stakeholder sekolah dapat juga dipandang sebagai *customers* (pengguna) pendidikan. Maguad (2007: 334-339) mengelompokkan pengguna menjadi dua, yaitu *internal customers* dan *external customers*. Selanjutnya secara umum Baldwin (2003:23) menyatakan bahwa yang termasuk *stakeholder* adalah *employers, customers, competitors, suppliers, the community, special-interest groups, society*, atau *the public at large, government*, dan *the natural environment*.

Secara ringkas, yang dimaksud *stakeholder* sekolah adalah semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah baik secara internal maupun eksternal. *Stakeholder* secara internal meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga administrasi/tata usaha, laboran, pustakawan, dan sebagainya. *Stakeholder* secara eksternal adalah pemerintah, dinas pendidikan, yayasan pengelola pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, LPMP dan instansi terkait lainnya, masyarakat luas, donator, alumni, lembaga akreditasi sekolah, *employers* atau kalangan dunia usaha, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan para penyedia barang dan jasa di bidang pendidikan. Masyarakat dan pemerintah berhak memperoleh informasi dan menuntut mutu proses dan hasil pendidikan di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan sekolah dalam menetapkan mutu atau dapat memenuhi standar pendidikan nasional sesuai dengan harapan *stakeholder*, tekad untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki, dan dapat mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan kepada lembaga yang berwenang membuat justifikasi tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan.

Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan

Mengacu pada peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013). Penjaminan mutu pendidikan yang dimaksud: (a) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dan (b) harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

BAN-S/M mempunyai tanggung jawab memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada pemerindah daerah, dan pemerintah. LPMP mempunyai tanggung jawab melaksanakan supervisi dan membantu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab melaksanakan supervisi dan membantu satuan pendidikan untuk

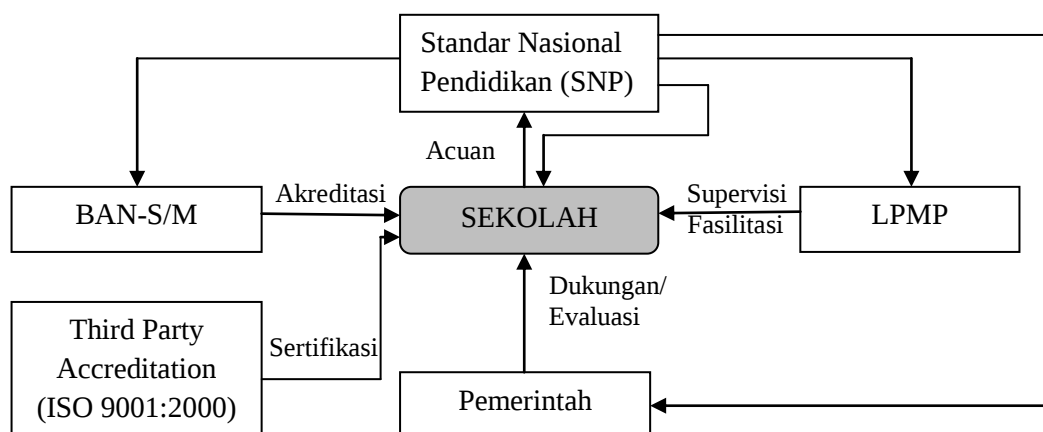
menyelenggarakan atau mengatur penyelenggarannya dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat yang fungsi utamanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kaitan ini, penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: (a) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (b) Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan (c) Standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan (Standar di atas SNP). Acuan mutu yang di atas SNP dapat berupa standar mutu yang berbasis keunggulan lokal atau standar mutu dari hasil mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar pendidikan internasional.

Evaluasi terhadap penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan dilakukan dengan cara mengukur dan menilai tingkat ketercapaian standar mutu acuan. Evaluasi untuk mengetahui ketercapaian standar mutu acuan dapat dilakukan melalui: (a) audit kinerja, (b) akreditasi, (c) sertifikasi, atau (d) bentuk lain untuk mengetahui capaian mutu pendidikan (Permendiknas Nomor 63, 2009). Apabila setiap satuan pendidikan telah memenuhi atau bahkan melampaui standar-standar nasional pendidikan, maka ada jaminan bahwa mutu pendidikan akan meningkat.

Evaluasi terhadap capaian standar-standar mutu pendidikan dalam rangka penjaminan mutu satuan pendidikan perlu dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Penyelenggara pendidikan harus mendorong dan mendukung setiap satuan pendidikan atau sekolah untuk mencapai standar mutu pendidikan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) berperan membantu memfasilitasi dan mensupervisi satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan agar satuan pendidikan dapat memenuhi standar-standar mutu pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan dalam rangka memberikan pengakuan atas pencapaian standar-standar pendidikan nasional. Terkait dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, perlu dilakukan evaluasi mutu secara terpadu. Wahono (2009: 5) memperlihatkan bangun global penjaminan mutu pendidikan yang melibatkan pemerintah selaku penyelenggara pendidikan, LPMP, dan BAN-S/M dengan fokus sekolah seperti pada Gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Skema Global Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Sumber: <http://vahonov.files.wordpress.com/2009/07/sistem-penjaminan-mutu-pengajaran-ipa-wahono.pdf>

Berdasar uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penilaian mutu sekolah pada hakikatnya ingin memperoleh informasi tentang tingkat ketercapaian 8 SNP sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan. Penilaian mutu sekolah dapat dilakukan melalui: (1) evaluasi diri sekolah (EDS oleh pihak sekolah/madrasah), (2) audit kinerja oleh penyelenggara pendidikan, dan (3) akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri. Penilaian mutu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sekolah dalam pemenuhan standar mutu pendidikan.

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, kriteria mutu sekolah sebagai acuan dalam penilaian terhadap kinerja sekolah dan/atau penilaian terhadap mutu layanan pendidikan harus mengacu pada standar nasional pendidikan. Kriteria mutu sekolah sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja sekolah dan penilaian mutu layanan pendidikan adalah 8 SNP.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, urutan kedelapan standar nasional pendidikan tersebut adalah: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar sarana dan prasarana pendidikan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian. Adapun urutan kedelapan standar nasional pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagai berikut: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga

kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana pendidikan, (6) standar pengelolaan (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Penjelasan tentang standar-standar nasional pendidikan secara ringkas dapat dipaparkan berikut ini.

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam Permendikbud Tahun 2013 Nomor 54 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa: (1) standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Adanya perubahan peraturan terkait standar kompetensi lulusan kemungkinan akan terus dilakukan oleh pemerintah seiring dengan tuntutan perkembangan jaman dan berdasarkan asumsi proyeksi kecapan yang diperlukan pada masa yang akan datang.

Ruang lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kualifikasi kemampuan lulusan SMA/MA adalah memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kualifikasi Kemampuan Lulusan SMA/MA

Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

b. Standar Penilaian

Dalam Permendikbud Tahun 2013 Nomor 66 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Peraturan tentang standar penilaian telah juga selalu mengalami perubahan. Namun demikian secara substansi, penilaian selalu terkait dengan tiga aspek yaitu penilaian aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian

tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.
- 2) Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 3) Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
- 4) Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- 5) Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- 6) Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah

semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

- 7) Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- 8) Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
- 9) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
- 10) Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.

11) Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berturut-turut sebagai berikut. Penilaian kompetensi sikap dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan dapat berupa lembar observasi, angket/kuesioner, dan jurnal. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen penilaian pengetahuan dapat berupa soal-soal, daftar pertanyaan, dan tugas rumah.

Penilaian kompetensi keterampilan dilakukan dengan teknik praktik, proyek, dan portofolio. Instrumen penilaian keterampilan dapat berupa lembar kerja praktik, lembar tugas proyek, dan lembar tugas portofolio. Instrumen penilaian keterampilan harus memenuhi persyaratan: substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan; dan

penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan Keefektifan pembelajaran. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan, sedangkan berbentuk deskripsi sikap untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial.

c. Standar Proses

Dalam Permendikbud Tahun 2013 Nomor 65 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Peraturan tentang standar proses juga mengalami perubahan. Namun demikian secara substansi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, maka dikatakan inti yang diatur dalam standar proses adalah bagaimana guru dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien.

Dalam standar proses dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan Keefektifan ketercapaian kompetensi lulusan. Ruang lingkup standar proses meliputi: (1) perencanaan proses pembelajaran, (2) pelaksanaan proses pembelajaran, (3) penilaian hasil pembelajaran, dan (4) pengawasan proses pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun pelajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 6 peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada

satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi: alokasi waktu jam tatap muka, buku teks yang digunakan peserta didik, dan perlunya pengelolaan kelas yang baik. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran.

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses

pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.

d. Standar Isi

Dalam Permendikbud Tahun 2013 Nomor 64 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peraturan tentang standar isi selalu mengacu pada standar kompetensi lulusan. Apabila pertauran tentang standar kompetensi lulusan berubah, biasanya peraturan tentang standar isi juga mengalami perubahan.

Dalam usaha mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi 8 (delapan) tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) tingkat perkembangan

peserta didik, (2) kualifikasi kompetensi Indonesia, (3) penguasaan kompetensi yang berjenjang. Tingkat kompetensi jenjang pendidikan dasar dan menengah dirumuskan seperti terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tingkat Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas
Tingkat 1	Kelas I SD/MI/SDLB/PAKET A
	Kelas II SD/MI/SDLB/PAKET A
Tingkat 2	Kelas III SD/MI/SDLB/PAKET A
	Kelas IV SD/MI/SDLB/PAKET A
Tingkat 3	Kelas V SD/MI/SDLB/PAKET A
	Kelas VI SD/MI/SDLB/PAKET A
Tingkat 4	Kelas VII SMP/MTs/SMPLB/PAKET B
	Kelas VIII SMP/MTs/SMPLB/PAKET B
Tingkat 4A	Kelas IX SMP/MTs/SMPLB/PAKET B
Tingkat 5	Kelas X SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ PAKET C/ PAKET C KEJURUAN
	Kelas XI SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ PAKET C/ PAKET C KEJURUAN
Tingkat 6	Kelas XII SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ PAKET C/PAKET C KEJURUAN

Sumber: Permendikbud Tahun 2013 Nomor 64.

Berdasarkan tingkat kompetensi di atas, ditetapkan kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Secara hirarkis, kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik pada tiap tingkat kompetensi. Kompetensi yang bersifat generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap muatan kurikulum.

Kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan kompetensi dasar pada pengembangan kurikulum satuan dan jenjang pendidikan. Kompetensi yang bersifat generik mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Setiap tingkat kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran dan penilaian pada tingkat yang sama memiliki karakteristik yang relatif sama dan memungkinkan terjadinya akselerasi belajar dalam 1 (satu) tingkat kompetensi. Selain itu, untuk tingkat kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian. Tabel 4 menyajikan uraian kompetensi inti untuk setiap tingkat kompetensi untuk jenjang SMA/MA.

Tabel 4. Kompetensi Inti Tingkat Kelas X-XI SMA/MA

Kompetensi	Deskripsi Kompetensi
Sikap Spiritual	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	3. Memahami, menerapkan, dan menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan, terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Keterampilan	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

Tabel 5. Kompetensi Inti Tingkat Kelas XII SMA/MA

Kompetensi	Deskripsi Kompetensi
Sikap Spiritual	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	3. Memahami, menerapkan, dan menganalisa, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan, terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Keterampilan	4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.

Berdasarkan deskripsi kompetensi inti, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi kompetensi dan ruang lingkup materi untuk setiap mata pelajaran. Untuk jenjang SMA/MA, tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi diterapkan untuk setiap muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77K ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Isi kurikulum secara nasional untuk jenjang SMA/MA terdiri dari: (1) muatan umum, (2) muatan peminatan akademik, dan (3) muatan pilihan lintas minat atau pendalaman materi. Muatan umum sebagaimana dimaksud terdiri atas: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, dan muatan lokal. Muatan umum tersebut dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Muatan peminatan akademik di SMA/MA terdiri atas: matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa dan budaya, dan peminatan lainnya.

Lebih lanjut, menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional perlu dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jadi, KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP

mengacu pada standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum yang ditetapkan Pemerintah. Dalam hal ini, KTSP perlu disusun dan dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Dalam penyusunan dan pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus mengacu pada Permendikbud Tahun 2014 Nomor 61 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Komponen KTSP meliputi 3 dokumen. Dokumen 1 yang disebut dengan Buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dokumen 2 yang disebut dengan Buku II KTSP berisi silabus dan dokumen 3 yang disebut dengan Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Penyusunan Buku I KTSP menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah, sedangkan penyusunan Buku III KTSP menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Buku II KTSP sudah disusun oleh Pemerintah.

Pengembangan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan satuan pendidikan. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja satuan pendidikan dan/atau kelompok satuan pendidikan yang diselenggarakan sebelum tahun ajaran baru. Tahap pengembangan KTSP secara garis besar meliputi: (1) penyusunan draf berdasarkan analisis konteks; (2) rewiu, revisi, dan finalisasi; serta (3) pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Langkah yang

lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim pengembang kurikulum satuan pendidikan. Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi dan supervisi.

Pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam pengembangan KTSP antara lain: tenaga pendidik, konselor dan kepala sekolah/madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan pengembangan KTSP, tim pengembang kurikulum satuan pendidikan dapat mengikutsertakan komite sekolah/madrasah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dan supervisi.

e. Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan di sekolah, yang dimaksud pendidik adalah guru dan konselor, sedangkan yang dimaksud tenaga kependidikan adalah kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Permendiknas Tahun 2007 Nomor 13 mengatur tentang standar kompetensi

kepala sekolah. Permendiknas Tahun 2007 Nomor 16 mengatur tentang standar kualifikasi dan kompetensi pendidik. Permendiknas Tahun 2008 Nomor 27 mengatur tentang standar kualifikasi dan kompetensi konselor. Permendiknas Tahun 2008 Nomor 24 mengatur tentang standar tenaga administrasi sekolah. Permendiknas Tahun 2008 Nomor 25 mengatur tentang standar kompetensi tenaga perpustakaan sekolah. Permendiknas Tahun 2008 Nomor 26 mengatur tentang standar kompetensi tenaga laboratorium.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan akan berpengaruh pada kinerja sekolah. Semakin tinggi tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja sekolah. Kualifikasi umum seorang kepala SMA/MA adalah: (a) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; (b) pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun; (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing; (d) memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Kualifikasi khusus yang harus dimiliki seorang kepala sekolah/madrasah adalah: (a) berstatus sebagai guru SMA/MA; (b) memiliki sertifikat pendidik

sebagai guru SMA/MA; dan (c) memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala SMA/MA adalah: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi manajerial, (c) kompetensi kewirausahaan, (d) kompetensi supervisi, dan (e) kompetensi social.

Kualifikasi guru SMA/MA minimal memiliki kualifikasi akademik pendidikan Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dengan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selanjutnya seorang guru harus memenuhi standar kompetensi secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup standar kepala tenaga administrasi, standar pelaksana urusan, dan standar petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional. Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup standar kepala perpustakaan sekolah/madrasah dan standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah.

Standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah mencakup standar kepala laboratorium, standar teknisi laboratorium, dan standar laboran. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga laboratorium sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan indikator mutu sekolah/madrasah. Pendidik yang dimaksud adalah guru dan konselor (guru bimbingan konseling). Tenaga kependidikan di sekolah/madrasah adalah tenaga administrasi (staf tata usaha), tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium.

f. Standar Sarana dan Prasarana

Dalam Permendiknas Tahun 2007 Nomor 24 diatur tentang standar sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan. Dalam pasal 1 Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana.

Standar sarana dan prasarana untuk SMA/MA mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Prioritas utama penyediaan sarana/prasarana terutama ditujukan agar peserta didik dapat memperoleh pelayanan pembelajaran yang optimal. Hal ini dikarenakan oleh adanya tuntutan bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional harus berpusat pada

peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dimaksudkan agar peserta didik dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

g. Standar Pengelolaan

Dalam Permendiknas Tahun 2007 Nomor 19 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal tentang pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan oleh satuan pendidikan. Standar pengelolaan meliputi: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah/madrasah, dan (5) informasi manajemen.

Perencanaan program terdiri dari: visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah/madrasah. Pelaksanaan rencana kerja mencakup: penyusunan pedoman, penyusunan struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan secara umum, pengelolaan bidang kesiswaan, pengelolaan bidang kurikulum dan proses pembelajaran,

pengelolaan bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan dan pembiayaan, pengelolaan budaya sekolah dan lingkungan sekolah/madrasah, dan pengelolaan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah/madrasah.

Ruang lingkup pengawasan dan evaluasi terdiri dari: program pengawasan, evaluasi diri terhadap kinerja sekolah, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidikan dan tenaga kependidikan, dan persiapan akreditasi sekolah/madrasah. Mengenai kepemimpinan, sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah/madrasah. Untuk jenjang SMA/MA, umumnya ada 4 (empat) wakil kepala sekolah/madrasah yaitu: (a) wakil kepala sekolah/madrasah urusan kurikulum, (b) wakil kepala sekolah/madrasah urusan kesiswaan, (c) wakil kepala sekolah/madrasah urusan sarana dan prasarana, dan (d) wakil kepala sekolah/madrasah urusan hubungan dengan masyarakat.

Inti pengelolaan sekolah/madrasah dapat dilihat sejauhmana kinerja sekolah/madrasah tersebut. Kata kinerja dapat berarti sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja. Kata berkinerja memiliki arti memperlihatkan prestasi atau berkemampuan kerja (KBBI, 2001: 570). Dalam bahasa Inggris kata kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* yang artinya penampilan atau prestasi. Kinerja sebagai bentuk kata benda mengandung arti sesuatu hasil yang telah dikerjakan.

Menurut Prawirosentono (1999: 6), kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja juga dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi (LAN, 1999: 3). Kinerja organisasi terkait dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut.

Keban (1995: 1) mendefinisikan kinerja sebagai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi. Kinerja organisasi dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan pada sebuah organisasi.

Sekolah sebagai satuan pendidikan merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kinerja sekolah perlu dievaluasi. Menurut Slamet (2000: 9), kinerja sekolah adalah pencapaian atau prestasi yang dihasilkan oleh proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat dievaluasi dengan cara mengukur tingkat Keefektifan, mutu, dan produktivitas, efisiensi, inovasi, mutu kehidupan kerja, dan moral kerja.

Sekolah sebagai sebuah organisasi pelayanan publik perlu dievaluasi kinerjanya terutama untuk melihat keberhasilan sekolah dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi sekolah. Informasi mengenai kinerja sekolah selain berguna untuk melihat seberapa baik mutu pelayanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah dalam memenuhi harapan dan kepuasan pengguna atau pemakai jasa (*customer satisfaction*), juga bermakna dalam memberikan masukan kepada para pejabat atau penyelenggara layanan publik untuk melakukan berbagai perubahan atau perbaikan di sekolah.

Dengan melakukan pengukuran kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Melalui informasi kinerja, setiap organisasi termasuk sekolah dapat melakukan *benchmarking* serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam usaha pencapaian tujuan organisasi dan memberikan penilaian yang objektif dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Pengukuran kinerja organisasi publik adalah *multiple measure* yakni menyangkut kemampuan internal organisasi, produk yang dihasilkan dan pencapaian hasilnya. Pengukuran kinerja lembaga-lembaga publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada entitas publik tersebut seperti Keefektifan dan efisiensi, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna seperti kepuasan, akuntabilitas, dan responsivitas.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, kinerja sekolah dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian yang menunjukkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan pencapaian standar kompetensi lulusan dan pertanggungjawaban bahwa layanan pendidikan yang diberikan telah memenuhi kepuasan dan harapan pengguna pendidikan di sekolah. Kinerja sekolah dapat digunakan sebagai indikator mutu sekolah. Penilaian atau evaluasi kinerja sekolah menggunakan acuan standar nasional pendidikan yaitu standar proses, standar pengelolaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan di sekolah.

Secara umum yang dimaksud layanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini pengguna agar kebutuhan pengguna tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka. Tjiptono (1998: 24) mengemukakan mutu layanan/jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pengguna. Menurut pendapat tersebut sebuah mutu layanan atau sebagai keunggulan-keunggulan yang diberikan perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan pengguna.

Pengertian lain dikemukakan Siagian (1998: 5) yang menyatakan bahwa layanan secara umum diartikan sebagai rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala

kebutuhan mereka. Dengan demikian layanan merupakan upaya memberikan kesenangan-kesenangan kepada pengguna dengan adanya kemudahan-kemudahan agar pengguna dapat memenuhi kebutuhannya.

Payne (2000: 16) menyatakan mutu jasa berkaitan dengan kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pengguna. Menurut Fitzsimmons & Fitz-Simmons (1997: 20) mengatakan mutu layanan didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pengguna atas layanan yang mereka terima/peroleh. Dalam hal ini, mutu layanan lebih merupakan harapan atau keinginan pengguna.

Mutu layanan merupakan sebuah tingkat kemampuan (*ability*) dari sebuah organisasi dalam memberikan segala yang menjadi harapan pengguna dalam memenuhi kebutuhannya. Parasuraman (1995: 44) menyatakan “*The quality that a consumer perceives in a service is a function of the magnitude and direction of the gap between expected service and perceived service*”. Mutu layanan ditentukan oleh seberapa besar penyedia jasa memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pengguna.

Parasuraman (1995: 46) membagi mutu layanan dalam lima dimensi, yaitu *tangible*, *reliable*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathi*. *Tangible* merupakan tampilan yang merupakan penampakan fasilitas fisik seperti fasilitas, peralatan, dan personil. *Reliable* adalah kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. *Responsiveness* merupakan hasrat ingin membantu pengguna dan menyediakan layanan yang cepat dan tepat. *Assurance* adalah

layanan yang ramah dan meyakinkan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. *Empaty* adalah bentuk kepedulian kepada pengguna dengan cara mendengarkan, berkomunikasi secara baik, dan memahami kondisi pengguna.

Penilaian atau evaluasi kinerja sektor publik khususnya organisasi pelayanan publik seharusnya melibatkan pihak internal dan eksternal. Penilaian atau evaluasi kinerja internal dapat dipertimbangkan menggunakan mutu proses layanan, sedangkan penilaian atau evaluasi kinerja eksternal biasanya difokuskan pada bagaimana persepsi dan kepuasan pengguna atau pengguna. Kepuasan pengguna pendidikan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pengguna pendidikan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna.

Pengukuran kepuasan pengguna merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pengguna merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan sekolah/madrasah harus berfokus pada layanan pendidikan dengan stakeholder utama yaitu peserta didik. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Peserta didik merupakan salah satu masukan yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. Kompetensi atau prestasi yang dicapai oleh peserta didik pada dasarnya

merupakan upaya kolektif antara peserta didik dan pendidik. Layanan pendidikan di sekolah/madrasah harus dapat memberikan fasilitasi agar peserta didik mampu mencapai kompetensi minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam standar nasional pendidikan yakni standar kompetensi lulusan. Dengan kata lain, kompetensi lulusan dapat digunakan sebagai indikator mutu sekolah.

Kesadaran terhadap mutu pendidikan sudah menjadi sebuah keniscayaan. Mengacu pada renstra Kemendikbud 2009-2014 yang menyatakan bahwa rencana program pendidikan serta sumber daya yang tersedia difokuskan kepada: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik seluruh jajaran pendidikan di pusat dan daerah. Peningkatan mutu dan penguatan tata kelola sebagai dua pilar fokus program, mengindikasikan kepedulian yang kuat terhadap mutu pendidikan.

Kemampuan daya saing sekolah, tingkat partisipasi masyarakat, efisiensi dan transparansi pengelolaan sekolah dapat digunakan sebagai kriteria mutu sekolah. Kemampuan daya saing sangat diperlukan dalam rangka menghadapi tantangan jaman dan tuntutan globalisasi. Tingkat partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam rangka memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, dan pengawasan. Sedangkan efisiensi dan transparansi pengelolaan sekolah merupakan suatu keharusan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

Keberhasilan sekolah/madrasah dalam melaksanakan pengelolaan sekolah/madrasah yang efektif juga dapat dilihat dari keberhasilan sekolah/madrasah dalam mewujudkan budaya sekolah/madrasah yang positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 169-170), kata budaya berarti pikiran atau akal budi. Berbudaya berarti mempunyai budaya; mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Membudayakan berarti mengajar supaya mempunyai budaya; mendidik supaya beradab (berbudaya). Membudayakan juga dapat berarti membiasakan suatu perbuatan yang baik sehingga dianggap sebagai berbudaya. Pembudayaan mempunyai arti proses, cara, perbuatan membudayakan.

Kreitner dan Kinicki (2003: 79) memberikan definisi budaya organisasi sebagai wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, memikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. Budaya organisasi perlu dikembangkan melalui proses sosialisasi karena akan mempengaruhi perilaku setiap individu yang ada di sebuah organisasi tersebut.

Pada tingkat yang tidak terlihat, budaya organisasi merefleksikan nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Pada tingkat yang lebih jelas, budaya organisasi dapat ditunjukkan oleh benda-benda khusus atau perwujudan fisik. Misalnya, adanya penghargaan, gaya berbusana, nilai-nilai yang dipublikasikan, upacara atau ritual yang dapat diamati, dan mitos atau cerita mengenai organisasi tersebut. Benda-benda khusus tersebut lebih mudah untuk diubah atau dikembangkan dibandingkan budaya organisasi yang kurang terlihat.

Nilai-nilai yang dimiliki oleh individu-individu yang tidak terlihat cenderung dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan lebih tahan terhadap perubahan.

Selain itu, Kreitner dan Kinicki (2003: 80-81) juga mengemukakan bahwa nilai-nilai menjadi dasar dalam pengembangan budaya sebuah organisasi. Nilai memiliki lima komponen kunci yaitu (a) nilai adalah konsep kepercayaan, (b) nilai berkaitan dengan perilaku yang dikehendaki, (c) nilai merupakan keadaan yang amat penting, (d) nilai merupakan pedoman untuk menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku, dan (e) nilai dimulai dari yang relatif penting. Vijay Sathe (Kreitner dan Kenicki, 2003: 83-84) mengemukakan model yang berguna untuk mengamati dan menginterpretasikan budaya organisasi. Ada empat manifestasi umum atau bukti budaya organisasi yakni (a) objek, adalah hal-hal yang dimiliki bersama; (b) pembicaraan, merupakan perkataan yang diucapkan bersama; (c) perilaku, yaitu pekerjaan yang dilakukan bersama; dan (d) emosi, merupakan perasaan yang dirasakan bersama. Seseorang dapat mulai mengumpulkan informasi budaya di dalam organisasi dengan bertanya, mengamati, membaca, dan merasakan.

Robbin (1991: 572) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu; suatu sistem dari makna bersama. Budaya organisasi memiliki kepribadian yang menunjukkan ciri suasana psikologis organisasi, yang memiliki arti penting bagi kehidupan organisasi, kenyamanan, kelancaran, dan keefektifan organisasi. Suasana

psikologis terbangun pola-pola kepercayaan, ritual, mitos, serta praktek-praktek yang telah berkembang sejak lama, yang pada gilirannya menciptakan pemahaman yang sama diantara para anggota organisasi mengenai bagaimana sebenarnya organisasi itu dan bagaimana para anggota harus berperilaku.

Sekolah sebagai agen budaya perlu mengembangkan budaya yang positif. Menurut Mardapi (2004: 14-15), tumbuhnya budaya sekolah/mdrasah yang positif yang dikembangkan diharapkan dapat berperan dalam (a) memperbaiki kinerja sekolah ; (b) membuat komitmen warga sekolah; (c) membuat suasana kekeluargaan, kolaborasi, ketahanan sekolah, semangat terus maju, dorongan bekerja keras, dan tidak mudah mengeluh; (d) memperbaiki mutu sekolah, kinerja sekolah, dan kehidupan sekolah; (e) memberi peluang warga sekolah berfungsi secara optimal, bekerja efisien, energik, dan penuh vitalitas; (f) budaya sekolah milik kolektif; (g) membangun konsensus bersama antar warga sekolah; (h) menjadi modal untuk melakukan perubahan; dan ada yang positif dan ada yang negatif. Budaya yang positif seperti menghargai kesuksesan, menekankan pencapaian dan kolaborasi, mengikat suatu komitmen pada staf dan siswa untuk selalu belajar. Budaya yang negatif seperti menyalahkan siswa atas prestasinya, menghindari kolaborasi, dan selalu ada pertentangan antar warga sekolah.

Lebih lanjut Mardapi (2004: 17-19) juga mengatakan bahwa budaya sekolah/madrasah yang utama antara lain budaya suka membaca, budaya jujur, budaya bersih, budaya disiplin, budaya efisien, budaya berkolaborasi, budaya saling percaya, budaya berprestasi, dan budaya adanya penghargaan dan teguran.

Budaya-budaya utama tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Produk budaya yang baik adalah (a) peningkatan kinerja individu dan kelompok, (b) peningkatan kinerja sekolah atau institusi, (c) terjalin hubungan yang sinergi, (d) tugas dilaksanakan dengan perasaan senang, (e) timbul iklim akademik, (f) kompetisi dengan kolaborasi, dan (g) interaksi yang menyenangkan.

Peter dan Waterman dalam Hanson (1996: 37) menemukan bahwa nilai-nilai budaya yang secara konsisten dilaksanakan di sekolah yang baik, yaitu mutu dan pelayanan merupakan hal yang harus diutamakan, selalu berupaya menjadi yang terbaik, memberikan perhatian penuh pada hal-hal yang nampak kecil, tidak membuat jarak dengan peserta didik, melakukan sesuatu sebaik mungkin, bekerja melalui orang (bukan sekedar bekerjasama atau memerintahnya), memacu inovasi, dan toleransi terhadap usaha yang berhasil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah/madrasah yang positif adalah nilai-nilai yang berorientasi pada mutu yang dapat mempengaruhi kinerja sekolah dan mutu layanan serta memungkinkan sekolah berhasil mencapai tujuan pendidikan. Adanya budaya sekolah/madrasah yang positif memungkinkan pengelolaan sekolah/madrasah mencapai suatu keberhasilan pendidikan. Penilaian terhadap budaya sekolah/madrasah perlu dilakukan sebagai bagian dalam melakukan penilaian mutu sekolah/madrasah.

h. Standar Pembiayaan

Dalam Permendikbud Tahun 2009 Nomor 69 tentang Standar Biaya Non Personalia Tahun 2009 dinyatakan bahwa Standar biaya operasi nonpersonalia

untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Standar biaya operasi non personalia tahun 2009 menggunakan basis biaya operasi nonpersonalia per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik yang berlaku di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Keberlangsungan sekolah dalam melaksanakan program-program pendidikan harus didukung tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Dalam hal ini, dukungan atau partisipasi dari komite sekolah sangat penting. Komite sekolah selain berperan memberikan saran dan masukan untuk pengembangan dan peningkatan mutu sekolah, juga perlu memikirkan terobosan-terobosan agar sekolah memperoleh sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar yang telah dianggarkan oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan.

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya

asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain. Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam kota maupun ke luar kota. Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah, dan lain-lain.

Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dan lain-lain. Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpindahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dan lain-lain.

Kriteria Mutu Satuan Pendidikan

Kriteria adalah karakteristik dari sebuah program yang dianggap sebagai dasar yang relevan dan penting untuk mengevaluasi program dan satuan pendidikan Windham dan Chapman (2003: 22) menyatakan: *“Criteria are an expression of what people value about program. These evaluations are grounded in beliefs, personal experience, the experience of others, and the result of theory-driven research”*. Kriteria merupakan ekspresi dari apa yang orang nilai tentang program. Dalam melaksanakan penilaian atau evaluasi sering didasarkan pada keyakinan, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan teori hasil penelitian.

Perbandingan antara kinerja program atau satuan pendidikan dengan kriteria merupakan salah satu inti yang penting dalam evaluasi pendidikan. Provus (1971: 118) mengemukakan: *“There can be no evaluation without discrepancy information and there can be no discrepancy without standards or criteria”*.

Untuk setiap dimensi program pendidikan yang dikembangkan, perlu ditetapkan dengan tegas standar atau kriteria yang akan dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja dari masing-masing dimensi tersebut. Salah satu kelemahan dalam evaluasi pendidikan adalah kurang jelasnya standar atau kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam mengadakan penilaian atau evaluasi tersebut.

Dalam akreditasi sekolah terdapat proses pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan tentang kelayakan program atau satuan pendidikan. Agar hasil akreditasi yang diperoleh dapat memberikan informasi tentang kelayakan program atau satuan pendidikan secara komprehensif dan objektif, maka mutlak diperlukan kriteria sebagai tolok ukur kelayakan sekolah yang diakreditasi. Kriteria mutu sekolah/madrasah yang digunakan harus ditetapkan secara jelas.

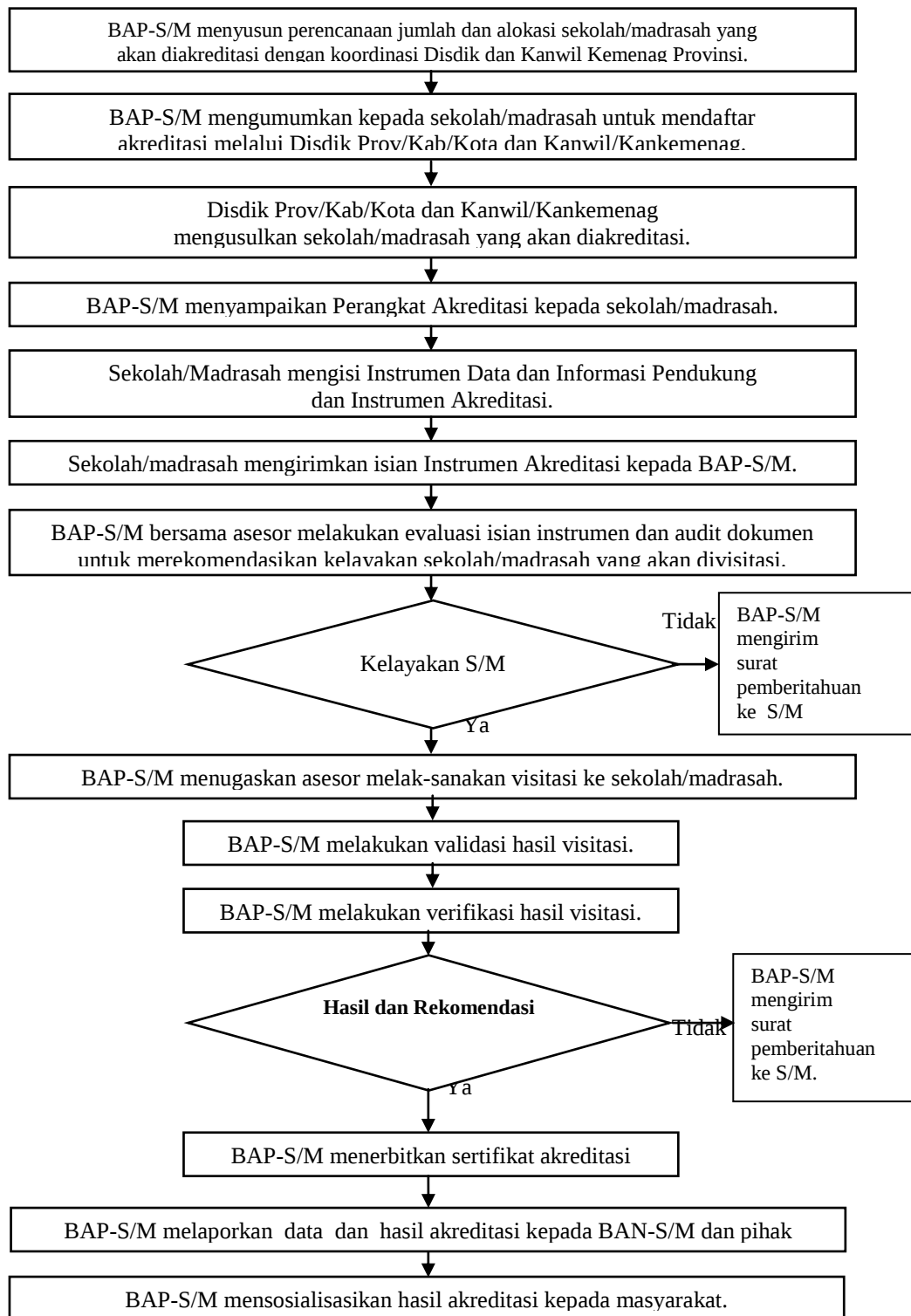
Model Akreditasi Sekolah/Madrasah BAN-S/M

Eksistensi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) ditetapkan dengan Permendikbud Tahun 2012 Nomor 59 sebagai badan evaluasi mandiri. BAN-S/M bekerja atas nama pemerintah dan bertanggung jawab kepada Mendikbud. BAN-S/M memiliki kewenangan menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai instansi yang bersifat mandiri di bawah dan bertanggung jawab kepada Mendikbud, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.

Model akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M terdiri 3 (tiga) aspek yaitu: kebijakan, perangkat, dan prosedur. Lingkup yang diatur dalam kebijakan akreditasi antara lain: (1) pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip akreditasi; (2) peran akreditasi dalam penjaminan mutu pendidikan; (3) struktur organisasi dan mekanisme kerja; (4) ketatalaksanaan administrasi; (5) mekanisme atau prosedur akreditasi; (6) norma, tata krama, dan tata tertib pelaksanaan akreditasi; (7) perangkat akreditasi; (8) monitoring dan evaluasi pelaksanaan akreditasi; (9) pelaporan, rekomendasi tindak lanjut, dan pengumuman hasil akreditasi; (10) teknik penyusunan rekomendasi; dan (11) klarifikasi dan pengaduan terhadap proses dan hasil akreditasi.

Kebijakan akreditasi dalam model BAN-S/M juga mengatur sekolah/madrasah yang ingin diakreditasi untuk pertama kali, yaitu: (1) memiliki surat keputusan izin pendirian/izin operasional, (2) memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas, (3) memiliki sarana dan prasarana pendidikan, (4) memiliki pendidik dan tenaga kependidikan, (5) melaksanakan kurikulum yang berlaku secara nasional; dan (6) telah menamatkan peserta didiknya.

Perangkat yang digunakan untuk menilai kepayakan sekolah/madrasah terdiri dari: (1) instrumen akreditasi, (2) instrumen pengumpul data dan informasi pendukung, (3) petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, dan (4) pedoman penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi. Sedangkan prosedur atau mekanisme pelaksanaan akreditasi dapat seperti terlihat pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah Model BAN-S/M
Sumber: Depdiknas (2007)

Penilaian kelayakan sekolah/madrasah dalam model akreditasi BAN-S/M menggunakan instrumen akreditasi yang berisi butir-butir pernyataan dikembangkan berdasarkan indikator mutu pendidikan mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Instrumen akreditasi yang digunakan untuk menilai kelayakan SMA/MA tersebut telah digunakan sejak tahun 2009. Adapun regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan instrumen akreditasi sekolah/madrasah untuk setiap komponen akreditasi sekolah/madrasah jenjang SMA/MA seperti terlihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Komponen Akreditasi dan Acuan Regulasinya

No.	Komponen	Acuan Regulasi
1	Standar Isi	Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
2	Standar Proses	Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
3	Standar Kompetensi Lulusan	Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
4	Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor; Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan Permendiknas No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
5	Standar Sarana dan Prasarana	Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
6	Standar Pengelolaan	Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
7	Standar Pembiayaan	Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009
8	Standar Penilaian	Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian

Proses penjabaran delapan standar nasional pendidikan menjadi instrumen akreditasi sekolah/madrasah yang mengacu pada regulasi sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan tahapan: (a) penjabaran delapan standar nasional pendidikan sesuai Permendinas dijadikan sebagai kisi-kisi instrumen akreditasi, (b) kisi-kisi instrumen akreditasi terdiri dari komponen atau aspek yang diakreditasi (nama dan urutan komponen akreditasi sama persis dengan nama dan urutan delapan standar nasional pendidikan), (c) indikator dalam Permendiknas dipakai dalam penyusunan substansi butir pernyataan dalam instrumen akreditasi, dan (d) setiap butir instrumen akreditasi mempunyai lima opsi jawaban. Ada lima kriteria untuk setiap butir pernyataan dalam instrumen akreditasi yaitu: (1) terukur, (2) jelas atau tidak menimbulkan persepsi ganda, (3) sesuai dengan aspek masing-masing standar, (4) masing-masing pernyataan hanya mengukur satu aspek, dan (5) masing-masing butir instrumen tidak saling bertentangan atau tidak saling meniadakan satu dengan lain.

Petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi berisi penjelasan dan rincian informasi tentang bukti fisik, dokumen, atau fakta yang harus diperlihatkan oleh pihak sekolah/madrasah maupun yang diperoleh tim asesor pada saat dilakukan visitasi untuk menjawab setiap butir pernyataan pada instrumen akreditasi. Setiap jawaban pada butir pernyataan instrumen harus dibuktikan dengan bukti fisik, dokumen, atau fakta seperti dijelaskan pada petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi ini. Bukti fisik, dokumen maupun

fakta yang sama dapat digunakan untuk membuktikan atau mendukung jawaban dari butir-butir pernyataan lain yang berkaitan.

Instrumen pengumpul data dan informasi pendukung berisi format berupa tabel atau uraian yang harus diisi oleh pihak sekolah/madrasah bersamaan saat mengisi setiap butir pernyataan dalam instrumen akreditasi. Data dan informasi pendukung yang diisikan dapat berupa angka yang menyatakan banyak/jumlah atau deskripsi informasi.

Teknik penskoran dilakukan dengan cara memberikan bobot komponen dan bobot butir instrumen akreditasi terlebih dahulu. Bobot komponen dan bobot butir instrumen akreditasi SMA/MA diperlihatkan pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Bobot Komponen dan Bobot Butir Instrumen Akreditasi SMA/MA

No	Komponen Akreditasi	Nomor Butir	Jumlah Butir	Bobot Komponen	Bobot Butir (*)
1	2	3	4	5	6
1	Standar Isi	1 - 15	15	15	1,00
2	Standar Proses	16 - 25	10	10	1,00
3	Standar Kompetensi Lulusan	26 - 50	25	10	0,40
4	Standar Pendidik dan Tendik	51 - 70	20	15	0,75
5	Standar Sarana dan Prasarana	71 - 100	30	15	0,50
6	Standar Pengelolaan	101 - 120	20	10	0,50
7	Standar Pembiayaan	121 - 145	25	15	0,60
8	Standar Penilaian	146 - 165	20	10	0,50

Keterangan: (*) Bobot butir = Bobot komponen : Jumlah butir

Berdasarkan pembobotan ditentukan skor butir dan skor tertimbang maksimum. Seluruh butir pernyataan dalam instrumen akreditasi SMA/MA merupakan pernyataan tertutup yang terdiri dari lima opsi jawaban yaitu A, B, C, D, atau E. Setiap pernyataan yang dijawab A memperoleh skor = 4, B

memperoleh skor = 3, C memperoleh skor = 2, D memperoleh skor = 1, dan E memperoleh skor = 0. Jika perolehan skor maksimum setiap butir sama dengan 4, maka skor tertimbang maksimum dapat dihitung dengan rumus: skor tertimbang maksimum = jumlah butir x skor butir maksimum x bobot butir. Skor tertimbang maksimum pada setiap komponen akreditasi SMA/MA seperti terlihat pada di bawah ini. Berdasarkan Tabel 8 di bawah ini terlihat bahwa jumlah skor tertimbang maksimum sama dengan 400.

Tabel 8. Skor Tertimbang Maksimum Akreditasi SMA/MA

No	Komponen Akreditasi	Jumlah Butir	Skor Butir Maks	Bobot Butir	Skor Tertimbang Maks (*)
1	2	3	4	5	6
1	Standar Isi	15	4	1,00	60
2	Standar Proses	10	4	1,00	40
3	Standar Kompetensi Lulusan	25	4	0,40	40
4	Standar Pendidik dan Tendik	20	4	0,75	60
5	Standar Sarana dan Prasarana	30	4	0,50	60
6	Standar Pengelolaan	20	4	0,50	40
7	Standar Pembiayaan	25	4	0,60	60
8	Standar Penilaian	20	4	0,50	40
Jumlah Skor Tertimbang Maksimum					400

Keterangan: (*) Skor tertimbang maksimum = jumlah butir x skor butir maksimum x bobot butir.

Selanjutnya dilakukan penentuan nilai akhir akreditasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menghitung jumlah skor butir yang dijawab A, B, C, D, atau E pada setiap komponen akreditasi; (2) menghitung skor tertimbang untuk setiap komponen dengan rumus: skor tertimbang setiap Komponen = jumlah skor butir x bobot butir; (3) menjumlahkan skor tertimbang untuk setiap komponen mulai dari komponen 1 sampai komponen 8; (4) menentukan nilai

akhir dengan rumus: nilai akhir = (jumlah skor tertimbang : 400) x 100. Contoh penghitungan nilai akhir seperti Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Contoh Penghitungan Nilai Akhir Akreditasi SMA/MA

No	Komponen Akreditasi	Jumlah Skor Butir	Bobot Butir	Skor Tertimbang (*)
1	Standar Isi	44	1,00	44,00
2	Standar Proses	30	1,00	30,00
3	Standar Kompetensi Lulusan	87	0,40	34,80
4	Standar Pendidik dan Tendik	71	0,75	53,25
5	Standar Sarana dan Prasarana	106	0,50	53,00
6	Standar Pengelolaan	67	0,50	33,50
7	Standar Pembiayaan	81	0,60	48,60
8	Standar Penilaian	78	0,50	39,00
9	Jumlah Skor Tertimbang			336,15
10	Nilai Akhir = $\frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang}}{\text{Jumlah skor tertimbang maksimum}} \times 100$ $= \frac{336,15}{400} \times 100 = 84,04$			84,04

Keterangan: (*) Skor tertimbang = jumlah skor butir x bobot butir.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian Brubaker (2004: 73-78) tentang pengukuran atribut mutu program pendidikan menyatakan bahwa peserta didik, keluarganya, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya tertarik dalam setiap usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan. Namun mereka menyadari bahwa atribut-atribut yang spesifik tentang mutu pendidikan sulit ditentukan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi tentang mutu antara kelompok pengguna yang satu dengan kelompok pengguna lain.

Untuk meningkatkan proses penilaian mutu pendidikan, penting untuk menguji bagaimana stakeholder memandang validitas pengukuran variabel yang umum digunakan untuk menilai mutu. Atribut-atribut mutu pendidikan umumnya terkait dengan dimensi-dimensi input, proses dan output program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam lima kategori: (1) mutu standar masuk program yang terkait dengan siswa baru (*input*), (2) mutu pengajaran (proses), (3) mutu penelitian (proses), (3) mutu layanan (proses), dan (5) mutu lulusan (*output*). Dalam penelitian ini, responden diminta memilih atribut-atribut berdasarkan prevalensi mereka dalam proses penilaian program pendidikan. Sebagai contoh, variabel evaluasi peserta didik ternyata terpilih sebagai salah satu dari beberapa variabel umum yang dapat digunakan untuk mengukur atribut mutu pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan atribut-atribut mutu program pendidikan berdasarkan penilaian stakeholder sebagai tindakan yang tepat rangka meningkatkan mutu pendidikan. Konsep mutu pendidikan akan terus berkembang berdasarkan keinginan dan harapan para pengguna. Oleh karena itu, para penyelenggara pendidikan harus terus memantau kebutuhan para penggunanya.

Penelitian Lindsay dan Campbell (2002: 29-31) tentang pengujian status akreditasi sebagai salah satu indikator mutu program pendidikan menyatakan bahwa status akreditasi sering dianggap sebagai indikator mutu program. Studi dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang dapat menentukan mutu program berdasarkan status akreditasi yang telah diperolehnya. Salah satu temua dalam penelitian ini menyatakan bahwa untuk kenyamanan akses indikator-indikator

akuntabilitas mutu dan kinerja program pendidikan, banyak disarankan menggunakan skor kelulusan peserta didik.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mencari apakah status akreditasi yang berfungsi sebagai prediktor yang signifikan terhadap nilai rata-rata ujian peserta didik, apakah status akreditasi dapat digunakan sebagai indikator mutu program atau tidak. Secara keseluruhan, akreditasi banyak dilihat sebagai suatu ukuran mutu secara komprehensif pada program pendidikan. Salah satu tujuan akreditasi adalah untuk membantu peserta didik agar sesuai dalam memilih program-program yang bermutu yang diinginkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi tingkat intelektual memang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan status akreditasi dan status akreditasi juga sangat berkaitan dengan mutu lulusan peserta didik di sekolah tersebut.

Penelitian Bennett (2002: 1-6) tentang akreditasi sekolah independen sebagai pedoman untuk memilih sekolah, diperoleh informasi bahwa akreditasi terhadap program pendidikan di sekolah dilakukan untuk mengetahui apakah isi program pendidikan yang diselenggarakan sekolah, apakah sekolah memiliki standar-standar yang tinggi, dan apakah ada komitmen dari sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu programnya. Bagi sebagian peserta didik, memilih sekolah merupakan sesuatu yang sulit, khususnya ketika ingin pindah dari sekolah umum ke sekolah independen. Bahkan orang tua mereka sering terkejut saat mengetahui bahwa budaya di sekolah independen berbeda dengan

budaya sekolah umum. Sekolah umum biasanya menyediakan berbagai program yang sesuai untuk semua peserta didik.

Sekolah independen berbeda satu sama lain dan mengembangkan cara tersendiri dalam merespon misi mereka. Kekuatan mereka muncul pada bagian kemandirian mereka dari peraturan *stultifying*, tetapi kemandirian dari pengawasan pemerintah sendiri memberikan tantangan untuk mencari alternatif cara untuk menilai dan menunjukkan mutu. Oleh karena itu, akreditasi sekolah independen merupakan wahana yang tepat untuk sekolah efektif dan sebagai katalisator akuntabilitas untuk perbaikan sekolah.

Terdapat dua aspek untuk proses akreditasi. *Pertama*, fokus akreditasi sekolah independen adalah pada keunikan sekolah tersebut, yang jelas ada pengakuan terhadap komitmen untuk misi khusus dan misi *unfolding* dalam semua bidang aktivitas di sekolah. *Kedua*, komplementer penerapan standar mutu terhadap semua anggota sekolah secara akuntabel. Akreditasi sekolah independen menghormati perbedaan antara sekolah. Tidak seperti kebanyakan sistem evaluasi, proses penilaian akreditasi sekolah independen bersifat individual. Proses akreditasi dimulai melalui *self-study*, dilanjutkan dengan prosedur untuk memeriksa setiap aspek sekolah, menilai sesuai dengan standar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, menentukan prioritas, dan menentukan rencana untuk perbaikan.

Akreditasi sekolah independen dimaksudkan untuk mencari komitmen secara sukarela untuk memenuhi satu set standar yang telah ditetapkan oleh

lembaga akreditasi sebagai indikator mutu dan integritas sekolah. Akreditasi berkaitan dengan akuntabilitas yang mengatur standar dan mengawasi sekolah yang sesuai. Akreditasi sekolah independen disesuaikan dengan tingkat keluasan institusi. Proses akreditasi mencakup setiap aspek individual dan namun tetap mempertahankan standar mutu yang ketat.

Prosedur atau proses akreditasi pada sekolah independen dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) sekolah mengajukan permohonan untuk diakreditasi kepada salah satu lembaga akreditasi, (2) sekolah diberi tawaran untuk dapat mempelajari proses akreditasi, (3) sekolah melaksanakan evaluasi diri dan membuat laporan hasil evaluasi, (4) sekolah dikunjungi oleh komite (asesor) yang terlatih yang dipilih oleh lembaga akreditasi, (4) setelah kunjungan, lembaga akreditasi memberi ulasan laporan dari kedua pihak yaitu sekolah dan komite yang mengunjungi, dan (5) jika ditemukan kondisi sekolah yang tidak sesuai dengan standar, maka lembaga akreditasi biasanya menjalin komunikasi dengan sekolah dan siap untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akreditasi dapat digunakan sebagai panduan dalam memilih sekolah yang bermutu. Akreditasi mungkin pada awalnya hanya memunculkan penjaminan mutu yang umum, dengan sedikit spesifik informasi tentang sekolah. Akreditasi berarti bahwa sekolah telah ditemukan untuk memenuhi standar dan mencapai tingkat mutu, tetapi hal ini adalah bersifat kualitatif yang tidak siap digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Akreditasi

harus dapat memberikan informasi yang spesifik tentang kesesuaian atau kelebihan khusus yang dimiliki sekolah.

Penelitian Sumarno (2000) yang berjudul: “Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Negeri Tingkat SLTP dan SMU” menghasilkan sebuah model akreditasi sekolah beserta instrumentasinya dan memberikan rekomendasi tentang organisasi yang tepat untuk melaksanakan akreditasi sekolah secara nasional. Ada tiga konsep dasar yang digunakan dalam penelitian tersebut: (a) sistem atau model akreditasi sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi dengan subjek satuan analisis sekolah; (b) objek pokok dari akreditasi sekolah adalah mutu sekolah, kemampuan, dan kinerja sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; dan (c) sistem akreditasi yang dihasilkan harus sesuai dengan desentralisasi manajemen pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan manajemen pendidikan berbasis sekolah.

Metodologi yang dipakai untuk menghasilkan model akreditasi sekolah menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. Pengembangan model diawali dengan kajian teori dan pengumpulan data empiris. Berdasarkan hasil kajian teori dan data empiris tersebut dirancang sebuah konsep tentang sistem atau model akreditasi sekolah beserta instrumentasinya sampai dengan pedoman pensekoran dan penentuan status akreditasi. Desain model akreditasi didiskusikan dengan pakar dan praktisi pendidikan. Setelah melalui uji validitas, model akreditasi diujicobakan dalam skala terbatas dengan melibatkan tiga SLTP dan tiga SMU. Selanjutnya dilakukan uji coba dalam skala yang lebih luas yakni di

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di provinsi Lampung dengan melibatkan enam SLTP dan enam SMU.

Hasil penelitian diperoleh sebuah model akreditasi sekolah dengan spesifikasi produk berupa prosedur dan instrumentasinya. Prosedur akreditasi yang direkomendasikan adalah: (a) sekolah menerima berkas akreditasi dari lembaga akreditasi, (b) sekolah mengisi berkas dan melengkapi dengan dokumen yang relevan, (c) berkas yang sudah diisi yang disertasi dengan dokumen yang relevan dikembalikan kepada lembaga akreditasi, (d) lembaga akreditasi menilai berkas dari sekolah untuk mendapatkan umpan balik, (e) lembaga akreditasi melakukan visitasi ke sekolah, dan (f) setelah diperoleh informasi yang mencerminkan keadaan sekolah yang sesungguhnya baru kemudian lembaga akreditasi menentukan status akreditasi sekolah tersebut.

Indikator utama mutu sekolah mencakup lima komponen dengan bobot yang berlainan. Komponen-komponen sebagai indikator utama mutu sekolah tersebut adalah: (1) fasilitas dan pemanfaatannya, (2) sumberdaya manusia, (3) orang tua siswa dan masyarakat, (4) siswa, dan (5) iklim sekolah. Kelima komponen tersebut kemudian dijabarkan sehingga mencakup aspek-aspek input, proses, dan hasil. Berdasarkan indikator utama tersebut lalu dikembangkan instrumen akreditasi sekolah dan dihasilkan enam angket yaitu: (a) angket untuk sekolah, (b) angket untuk kepala sekolah, (c) angket untuk tata usaha, (d) angket untuk guru, (e) angket untuk siswa, dan (f) angket untuk orang tua siswa.

Penelitian Budi Koestoro (2007) yang berjudul: “Pengembangan Model Akreditasi Sekolah” dilakukan melalui metode survei terhadap 450 responden yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Responden berasal dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Badan Akreditasi Sekolah Provinsi, Asesor, Komite Sekolah, Kepala sekolah, dan Guru. Hasil penelitian memandang bahwa keberlangsungan penyelenggaraan akreditasi sekolah selama ini sudah cukup berhasil, namun masih belum melibatkan seluruh elemen sekolah dan kurang sosialisasi. Pelaksanaan evaluasi diri, pengisian instrumen, dan saat dilakukannya visitasi oleh asesor hanya melibatkan tim. Sebagian besar guru, staf tata usaha, komite sekolah, dan siswa kurang tidak dilibatkan dalam proses akreditasi.

Penelitian Totok Sumaryanto F. (2008) yang berjudul: “Kajian Penyelenggaraan Akreditasi pada Pendidikan Dasar” dilaksanakan dengan menggunakan atau memodifikasi desain Penelitian dan Pengembangan (*Educational Research & Development*) Borg & Gall dibagi ke dalam 7 tahapan. Tahapan *Riset & Development* (R & D) tersebut adalah: (1) Pengumpulan informasi dan kajian literatur, (2) Penyusunan desain dan instrumen model penyelenggaraan akreditasi pendidikan dasar, (3) Pengumpulan data lapangan, (4) Pengalohan dan analisis data, (5) Penyusunan draft laporan, (6) Seminar laporan, dan (7) Penyusunan laporan akhir. Sumber data penelitian ini terdiri atas guru SD/MI dan MTS/SMP, kepala sekolah, Komite Sekolah, Badan Akreditasi Sekolah Propinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota di 15 propinsi se-Indonesia.

Dari kelima belas propinsi tersebut, empat propinsi di antaranya dijadikan sebagai wilayah uji coba untuk kepentingan uji validitas dan reliabilitas instrumen.

Subjek penelitian adalah guru SD/MI dan MTS/SMP, kepala sekolah, Komite Sekolah, Badan Akreditasi Sekolah Propinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode survei melalui *interview*/FGD, kuesioner, observasi lapangan dengan instrumen standar yang dikembangkan peneliti. Sumber data dari guru SD/MI dan SMP/MTs, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Badan Akreditasi Sekolah Propinsi, dan kepala dinas kabupaten/kota di 15 propinsi se-Indonesia, dari setiap propinsi diambil sampel 1 Kabupaten dan 1 Kota.

Sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilakukan, data yang dihasilkan dari kuesioner dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk melihat kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Sedangkan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang secara simultan terdiri dari tahapan: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Juga dilakukan analisis sistem untuk menentukan model penyelenggaraan akreditasi pendidikan dasar.

Hasil temuan dan kesimpulan penelitian merekomendasikan tiga hal sebagai berikut. *Pertama*, potensi dan permasalahan penyelenggaraan pendidikan dasar, meliputi delapan aspek kajian, yaitu : (1) kurikulum, (2) proses pembelajaran, (3) kompetensi lulusan, (4) tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian. *Kedua*, kondisi dan efektifitas komponen penyelenggaraan akreditasi pendidikan dasar, meliputi empat komponen, yaitu (1) Lembaga Penyelenggara Akreditasi, (2) Satuan Pendidikan sasaran Akreditasi, (3) Instrumen Akreditasi, dan (4) Prosedur Akreditasi. *Ketiga*, pengembangan komponen dalam penyelenggaraan akreditasi pendidikan dasar terdapat empat komponen yang dianalisis pengembangannya, yaitu: (1) Lembaga Penyelenggara Akreditas, (2) Satuan Pendidikan Sasaran Akreditasi, (3) Instrumen Akreditasi, dan (4) Prosedur Akreditasi.

Penelitian Eddy Sutadji (2009) yang berjudul “Model Evaluasi Mutu Sekolah” dilakukan dalam rangka pengembangan instrumen untuk menetapkan mutu sekolah diperoleh beberapa kajian menarik. Dari sisi metodologi, pengembangan komponen dan indikator mutu sekolah dapat diperoleh melalui kajian konseptual, teoritik, dan empirik di lapangan melalui survei, FGD, dan teknik Delphi. Dari sisi subjek yang terlibat dalam penelitian dinyatakan bahwa ada interaksi yang positif antar pakar pendidikan dan praktisi pendidikan dalam memberikan *judgment* komponen dan indikator mutu sekolah.

Hasil validasi model yang dikembangkan dikatakan bahwa (a) model evaluasi mutu sekolah hasil pengembangan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap objek yang diteliti, (b) model evaluasi mutu sekolah hasil pengembangan dapat memberikan informasi yang tepat bagi stakeholder, dan (c) tingkat koherensi instrumen evaluasi mutu sekolah ketika digunakan untuk menetapkan

mutu sekolah sesuai dengan rancangan, (d) instrumen yang dikembangkan peneliti memiliki kelebihan dibandingkan instrumen akreditasi dari BASNAS.

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa ada sepuluh komponen yang digunakan untuk mengevaluasi mutu sekolah, yaitu: (a) keefektifan proses pembelajaran, (b) kepemimpinan, (c) tenaga pendidik, (d) peserta didik, (e) manajemen sekolah, (f) lingkungan fisik dan sumber daya, (g) budaya sekolah, (h) kepuasan pemangku kepentingan, dan (i) hasil belajar, (j) pertanggungjawaban. Kesepuluh komponen tersebut merupakan kriteria yang tepat untuk mengukur mutu sekolah.

Berdasarkan kajian beberapa hasil penelitian yang relevan sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dikemukakan hal-hal pokok sebagai acuan dalam penelitian ini. *Pertama*, sebelum melakukan pengembangan model, perlu dilakukan kajian-kajian teori dan pengumpulan bukti-bukti empiris tentang kelebihan dan kelemahan terkait dengan implementasi model yang telah ada. *Kedua*, komponen-komponen akreditasi sebagai kriteria mutu sekolah perlu dirumuskan secara tepat. *Ketiga*, pengembangan prosedur dan instrumen akreditasi perlu melibatkan pakar dan praktisi pendidikan. *Keempat*, desain model akreditasi harus diujicobakan di lapangan. *Kelima*, pengembangan model akreditasi sekolah harus dilaksanakan secara serius mengingat pentingnya akreditasi sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan.

Akreditasi sekolah pada dasarnya merupakan bentuk evaluasi pendidikan yang tujuan utamanya adalah memberikan penilaian kelayakan sekolah. Penilaian

kelayakan yang dimaksud adalah untuk mengetahui atau ingin mendapatkan informasi apakah satuan pendidikan telah memenuhi kriteria atau standar-standar mutu yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Setelah diperoleh gambaran atau informasi tentang mutu sekolah, lembaga akreditasi memberikan pengakuan peringkat akreditasi yang menunjukkan tingkatan pencapaian pemenuhan kriteria atau standar yang ditetapkan. Fernandes (1984: 1) menyatakan bahwa fungsi dasar evaluasi adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu program dan evaluasi sumatif untuk tujuan akuntabilitas, penentuan mutu, dan sertifikasi. Akreditasi sekolah/madrasah dapat dipandang sebagai bentuk evaluasi sumatif.

C. Kerangka Pikir

Penilaian mutu SMA/MA perlu dilakukan secara berkala, terpadu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Model akreditasi terutama yang berkaitan dengan aspek prosedur dan instrumen perlu didesain sedemikian rupa agar mudah digunakan, menghasilkan data secara komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan model akreditasi perlu mempertimbangkan kembali hasil kajian tentang kelebihan dan kekurangan dalam implementasi model yang sudah ada yakni model akreditasi BAN-S/M. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah membuat rumusan tentang standar-standar akreditasi yang tepat. Standar akreditasi tidak harus mengungkap semua hal terkait dengan 8 SNP, namun secara substansi dapat merepresentasikan capaian 8 SNP yang dapat diamati dan dapat diukur.

Akreditasi sekolah pada hakikatnya merupakan bentuk evaluasi terhadap mutu satuan pendidikan. Dalam penelitian ini, istilah akreditasi SMA/MA adalah penilaian kelayakan SMA/MA atau penilaian mutu SMA/MA. Dalam proses akreditasi SMA/MA terdapat menggunakan konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengumpulan data dan informasi merupakan tahap pengukuran, membandingkan antara data dan informasi dengan kriteria yang ditetapkan merupakan tahap penilaian, dan pemeringkatan/penenetapan hasil akreditasi merupakan tahap evaluasi.

Kebijakan dalam model akreditasi BAN-S/M tentang prinsip dasar yakni: objektif, komprehensif, adil, transparan, dan akuntabel tetap dipertahankan. Pengembangan model dimaksudkan agar diperoleh model yang dapat diterapkan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Model akreditasi yang efektif adalah model akreditasi yang instrumen yang sederhana dan praktis namun dapat menghasilkan data yang akurat, objektif, dan komprehensif. Model akreditasi yang efisien adalah model akreditasi dengan instrumen yang mudah digunakan untuk menilai mutu sekolah secara adil dan transparan. Model akreditasi yang akuntabel adalah model akreditasi yang prosedur penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan.

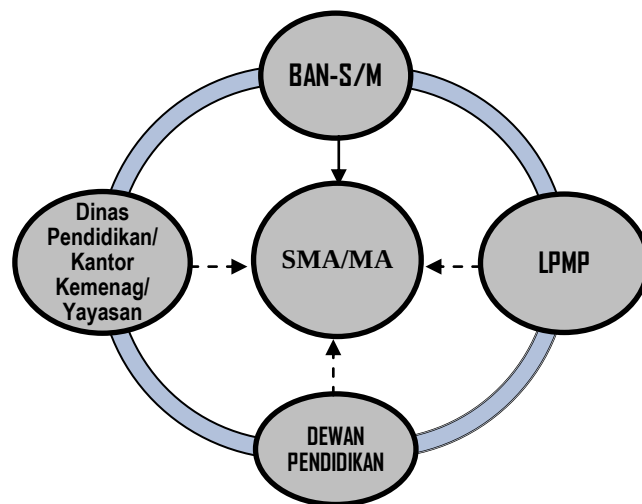
Model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan juga mengadaptasi prinsip-prinsip atau standar-standar evaluasi yang berlaku. Salah satu standar evaluasi yang dapat dijadikan rujukan adalah standar evaluasi yang dikeluarkan oleh *The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation*. Ada lima standar yang patut diperhatikan dalam proses evaluasi, yaitu: *utility*, *feasibility*,

propriety, dan *accuracy*. Standar *utility*, dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi akan memberikan manfaat layanan kebutuhan informasi bagi pengguna. Standar *feasibility*, dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi akan realistis, bijaksana, cerdas, dan cermat. Standar *propriety*, dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi akan dilakukan secara legal, etis, dan dengan memperhatikan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam evaluasi, serta yang dipengaruhi oleh hasil-hasilnya. Standar *accuracy*, dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi akan mengungkapkan dan menyampaikan secara teknis informasi yang memadai tentang ciri-ciri yang menentukan nilai/manfaat dari program yang dievaluasi.

Dasar pemikiran pengembangan model instrumen akreditasi SMA/MA adalah: (1) instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan SMA/MA dalam model akreditasi BAN-S/M belum disesuaikan dengan regulasi baru terkait 4 SNP yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian; (2) instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung dalam model akreditasi dari BAN-S/M pengisiannya masih bersifat manual sehingga kurang praktis dan kurang efisien untuk keperluan pengumpulan database hasil penilaian akreditasi; dan (3) indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur kelayakan sekolah/madrasah pada model akreditasi dari BAN-S/M lebih banyak hanya meminta bukti-bukti berupa dokumen administratif. Hal inilah yang menjadi salah satu indikasi bahwa hasil penilaian akreditasi dinilai kurang objektif, kurang akurat, dan kurang terpercaya. Bukti-bukti yang harus dipenuhi semestinya juga harus berdasarkan hasil kinerja faktual yang teramati dan terukur.

Agar hasil akreditasi lebih terpercaya maka perlu mengembangkan model akreditasi dari aspek prosedur. Prosedur penilaian mutu SMA/MA harus dapat menjamin pihak SMA/MA dan penilai (asesor) melakukan penilaian secara jujur dan objektif berdasarkan bukti-bukti faktual sesuai dengan kondisi nyata.

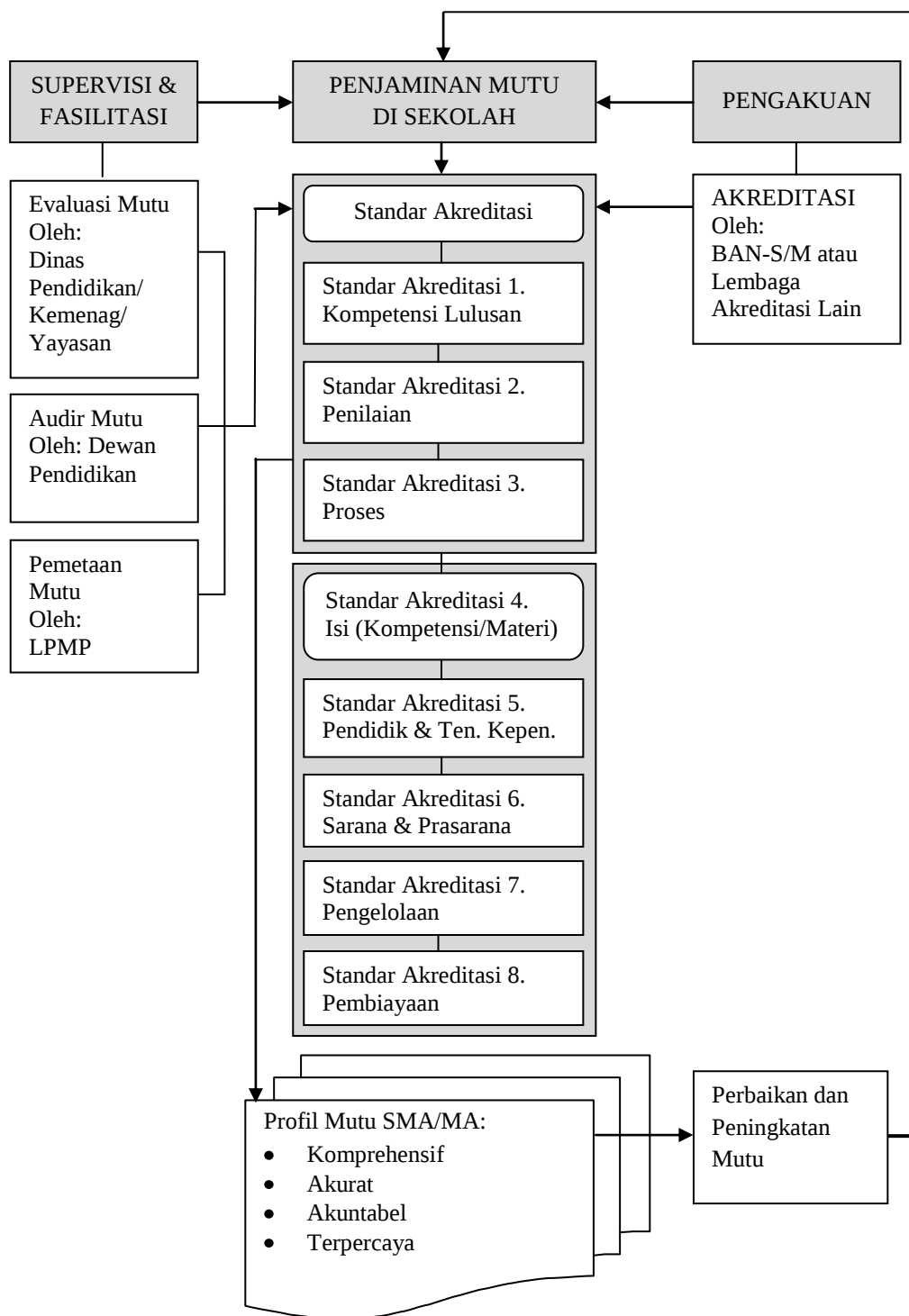
Selain untuk keperluan justifikasi apakah sebuah SMA/MA layak atau belum layak mendapatkan peringkat akreditasi tertentu, maka model akreditasi yang dikembangkan harus mampu mendorong dan memotivasi pihak SMA/MA untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Untuk itu, model akreditasi yang dikembangkan dapat digunakan untuk keperluan penilaian mutu SMA/MA secara terpadu. Konsep penilaian mutu SMA/MA secara terpadu dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.



Gambar 6. Konsep Penilaian Mutu SMA/MA Terpadu

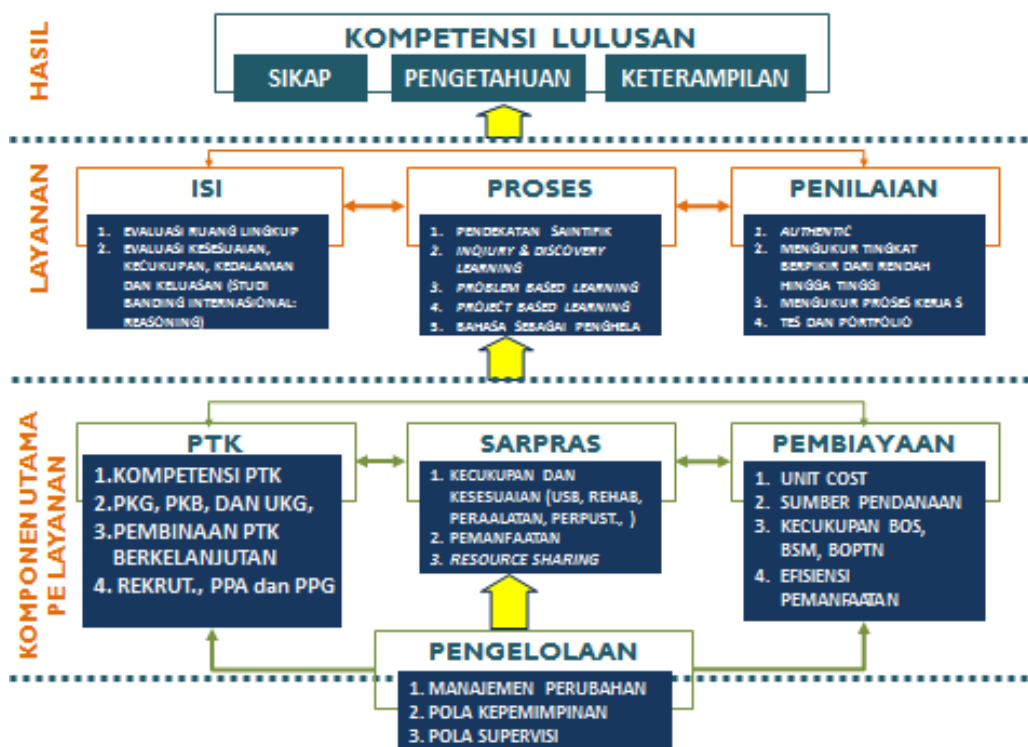
Pihak SMA/MA perlu melakukan penilaian mutu sekolah melalui evaluasi diri. Evaluasi diri bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan sekaligus mengetahui pada tingkatan mana sekolah telah memenuhi standar-standar yang ditetapkan. Penyelenggara pendidikan (dinas pendidikan/kantor kemenag/yayasan) perlu melakukan evaluasi mutu sekolah yang menjadi kewenangannya. LPMP melakukan penilaian mutu sekolah untuk keperluan pemetaan mutu pendidikan. BAN-S/M melakukan penilaian mutu sekolah melalui akreditasi untuk keperluan penjaminan mutu secara eksternal.

Penilaian mutu SMA/MA dapat dilakukan melalui akreditasi, evaluasi mutu, audit mutu, pemetaan mutu. Penilaian mutu SMA/MA tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran profil mutu yang komprehensif, akurat, akuntabel, dan terpercaya. Standar-standar mutu SMA/MA tersebut dalam konteks akreditasi sekolah/madrasah dapat disebut sebagai standar-standar akreditasi. Dalam penelitian ini, istilah profil mutu SMA/MA dapat dilihat dari capaian 8 standar akreditasi yakni: (1) standar akreditasi tentang kompetensi lulusan, (2) standar akreditasi tentang penilaian, (3) standar akreditasi tentang proses pembelajaran, (4) standar akreditasi tentang isi kurikulum, (5) standar akreditasi tentang pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar akreditasi tentang pengelolaan, dan standar akreditasi tentang pembiayaan. Konsep profil mutu SMA/MA dari hasil penilaian akreditasi menggunakan model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan seperti terlihat pada Gambar 7 berikut.



Gambar 7. Profil Mutu SMA/MA Hasil Penilaian Akreditasi SMA/MA

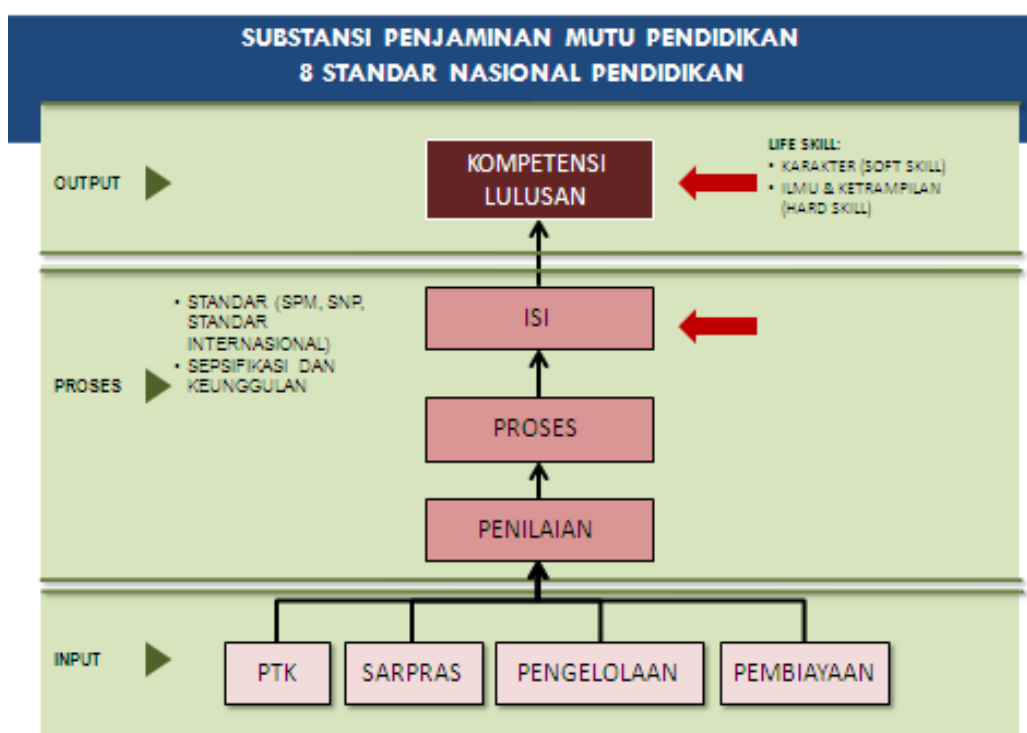
Komponen penilaian mutu SMA/MA dalam standar akreditasi SMA/MA tetap menggunakan acuan 8 SNP, dengan penyesuaian urutan komponen penilaian dan disesuaikan dengan regulasi terbaru. Hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan: (1) adanya perubahan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 dan telah disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 32, dan (2) adanya perubahan regulasi terkait 4 SNP yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Hubungan antar standar-standar nasional pendidikan seperti pada Gambar 8 berikut.



Gambar 8. Bagan Hubungan Antar Standar-Standar dalam SNP

Sumber: Bahan Paparan Kepala Badan PSDMPKPMP Kemdikbud, 2013

Substansi penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang mengacu pada 8 SNP meliputi: input, proses, dan output. Input pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Proses pendidikan mencakup isi kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian. Output pendidikan adalah kompetensi lulusan. Gambaran substansi penjaminan mutu seperti disajikan pada Gambar 9 berikut.



Gambar 9. Substansi Penjaminan Mutu Berdasarkan 8 SNP

Sumber: Bahan Paparan Kepala Badan PSDMPKPMP Kemdikbud (2013)

Selanjutnya regulasi yang digunakan dalam pengembangan model akreditasi SMA/MA terutama terkait dengan pengembangan instrumentasi untuk penilaian mutu SMA/MA seperti terlihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Komponen Akreditasi dan Acuan Regulasinya

No.	Komponen Akreditasi	Acuan Regulasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi
5	Standar Akreditasi 5. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor; Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan Permendiknas No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009

Penilaian mutu SMA/MA dilakukan menggunakan instrumen akreditasi SMA/MA yang disusun berdasarkan indikator-indikator kunci yang dijabarkan dari 8 standar akreditasi yang mengacu pada 8 SNP.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel?
2. Bagaimana validitas isi dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan?
3. Bagaimana validitas prosedur akreditasi yang digunakan dalam model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan?
4. Bagaimana keefektifan model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi gabungan model *research, development and diffusion* (model R, D & D) dari Hopkins dan Clark (Havelock, 1976) dan model *research and development* (model R & D) dari Borg & Gall (1983). Model R, D & D dari Hopkins dan Clark diadaptasi hanya sampai R & D (tanpa D=Diffussion), sedangkan model R & D dari Borg dan Gall diadaptasi tidak sampai pada tahap terakhir yakni tahap diseminasi dan implementasi.

Model R & D (adaptasi) dari Hopkins dan Clark (Havelock, 1976: 10-40) terdiri dari dua tahap, yaitu (1) tahap penelitian (*research*) dan (2) tahap pengembangan (*development*). Pada tahap penelitian meliputi tiga kegiatan, yaitu: (a) kajian penelitian, (b) studi tentang permasalahan, dan (c) pengumpulan data dan perencanaan operasional penelitian. Pada tahap pengembangan terdiri dari empat kegiatan, yaitu: (a) menemukan solusi permasalahan, (b) merencanakan paket program, (c) melakukan uji coba, dan (d) melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba paket program.

Model R & D (adaptasi) dari Borg & Gall (1983: 775-776) ada sembilan tahap, yaitu: (1) studi pendahuluan dan pengumpulan informasi (*research and information collecting*), (2) perencanaan (*planning*), (3) mengembangkan desain

produk awal (*develop preliminary form of product*), (4) ujicoba awal atau ujicoba terbatas (*preliminary field test*), (5) revisi untuk mengembangkan produk utama (*main product revision*), (6), ujicoba lapangan atau ujicoba skala luas (*main field test*), (7) revisi untuk menyusun produk operasional (*operational product revision*), (8) uji Keefektifan produk (*operational field test*), dan (9) revisi untuk menyusun produk final (*final product revision*).

Model R & D modifikasi hasil gabungan model R & D (adaptasi) dari Hopkins dan Clark dan model R & D (adaptasi) dari Borg dan Gall dirumuskan dalam Tabel 11 berikut.

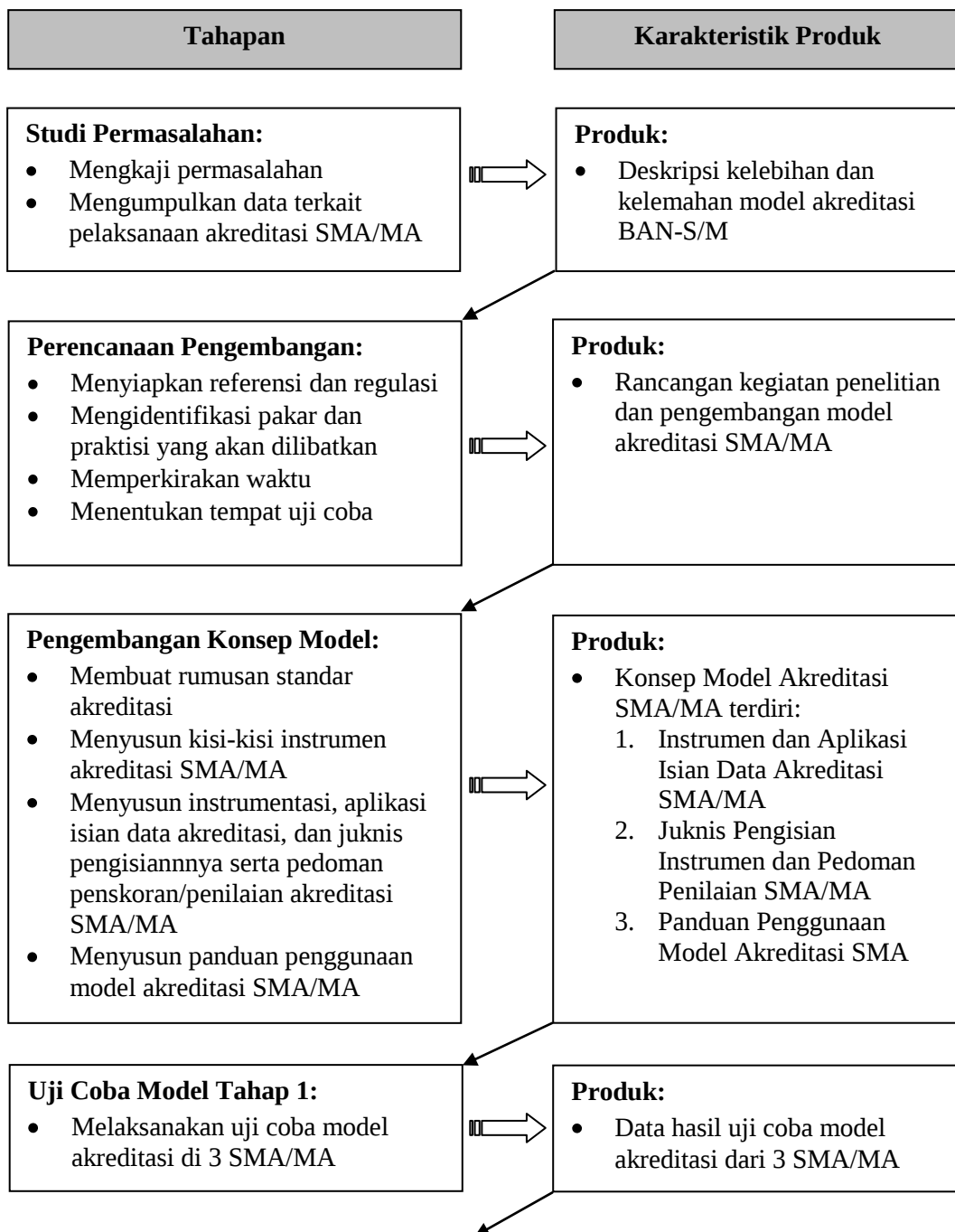
Tabel 11. Model Research & Development (Modifikasi)

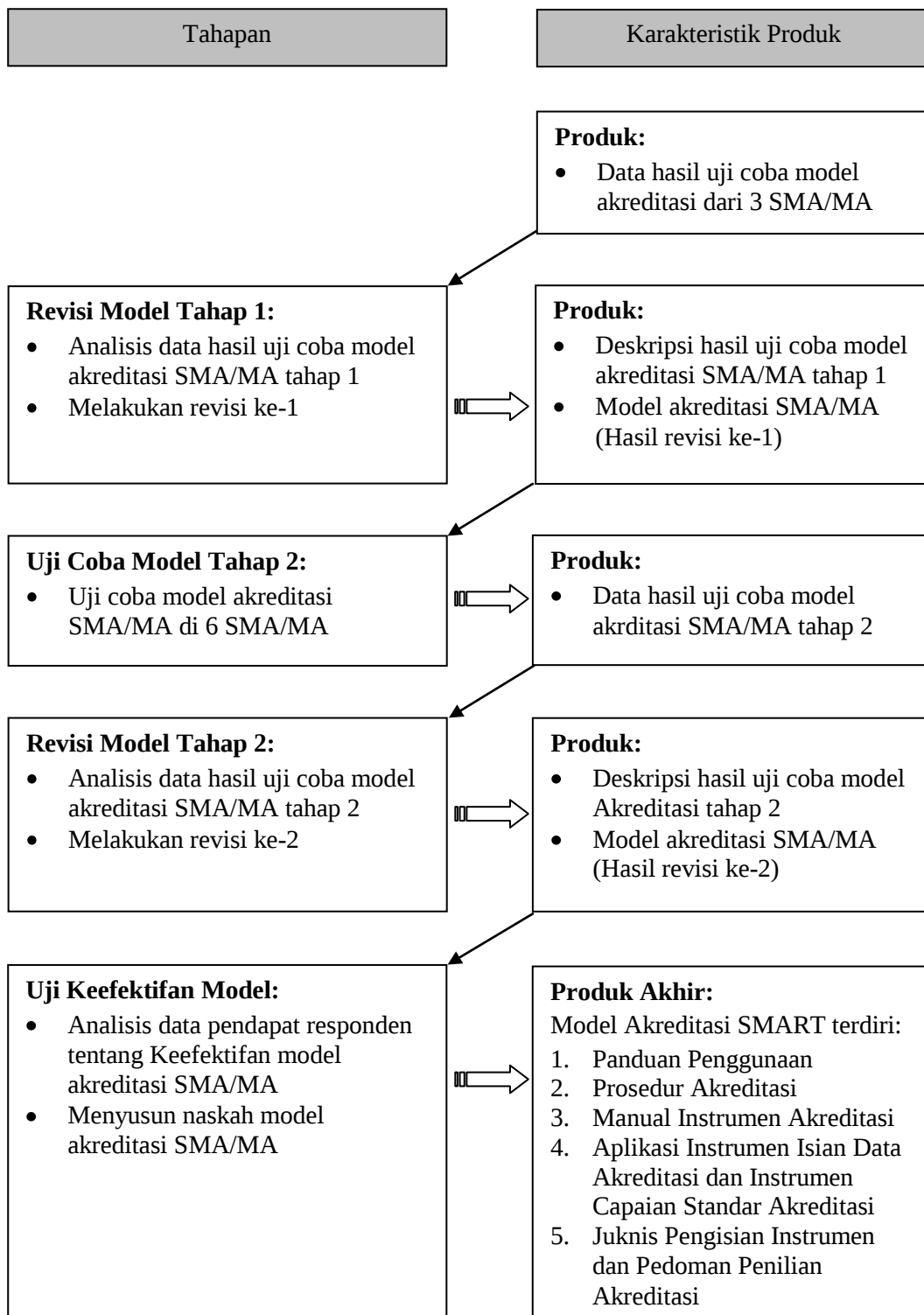
Tahap	R & D (Adaptasi) Hopkins dan Clark	R & D (Adaptasi) Borg dan Gall	R & D (Modifikasi Gabungan)
R	1. Kajian penelitian 2. Studi permasalahan 3. Pengumpulan data dan perencanaan	1. Studi pendahuluan dan pengumpulan informasi 2. Perencanaan	1. Studi permasalahan dan pengumpulan data. 2. Perencanaan Pengembangan
D	1. Menemukan solusi permasalahan 2. Merencanakan paket program 3. Melakukan uji coba 4. Evaluasi	3. Mengembangkan desain produk awal 4. Uji coba terbatas 5. Revisi & Penyusunan desain produk utama 6. Uji coba skala luas 7. Revisi & Penyusunan produk produk operasional 8. Uji Keefektifan produk 9. Revisi & Penyusunan produk akhir	3. Pengembangan model 4. Uji coba tahap 1 dan Revisi tahap 1 5. Uji coba tahap 2 dan Revisi tahap 2 6. Uji Keefektifan model 7. Penyusunan produk hasil pengembangan

Keterangan: R = *Research* & D = *Development*.

B. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan model akreditasi SMA/MA dilakukan seperti terlihat pada bagan di bawah ini.





Gambar 10. Prosedur Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA

Penjelasan tahapan studi permasalahan, perencanaan pengembangan, dan pengembangan model dijelaskan sebagai berikut.

1. Studi Permasalahan

Studi permasalahan dilakukan terhadap pelaksanaan akreditasi di SMA/MA. Pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan akreditasi di SMA/MA dilakukan dengan teknik wawancara dan angket. Sumber informasi adalah Anggota BAP-S/M Provinsi, Asesor Akreditasi, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akreditasi di SMA/MA, selanjutnya dilakukan telaah terhadap sistem atau model akreditasi BAN-S/M untuk jenjang SMA/MA. Telaah dilakukan dengan cara: (1) mengidentisikasi substansi isi dalam pedoman pelaksanaan akreditasi, (2) mencermati kesesuaian antara substansi isi setiap butir pernyataan untuk setiap komponen penilaian dalam model akreditasi BAN-S/M dengan substansi kriteria mutu pendidikan yang tertuang dalam regulasi yang terkait standar nasional pendidikan, dan (3) mengidentifikasi keterkaitan permasalahan dengan substansi ketentuan dalam pedoman akreditasi BAN-S/M dan perangkat akreditasi yang digunakan.

2. Perencanaan Pengembangan

Berdasarkan hasil studi permasalahan dan pengumpulan data awal terkait implementasi model akreditasi BAN-S/M, peneliti melakukan perencanaan pengembangan model akreditasi SMA/MA yaitu: (a) menyiapkan bahan-bahan

referensi dan regulasi sebagai bahan rujukan untuk menyusun desain konsep model akreditasi SMA/MA, (b) menentukan pakar dan praktisi yang dilibatkan dalam pengembangan model akreditasi SMA/MA, (c) memperkirakan lamanya waktu untuk kegiatan pengembangan model akreditasi SMA/MA, dan (d) menentukan SMA/MA yang dituju untuk uji coba model akreditasi SMA/MA.

3. Pengembangan Produk Model Akreditasi

Pengembangan produk model akreditasi yang dimaksud dalam penelitian adalah sebuah konsep Model Akreditasi SMA/MA yang dalam penelitian ini disebut Model Akreditasi SMA/MA. Kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan Model Akreditasi SMA/MA dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut: (a) menentukan komponen-komponen standar akreditasi di SMA/MA, (b) membuat rumusan standar-standar akreditasi SMA/MA, (c) menyusun model instrumen akreditasi SMA/MA, dan (d) menyusun pedoman penilaian akreditasi SMA/MA.

Komponen-komponen penilaian sebagai standar akreditasi mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (8 SNP), yakni: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Penilaian, (3) Standar Proses, (4) Standar Isi, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan. Dari 8 SNP tersebut, 4 SNP yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Proses, dan Standar Isi menggunakan acuan regulasi terbaru, sedangkan 4 SNP yang lain yakni Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar

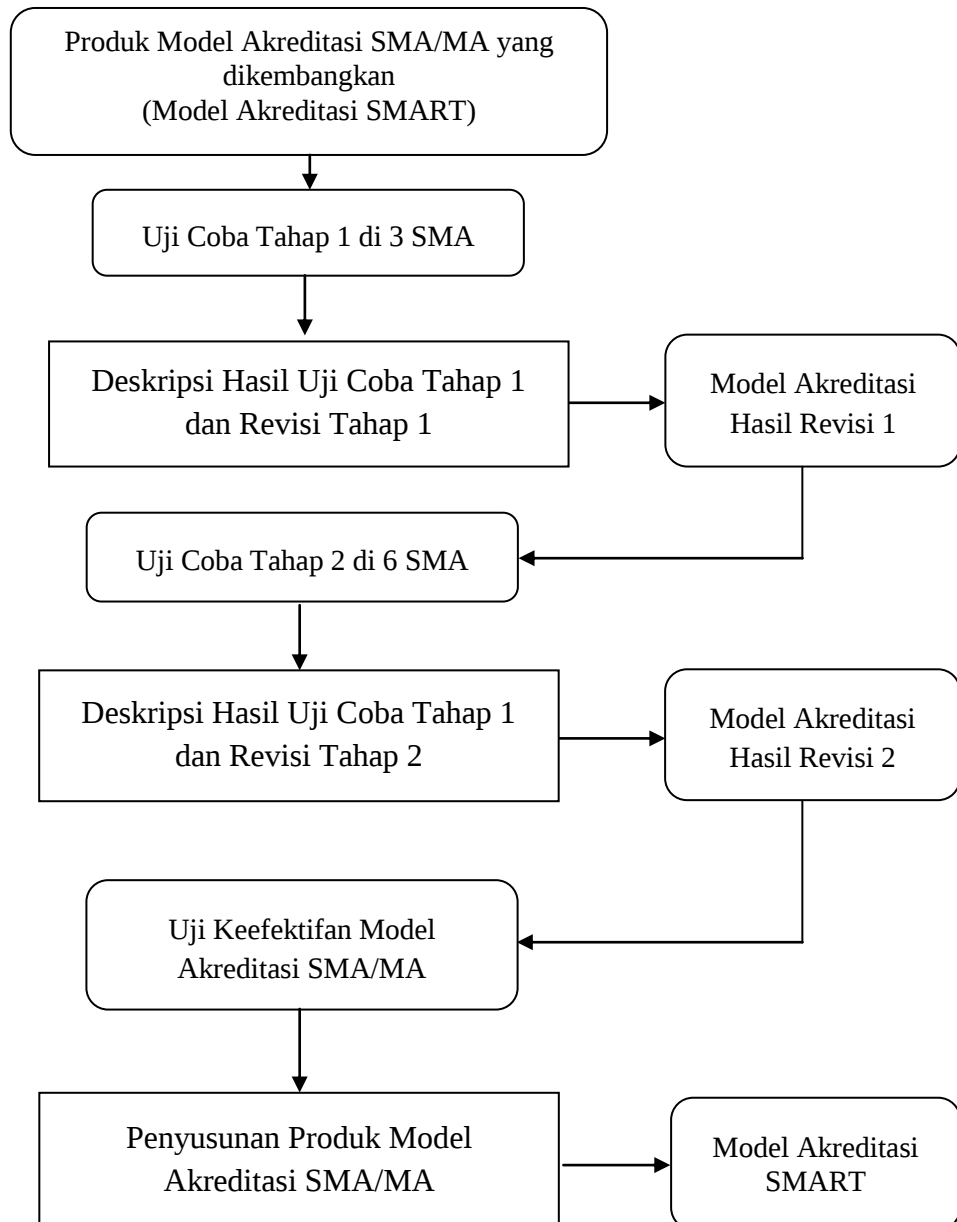
Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan masih mengacu pada regulasi lama. Pengembangan komponen-komponen standar akreditasi dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tahap 1. Peserta FGD tahap 1 adalah Anggota BAP-S/M Provinsi Bengkulu.

Rumusan standar-standar akreditasi SMA/MA berupa indikator kunci dan indikator faktual disertai dengan teknik penilaian dan bukti fisik yang harus dipenuhi. Pengembangan rumusan standar-standar akreditasi SMA/MA dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tahap 2, penilaian oleh pakar, dan penilaian oleh asesor akreditasi. Peserta FGD tahap 2 terdiri dari unsur Promotor, Dosen Pascasarjana Prodi PEP, dan Widyaiswara LPMP. Penilaian oleh pakar terdiri dari pakar evaluasi pendidikan dari Prodi PEP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, pakar akreditasi sekolah/madrasah dari BAN-S/M, dan pakar manajemen pendidikan dari Universitas Bengkulu. Penilaian oleh asesor akreditasi dilakukan oleh asesor akreditasi SMA/MA dari BAP-S/M Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil FGD tahap 1, hasil FGD tahap 2, dan validasi oleh pakar digunakan sebagai acuan dalam pengembangan model instrumentasi akreditasi. Validasi model instrumentasi akreditasi SMA/MA dilakukan oleh praktisi yakni dari unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di SMA/MA yang memahami proses akreditasi.

C. Uji Coba Produk

Desain uji coba produk digambarkan dalam bentuk bagan di bawah ini.



Gambar 11. Alur Uji Coba Model Akreditasi SMA/MA

Penjelasan desain uji coba produk mulai dari uji coba tahap 1, uji coba tahap 2, evaluasi Keefektifan model akreditasi SMA/MA hingga penyusunan model akreditasi SMA/MA final sebagai berikut.

1. Desain Uji Coba

a. Uji Coba Tahap 1

Uji coba model konseptual yakni konsep model akreditasi SMA/MA tahap 1 dilakukan di 3 SMA. Daftar SMA yang dilibatkan sebagai sasaran uji coba Model Akreditasi SMART seperti terlihat pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. SMA Sasaran Uji Coba Model Akreditasi SMA/MA Tahap 1

No.	Nama Sekolah	Peringkat Akreditasi BAN-S/M
1	SMA Negeri 5 Kota Bengkulu	A
2	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu	A
3	SMA Negeri 10 Kota Bengkulu	B

Sumber: Data Hasil Akreditasi BAP-S/M Provinsi Bengkulu

Model Akreditasi SMART terdiri dari 3 bagian utama, yaitu: (1) rumusan standar-standar akreditasi, (2) instrumentasi akreditasi, dan (3) prosedur akreditasi. *Pertama*, model standar akreditasi SMA/MA berisi indikator kunci, indikator operasional, teknik penilaian, dan bukti yang harus dipenuhi. *Kedua*, model instrumen akreditasi SMA/MA terdiri: (a) instrumen aplikasi isian data akreditasi, (b) instrumen isian capaian standar akreditasi, (c) petunjuk teknis pengisian instrumen aplikasi isian data akreditasi; dan (d) penskoran dan penilaian akreditasi. *Ketiga*, model prosedur akreditasi.

Setiap SMA sasaran uji coba diberikan seperangkat naskah Model Akreditasi SMART berupa: 1 (satu) set model standar akreditasi, 1 (satu) set model instrumen akreditasi, 1 (satu) set model prosedur akreditasi, dan 8 (delapan) set kuesioner penilaian responden terhadap Model Akreditasi SMART. Rincian distribusi konsep model akreditasi SMA/MA untuk setiap SMA/MA sasaran uji coba seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Distribusi Konsep Model Akreditasi SMA/MA

Sasaran Uji Coba	Standar Akreditasi	Instrumentasi Akreditasi	Prosedur Akreditasi	Kuesioner
SMAN 5 Bengkulu	1 Set	1 Set	1 Set	8 Set
SMAN 7 Bengkulu	1 Set	1 Set	1 Set	8 Set
SMAN 10 Bengkulu	1 Set	1 Set	1 Set	8 Set

b. Uji Coba Tahap 2

Uji coba model model akreditasi SMA/MA tahap 2 dilakukan di 6 SMA. Daftar SMA yang dilibatkan sebagai sasaran uji coba Model Akreditasi Sekolah MATEA seperti terlihat pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. SMA Sasaran Uji Coba Model Akreditasi SMA/MA Tahap 2

No.	Nama Sekolah	Peringkat Akreditasi BAN-S/M
1	SMA Negeri 5 Kota Bengkulu	A
2	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu	A
3	SMA Negeri 10 Kota Bengkulu	B
4	SMA Negeri 3 Kota Bengkulu	A
5	SMA Negeri 9 Kota Yogyakarta	A
6	SMA Negeri 1 Kabawetan	B

Sumber: Data Hasil Akreditasi BAP-S/M Bengkulu & BAP-S/M D.I. Yogyakarta.

Model Akreditasi SMART hasil revisi ke-1 pada dasarnya sama dengan produk Model Akreditasi SMART yakni dari 3 bagian utama, yaitu: (1) rumusan standar-standar akreditasi, (2) instrumentasi akreditasi, dan (3) prosedur akreditasi. *Pertama*, model standar akreditasi SMA/MA berisi indikator kunci, indikator operasional, teknik penilaian, dan bukti yang harus dipenuhi. *Kedua*, model instrumen akreditasi SMA/MA terdiri: (a) instrumen aplikasi isian data akreditasi, (b) instrumen isian capaian standar akreditasi, (c) petunjuk teknis pengisian instrumen aplikasi isian data akreditasi; dan (d) penskoran dan penilaian akreditasi. *Ketiga*, model prosedur akreditasi.

Model akreditasi SMA/MA hasil revisi ke-1 sudah lebih baik dibanding konsep model akreditasi SMA/MA karena sudah direvisi berdasarkan saran/masukan dari responden pada saat uji coba tahap 1.

Sama seperti saat uji coba tahap 1, setiap SMA sasaran uji coba diberikan seperangkat konsep model akreditasi SMA/MA berupa: 1 (satu) set model standar akreditasi, 1 (satu) set model instrumen akreditasi, 1 (satu) set model prosedur akreditasi, dan 8 (delapan) set kuesioner penilaian responden terhadap Model Akreditasi SMART.

Rincian distribusi konsep model akreditasi SMA/MA untuk setiap SMA/MA sasaran uji coba seperti terlihat pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Distribusi Model Akreditasi SMA/MA Hasil Revisi Ke-1

Sasaran Uji Coba	Standar Akreditasi	Instrumentasi Akreditasi	Prosedur Akreditasi	Kuesioner
SMAN 5 Bengkulu	1 Set	1 Set	1 Set	8 Set
SMAN 7 Bengkulu	1 Set	1 Set	1 Set	8 Set
SMAN 10 Bengkulu	1 Set	1 Set	1 Set	8 Set
SMAN 3 Bengkulu	1 Set	1 Set	1 Set	8 Set
SMAN 9 Yogyakarta	1 Set	1 Set	1 Set	8 Set
SMAN 1 Kabawetan	1 Set	1 Set	1 Set	8 Set

2. Subjek Coba

Subjek coba yang dilibatkan dalam uji coba Model Akreditasi SMART adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dengan persyaratan yang telah memahami akreditasi sekolah/madrasah atau sekurang-kurangnya pernah dilibatkan dalam pelaksanaan akreditasi di sekolahnya. Sebaran subjek coba seperti terlihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Subjek Coba pada Uji Coba Model Akreditasi SMA/MA

Uji Coba	Banyaknya SMA	Subjek Coba	Banyaknya Subjek Coba	Jumlah Subjek Coba
Tahap 1	3 SMA	Kepala Sekolah	3 Orang	24 Orang
		Wakil Kepala Sekolah	12 Orang	
		Kepala Tenaga Administrasi atau Staf	3 Orang	
		Kepala Perpustakaan	3 Orang	
		Kepala Laboratorium	3 Orang	
Tahap 2	6 SMA	Kepala Sekolah	6 Orang	48 Orang
		Wakil Kepala Sekolah	24 Orang	
		Kepala Tenaga Administrasi atau Staf	6 Orang	
		Kepala Perpustakaan	6 Orang	
		Kepala Laboratorium	6 Orang	

3. Teknik dan Instrumen Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara FGD, wawancara, verifikasi dan validasi (verval) isian data, cek dokumen, observasi, dan angket. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dibedakan 2 macam yaitu instrumen yang digunakan pada saat pengembangan model dan instrumen yang digunakan pada saat uji coba model. Jenis instrumen pengumpulan data seperti pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Instrumen Pengumpulan Data

Jenis Instrumen	Bentuk Instrumen	Keterangan
Instrumen Pengumpulan Data pada Tahap Pengembangan	Lembar telaah/komentar/ pendapat tentang konsep pengembangan model akreditasi SMA/MA.	Instrumen diberikan kepada peserta FGD tahap 1 guna diperoleh masukan/pendapat atau <i>judgment</i> mengenai konsep/gagasan tentang konsep pengembangan model SMA/MA.
	Lembar Penilaian tentang tingkat kepentingan indikator kunci	Instrumen ini diberikan kepada peserta FGD tahap 2 guna diperoleh data hasil penilaian mengenai indikator kunci, indikator faktual, teknik penilaian, dan bukti yang harus dipenuhi.
	Lembar Validasi/ Penilaian Pakar	Instrumen diberikan kepada pakar guna diperoleh <i>judgment</i> mengenai substansi isi butir-butir indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti penilaian.
	Lembar Penilaian tentang tingkat kepentingan indikator kunci	Instrumen diberikan kepada asesor akreditasi guna mendapatkan penilaian tingkat kepentingan butir-butir indikator.
Instrumen Pengumpulan Data pada Tahap Uji Coba	Instrumen Akreditasi SMA/MA (Hasil Pengembangan)	Diberikan kepada pihak SMA untuk diisi/digunakan.
	Pedoman Wawancara	Digunakan untuk meminta informasi dan klarifikasi terkait dengan isian data pada model instrumen akreditasi.

Jenis Instrumen	Bentuk Instrumen	Keterangan
	Daftar Cek Dokumen	Digunakan untuk mengecek kesesuaian isian data pada model instrumen akreditasi dengan bukti berbentuk dokumen.
	Lembar Observasi	Digunakan untuk mengecek kesesuaian isian data pada model instrumen akreditasi dengan bukti berupa sarana dan prasarana fisik.
	Angket	Digunakan untuk memperoleh data hasil penilaian praktisi tentang keefektifan model.

4. Teknik Analisis Data

a. Data yang Diperoleh pada Tahap Pengembangan

Teknik analisis data yang diperoleh pada tahap pengembangan model seperti terlihat pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Teknik Analisis Data pada Tahap Pengembangan

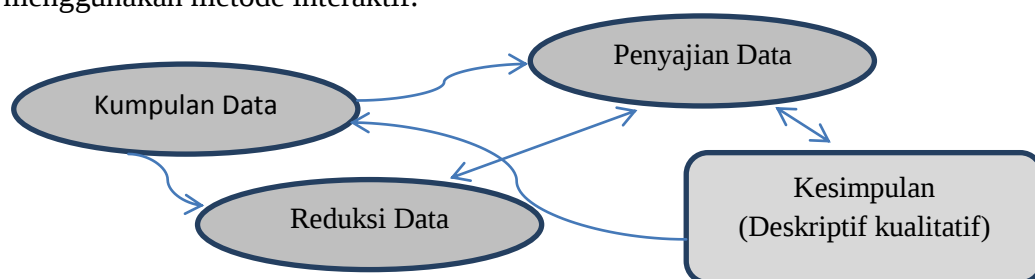
Sumber Data	Jenis Data	Teknik Analisis Data
Tahap Pengembangan: • FGD Tahap 1 • FGD Tahap 2 • Validasi Pakar • Penilaian Asesor	Kuantitatif	• Deskriptif Persentase • Koefisien Validitas Isi Aiken's V • Analisis ICC dengan SPSS
	Kualitatif	• Deskriptif

Validasi substansi isi rumusan indikator kunci, ketepatan teknik penilaian yang digunakan, dan kesesuaian bukti fisik penilaian dilakukan dengan cara meminta pendapat pakar (*expert judgment*). Analisis dilakukan dengan menghitung koefisien validitas isi dengan rumus *Aiken's V*. Menurut Aiken (1985) sebagaimana dikutip Azwar (2012: 113) dan Hendryadi (2014: 3), formula untuk menghitung koefisien validitas isi yang didasarkan pada hasil penilaian

dari panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu aitem dari segi sejauh mana aitem tersebut mewakili konstruk yang diukur adalah $V = \sum s / [n(c-1)]$. Dimana $S = r - lo$; Lo = angka penilaian validitas yang terendah (misalnya 1); C = angka penilaian validitas tertinggi (misalnya 5); dan R = angka yang diberikan oleh penilai (*rater*)

Selain itu, uji validitas isi dan reliabilitas juga dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Menurut Badrun Kartowagiran (2014: 13), penilaian yang dilakukan oleh beberapa rater (penilai) dimana antar rater setara kepakarannya dan independen satu sama lain, maka validitas isi dapat dilihat dari hasil analisis Anova dari ketiga rater, sedangkan reliabilitas hasil penilaian dapat dilihat dari konsistensi diantara para rater (*interrater reliability*) dalam memberikan penilaian dari hasil *interclass correlation coefficient* (ICC).

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Menurut Eddy Sutadji (2009:153), dengan analisis deskriptif data dapat disajikan secara sederhana sehingga gambaran hasil penelitian mudah dipahami. Data kualitatif berupa komentar/saran dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif menggunakan metode interaktif.



Gambar 12. Model Analisis Interaktif

b. Data yang Diperoleh pada Tahap Uji Coba

Teknik analisis data yang diperoleh pada tahap uji coba model akreditasi SMA/MA seperti terlihat pada Tabel 19 berikut ini

Tabel 19. Teknik Analisis Data pada Tahap Uji Coba

Sumber Data	Jenis Data	Teknik Analisis Data
• Hasil verifikasi dan validasi isian data; • Hasil Wawancara; • Hasil Observasi; dan • Hasil isian Angket	Kuantitatif	• Deskriptif persentase • Menghitung validitas dan reliabilitas instrumen • Menghitung Keefektifan model
	Kualitatif	• Deskriptif

Seperti analisis data pada tahap pengembangan model, analisis data kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif menggunakan metode interaktif model Milles dan Huberman seperti diikuti Eddy Sutadji (2009:159).

Untuk data kuantitatif yang diperoleh dari isian angket dilakukan analisis untuk menghitung Keefektifan model. Data kuantitatif yang diperoleh dicari rerata skor kemudian dikonversikan ke data kualitatif skala 5 kemudian dideskripsikan. Setelah itu disimpulkan tingkat efektifitas model berdasarkan kriteria penilaian. Konversi data kuantitatif ke data kualitatif mengacu pendapat Hogg dan Tanis (2001:656) dengan rumus: $\frac{3\sigma - (-3\sigma)}{5} = \frac{6\sigma}{5} = 1,2\sigma$ dimana σ = simpangan baku dan 5 = kategori. Selanjutnya kriteria penilaian Keefektifan model menggunakan kategori pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Kriteria Penilaian Keefektifan Model

Rerata Skor	Kategori	Kesimpulan
$X \geq 3,4$	Sangat baik	Model dapat dicontoh/diadopsi
$2,8 \leq X < 3,4$	Baik	Model dapat diterima/digunakan
$2,2 \leq X < 2,8$	Cukup baik	Model dapat diterima/digunakan dengan sedikit revisi
$1,6 \leq X < 2,2$	Kurang baik	Model dapat diterima/digunakan setelah direvisi
$< 1,6$	Sangat kurang baik	Model belum dapat diterima/digunakan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Hasil Pengembangan Produk Awal

Model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan mengacu atau merujuk pada model akreditasi SMA/MA yang sudah ada yakni model akreditasi milik BAN-S/M. Sebelum dilakukan pengembangan terlebih dulu dilakukan studi permasalahan dan pengumpulan data terkait pelaksanaan akreditasi di SMA/MA. Data keterlaksanaan akreditasi diambil dari 4 SMA/MA di Kota Yogyakarta yakni SMA Negeri 2 Yogyakarta, SMA Negeri 9 Yogyakarta, SMA Negeri 11 Yogyakarta dengan metode survei menggunakan angket dengan melibatkan 38 respon. Data hasil survei dianalisis guna mendapatkan informasi tentang kelebihan dan kelemahan implementasi model akreditasi BAN-S/M untuk jenjang SMA/MA. Deskripsi rangkuman kelebihan dan kelemahan model akreditasi BAN-S/M diuraikan sebagai berikut.

Tujuan, manfaat, dan fungsi akreditasi telah dirumuskan secara jelas dalam pedoman pelaksanaan akreditasi, namun belum sepenuhnya dipahami oleh pihak sekolah/madrasah yang diakreditasi. Berdasarkan panduan, akreditasi dilaksanakan dengan 5 (lima) prinsip yaitu: objektif, komprehensif, adil, transparan, dan akuntabel dalam pedoman pelaksanaan akreditasi, namun faktanya prinsip-prinsip tersebut belum dapat terlaksana dengan baik. Salah satu indikatornya adalah masih ada pihak yang meragukan objektivitas dan

akuntabilitas proses dan hasil penilaian akreditasi. Selain itu, diketahui bahwa komponen akreditasi dinilai sudah komprehensif terdiri dari 8 komponen mengacu pada standar nasional pendidikan, namun instrumen akreditasi masih menggunakan instrumen lama dan belum dikembangkan instrumen baru yang mengacu pada empat standar nasional pendidikan yang baru yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

Instrumen akreditasi telah disusun secara representatif menggunakan kriteria yang jelas mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, namun bukti-bukti pemenuhan standar akreditasi yang diminta dalam butir-butir dalam instrumen akreditasi lebih dominan berupa bukti fisik yang bersifat administratif. Dalam pedoman pelaksanaan akreditasi telah diatur bahwa sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi harus mengajukan usul/permintaan untuk diakreditasi, tetapi kenyataannya tidak semua sekolah/madrasah yang mengajukan belum tentu dapat diakreditasi karena penentuan sekolah/madrasah yang akan diakreditasi berdasarkan kuota. Telah ada rintisan sebagian prosedur akreditasi (untuk SMA/MA) akan dilaksanakan secara *online*, tetapi sampai saat ini belum dapat terealisasi. Prinsip-prinsip visitasi dalam rangka penilaian kelayakan sekolah/madrasah melalui akreditasi dilakukan oleh asesor, namun masih ada pihak yang meragukan kinerja asesor.

Selanjutnya, studi pendahuluan juga dilakukan untuk mendapat masukan tentang aspek model yang perlu dikembangkan. Data diambil dengan teknik wawancara dengan 4 orang asesor akreditasi dari BAP-S/M Provinsi Bengkulu

dan 8 orang kepala sekolah/guru dengan kriteria yang bersangkutan pernah terlibat dalam proses penyiapan akreditasi di sekolahnya dari SMAN 3 Bengkulu, SMAN 5 Bengkulu, SMAN 7 Bengkulu, dan SMAN 10 Bengkulu. Hasil wawancara diperoleh diperoleh informasi tentang aspek-aspek dalam model akreditasi yang masih perlu dikembangkan sebagaimana diuraikan berikut ini.

Ditinjau dari aspek atau komponen penilaian, sebagian besar responden atau sebanyak 11 responden (92 %) memberikan persetujuan bila komponen penilaian akreditasi atau komponen penilaian mutu sekolah berturut-turut sebagai berikut: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar penilaian, (3) standar proses, (4) standar isi, (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) standar pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan. Komentar/saran yang muncul adalah sebaiknya komponen penilaian akreditasi perlu ditambah komponen lain seperti: pengembangan budaya mutu sekolah, kemampuan daya saing, dan pendidikan karakter.

Ditinjau dari proses pengumpulan data, sebanyak 8 responden (66 %) memberikan pendapat bahwa data yang akurat dan objektif tergantung dari kinerja asesor dan 4 responden (34 %) berpendapat bahwa data yang akurat dan objektif ditentukan oleh instrumen yang baik. Beberapa komentar/saran yang muncul: (1) lamanya visitasi sebaiknya dikategorikan berdasarkan hasil analisis kelayakan, untuk sekolah yang kemungkinan akan memperoleh nilai akreditasi A lama visitasi 3-4 hari, yang kemungkinan akan memperoleh nilai akreditasi B lama visitasi 2-3 hari, dan yang kemungkinan hanya akan memperoleh nilai akreditasi C

lama visitasi cukup 2 hari; (2) asesori perlu tegas dalam mengklarifikasi data yang tidak sesuai dengan fakta di sekolah, (3) asesori seharusnya menolak mendapatkan sesuatu yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian seperti kamar hotel/ penginapan dibayari pihak sekolah, diberikan bingkisan/cenderamata dari pihak sekolah, dan diberi tambahan transportasi dari pihak sekolah, dan (4) asesori seharusnya memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dan mentaati norma dan tata krama yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

Ditinjau dari aspek instrumen akreditasi, semua responden (100%) berpendapat perlunya pengembangan instrumen akreditasi yang disesuaikan dengan regulasi terkait standar nasional pendidikan. Butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi untuk komponen standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru. Komentar/saran yang muncul: (1) instrumen perlu dibuat yang lebih sederhana, (2) perlu ada aplikasi isian data, (3) mendesain instrumen supaya pihak sekolah tidak asal-asalan dalam memilih opsi jawaban A atau B tanpa memiliki bukti yang relevan, dan (4) instrumen akreditasi yang sudah diisi sebaiknya dikirimkan secara *online*.

Ditinjau dari aspek prosedur akreditasi, sebanyak 10 responden (83%) menyatakan setuju bila sebagai prosedur akreditasi dilakukan secara online, namun ada 2 responden (17%) menyatakan kurang setuju dengan argumentasi belum tentu semua sekolah/madrasah dapat mengakses internet. Komentar/saran yang muncul: (1) bagaimana prosedur akreditasi dapat dilaksanakan dengan

melibatkan partisipasi pembiayaan dari dana APBD sehingga sekolah yang akan diakreditasi tidak semata-mata berdasarkan atas kuota, (2) pengolahan data dan analisis kelayakan sekolah untuk diakreditasi sebaiknya dilakukan secara sungguh-sungguh agar tidak terjadi kasus adanya perbedaan yang menyolok antara hasil penilaian asesor dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah, (3) prosedur pengisian data dan informasi pendukung sebaiknya dilakukan lebih dulu baru memilih opsi jawaban A, B, C, D, atau E; (4) bagaimana prosedur akreditasi dapat dilaksanakan secara profesional dan dapat hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta mampu meminimalkan kemungkinan diperoleh data yang kurang akurat, dan (4) ada penjadwalan yang jelas mulai dari proses pendaftaran untuk diakreditasi, pelaksanaan visitasi, hingga perolehan sertifikat akreditasi.

Berdasar hasil survei dan wawancara sebagaimana dipaparkan di atas, kemudian disusun konsep model akreditasi SMA/MA yang memenuhi kriteria model akreditasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pengembangan model akreditasi dilakukan pada tiga aspek yaitu: (1) aspek standar penilaian akreditasi, (2) aspek instrumentasi akreditasi, dan (3) aspek prosedur akreditasi. Tahapan dan hasil pengembangan dipaparkan sebagai berikut.

Pengembangan komponen standar akreditasi diawali dengan menyusun konsep aspek-aspek pengembangan model akreditasi SMA/MA. Konsep aspek-aspek pengembangan model akreditasi SMA/MA selanjutnya didiskusikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tahap 1. FGD tahap 1 dilaksanakan

pada tanggal 10 April 2013 bertempat di Ruang Rapat Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Peserta FGD adalah anggota BAP-S/M Provinsi Bengkulu yang terdiri dari unsur dosen, unsur pejabat pada dinas pendidikan provinsi Bengkulu, unsur pejabat pada kantor wilayah kemenag provinsi Bengkulu, unsur pengawas sekolah, unsur kepala sekolah, dan unsur LPMP Bengkulu.

Berdasarkan pendapat/saran/masukan dari peserta FGD tahap 1 terhadap aspek-aspek pengembangan model akreditasi SMA/MA diperoleh kesepakatan atau konsensus tentang aspek-aspek pengembangan model akreditasi SMA/MA. Ada 3 (tiga) aspek pengembangan model akreditasi SMA/MA, yaitu: (1) komponen standar akreditasi, (2) instrumentasi akreditasi, dan (3) prosedur akreditasi. Ketiga aspek pengembangan model akreditasi seperti terlihat pada Tabel 21 halaman berikut ini.

Tabel 21. Aspek-aspek Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA

Aspek	Kondisi yang Ada	Identifikasi Masalah/Kelemahan	Solusi Perbaikan/Pengembangan
Standar Akreditasi	Standar Akreditasi sudah bersifat komprehensif terdiri dari 8 komponen akreditasi.	Empat dari lima komponen akreditasi (sebagai Standar Akreditasi) tidak lagi relevan karena ada 4 SNP dari 8 SNP yang berubah.	Mengembangkan standar akreditasi sebagai acuan penilaian kelayakan SMA/MA dengan menggunakan acuan 8 SNP (4 SNP baru dan 4 SNP lama).
		Nama-nama 8 komponen dalam instrumen akreditasi sama dengan nama-nama 8 SNP.	Nama-nama komponen standar akreditasi dapat dirumuskan secara generik, sehingga fleksibel terhadap perubahan regulasi.

Aspek	Kondisi yang Ada	Identifikasi Masalah/ Kelemahan	Solusi Perbaikan/ Pengembangan
Instrumen Akreditasi	Instrumentasi akreditasi berupa perangkat akreditasi yang terdiri dari: a. Instrumen Akreditasi b. Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi c. Instrumen Pengumpul Data dan Informasi Pendukung d. Teknik Penskoran dan Peringkat Akreditasi e. Program Aplikasi Skoring	Bukti-bukti yang diminta dari setiap butir pernyataan dalam instrumen akreditasi lebih banyak berupa dokumen yang bersifat administratif.	Instrumen akreditasi perlu dikembangkan berdasarkan indikator-indikator kunci atau indikator kelayakan yang bersifat esensial yang diturunkan dari komponen standar akreditasi (standar kelayakan SMA/MA).
			Selain bukti-bukti berupa dokumen yang bersifat administratif, perlu bukti-bukti kinerja yang bersifat faktual.
		Meskipun sudah ada petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, namun masih sering terjadi kasus adanya perbedaan persepsi dalam penilaian.	Selain petunjuk teknis perlu dilengkapi dengan model aplikasi isian data yang bersifat kuantitatif sehingga lebih bersifat objektif dan dapat meminimalkan terjadinya perbedaan persepsi dalam penilaian.
		Instrumen pengumpul data dan informasi pendukung sebagai kelengkapan instrumen akreditasi masih ada SMA/MA yang menilai kurang praktis digunakan.	Instrumen pengumpul data dan informasi pendukung perlu diintegrasikan dengan bukti-bukti pemenuhan Standar Akreditasi untuk setiap butir pertanyaan dalam instrumen akreditasi.
		Program aplikasi skoring yang ada belum dapat membantu SMA/MA untuk mengetahui rekomendasi apa saja yang seharusnya dilakukan ketika memilih jawaban	Program aplikasi skoring perlu dilengkapi dengan tampilan informasi berupa rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak SMA/MA ketika memilih jawaban tertentu pada butir pertanyaan tertentu sehingga dapat

Aspek	Kondisi yang Ada	Identifikasi Masalah/ Kelemahan	Solusi Perbaikan/ Pengembangan
		tertentu pada butir pertanyaan tertentu.	digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan.
Prosedur Akreditasi	Prosedur akreditasi model BAN-S/M sebagai berikut: Penetapan kuota S/M → Usulan S/M untuk diakreditasi dari melalui UPA → Penentuan S/M yang akan diakreditasi → S/M mengisi instrumen akreditasi → BAP-S/M menilai kelayakan → Asesor visitasi → Penetapan Hasil.	Masih dijumpai kasus kesalahan BAP-S/M memutuskan tentang kelayakan sekolah/ madrasah yang akan divisitasi dikarenakan data yang diisikan pada instrumen akreditasi tidak sepenuhnya data yang benar.	Sebelum mengisi instrumen akreditasi pihak S/M mengisi lebih dahulu aplikasi isian data akreditasi. Selanjutnya file isian data akreditasi dan instrumen akreditasi yang sudah diisi keduanya harus diunggah (<i>di-upload</i>) disertai bukti-buktinya dalam bentuk file dokumen dan file foto.
			Perlu dibuat instrumentasi untuk keperluan akreditasi atau penilaian mutu SMA/MA yang dapat diterapkan secara mudah dan singkat namun data yang dihasilkan akurat dan objektif.

Hasil pengembangan model akreditasi SMA/MA secara lengkap dipaparkan berikut ini.

1. Hasil Pengembangan Komponen Standar Akreditasi

Setelah diperoleh kesepakatan tentang aspek-aspek pengembangan model akreditasi SMA/MA, melalui kegiatan FGD tahap 1 juga diperoleh kesepakatan tentang perubahan nama dan urutan nama komponen-komponen akreditasi. Nama komponen-komponen akreditasi tersebut dalam penelitian ini disebut dengan

komponen standar akreditasi. Adapun perubahan nama komponen akreditasi seperti terlihat pada Tabel 22 berikut ini.

Tabel 22. Perubahan Nama Komponen Akreditasi SMA/MA

Nama dan Urutan Komponen dalam Model Akreditasi BAN-S/M	Nama dan Urutan Komponen dalam Model Akreditasi Pengembangan
Standar Isi	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan
Standar Proses	Standar Akreditasi 2. Penilaian
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Standar Sarana dan Prasarana	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana
Standar Penilaian	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan
Standar Pembiayaan	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan

Kriteria penilaian kelayakan SM/MA dalam model akreditasi BAN-S/M menggunakan acuan 8 SNP. Adapun regulasi terkait 8 SNP yang digunakan sebagai acuan penilaian dalam model akreditasi BAN-S/M terlihat pada Tabel 23 berikut ini.

Tabel 23. Acuan Regulasi dalam Model Akreditasi BAN-S/M

Komponen Akreditasi	Acuan Regulasi
Standar Isi	Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Standar Proses	Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
Standar Kompetensi Lulusan	Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru; Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor; Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi; Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan; dan Permendiknas No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium.

Komponen Akreditasi	Acuan Regulasi
Standar Sarana dan Prasarana	Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan	Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan	Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan
Standar Penilaian	Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Kriteria penilaian kelayakan SM/MA dalam model akreditasi pengembangan menggunakan acuan 8 SNP Plus. Adapun regulasi terkait 8 SNP Plus yang digunakan sebagai acuan penilaian dalam model akreditasi pengembangan sebagaimana terlihat pada Tabel 24 berikut ini.

Tabel 24. Acuan Regulasi dalam Model Akreditasi Pengembangan

Komponen Akreditasi	Acuan Regulasi
Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Standar Akreditasi 2. Penilaian	Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi
	Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA
Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Permendiknas No. 13 Tahun 2006 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
	Permendiknas No. 16 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
	Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
	Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi
	Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan
	Permendiknas No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium
Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Standar Akreditasi 7.	Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar

Komponen Akreditasi	Acuan Regulasi
Pengelolaan	Pengelolaan Pendidikan
	Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009

Setelah nama komponen standar akreditasi ditentukan, dilakukan pengembangan isi dari komponen standar akreditasi berupa rumusan indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti fisik penilaian. Rumusan indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti fisik penilaian divalidasi lebih dulu sebelum digunakan sebagai acuan dalam pengembangan instrumen akreditasi.

Validasi dilakukan dengan cara meminta pendapat pakar (*expert judgment*) guna menilai substansi isi indikator kunci, ketepatan teknik penilaian yang digunakan, dan kesesuaian bukti fisik penilaian. Ketiga pakar diminta menilai dengan cara memberikan tanda cek (✓) pada kolom: angka 5 = sangat baik/sangat tepat/sangat sesuai; angka 4 = baik/tepat/sesuai; angka 3 = cukup baik/cukup tepat/cukup sesuai; angka 2 = kurang baik/kurang tepat/kurang sesuai; dan angka 1 = tidak baik/tidak tepat/tidak sesuai.

Data hasil penilaian pakar (*rater*) dilakukan analisis dengan teknik koefisien *Aiken's V*. Aiken (1985) seperti dikutip Hendryadi (2014: 3) merumuskan formula Aiken's V untuk menghitung koefisien validitas isi yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu aitem dari segi sejauh mana aitem tersebut mewakili

konstrak yang diukur. Formula yang diajukan oleh Aiken sebagaimana dikutip Azwar (2012: 113) sebagai berikut: $V = \sum s / [n(c-1)]$;

Keterangan: $s = r - lo$
 r = angka yang diberikan oleh penilai (*rater*)
 lo = angka penilaian validitas yang terendah (misalnya 1)
 n = banyaknya panel ahli/pakar
 c = angka penilaian validitas tertinggi (misalnya 5).

Analisis data hasil penilaian pakar tentang indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti fisik penilaian dilakukan dengan cara menghitung s ($r - lo$) untuk setiap r yang diberikan oleh penilai (r_1 , r_2 , dan r_3). Hasil perhitungan diperoleh data s_1 , s_2 , dan s_3 . Setelah itu menjumlahkan s dari masing-masing penilai, dimana $\sum s = s_1 + s_2 + s_3$. Selanjutnya menghitung indeks atau koefisien Aiken's V untuk setiap item dengan rumus di atas. Hasil analisis validasi item-item tentang indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti fisik penilaian sebagaimana disajikan pada Tabel 25 berikut ini.

Tabel 25. Validitas Isi Instrumen Akreditasi SMA/MA

Komponen Penilaian Akreditasi	Rerata Indeks Koefisien Aiken'V
Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	0,81
Standar Akreditasi 2. Penilaian	0,81
Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	0,79
Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	0,80
Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,82
Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	0,92
Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	0,76
Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	0,81
Rerata Indeks Koefisien Aiken'V Keseluruhan	0,81

Aiken seperti dikutip Hendryadi (2014: 3) menyatakan bahwa indeks koefisien Aiken's $V > 0,50$ menunjukkan bahwa validitas isi item baik. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan kriteria sebagai berikut: (1) bila $0,75 \leq V \leq 1,00$; maka validitas isi item sangat baik; (2) bila $0,50 \leq V < 0,75$; maka validitas isi item baik; dan (3) bila $V < 0,50$; maka validitas isi item kurang baik.

Berdasarkan Tabel 25 dapat disimpulkan bahwa item-item dari: (1) Standar Akreditasi 1, semua item memiliki validitas isi sangat baik; (2) Standar Akreditasi 2, semua item memiliki validitas isi sangat baik; (3) Standar Akreditasi 3, sebagian besar item memiliki validitas sangat baik dan ada 3 item yang memiliki validitas baik; (4) Standar Akreditasi 4, sebagian besar item memiliki validitas sangat baik dan ada 1 item yang memiliki validitas baik; (5) Standar Akreditasi 5, semua item memiliki validitas sangat baik; (6) Standar Akreditasi 6, semua item memiliki validitas sangat; (7) Standar Akreditasi 3, sebagian besar item memiliki validitas sangat baik dan ada 1 item yang memiliki validitas baik; dan (8) Standar Akreditasi 8, semua item memiliki validitas sangat baik.

Hasil uji validitas dan reliabilitas dianalisis menggunakan program aplikasi SPSS. Badrun Kartowagiran (2014: 13) menyatakan apabila penilaian dilakukan oleh beberapa rater (penilai) dimana antar rater setara kepakarannya dan independen satu sama lain, maka validitas isi dapat dapat dilihat dari hasil analisis Anova dari ketiga rater, sedangkan reliabilitas hasil penilaian dapat dilihat dari konsistensi diantara para rater (*interrater reliability*) dalam memberikan

penilaian atau dapat dilihat dari hasil *interclass correlation coefficient* (ICC).

Hasil analisis dengan SPSS 17 seperti terlihat pada Tabel 26 berikut ini.

Tabel 26. Hasil Analisis Anova dari Ketiga Rater

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Between People		36.036	54	.667		
Within People	Between Items	.958	2	.479	2.920	.058
	Residual	17.709	108	.164		
	Total	18.667	110	.170		
Total		54.703	164	.334		

Grand Mean = 4.3758

Tabel 26 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ($p = 0.058$) antar rata-rata nilai yang diberikan oleh rater 1, rater 2, dan rater 3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumusan indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti fisik penilaian adalah valid. Selanjutnya reliabilitas antar rater dapat dilihat dari hasil *interclass correlation coefficient* pada Tabel 27 berikut ini.

Tabel 27. Interclass Correlation Coefficient (ICC)

	Intraclass Correlation ^b	95% Confidence Interval		F Test with True Value 0			
		Lower Bound	Upper Bound	Value	df1	df2	Sig
Single Measures	.506 ^a	.348	.651	4.070	54	108	.000
Average Measures	.754 ^c	.616	.849	4.070	54	108	.000

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed.

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not.

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition. The between-measure variance is excluded from the denominator variance.

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable otherwise.

Tabel 27 menunjukkan bahwa reliabilitas antar rater atau *interclass correlation coefficient* sebesar 0.506 suatu harga yang moderat dan dapat dikatakan bahwa rumusan indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti fisik penilaian adalah reliabel.

2. Hasil Pengembangan Instrumen Akreditasi

Pengembangan model instrumen akreditasi diawali dengan kegiatan menyusun kisi-kisi instrumen akreditasi seperti terlihat pada Tabel 28 berikut.

Tabel 28. Kisi-kisi Instrumen Akreditasi SMA/MA

Standar Akreditasi	Jumlah Butir	No. Butir
Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	7 Butir	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; dan 1.7
Standar Akreditasi 2. Penilaian Proses dan Hasil Belajar	10 Butir	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; dan 2.10
Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	15 Butir	3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; dan 3.15
Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	13 Butir	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; dan 4.13
Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25 Butir	5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.16; 5.17; 5.18; 5.19; 5.20; 5.21; 5.22; 5.23; 5.24; dan 5.25
Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	26 Butir	6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.16; 6.17; 6.18; 6.19; 6.20; 6.21; 6.22; 6.23; 6.24; 6.25; dan 6.26
Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	19 Butir	7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.16; 7.17. 7.18, 7.19
Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	4 Butir	8.1; 8.2; 8.3; dan 8.4

Mengacu pada rumusan indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti fisik penilaian serta kisi-kisi penyusunan instrumen akreditasi, kemudian disusun butir-butir pertanyaan untuk setiap standar akreditasi. Kolom-kolom dalam instrumen akreditasi terdiri dari nomor butir, pernyataan, bukti fisik, dan keterangan.

Sebelum dilakukan uji coba di SMA/MA, peneliti meminta bantuan sembilan asesor akreditasi SMA/MA untuk melakukan validasi terhadap kelayakan instrumen akreditasi dan aplikasi isian data akreditasi. Data hasil validasi atau hasil penilaian asesor digunakan mengetahui keefektifan instrumen akreditasi dan keefektifan prosedur akreditasi. Skor hasil validasi asesor dianalisis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut.

Adapun penggalan manual instrumentasi akreditasi SMA/MA untuk setiap komponen standar akreditasi sebagai berikut.

Contoh Instrumen Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan

No.	Pernyataan	Bukti Fisik	Keterangan
1.1	Rerata persentase jumlah peserta didik yang lulus dalam 3 tahun terakhir sebesar ☐ A. Antara 86 % sampai 100 % ☐ B. Antara 71 % sampai 85 % ☐ C. Antara 56 % sampai 70 % ☐ D. Antara 41 % sampai 55 % ☐ E. Kurang dari 41 %	• Buku Leger	☐ Ada ☐ Tidak ada

Contoh Instrumen Standar Akreditasi 2. Penilaian

No.	Pernyataan	Bukti Fisik	Keterangan
2.1	Persentase banyaknya guru mata pelajaran yang dapat membuat instrumen penilaian sikap berupa lembar observasi sikap, daftar cek penilaian diri, daftar cek penilaian antar teman, dan jurnal sebesar ☐ A. Antara 86 % sampai 100 % ☐ B. Antara 71 % sampai 85 % ☐ C. Antara 56 % sampai 70 % ☐ D. Antara 41 % sampai 55 % ☐ E. Kurang dari 41 %	• Daftar nilai aspek sikap	☐ Ada ☐ Tidak ada
		• Contoh RPP dan lampiran instrumen penilaian aspek sikap	☐ Ada ☐ Tidak ada

Contoh Instrumen Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran

No.	Pernyataan	Bukti Fisik	Keterangan
3.1	Persentase banyaknya guru yang telah memiliki RPP lengkap yang dibuat sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar ☐ A. Antara 86 % sampai 100 % ☐ B. Antara 71 % sampai 85 % ☐ C. Antara 56 % sampai 70 % ☐ D. Antara 41 % sampai 55 % ☐ E. Kurang dari 41 %	• Contoh RPP lengkap untuk setiap mata pelajaran	☐ Ada ☐ Tidak ada

Contoh Instrumen Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum

No.	Pernyataan	Bukti Fisik	Keterangan
4.1	Sekolah/madrasah memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: ☐ A. Ya ☐ B. Tidak	Naskah KTSP	☐ Ada ☐ Tidak ada

Contoh Instrumen Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan	Bukti Fisik	Keterangan
5.1	Persentase guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 sebesar ☐ A. 100 % ☐ B. Antara 86 % sampai 99 % ☐ C. Antara 71 % sampai 85 % ☐ D. Antara 55 % sampai 70 % ☐ E. Kurang dari 55 %	Data Guru dan Lampiran Ijazah	☐ Ada ☐ Tidak ada

Contoh Instrumen Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana

No.	Pernyataan	Bukti Fisik	Keterangan
6.1	Sekolah/madrasah memiliki lahan dengan ukuran sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah: ☐ A. Ya ☐ B. Tidak	Sertifikat tanah (keterangan ukuran luas lahan)	☐ Ada ☐ Tidak ada

Contoh Instrumen Standar Akreditasi 7. Pengelolaan

No.	Pernyataan	Bukti Fisik	Keterangan
7.1	Kegiatan yang telah dilakukan oleh terkait dengan penyusunan rencana program sekolah/madrasah dalam 4 tahun terakhir adalah ☐ Merumuskan/meninjau kembali visi dan misi sekolah/madrasah ☐ Merumuskan kembali tujuan sekolah/madrasah ☐ Membuat rencana kerja jangka menengah ☐ Membuat rencana kerja tahunan setiap tahun ☐ Membuat/menyempurnakan pedoman pengelolaan sekolah/madrasah	• Data/ catatan/ keterangan sesuai dengan jawaban	☐ Ada lengkap ☐ Ada sebagian ☐ Tidak ada

Contoh Instrumen Standar Akreditasi 8. Pembiayaan

No.	Pernyataan	Bukti Fisik	Keterangan
8.1	Sekolah/madrasah menerapkan sistem pengelolaan keuangan/pembiayaan melalui jasa Bank: ☐ A. Ya ☐ B. Tidak	• Contoh rekening koran dari Bank	☐ Ada ☐ Tidak ada

Manual instrumen akreditasi SMA/MA hasil pengembangan dilengkapi dengan aplikasi isian data akreditasi menggunakan program microsoft excel dan petunjuk teknis pengisian data akreditasi. Contoh penggalan aplikasi isian data akreditasi untuk setiap komponen akreditasi sebagai berikut.

Contoh Isian Data Akreditasi Umum

Petunjuk:

1. Data yang diisikan adalah data umum mencakup:
 - a. Identitas Sekolah/Madrasah
 - b. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - c. Jumlah Siswa
 - d. Jumlah Rombongan Belajar
 - e. Jumlah Ruang Kelas
2. Data yang diisikan harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah/madrasah.

Nama Sekolah/Madrasah	
NPSN	
Alamat Sekolah/Madrasah	
Telepon/Fax.	
Alamat Web (Jika ada)	
Alamat Email (Wajib ada)	
Status Akreditasi (A, B, C atau TT)	
Tahun Sertifikat Akreditasi	

Contoh Isian Data Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan

Petunjuk:

1. Data yang diisikan digunakan sebagai dasar penilaian pemenuhan standar akreditasi tentang kompetensi lulusan.
2. Untuk No. 1.1 sampai dengan 1.20, isikan data dengan cara meng-entri ‘angka’ pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data berupa ‘bilangan’ yang menyatakan banyak/jumlah atau nilai.
3. Data yang diisikan harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah/madrasah.

1.1 Jumlah lulusan (jumlah peserta didik yang lulus) dalam 3 tahun terakhir:

Tahun Pelajaran	Peminatan	Jumlah Peserta Didik yang Ikut Ujian	Jumlah Lulusan

Contoh Isian Data Standar Akreditasi 2. Penilaian

Petunjuk:

1. Data yang diisikan digunakan sebagai dasar penilaian pemenuhan standar akreditasi tentang penilaian proses dan hasil belajar.
2. Untuk No. 2.1 sampai dengan 2.9, isikan data dengan cara meng-entri 'angka' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data berupa 'bilangan' yang menyatakan banyak/jumlah.
3. Untuk No. 2.10, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menyatakan data sesuai dengan pernyataan (dapat meng-entri angka '1' lebih dari satu) dan bila tidak meng-entri angka '1' maka entri-kan angka '0'.
4. Data yang diisikan harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah/madrasah.

2.1 Banyaknya guru mata pelajaran yang dapat membuat instrumen penilaian secara mandiri:

Jenis instrumen penilaian	Banyaknya guru yang dapat membuat instrumen penilaian sikap secara mandiri
Lembar Observasi Penilaian Sikap	
Daftar Cek/Angket Penilaian diri	
Daftar Cek/Angket Penilaian Antar Peserta Didik	
Jurnal Sikap	

Contoh Isian Data Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran

Petunjuk:

1. Data yang diisikan digunakan sebagai dasar penilaian pemenuhan standar akreditasi tentang proses pembelajaran dan pengawasannya.
2. Untuk No. 3.1 s.d. No. 3.15, isikan data dengan cara meng-entri 'angka' yang menunjukkan data berupa 'bilangan' yang menyatakan 'banyak/jumlah' atau bila tidak di-entri angka '1' maka entri-kan angka '0'.
3. Data yang diisikan harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah/madrasah.

3.1 Banyaknya guru yang telah memiliki RPP lengkap yang dibuat sendiri dan/atau dibuat bersama dengan kelompok kerja guru:

Banyaknya guru yang telah memiliki RPP lengkap	
--	--

Contoh Isian Data Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum

Petunjuk:

1. Data yang diisikan digunakan sebagai dasar penilaian pemenuhan standar akreditasi tentang isi kurikulum yang digunakan di sekolah/madrasah.
2. Untuk No. 4.1 s.d. 4.10 dan No. 4.12, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data sesuai pernyataan 'ya' atau 'tidak' (pilih salah satu) dan bila tidak di-entri angka '1' maka entrikan angka '0'.
3. Untuk No. 4.11, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data 'sesuai pernyataan'. (dapat meng-entri angka '1' lebih dari satu) atau bila tidak di-entri angka '1' maka entrikan angka '0'.
4. Data yang diisikan harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah/madrasah.

4.1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP):

Sekolah/madrasah memiliki dokumen KTSP yang disusun/dikembangkan dengan sistematika sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah	
	Ya
	Tidak

Contoh Isian Data Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Petunjuk:

1. Data yang diisikan digunakan sebagai dasar penilaian pemenuhan standar akreditasi tentang pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Untuk No. 5.1 - 5.2, 5.4 - 5.7, 5.9 - 5.10, 5.12 - 5.13, 5.15, 5.17 - 5.21, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data berupa 'bilangan' yang menyatakan 'banyak/jumlah' dan bila tidak di-entri angka '1' maka entri-kan angka '0'.
3. Untuk No. 5.3, 5.11, dan 5.16, isikan data dengan cara meng-entri angka '5', '4', '3', '2', atau '1' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data 'sesuai dengan kategori nilai'.
4. Untuk No. 5.8 dan 5.14, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data 'sesuai dengan pernyataan' (dapat meng-entri angka '1' lebih dari satu) atau bila tidak di-entri angka '1' maka entri-kan angka '0'.
5. Data yang diisikan harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah/madrasah.

5.1 Kualifikasi Guru

Tahun Pelajaran	Jumlah Guru	Banyaknya Guru dengan Kualifikasi						Jumlah Guru Minimal S1
		Belum S1		S1		S2/S3		
		Mapel	BK	Mapel	BK	Mapel	BK	

Contoh Isian Data Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana

Petunjuk:

1. Data yang diisikan digunakan sebagai dasar penilaian pemenuhan standar akreditasi tentang sarana dan prasarana.
2. Untuk No. 6.2, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, dan 6.26, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menyatakan data 'sesuai dengan pernyataan' atau data sesuai dengan pernyataan 'ya' atau 'tidak' (pilih salah satu) atau bila tidak di-entri angka '1' maka entri-kan angka '0'.
3. Untuk No. 6.3, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menyatakan data 'sesuai dengan pernyataan' (dapat meng-entri angka '1' lebih dari satu) atau bila tidak di-entri angka '1' maka entri-kan angka '0'.
4. Data yang diisikan harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah/madrasah.

6.1 Rasio luas lahan per siswa:

Luas lahan milik sekolah		m2
Jumlah siswa		orang
Rasio luas lahan per siswa		m2

Contoh Isian Data Standar Akreditasi 7. Pengelolaan

Petunjuk:

1. Data yang diisikan akan digunakan sebagai dasar penilaian pemenuhan standar akreditasi tentang pengelolaan sekolah/madrasah.
2. Untuk No. 7.1 - 7.10, 7.15 - 7.17, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data 'sesuai dengan pernyataan' (dapat meng-entri angka '1' lebih dari satu) atau bila tidak di-entri angka '1' maka entri-kan angka '0'.
3. Untuk No. 7.11 - 7.14, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data 'sesuai dengan pernyataan' (pilih salah satu) atau bila tidak di-entri angka '1' maka entrikan angka '0'.
4. Data yang diisikan harus sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah/madrasah.

7.1 Penyusunan rencana program sekolah/madrasah:

Kegiatan yang telah rutin dilakukan terkait dengan penyusunan rencana program sekolah/madrasah dalam 3 tahun terakhir:	
	Merumuskan/meninjau kembali visi dan misi sekolah/madrasah.
	Merumuskan kembali tujuan sekolah/madrasah.
	Membuat rencana kerja jangka menengah.
	Membuat rencana kerja tahunan setiap tahun.
	Membuat/menyempurnakan pedoman pengelolaan sekolah/madrasah.

Contoh Isian Data Standar Akreditasi 8. Pembiayaan

Petunjuk:

1. Data yang diisikan akan digunakan sebagai dasar penilaian pemenuhan standar akreditasi tentang pembiayaan non personalia.
2. Untuk No. 8.1 dan 8.4, isikan data dengan cara meng-entri angka '1' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data sesuai pernyataan 'ya' atau 'tidak' (pilih salah satu) atau bila tidak di-entri angka '1' maka entri-kan angka '0'.
3. Untuk No. 8.2 dan 8.3, isikan data dengan cara meng-entri 'angka ' pada kolom berwarna hijau yang menunjukkan data berupa 'bilangan' yang menyatakan 'banyak/jumlah' atau bila tidak di-entri angka '1' maka entri-kan angka '0'.

13.1. Sistem pengelolaan keuangan:

Sistem pengelolaan keuangan/pembiayaan sudah menggunakan jasa perbankan:	
	Ya, untuk semua jenis transaksi.
	Ya, untuk sebagian besar jenis transaksi.
	Ya, hanya untuk jenis penyimpangan uang kas/dana masuk.
	Belum

Sebelum pihak sekolah/madrasah mengisi butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi SMA/MA, terlebih dahulu harus mengisi data akreditasi pada aplikasi isian data akreditasi. Penggalan petunjuk teknis pengisian data akreditasi sebagai berikut.

Contoh Petunjuk Teknis Pengisian Data Standar Akreditasi 1: Kompetensi Lulusan

No.	Petunjuk Teknis Pengisian Data
1.1	Isikan data jumlah lulusan (jumlah peserta didik yang ikut ujian dan lulus) dalam 3 tahun terakhir untuk setiap program atau peminatan. Ada 3 jenis program atau peminatan di SMA/MA: a. Program IPA (Peminatan Matematika dan IPA) b. Program IPS (Peminatan Ilmu-ilmu Sosial) c. Program Bahasa (Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya)

Contoh Petunjuk Teknis Pengisian Data Standar Akreditasi 2: Penilaian

No.	Petunjuk Teknis Pengisian Data
2.1	Isikan data banyaknya guru yang sudah dapat membuat 4 jenis bentuk instrumen penilaian sikap. Data yang diisikan adalah data/catatan hasil pemantauan/supervisi akademik baik yang dilakukan oleh pengawas sekolah/madrasah maupun oleh kepala sekolah/ madrasah yang dilakukan secara objektif.

Contoh Petunjuk Teknis Pengisian Data Standar Akreditasi 3: Penilaian

No.	Petunjuk Teknis Pengisian Data
3.1	Isikan data banyaknya guru yang memiliki RPP lengkap yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Data yang diisikan berdasarkan data/catatan hasil supervisi akademik dan/atau dapat menggunakan data/catatan hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan secara objektif dalam satu tahun terakhir.

Contoh Petunjuk Teknis Pengisian Data Standar Akreditasi 4: Isi Kurikulum

No.	Petunjuk Teknis Pengisian Data
4.1	Untuk KTSP yang dibuat berdasarkan kurikulum lama (Kurikulum 2006), disusun mengacu pada panduan penyusunan KTSP dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Untuk KTSP yang dibuat berdasarkan kurikulum baru (Kurikulum 2013), disusun mengacu pada Lampiran 2 Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP.

Contoh Petunjuk Teknis Pengisian Data Standar Akreditasi 5: Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Petunjuk Teknis Pengisian Data
5.1	Isikan data banyaknya guru baik yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 maupun yang belum S1 (jika ada). Data yang diisikan berdasarkan data guru dan bukti ijazah.

Contoh Petunjuk Teknis Pengisian Data Standar Akreditasi 6: Sarana dan Prasarana

6.1

Isikan data ukuran luas lahan sekolah/madrasah. Data yang disikan berdasarkan data/dokumen sertifikat tanah.

Ketentuan 1:

Jika SMA/MA memiliki jumlah siswa antara 15 – 32 orang per rombel, maka ketentuan rasio minimal luas lahan terhadap siswa (peserta didik) sebagai berikut:

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	36,5	19,3	-
2	4-6	22,8	12,2	8,1
3	7- 9	18,4	9,7	6,5
4	10-12	16,3	8,7	5,9
5	13-15	14,9	7,9	5,3
6	16-18	14,0	7,5	4,9
7	19-21	13,5	7,2	4,8
8	22-24	13,2	7,0	4,7
9	25-27	12,8	6,8	4,6

Ketentuan 2:

Jika SMA/MA memiliki jumlah siswa kurang dari 15 orang per rombel, maka ketentuan luas lahan minimal sbb:

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	2140	1360	-
2	4-6	2570	1420	1290
3	7- 9	3040	1640	1340
4	10-12	3570	1890	1390
5	13-15	4000	2150	1440
6	16-18	4440	2390	1590
7	19-21	5000	2670	1780
8	22-24	5570	3000	2020
9	25-27	6040	3240	2170

Contoh Petunjuk Teknis Pengisian Data Standar Akreditasi 7: Pengelolaan

No.	Petunjuk
7.1	Isikan data ada/tidak ada kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan penyusunan rencana program sekolah/madrasah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data yang diisikan harus tersedia dokumennya. Kegiatan terkait dengan perencanaan penyusunan program sekolah/madrasah, antara lain: - Merumuskan/meninjau kembali visi dan misi sekolah/madrasah - Merumuskan kembali tujuan sekolah/madrasah - Membuat rencana kerja jangka menengah - Membuat rencana kerja tahunan setiap tahun - Membuat/menyempurnakan pedoman pengelolaan sekolah/ madrasah.

Contoh Petunjuk Teknis Pengisian Data Standar Akreditasi 8: Pembiayaan

No.	Petunjuk
8.1	Isikan data apabila pengelolaan keuangan/pembiayaan menggunakan jasa Bank. Indikator sistem pengelolaan keuangan/pembiayaan yang dilakukan menggunakan jasa perbankan, antara lain: - Setoran/pembayaran uang SPP/iuran/sumbangan dari orang tua/wali siswa, donatur, dan/atau masyarakat dilakukan melalui rekening bank milik sekolah/madrasah - Pembayaran gaji pegawai dilakukan melalui bank ke rekening atas nama pegawai - Transaksi keuangan/pembayaran dalam jumlah besar oleh pihak sekolah/madrasah ke pihak rekanan/mitra dilakukan melalui bank ke rekening rekanan/mitra - Laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah selalu dilampiri cetak rekening koran dari bank

Pada saat uji coba model, sebelum pihak sekolah/madrasah menjawab setiap butir pertanyaan pada instrumen akreditasi, terlebih dahulu harus mengisi data pada model isian data akreditasi. Data yang diisikan harus sesuai dengan kondisi bukti fisik yang tersedia di sekolah/madrasah. Pada saat asesor melakukan visitasi ke sekolah/madrasah, tugas utama asesor adalah memverifikasi dan memvalidasi isian data akreditasi dan mengecek kebenaran pilihan jawaban pada

instrumen akreditasi. Apabila terdapat perbedaan antara isian data yang dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah dengan hasil verifikasi dan validasi asesor, maka asesor meminta melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah/madrasah. Teknik verifikasi dan validasi data dilakukan dengan teknik cek dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi.

Teknik cek dokumen digunakan untuk verifikasi dan validasi isian data bila bukti kesesuaian dengan Standar Akreditasi yang ditunjukkan pihak sekolah/madrasah berupa dokumen, teknik wawancara digunakan untuk verifikasi dan validasi isian data bila bukti kesesuaian dengan Standar Akreditasi yang diberikan pihak sekolah/madrasah perlu dilakukan klarifikasi, dan teknik observasi digunakan untuk verifikasi dan validasi isian data bila bukti kesesuaian dengan Standar Akreditasi yang diperlihatkan pihak sekolah/madrasah berupa barang/benda yang perlu dicek kebenarannya melalui pengamatan langsung.

Setelah melakukan pengumpulan data dan informasi, asesor menentukan jawaban pada setiap butir pernyataan berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan klarifikasi. Selanjutnya, asesor melakukan penskoran dan penilaian hasil akreditasi. Adapun teknis penskoran, pembobotan, dan penilaian hasil akreditasi digunakan sebagai acuan dalam menentukan nilai akhir dan pemeringkatan hasil akreditasi sebagaimana berikut.

1) Penskoran

Untuk setiap jawaban pertanyaan dari setiap butir pertanyaan dengan alternatif jawaban terdiri 5 opsi yakni A, B, C, D atau E; teknik penskoran sebagai

berikut: (1) jawaban A diberi skor 5, (2) jawaban B diberi skor 4, (3) jawaban C diberi skor 3, (4) jawaban D diberi skor 2, dan (5) jawaban E diberi skor 1. Untuk setiap jawaban pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu, skor maksimal 5 dan skor minimal 1.

2) Pembobotan

Setiap butir pertanyaan memiliki bobot jawaban yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingan butir pertanyaan. Kriteria bobot butir jawaban seperti terlihat pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29. Kriteria Bobot Butir Jawaban

Tingkat Kepentingan Butir Pertanyaan	Bobot Butir Jawaban
Sangat Penting/Sangat Esensial	4
Penting/Esensial	3
Cukup Penting/Cukup esensial	2
Kurang Penting/Kurang Esensial	1

Untuk setiap komponen Standar Akreditasi, diberikan bobot butir jawaban dari setiap butir pertanyaan. Pembobotan dilakukan dengan meminta pendapat praktisi untuk dengan cara memberikan skor tingkat kepentingan berdasarkan daya dukungnya terhadap pencapaian kompetensi lulusan. Selain pembobotan butir jawaban dari setiap butir pertanyaan, diberikan juga pembobotan untuk setiap komponen standar akreditasi seperti terlihat pada Tabel 30 berikut.

Tabel 30. Bobot Setiap Standar Akreditasi

Komponen	Bobot Standar Akreditasi
Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	16
Standar Akreditasi 2. Penilaian	14
Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	14
Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	10
Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12
Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	12
Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	12
Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	10

3) Penilaian

Langkah-langkah sebagai berikut: (1) memberi skor (S) untuk setiap butir jawaban pada setiap nomor butir jawaban berdasarkan data pada isian jawaban instrumen akreditasi menggunakan acuan penskoran; (2) untuk setiap nomor butir jawaban, skor (S) dikalikan dengan bobot (B) butir jawaban ($S \times B$); (3) menjumlahkan perkalian skor (S) dengan (B) untuk setiap Standar Akreditasi; (4) menghitung rata-rata ($S \times B$) dan standar deviasi ($S \times B$); (5) menghitung Z-Skor untuk setiap nomor butir jawaban; dan (6) menghitung T-Skor untuk setiap nomor butir jawaban berdasarkan Z-Skor.

Langkah selanjutnya adalah: (1) menghitung Nilai Standar Akreditasi Tertimbang (NSAT) untuk setiap nomor butir jawaban dengan cara melakukan perkalian skor (S), bobot (B) butir jawaban, dan T Skor ($S \times B \times T \text{ Skor}$); (2) menghitung Nilai Standar Akreditasi Tertimbang Maksimal (NSAT Maks) untuk setiap nomor butir jawaban dengan cara melakukan perkalian skor (S), bobot (B) butir jawaban, dan T Skor ($S \times B \times T \text{ Skor}$) dimana skor yang dikalikan adalah

skor maksimal yakni 4; (3) menghitung Nilai Standar Akreditasi dihitung dengan persamaan: $NSA = \frac{NSAT}{NSAT Maks} \times 100$; dan (4) menghitung Nilai Akreditasi Tertimbang (NAT) untuk setiap Standar Akreditasi dengan cara mengalikan NSM dengan Bobot Standar Akreditasi (BSA) kemudian dibagi dengan angka 100 sebagai berikut:

$$NAT1 = (NSM1 \times BSM1)/100$$

$$NAT2 = (NSM2 \times BSM2)/100$$

$$NAT3 = (NSM3 \times BSM3)/100$$

$$NAT4 = (NSM4 \times BSM4)/100$$

$$NAT5 = (NSM5 \times BSM5)/100$$

$$NAT6 = (NSM6 \times BSM6)/100$$

$$NAT7 = (NSM7 \times BSM7)/100$$

$$NAT8 = (NSA8 \times BSA8)/100;$$

Keterangan:

NAT1 : Nilai Akreditasi Tertimbang untuk Standar Akreditasi 1;

BSM1 : Bobot Standar Akreditasi untuk Standar Akreditasi 1, dan seterusnya.

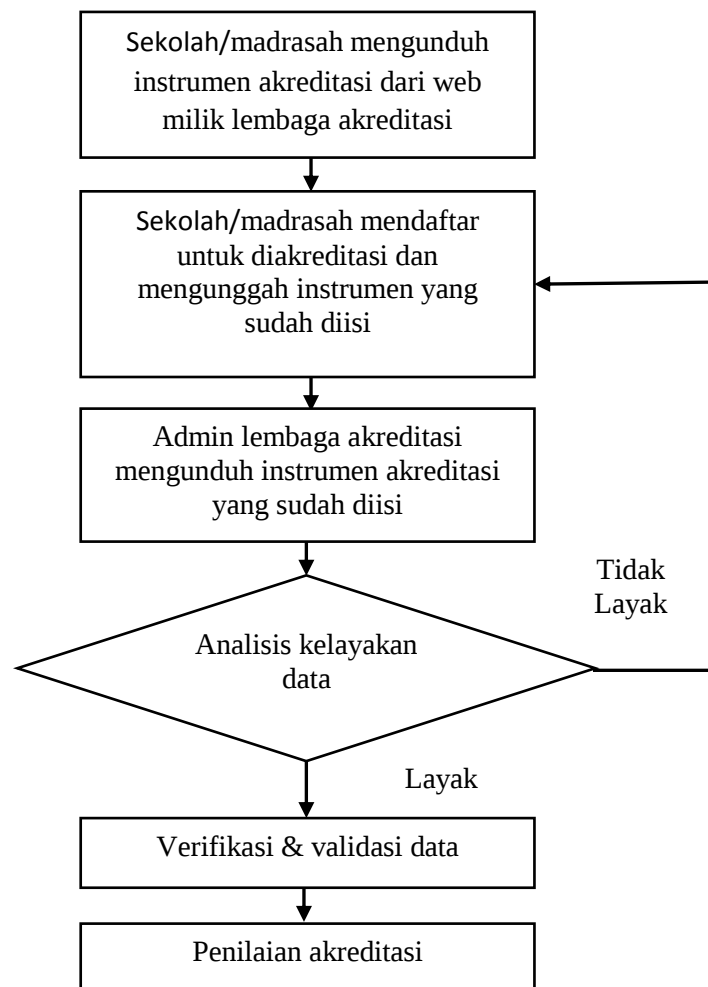
Langkah terakhir adalah menentukan Nilai Akhir (NA) dengan persamaan sebagai berikut:

$$NA = NAT1 + NAT2 + NAT3 + NAT4 + NAT5 + NAT6 + NAT7 + NAT8.$$

Contoh perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran laporan disertasi ini.

3. Hasil Pengembangan Prosedur Akreditasi

Prosedur pelaksanaan akreditasi hasil pengembangan tidak banyak perubahan dibanding model akreditasi dari BAN-S/M. Hasil pengembangan prosedur akreditasi diperoleh prosedur dengan langkah-langkah seperti terlihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Prosedur Akreditasi SMA/MA

Pihak sekolah mengunduh instrumen akreditasi yang tersedia di web milik lembaga akreditasi. Pihak sekolah mengisi instrumen akreditasi dalam bentuk aplikasi *microsoft excel*. Isian data akreditasi ini *hyperlink* dengan: (1) instrumen pernyataan capaian standar akreditasi dan (2) hasil penilaian akreditasi. Selanjutnya pihak sekolah mendaftar untuk diakreditasi dan mengunggah instrumen akreditasi yang sudah diisi disertai file dalam bentuk dokumen, foto, atau video.

Langkah berikutnya, admin yang bekerja pada lembaga akreditasi mengunduh instrumen akreditasi dari sekolah yang akan diakreditasi. Data yang diperoleh dianalisis kelayakannya. Analisis dikerjakan oleh asesor. Apabila hasil analisis diperoleh keputusan layak untuk diakreditasi, maka lembaga akreditasi menugaskan asesor untuk melakukan visitasi guna memverifikasi dan memvalidasi data yang telah diberikan oleh pihak sekolah/madrasah. Langkah terakhir adalah penilaian akreditasi berdasarkan data, bukti, dan catatan hasil visitasi yang dikumpulkan oleh asesor.

Prosedur akreditasi di atas kemudian divalidasi oleh Asesor Akreditasi dari BAP-S/M Daerah Istimewa Yogyakarta. Asesor diminta memberikan penilaian dengan cara memberi skor sebagai berikut: Skor 4 = Sangat baik, Skor 3 = Baik, Skor 2 = Cukup baik, dan Skor 1 = Kurang baik. Hasil validasi disajikan pada Tabel 31 berikut.

Tabel 31. Hasil Validasi Prosedur Akreditasi

Aspek yang Dinilai	Rerata Skor
Prosedur praktis	3,35
Prosedur dapat menjamin pihak sekolah bertindak jujur dan transparan.	3,32
Prosedur dapat menjamin asesor bertindak jujur, adil, dan objektif.	2,91
Proses verifikasi dan validasi mudah dikerjakan	2,96
Fisibilitas (dapat diterapkan)	3,26
Rerata Skor Keseluruhan	3,16

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui validitas prosedur akreditasi disajikan pada Tabel 32 berikut.

Tabel 32. Kriteria Validasi Prosedur Akreditasi

Rumus	Rerata Skor	Kategori
$X > X_i + 1,8 \times SB_i$	$X > 3,4$	Sangat baik
$X_i + 0,6 \times SB_i < X \leq X_i + 1,8 \times SB_i$	$2,8 < X \leq 3,4$	Baik
$X_i - 0,6 \times SB_i < X \leq X_i + 0,6 \times SB_i$	$2,2 < X \leq 2,8$	Cukup baik
$X_i - 1,8 \times SB_i < X \leq X_i - 0,6 \times SB_i$	$1,6 < X \leq 2,2$	Kurang baik
$X \leq X_i - 1,8 \times SB_i$	$X \leq 1,6$	Tidak baik

Berdasarkan Tabel 28 dan Tabel 29 diperoleh informasi bahwa rerata skor keseluruhan sebesar 3,16. Hal menunjukkan bahwa prosedur akreditasi termasuk kategori baik.

B. Hasil Uji Coba Produk

1. Hasil Uji Coba Tahap 1

Instrumen akreditasi SMA/MA diujicobakan di 3 SMA. Daftar SMA yang dilibatkan sebagai sasaran uji coba model akreditasi dan tanggal pelaksanaan uji coba seperti terlihat pada Tabel 33 berikut ini.

Tabel 33. SMA Sasaran Uji Coba Tahap 1

No.	Nama Sekolah	Peringkat Akreditasi BAN-S/M	Tanggal Pelaksanaan Uji Coba
1	SMA Negeri 5 Bengkulu	A	04 s.d 07 Feb 2014
2	SMA Negeri 7 Bengkulu	A	17 s.d 21 Feb 2014
3	SMA Negeri 10 Bengkulu	B	02 s.d 05 Mar 2014

Pada setiap SMA sasaran uji coba diberikan satu set model instrumen akreditasi yang terdiri dari: (1) manual instrumen akreditasi, (2) aplikasi isian data akreditasi dan capaian standar akreditasi dan (3) petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi. Setelah pihak SMA/MA selesai melakukan pengisian data pada aplikasi isian data akreditasi dan/atau manual instrumen akreditasi, peneliti melakukan visitasi guna melakukan verifikasi dan validasi isian data dan jawaban atas yang diisikan dalam instrumen akreditasi. Dalam hal ini peneliti seolah-olah berperan sebagai asesor dari lembaga akreditasi. Setelah selesai melakukan verifikasi dan validasi, peneliti membagikan angket guna menjaring data dari kepala sekolah/madrasah, guru, tenaga kependidikan yang ikut mengisi instrumen akreditasi untuk memberikan penilaian tentang keefektifan instrumen dan prosedur akreditasi.

Hasil isian data dan jawaban yang diberikan oleh pihak sekolah, setelah dilakukan verifikasi dan validasi dan penilaian, diperoleh data nilai akhir akreditasi untuk ketiga SMA berturut-turut seperti terlihat pada Tabel 34, 35, dan 36 berikut.

Tabel 34. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 5 Kota Bengkulu

No.	Standar Akreditasi	Nilai Akreditasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	94,56
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	88,74
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	89,81
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	98,00
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	94,18
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	92,25
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	90,45
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	96,75

Tabel 35. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 7 Kota Bengkulu

No.	Standar Akreditasi	Nilai Akreditasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	92,73
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	85,24
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	87,52
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	96,75
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90,36
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	91,50
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	88,75
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	95,50

Tabel 36. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 10 Kota Bengkulu

No.	Standar Akreditasi	Nilai Akreditasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	85,28
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	82,85
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	80,50
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	96,50
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	85,38
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	78,65
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	83,50
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	91,50

Hasil penilaian mutu SMA/MA pada SMA Negeri 5 Bengkulu, SMAN 7 Bengkulu, dan SMAN 10 Bengkulu hampir sama dengan nilai untuk setiap komponen akreditasi berdasarkan penilaian hasil akreditasi yang diberikan oleh BAN-S/M.

Untuk menilai keefektifan instrumen akreditasi dan prosedur akreditasi hasil pengembangan yang diujicobakan, dilakukan dengan cara meminta pendapat praktisi dari SMA sararan yang ikut terlibat dalam pengisian instrumen akreditasi dan pengisian data akreditasi. Data penilaian dari praktisi berupa data kuantitatif yakni skor 4 = sangat baik/sangat tepat/sangat sesuai, skor 3 = baik/tepat/sesuai, skor 2 = cukup baik/cukup tepat/cukup sesuai, dan skor 1 = kurang baik/kurang tepat/kurang sesuai. Data hasil penilaian praktisi terhadap model akreditasi SMA/MA hasil pengembangan pada uji coba tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 37 berikut.

Tabel 37. Keefektifan Model pada Uji Coba Tahap 1

No.	Aspek yang Dinilai	Rerata Skor	Kategori
1	Tampilan/desain Instrumen Akreditasi SMA/MA	3,09	Baik
2	Tampilan/desain Aplikasi Isian Data Akreditasi SMA/MA	3,04	Baik
3	Kejelasan Petunjuk Teknis Pengisian Data Akreditasi SMA/MA	3,17	Baik
4	Ketepatan substansi data akreditasi	3,48	Sangat baik
5	Keakuratan data akreditasi yang diisikan	3,57	Sangat baik
6	Obyektivitas data akreditasi yang diisikan	3,43	Baik
7	Kepraktisan dalam penggunaan	3,00	Baik
8	Bahasa yang digunakan	3,52	Sangat baik
9	Fisibilitas (kemungkinan dapat diterapkan)	3,00	Cukup Baik
	Rerata Skor Keseluruhan	3,26	Baik

Analisis keefektifan instrumen akreditasi SMA/MA dilakukan dengan cara mengkonversi data kuantitatif menjadi data kualitatif menggunakan teknik kategori seperti terlihat pada Tabel 38 di bawah ini.

Tabel 38. Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif

Rumus	Rerata Skor	Kategori
$X > X_i + 1,8 \times SB_i$	$X > 3,4$	Sangat Baik
$X_i + 0,6 \times SB_i < X \leq X_i + 1,8 \times SB_i$	$2,8 < X \leq 3,4$	Baik
$X_i - 0,6 \times SB_i < X \leq X_i + 0,6 \times SB_i$	$2,2 < X \leq 2,8$	Cukup Baik
$X_i - 1,8 \times SB_i < X \leq X_i - 0,6 \times SB_i$	$1,6 < X \leq 2,2$	Kurang Baik
$X \leq X_i - 1,8 \times SB_i$	$X \leq 1,6$	Tidak Baik

Setelah mengkonversi data kuantitatif menjadi data kualitatif, keefektifan model akreditasi ditentukan berdasarkan kriteria penilaian seperti tercantum pada Tabel 39.

Tabel 39. Kriteria Keefektifan Model

Rerata Skor	Kategori	Kesimpulan
$X \geq 3,4$	Sangat Baik	Dapat dicontoh
$2,8 < X < 3,4$	Baik	Dapat digunakan
$2,2 < X \leq 2,8$	Cukup Baik	Dapat diterima dengan sedikit revisi
$1,6 < X \leq 2,2$	Kurang Baik	Dapat diterima dengan banyak revisi
$X \leq 1,6$	Tidak Baik	Tidak dapat digunakan

Berdasarkan data pada Tabel 37, 38, dan 39 dapat ditentukan rerata skor secara keseluruhan sebesar 3.36. Hasil uji coba tahap 1 dapat disimpulkan bahwa instrumen akreditasi SMA/MA yang digunakan memenuhi kategori baik dan dapat digunakan.

2. Hasil Uji Coba Tahap 2

Setelah dilakukan revisi terhadap model akreditasi SMA/MA berdasarkan hasil uji coba tahap 1, kemudian dilakukan uji coba tahap 2. Dalam uji coba tahap 2, banyaknya SMA sasaran uji coba adalah 6 SMA. Daftar SMA yang dilibatkan sebagai sasaran uji coba model akreditasi dan tanggal pelaksanaan uji coba seperti terlihat pada Tabel 40 berikut ini.

Tabel 40. SMA Sasaran Uji Coba Tahap 2

No.	Nama Sekolah	Peringkat Akreditasi BAN-S/M	Tanggal Pelaksanaan Uji Coba
1	SMA Negeri 5 Bengkulu	A	12 s.d. 14 Mei 2014
2	SMA Negeri 7 Bengkulu	A	03 s.d. 06 Feb 2014
3	SMA Negeri 10 Bengkulu	B	10 s.d. 13 Mar 2014
4	SMA Negeri 3 Bengkulu	A	26 s.d. 29 Mei 2014
5	SMA Negeri 1 Kabawetan	B	05 s.d. 08 Mei 2014
6	SMA Negeri 9 Yogyakarta	A	07 s.d. 10 Apr 2014

Seperti pelaksanaan pada uji coba tahap 1, pada uji coba tahap 2 kepada setiap SMA sasaran uji coba diberikan model instrumen akreditasi yang terdiri dari: (1) model instrumen akreditasi, (2) model aplikasi isian data akreditasi, dan (3) model petunjuk teknis pengisiannya. Setelah pihak SMA/MA menyelesaikan pengisian model isian data akreditasi dan model instrumen akreditasi, peneliti melakukan visitasi guna melakukan verifikasi dan validasi isian data dan jawaban atas pertanyaan dalam instrumen akreditasi. Dalam hal ini peneliti seolah-olah berperan sebagai asesor dari lembaga akreditasi.

Setelah selesai melakukan verifikasi dan validasi, peneliti membagikan angket guna menjangkau data dari praktisi (kepala sekolah/madrasah, guru, tenaga kependidikan di sekolah yang ikut mengisi instrumen akreditasi) untuk keperluan uji keefektifan model. Hasil isian data dan jawaban yang diberikan oleh pihak sekolah, setelah dilakukan verifikasi dan validasi dan penilaian diperoleh data nilai akhir akreditasi untuk ketiga SMA berturut-turut seperti terlihat pada Tabel 41, 42, 43, 44, 45, dan 46 berikut.

Tabel 41. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 5 Kota Bengkulu

No.	Standar Akreditasi	Nilai Akreditasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	96,50
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	88,25
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	90,54
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	97,00
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	94,18
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	92,25
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	90,45
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	96,75

Tabel 42. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 7 Kota Bengkulu

No.	Standar Akreditasi	Nilai Akreditasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	94,15
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	84,53
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	89,52
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	91,75
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90,36
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	91,50
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	89,75
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	93,50

Tabel 43. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 10 Kota Bengkulu

No.	Standar Akreditasi	Nilai Akreditasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	85,28
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	82,85
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	80,50
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	86,50
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	85,38
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	78,65
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	83,50
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	86,75

Tabel 44. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 3 Kota Bengkulu

No.	Standar Akreditasi	Nilai Akreditasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	94,28
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	91,85
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	88,50
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	92,50
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	85,38
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	91,65
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	89,50
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	90,50

Tabel 45. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 9 Kota Yogyakarta

No.	Standar Akreditasi	Nilai Akreditasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	95,50
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	89,85
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	89,50
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	93,50
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90,50
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	92,65
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	93,50
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	94,50

Tabel 46. Hasil Nilai Akreditasi SMAN 1 Kabawetan Kab. Kepahiang

No.	Standar Akreditasi	Nilai Akreditasi
1	Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	79,35
2	Standar Akreditasi 2. Penilaian	84,85
3	Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	79,50
4	Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	83,50
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	82,45
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	76,65
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	82,50
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	76,50

Sama seperti pada uji coba tahap 1, pada waktu uji coba tahap 2 ini juga dilakukan uji Keefektifan model. Untuk menilai keefektifan model akreditasi yang diujicoba, dilakukan dengan cara meminta pendapat praktisi dari SMA sararan yang ikut terlibat dalam pengisian model isian data akreditasi dan pengisian model instrumen akreditasi.

Data penilaian dari praktisi (*professional judgment*) berupa data kuantitatif yakni skor 4 = sangat baik/sangat tepat/sangat sesuai, skor 3 = baik/tepat/sesuai, skor 2 = cukup baik/cukup tepat/cukup sesuai, dan skor 1 = kurang baik/kurang tepat/kurang sesuai. Data hasil penilaian praktisi terhadap model akreditasi SMA/MA hasil pengembangan seperti terlihat pada Tabel 47 berikut.

Tabel 47. Keefektifan Model Akreditasi SMA/MA pada Uji Coba Tahap 2

Aspek yang Dinilai	Rerata Skor
Bentuk instrumen sederhana	3,39
Keterbacaan petunjuk teknis pengisian instrumen	3,30
Keakuratan data	3,43
Kesesuaian data dengan bukti pendukung	3,39
Prosedur praktis	3,52
Kemudahan pengisian data	3,22
Kemudahan melakukan verifikasi dan validasi data	3,17
Komponen penilaian komprehensif	3,39
Kepercayaan dapat diterapkan secara jujur dan objektif	3,22
Fisibilitas (kemungkinan dapat digunakan)	3,52
Kejelasan panduan penggunaan	3,48
Rerata Skor Keseluruhan	3,40

Seperti pada analisis keefektifan model pada ujicoba tahap 1, analisis juga dilakukan dengan cara mengkonversi data kuantitatif menjadi data kualitatif menggunakan teknik kategori seperti terlihat pada Tabel 48 berikut.

Tabel 48. Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif

Rumus	Rerata Skor	Kategori
$X > X_i + 1,8 \times SB_i$	$X > 3,4$	Sangat Baik
$X_i + 0,6 \times SB_i < X \leq X_i + 1,8 \times SB_i$	$2,8 < X \leq 3,4$	Baik
$X_i - 0,6 \times SB_i < X \leq X_i + 0,6 \times SB_i$	$2,2 < X \leq 2,8$	Cukup Baik
$X_i - 1,8 \times SB_i < X \leq X_i - 0,6 \times SB_i$	$1,6 < X \leq 2,2$	Kurang Baik
$X \leq X_i - 1,8 \times SB_i$	$X \leq 1,6$	Tidak Baik

Setelah mengkonversi data kuantitatif menjadi data kualitatif, keefektifan model akreditasi ditentukan berdasarkan kriteria penilaian seperti tercantum pada Tabel 49 berikut.

Tabel 49. Kriteria Keefektifan Model

Rerata Skor	Kategori	Kesimpulan
$X \geq 3,4$	Sangat Baik	Dapat dicontoh
$2,8 < X < 3,4$	Baik	Dapat digunakan
$2,2 < X \leq 2,8$	Cukup Baik	Dapat diterima dengan sedikit revisi
$1,6 < X \leq 2,2$	Kurang Baik	Dapat diterima dengan banyak revisi
$X \leq 1,6$	Tidak Baik	Tidak dapat digunakan

Berdasarkan data pada Tabel 47, 48, dan 49 dapat ditentukan rerata skor secara keseluruhan sebesar 3.40. Hasil uji coba tahap 2 dapat disimpulkan bahwa model akreditasi SMA/MA hasil pengembangan memenuhi kategori baik dan dapat digunakan.

C. Revisi Produk

Setelah dilakukan uji coba tahap 2, dilakukan revisi guna penyempurnaan model akreditasi SMA/MA. Produk akhir adalah model akreditasi SMA/MA yang telah memenuhi kriteria efektif, efisien, dan akuntabel. Model akreditasi SMA/MA hasil pengembangan diberinama model akreditasi SMART. Model akreditasi SMART yang sudah direvisi terdiri dari: (1) panduan penggunaan; (2) instrumen isian data akreditasi (aplikasi excel); (3) instrumen isian capaian standar akreditasi, (4) petunjuk teknis pengisian instrumen isian data akreditasi, (5) penskoran dan penilaian; dan (6) prosedur akreditasi.

D. Kajian Produk Akhir

Produk akhir yakni model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan telah dipublikasikan melalui seminar hasil disertasi pada tanggal 3 Maret 2016 di Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Peserta seminar adalah mahasiswa S-3 program studi penelitian dan evaluasi pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Seminar hasil disertasi juga dihadiri oleh promotor. Berdasarkan komentar, saran, masukan dari peserta seminar dan promotor dilakukan kajian dan perbaikan guna penyempurnaan produk.

E. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (1) tidak melibatkan Asesor untuk melakukan verifikasi dan validasi data isian dan jawaban yang diberikan oleh pihak SMA/MA sehingga keakuratan hasil verifikasi dan validasi belum maksimal, (2) uji coba pada tahap 1 dan tahap 2 dapat dianggap belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi SMA/MA di lapangan dan belum melibatkan sasaran MA.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Tentang Produk

Pengembangan model akreditasi SMA/MA diperoleh model akreditasi yang memenuhi kriteria sebagai model akreditasi yang efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan hasil uji keefektifan model. Model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan diberi nama Model Akreditasi SMART.

Simpulan tentang produk hasil pengembangan yakni Model Akreditasi SMART dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Model Akreditasi SMART:
 - a. bentuk instrumen sederhana, praktis, dan mudah digunakan;
 - b. petunjuk pengisian instrumen jelas dan mudah dipahami;
 - c. bukti-bukti pemenuhan standar mutu sekolah jelas dan terukur;
 - d. dapat digunakan untuk menilai mutu sekolah secara jujur dan objektif; dan
 - e. menghasilkan data mutu sekolah yang komprehensif dan valid.
2. Instrumen akreditasi dalam Model Akreditasi SMART memiliki validitas isi berdasarkan indeks koefisien Aiken's V sebesar 0,81 termasuk kategori baik dan reliabilitas berdasarkan *Interclass Correlation Coefficient* (ICC) sebesar 0,75 termasuk kategori baik.
3. Prosedur akreditasi dalam Model Akreditasi SMART mendapat penilaian dari peserta FGD dengan rerata skor sebesar 3,16 termasuk kategori baik.

4. Model Akreditasi SMART mendapat penilaian keefektifan dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dengan skor rata-rata sebesar 3,40 termasuk kategori baik sehingga model dapat digunakan.

B. Saran Pemanfaatan Produk

Saran pemanfaatan Model Akreditasi SMART sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kemenag, Pengurus Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), dan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) perlu memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan sosialisasi Model Akreditasi SMART kepada para Pengawas SMA/MA dan para Kepala SMA/MA di wilayah yang menjadi kewenangannya.
2. Kepala SMA/MA dapat bekerjasama dengan penulis guna menyelenggarakan pelatihan dalam menggunakan instrumen akreditasi dalam Model Akreditasi SMART kepada anggota tim pengembang sekolah.
3. Kepala SMA/MA dapat menggunakan instrumen akreditasi dalam Model Akreditasi SMART sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri sekolah (EDS).
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kemenag, dan Pengurus Yayasan penyelenggaran pendidikan dapat menggunakan Model Akreditasi SMART sebagai alat evaluasi internal untuk keperluan pengendalian mutu MA/MA yang menjadi kewenangannya.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) perlu memfasilitasi penulis guna melakukan sosialisasi model akreditasi SMA/MA ini kepada anggota tim fasilitator penjaminan mutu pendidikan dan dapat

mempertimbangkan penggunaan Model Akreditasi SMART untuk keperluan pemetaan mutu SMA/MA di tingkat provinsi.

6. Anggota BAN-S/M, Anggota BAP-S/M Provinsi, dan Asesor Akreditasi SMA/MA perlu menelaah dan menyampaikan rekomendasi agar Model Akreditasi SMART dapat diadopsi/diadaptasi atau dijadikan rujukan dalam mengembangkan model akreditasi yang ada.
7. Pakar evaluasi pendidikan dan peneliti lainnya dapat menggunakan produk hasil penelitian ini sebagai bahan referensi atau rujukan untuk keperluan penelitian sejenis dan/atau mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.

C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut

Model Akreditasi SMART ini telah didiseminasikan dalam Seminar Internasional ICERE 2016 pada tanggal 31 Mei 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta. Peserta seminar berasal dari unsur akademisi, praktisi pendidikan, dan mahasiswa program pascasarjana.

Pengembangan produk Model Akreditasi SMART lebih lanjut akan dilakukan oleh penulis sendiri sebagai bagian dari pengembangan keprofesian jabatan fungsional widyaiswara dalam upaya memberikan kontribusi terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Artcraft. (2005). *Program evaluation*. Sydney: Artcraft Research.
- Aswandi. (2009). *Akreditasi sekolah 2009*. Diambil pada tanggal 25 Desember 2010 dari <http://www.pontianak/post.com/?mib=berita.detail&id=27077>
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badrun Kartowagiran. (2006). *Prinsip-prinsip dasar monitoring dan implementasinya*. Bahan Penyelenggaraan Calon Tim Pelatih Monitoring dan Evaluasi Provinsi DKI Jakarta. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Badrun Kartowagiran. (2014). *Optimalisasi uji tingkat kompetensi di SMK untuk meningkatkan soft skill lulusan*. Makalah Seminar. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bennett, W.M. (2000). *Independent school accreditation: A guide to school choice*. Diambil pada tanggal 22 Desember 2008 dari <http://www.educationalconsulting.org/PDF/Independent/School/Accreditation.pdf.htm>
- Brady, L. (1992). *Curriculum development*. New York: Prentice Hall.
- Byars, L. & Rue, L. W. (1991). *Human resources management*. Boston: Irwin.
- Caldwell, B.J. & Spinks, J.M. (1992). *Leading the self-managing schools*. Bristol, PA: The Falmer Press.
- Campbell, J.P. (1998). Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology. *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*. 1. 687-732.
- Chaerun. (2009). *Pengembangan model evaluasi hasil belajar seni tari yang apresiatif dan kreatif di sekolah dasar*. Disertasi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- COA. (2008). *Accreditation handbook: Definition of stipulation*. Diambil pada tanggal 19 Juli 2008 dari <http://www.accreditation/2008-05-item-16.pdf>
- Davis, G.A. & Thomas, M.A. (1989). *Effective Schools and Effective Teachers*. London: Allyn and Bacon.
- Depdiknas (2005b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan*.

- Depdiknas. (1993). *Akuntabilitas program pengajaran*. Jakarta: Proyek PIPT Ditjen Dikti.
- Depdiknas. (2000). *Manajemen peningkatan mutu serbasis sekolah*. Buku 1. Jakarta: Direktorat Dikmenum, Ditjen Dikdasmen.
- Depdiknas. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. (2002). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah: Konsep dasar*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Depdiknas. (2004). *Kebijakan akreditasi sekolah*. Jakarta: Badan Akreditasi Sekolah Nasional.
- Depdiknas. (2005a). *Peraturan Mendiknas Nomor 29, Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah*.
- Depdiknas. (2005c). *Manajemen berbasis sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Depdiknas. (2006). *Draf uji publik panduan umum penilaian pendidikan*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Depdiknas. (2007a). *Pengembangan budaya mutu sekolah*. Jakarta: Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Depdiknas. (2007b). *Pedoman pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah*. Jakarta: Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
- Depdiknas. (2009). *Peraturan Mendiknas Nomor 63, Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- ECA (2005). *Accreditation in european higher education Area*. Diambil pada tanggal 19 Juli 2008, http://www.accreditation/041203_ECA_on_Bergen.pdf
- Eddy Sutadji (2009). *Model Evaluasi Mutu Sekolah: Pengembangan Instrumen untuk Menetapkan Mutu*. Disertasi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Edmons, R.R. (1979). Effective school for the urban poor. *Educational Leadership*, 37, 15-27.
- Fernandes, H.J.X. (1984). *Evaluation of educational programs*. Jakarta: National Educational Planning, Evaluation and Curriculum Development.
- Glasser, W. (1992). *The quality school: Managing students without coercion*. New York: Harper Collins Publisher.

- Glover, D. dan Sue, L. (2002). *Improving learning: Professional practice in secondary schools*. Edisi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.
- Gorton, R.A (1976). *School administration*. Dubuque IO: Wm.C.Brown Co.
- Griffin, P. & Nix, P. (1991). *Educational assessment and reporting*. Sydney: Harcont Brace Javanovic Publisher.
- Griffin, Patrix. & Nix, Peter. (1991). *Educational assessment and reporting*. Sydney: Harcout Brace Javanovich Publisher.
- Hanson, E.M. (1996). *Educational administration and organizational behavior*. Boston: Allyn and Bacon.
- Havelock, R.G. (1976). *Planning for innovation: Through dissemination and utilization of knowledge*. Michigan: Institute for Sosial Research, The University of Michigan.
- Hendryadi. (2014). *Content Validity (Validitas Isi)*. Teorionline Personal Paper: No.01/Juni-2014. Diambil pada tanggal 21 November 2015 dari www.teorionline.net
- Herman, J.L. dan Herman, J.J. (1995). Total quality management (TQM) for education. *Journal of Educational Technology*, May-June.
- Hodge, T. (2006). *Accreditation – Does It Make a Difference?* Diambil pada tanggal 29 Oktober 2008, dari <http://www.atem.org.au/download/archive/2006NZ/Accreditation-T-Hodge.pdf.htm>
- Hogan, P., Jaska, P. & Leavins, J. (2000). *Benchmarking in accounting schools of AACSB colleges of business*. Diambil pada tanggal 22 Oktober 200, dari <http://www.sbaer.uca.edu/research/TemporarilyDisabled---wdsi/2000/papers/007.pdf>
- Hostrop, R.W. (1983). *Managing education for result*. Palm Spring, FL; ETC Pub.
- Howell, C. (2008). *AACSB Accreditation and success on the uniform CPA exam*. Diambil pada tanggal 10 Januari 2009, dari <http://www.na-businesspress.com/howellweb.pdf.htm>
- Huitt, W. (1996). *Assessment, measurement, and evaluation: Undergraduate version, educational psychology interactive*. Diambil pada tanggal 20 Juni 2009, dari <http://chiron.valdosta.edu/whuitt/edpsyc/edpmsevl.html>
- Kaufman, I. (1996). *Art and education in culture*. New York: The MacMillan Company.
- Kaufman, R. & Susan, T. (1980). *Evaluation without fear*. New York: New View Point.

- Kemdikbud. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Kreitner, Robert & Kinicki, Angelo (2003). *Perilaku organisasi*. Buku 1. Edisi Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- LAN (1999). *Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kerja instansi pemerintah*. Jakarta.
- Lesley and Malcolm (2002). *Implementing total quality management: Menerapkan mutu terpadu*. Terjemahan Sularno Tjiptowardoyo. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lewis, J. Jr. (1987). *Long-range and short-range Planning for educational administrators*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Lindsay, D.H. & Campbell, A. (2002). *An examination of AACSB accreditation status an accounting program quality indikator*. Diambil pada tanggal 22 Oktober 2008, dari <http://www.sbaer.uca.edu/research/TemporarilyDisabled---wdsi/2002/pdffiles/papers/012.pdf.htm>
- Mackenzie, D.E. (1983). Research for school improvement: An appraisal of some recent trend. *Educational Research*, 12 (4), 5-17.
- Mardapi, D. (2003a). *Desain dan penilaian pembelajaran mahasiswa*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Sistem Jaminan Mutu Proses Pembelajaran, tanggal 19 Juni 2003 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Mardapi, D. (2003b). *Konstruksi tes dan analisis butir*. Makalah tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardapi, D. (2004). *Pengembangan kultur sekolah*. Paparan Presentasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardapi, D. (2008). *Teknik penyusunan instrumen: Tes dan non tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Martins Fabunmi, M., Brai-Abu, P. & Adeyinka, I. (2007). Class factors as determinants of secondary school student's academic performance in Oyo State Nigeria. *Journal Soc. Sci.*, 14(3), 243 – 247.
- McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2001). *Research in education: A Conceptual intriduction*. New York: Longman.
- McNeil, J.D. (1990). *Curriculum a comprehensive instruction*. London: A Devision of Scott, Forresman and Company.

- MEERA. (2007). *My environmental education evaluation*. Diambil pada tanggal 1 Oktober 2008 dari <http://www.meera.snre.umich.edu/plan-an-evaluation/plonearticlemultipage.2007-10-30.4643>
- Newmann, F.M., King, H.B., & Rigdon, M. (1997) Accountability and school performance: implication from restructuring schools. *Havard Educational Review*. 67(1): 41-68. Cambridge, MA: Havard College.
- Owens, R.G. (1995). *Organizational behavior in education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Pagliarulo. (1996). Accreditation: Its Nature, Process, and Effective Implementation. *Physical Therapy Education Journal*, 66 (7), 1114-1118.
- Patil, A.S. & Pudlowski, Z.J. (2005). Important issues of the accreditation and quality assurance and a strategy in the development of an accreditation framework for engineering Courses. *Global Journal of Engineering Education*, 9, 49-58.
- Patrick, A.O. & Kpangban, E. (2007). Quality science education at secondary school level in Delta State: Are the libraries and science books available for use? *Journal of Studi. Home Comm. Sci.*, 1(2): 113 – 120.
- Priestley, M. (1982). *Performance assessment in education and training: Alternative techniques*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Raham, H. (1998). *Integration of strategic management and quality assurance*. Kelowna, B.C.: Society for The Advancement of Excellence Education.
- Reynold, David, et.al. (1996). *Making good schools: Linking school effectiveness and school improvement*. London: Routledge.
- Robbins, S.P. (1991). *Organizational behavior*. New Jersey: Engelwood Cliffs Prentice Hall, Inc.
- Robbins, S.P. (2006). *Perilaku organisasi*. Edisi Indonesia. Jakarta: Indeks.
- Robert P. Alexander, R.P. & Hatfield, D. (1998). Does AACSB accreditation impact enrollment? *The Coastal Business Journal*, 1 (1), 47 – 52.
- Robinson, E.T. (2004). Accreditation of distance education programs: A primer. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 68 (4), 1 – 5.
- Rossi H. Peter, Lipsey Mark W. & Freeman Howard E. (2004). *Evaluation: A systematic approach*. California: Sage Publications, Inc.
- Rumberger, R.W. (2005). Test score, dropout rates, and transfer rates as alternatif indicator of high school performance. *American Educational Research Journal*. 42. 3-34.

- Sallis, Edward (1993). *Total quality management in education*. London: Kogan Page Limited.
- Sallis, Edward (2007). *Total quality management in education: Manajemen mutu pendidikan*, Edisi Indonesia. Yogyakarta: IRCiSoD.y
- Sanders, J.R. and Sullins, C.D. (2006). *Evaluating school programs: An education guide. Third Edition*. California: Corwin Press.
- Scheerens, J. (1999). *School effectiveness in development and developing countries: A review of the research evidence*. University of Twente/The World Bank. Diambil pada tanggal 5 Mei 2010 dari <http://www.proquest.com/pqdweb.html>
- Sergiovanni. T.J. (1987). *The principalship: A reflective practice perspective*. Bonton: Allyn and Bacon Inc.
- Slamet. (2000a). *Manajemen berbasis sekolah*. Diambil pada tanggal 10 Maret 2010 dari <http://www.dikmen.org.id>
- Slamet. (2000b). *Karakteristik kepala sekolah*. Diambil pada tanggal 14 Oktober 2010 dari <http://www.indonesia.com/sripo/2003/03/25/2503opl.htm>
- Smither, J.W. (1998). *Performance appraisal: state of the art in practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Stanley, J.C. & Hopkins, K.D. (1978). *Educational and psychological measurement and evaluation*. New Delhi: Indiana Prentice-Hall of India Private Limited.
- Stark, J.S. & Thomas, A. (1994). *Assessment and program evaluation*. Needham Height: Simon & Schuster Custom Publishing.
- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (2007). *Evaluation, Theory, Models, and Applications*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Stufflebeam, D.L. (1971). *Educational evaluation and decision making*. Ithaca: Peacock.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarno. (2000). *Pengembangan model akreditasi sekolah negeri tingkat SLTP dan SMU*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tenner, A.R. dan De Toro, I.J. (1992). *Total quality management: Three steps to continuous improvement*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.

- Thomas F. Brubaker, T.F. (2004). Measurement of quality attributes in accounting education programs: Perceptions of certified public accountants. *Journal of College Teaching & Learning*, 1 (1), 73-77.
- Thorndike, R.M., Cuningham, G.K., Thorndike, R.L., Hagen, E.P. (1991). *Measurement and evaluation in psychology and education*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Totok Sumaryanto F. (2007). *Kajian penyelenggaraan akreditasi sekolah pada pendidikan dasar*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Trevisan, M.S. (2000). The status of program evaluation expectations in state school counselor certification requirements. *American Journal of Evaluation*, 21 (1), 81–94.
- Wahono Widodo (2009). *Sistem penjaminan mutu pendidikan IPA*. Diambil pada tanggal 18 Maret 2010 dari <http://vahonov.files.wordpress.com/2009/07/sistem-penjaminan-mutu-pengajaran-ipa-wahono.pdf>
- William Francisco, W., Thomas G. Noland, T.G. & Sinclair, D. (2008). AACSB accreditation: Symbol of excellence or march toward medioc. *Journal of College Teaching & Learning*, 5 (5), 25 – 29.
- Worthen, B.R. & Sander, J.R. (1977). *Educational evaluation: Theory and practice*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Worthen, B.R. & Sander, J.R. (1989). *Educational Evaluation: Theory and Practice*. Worthington, Ohio: Charles A. Jones Publishing Company.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Studi Permasalahan

	Nama	
	Tempat Tugas	
	Bagaimana Pemahaman Bapak/Ibu tentang Akreditasi S/M?	☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang

PEDOMAN WAWANCARA STUDI PERMASALAHAN IMPLEMENTASI MODEL AKREDITASI BAN-S/M JENJANG SMA/MA

1. Standar Akreditasi (Komponen/Objek Penilaian)

Pertanyaan	Jawaban Responden
1.1 Ada 8 komponen yang menjadi objek penilaian dalam akreditasi sekolah/madrasah yakni mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (8 SNP). Apakah hasil penilaian terhadap 8 komponen tersebut dapat menggambarkan kelayakan atau mencerminkan mutu sekolah/madrasah secara komprehensif? Apa alasannya?	☐ Ya ☐ Tidak Alasan:
1.2 Apakah setiap komponen dari 8 SNP perlu diberikan bobot penilaian yang berbeda? Apabila 'Ya', coba Bapak/Ibu urutkan mulai dari komponen yang paling penting ke komponen yang kurang penting?	☐ Ya ☐ Tidak Nomor urutan: ☐ Standar Isi ☐ Standar Kompetensi Lulusan ☐ Standar Proses ☐ Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ☐ Standar Sarana dan Prasarana ☐ Standar Pengelolaan ☐ Standar Pembiayaan ☐ Standar Penilaian
1.3 Apabila terdapat perubahan isi salah satu atau beberapa SNP, apakah perlu dilakukan perubahan butir pernyataan dalam instrumen akreditasi sekolah/madrasah? Berikan alasannya!	☐ Ya ☐ Tidak Alasan:

1.4 Selain 8 komponen (8 SNP) tersebut, apakah ada aspek atau komponen penting lainnya yang perlu ditambahkan sebagai objek penilaian dalam akreditasi sekolah/madrasah? Jika ada, aspek atau komponen penting apa saja menurut Bapak/Ibu?	☐ Ada ☐ Tidak ada Ada, yaitu:
1.5 Selain 8 komponen (8 SNP) tersebut, apakah ada aspek atau komponen penting lainnya yang perlu ditambahkan sebagai objek penilaian dalam akreditasi sekolah/madrasah? Jika ada, aspek atau komponen penting apa saja menurut Bapak/Ibu?	☐ Ada ☐ Tidak ada Ada, yaitu:
1.6 Menurut pendapat Bapak/Ibu, apakah aspek seperti <u>pengembangan pendidikan karakter</u> , <u>program penjaminan mutu</u> , <u>budaya mutu sekolah/madrasah</u> dan <u>kemampuan daya saing</u> dapat dijadikan sebagai objek penilaian dalam akreditasi sekolah/ madrasah? Bisa Bapak/Ibu berikan argumentasi!	☐ Ya, dapat ☐ Tidak Argumentasi:

2. Pengumpulan Data dan Penilaian

Pertanyaan	Jawaban Responden
2.1 Sebelum pelaksanaan visitasi oleh Asesor, sekolah/madrasah terlebih dulu diminta mengisi instrumen akreditasi dan instrumen pengumpul data dan informasi pendukung. Menurut Bapak/Ibu, kira-kira berapa persen tingkat keakuratan data dan informasi yang diisikan oleh pihak sekolah/madrasah?	☐ Antara 86 % sampai 100 % ☐ Antara 71 % sampai 85 % ☐ Antara 56 % sampai 70 % ☐ Kurang dari 55 %
2.2 Kira-kira berapa persen tingkat kepercayaan Bapak/Ibu bahwa pihak sekolah/madrasah yang diakreditasi telah melakukan pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpul data dan informasi pendukung secara objektif, jujur, dan tidak ada data yang dimanipulasi?	☐ Antara 86 % sampai 100 % ☐ Antara 71 % sampai 85 % ☐ Antara 56 % sampai 70 % ☐ Kurang dari 55 %
2.3 Pada saat asesor melakukan visitasi, mereka bertugas melakukan verifikasi, validasi, dan klarifikasi terhadap data dan informasi yang	☐ Antara 86 % sampai 100 % ☐ Antara 71 % sampai 85 % ☐ Antara 56 % sampai 70 %

disampaikan pihak sekolah/madrasah. Menurut Bapak/Ibu kira-kira berapa persen tingkat keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan oleh tim asesor?	☐ Kurang dari 55 %
2.4 Kira-kira berapa persen tingkat kepercayaan Bapak/Ibu bahwa asesor telah melaksanakan tugasnya secara profesional (objektif, adil, transparan, dan bertanggung jawab)?	☐ Antara 86 % sampai 100 % ☐ Antara 71 % sampai 85 % ☐ Antara 56 % sampai 70 % ☐ Kurang dari 55 %
2.5 Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang dapat menyebabkan seorang asesor tidak dapat melaksanakan pengumpulan data dan informasi secara maksimal?	
2.6 Apakah ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penilaian asesor yang cenderung kurang objektif? Jika ada, apa misalnya?	☐ Ya ☐ Tidak Ada, yaitu:
2.7 Apabila ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah saat memberikan data/informasi yang cenderung kurang objektif, tidak jujur, dan ada data yang dimanipulasi, motif apa yang menyebabkan sekolah/madrasah melakukan hal itu?	
2.8 Coba Bapak/Ibu berikan saran/pendapat agar dalam proses akreditasi baik pihak sekolah/madrasah maupun asesor dapat menghindarkan diri segala bentuk penyimpangan/penyelewengan terhadap prinsip, norma, dan tata tertib yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah!	
2.9 Apakah Bapak/Ibu memiliki ide/gagasan tentang metode atau teknik lain yang lebih efektif yang dapat menjamin bahwa proses penilaian dalam akreditasi sekolah/madrasah menghasilkan data/informasi yang benar-benar objektif, akurat, dan terpercaya?	

3. Instrumen Akreditasi

Pertanyaan	Jawaban Responden
3.1 Berikan penilaian/pendapat dan komentar tentang instrumen akreditasi yang digunakan di SMA/MA! a. Apakah instrumen bersifat sederhana dan mudah digunakan? b. Apakah secara umum instrumen akreditasi mampu mengungkap hal-hal yang bersifat substantif? Misalnya: - saat asesor menilai standar proses dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan pembelajaran di kelas - saat menilai sarana/prasarana lebih menekankan pada bukti-bukti pemanfaatannya/ pendaayagunaannya c. Apakah butir-butir pernyataan hanya mengungkap hal-hal yang bersifat administratif yang harus disertai dengan bukti fisik berupa dokumen? d. Apakah semua butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi dapat diukur (<i>measurable</i>) dan dapat diamati (<i>observerable</i>)? e. Apakah instrumen disusun dengan kalimat yang tidak menimbulkan banyak penafsiran (<i>non multi- interpretation</i>)? f. Apakah instrumen disusun merujuk pada standar yang jelas (<i>standard reffered</i>)? g. Apakah ada butir pernyataan yang satu dengan butir pernyataan yang lain yang saling meniadakan?	☐ Ya ☐ Tidak Komentar: ☐ Ya ☐ Tidak Komentar: ☐ Ya ☐ Tidak Komentar: ☐ Ya ☐ Tidak Komentar: ☐ Ya ☐ Tidak Komentar: ☐ Ya ☐ Tidak Komentar:
3.2 Dapatkah Bapak/Ibu mengemukakan apa kelebihan dan kelemahan instrumen akreditasi SMA/MA?	Kelebihan/Kelemahan:

3.3 Apakah instrumen akreditasi SMA/MA masih perlu dikembangkan/diperbaiki? Jika “ya”, coba Bapak/Ibu berikan saran/masukan apa yang perlu dikembangkan/diperbaiki!	☐ Ya ☐ Tidak Saran/Masukan:
3.4 Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penilaian selama proses akreditasi, sebaiknya data/informasi tentang kelayakan sebuah sekolah/madrasah yang dilaporkan oleh pihak sekolah/madrasah perlu dipublikasikan melalui media cetak (koran) atau diunggah (di-<i>upload</i>) di internet. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?	
3.5 Penetapan nilai secara rinci untuk setiap komponen dari hasil akreditasi sekolah/madrasah sebaiknya perlu dipublikasi di media masa (koran) dan internet. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?	
3.6 Saat ini BAN-S/M sedang merintis pengembangan model akreditasi dengan sistem <i>on-line</i>. Kemungkinan pengisian data/informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah dalam instrumen akreditasi dilakukan secara <i>on-line</i>? Beri komentar! Apa kelebihan dan kelemahannya?	

4. Pelaksanaan Akreditasi di SMA/MA

Pertanyaan	Jawaban Responden
4.1 Menurut penilaian Bapak/Ibu, kira-kira berapa persen prinsip-prinsip pelaksanaan akreditasi yakni jujur, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional telah dipatuhi oleh pihak sekolah/madrasah, asesor, dan BAP-S/M?	☐ Antara 86 % sampai 100 % ☐ Antara 71 % sampai 85 % ☐ Antara 56 % sampai 70 % ☐ Kurang dari 55 %

4.2 Kalau misalnya ada sekolah/madrasah yang ditengarai atau ada indikasi melakukan kecurangan/penyimpangan dalam pelaksanaan akreditasi, sebenarnya motif apa atau alasan apa yang mendasari sekolah/madrasah melakukan hal itu?	
4.3 Kalau misalnya ada oknum asesor yang memberikan penilaian kepada sekolah/madrasah yang diakreditasi cenderung kurang objektif dan tidak akurat, menurut pendapat Bapak/Ibu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi?	
4.4 Apa ide/gagasan Bapak/Ibu agar pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dapat menghasilkan data yang objektif, akurat, dan lebih terpercaya?	

5. Prosedur Pelaksanaan Akreditasi

Pertanyaan	Jawaban Responden
5.1 Untuk lebih memberikan kesempatan kepada sekolah/madrasah dapat melakukan re-akreditasi (akreditasi ulang karena habis masanya), apakah Bapak/Ibu setuju seandainya pendanaan akreditasi selain dibebankan dari APBN juga perlu dibebankan dari APBD. Jika Bapak/Ibu sangat setuju atau setuju, berikan alasannya?	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju Alasan:
5.2 Diantara alternatif masa pendaftaran bagi sekolah/madrasah yang ingin diakreditasi berikut, manakah yang Bapak/Ibu rekomendasikan?	☐ Setiap saat dapat mendaftar secara <i>online</i> ☐ Setahun ada dua kali masa pendaftaran secara <i>online</i> . ☐ Setahun sekali ada masa pendaftaran secara <i>online</i> .
5.3 Meskipun akreditasi dilakukan dengan sistem <i>online</i> , saat sekolah/madrasah melakukan pengisian instrumen akreditasi sebaiknya dilakukan secara manual baru kemudian diunggah (di-upload) secara <i>online</i> . Jika sangat setuju atau setuju, berikan alasannya?	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju Alasan:

5.4 Meskipun akreditasi dilakukan dengan sistem <i>online</i> , saat sekolah/madrasah melakukan pengisian instrumen akreditasi sebaiknya dilakukan secara manual baru lebih dulu kemudian diunggah (di- <i>upload</i>) secara <i>online</i> . Jika Bapak/Ibu sangat setuju atau setuju, berikan alasannya?	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju Alasan:
5.5 Saat sekolah/madrasah mengunggah (meng- <i>upload</i>) instrumen akreditasi dan instrumen pengumpul data dan informasi pendukung yang sudah diisi, sebaiknya perlu disertai dengan lampiran bukti berupa foto/gambar yang relevan. Jika Bapak/Ibu sangat setuju atau setuju, berikan alasannya?	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju Alasan:
5.6 Setelah sekolah/madrasah mengunggah (meng- <i>upload</i>) instrumen akreditasi dan instrumen pengumpul data dan informasi pendukung yang sudah diisi, berapa lama sekolah/madrasah menunggu informasi tentang kelayakan untuk divisitasi? Pilih satu diantara alternatif berikut.	☐ Satu minggu ☐ Dua minggu ☐ Tiga minggu ☐ Satu bulan
5.7 Bila akreditasi dilakukan dengan sistem <i>online</i> , apakah visitasi ke sekolah/madrasah oleh asesor tetap perlu dilakukan? Jika ‘Ya’, apa alasannya?	☐ Ya ☐ Tidak Alasan:
5.8 Menurut Bapak/Ibu, berapa lama/jumlah hari yang relatif memadai bagi asesor berada di sekolah/madrasah saat visitasi agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan data dan informasi yang objektif, akurat, dan terpercaya? Pilih satu diantara alternatif berikut.	☐ Dua hari ☐ Tiga hari ☐ Tergantung dari hasil penilaian kelayakan untuk divisitasi (jika nilainya A/B perlu tiga hari, tetapi jika nilainya C cukup dua hari.

_____, _____ 20__

Pewawancara/Peneliti,

Lampiran 2. Angket Pendapat Praktisi Tentang Akreditasi SMA/MA

ANGKET PENDAPAT PRAKTIKSI TENTANG AKREDITASI SMA/MA

Petunjuk: Berikan tanda cek (✓) pada kolom alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

No.	Pernyataan	Jawaban
1	Penilaian mutu SMA/MA secara komprehensif harus mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
2	Aspek-aspek seperti peran serta masyarakat, daya saing, transparansi, lingkungan dan budaya sekolah merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan sebagai indikator utama mutu SMA/MA.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
3	Instrumen akreditasi dapat digunakan oleh pihak sekolah/madrasah sebagai alat dalam melakukan evaluasi diri secara berkala.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
4	Instrumen akreditasi perlu dikembangkan/ disempurnakan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan zaman.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
5	Butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi sebaiknya tidak sekedar menilai hal-hal yang bersifat administratif melainkan juga menilai hal-hal yang bersifat substantif/faktual.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
6	Butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi sekolah sebaiknya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator kinerja kunci dengan fokus pada ukuran strategis mencakup input, proses, dan hasil dan tidak harus mencakup semua informasi mengenai kondisi sekolah.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
7	Butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi harus mengungkap fakta yang sebenarnya atau kinerja faktual.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
8	Instrumen akreditasi yang digunakan saat ini perlu dikembangkan guna menjamin data dan informasi yang diperoleh dapat lebih objektif, valid, dan akuntabel	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
9	Sekolah/madrasah yang akan diakreditasi sebaiknya berdasarkan pertimbangan prioritas yang sudah habis masa berlakunya atau diutamakan sekolah/madrasah baru yang belum diakreditasi, bukan berdasarkan kuota semata.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju

10	Saat ini masih ada pandangan bahwa akreditasi sekolah merupakan kepentingan pemerintah, bukan kebutuhan dari pihak sekolah/madrasah.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
12	Sebelum sekolah/madrasah diakreditasi, data akreditasi diunggah secara <i>online</i> disertai dengan keterangan bukti fisik apa saja yang tersedia di sekolah/madrasah.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
13	Jadwal visitasi asesor sekolah/madrasah yang akan diakreditasi tidak perlu diberitahukan terlebih dulu kepada pihak sekolah/madrasah, jadwal visitasi yang diinformasikan hanya berupa rentang tanggal saja.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
14	Pada saat visitasi, asesor harus melakukan validasi, verifikasi, dan klarifikasi data dan informasi secara ketat, cermat, teliti, dan profesional.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
15	Waktu pelaksanaan visitasi ke sekolah/madrasah ditentukan nilai akreditasi sebelumnya atau berdasarkan estimasi nilai akreditasi berdasarkan data akreditasi yang telah dikirim pada saat pendaftaran untuk diakreditasi sebagai berikut: (a) terakreditasi A selama 3-4 hari, (b) terakreditasi B selama 2-3 hari, dan terakreditasi C selama 1-2 hari.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
16	Asesor yang melaksanakan tugas secara tidak profesional dan melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan akreditasi dan melanggar norma, tata krama, dan tata tertib sebagaimana ditetapkan perlu diberikan sanksi yang tegas.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
17	Dalam memberikan penilaian, asesor perlu dibekali dengan instrumen verifikasi dan validasi data sehingga tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara hasil penilaian asesor yang satu dengan asesor yang lain.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
18	Untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas, maka data dan informasi hasil akreditasi sekolah setiap sekolah sebaiknya dipublikasi secara <i>online</i> , data dan informasi yang dipublikasikan tidak hanya nilai akhir hasil penetapan status akreditasi A, B, C, atau TT.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
19	Anggota/pengelola lembaga akreditasi sekolah/madrasah sebaiknya berasal dari kalangan profesional, memenuhi persyaratan tertentu, dan telah melalui uji kompetensi dan kelayakan.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju
20	Asesor akreditasi sebaiknya direkrut dari kalangan profesional atau pejabat fungsional di bidang pendidikan, telah lulus seleksi, dan telah mengikuti pelatihan asesor akreditasi.	☐ Sangat setuju ☐ Setuju ☐ Kurang setuju ☐ Tidak setuju

_____, _____ 20__
Responen,

Lampiran 3. Pendapat Praktisi Tentang Pelaksanaan Akreditasi SMA/MA

PENDAPAT PRAKTIKSI TENTANG PELAKSANAAN AKREDITASI SMA/MA

No.	Responden	Jawaban Butir Pernyataan Nomor																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Praktisi 1	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3
2	Praktisi 2	3	3	2	3	4	4	3	2	3	4	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3
3	Praktisi 3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4
4	Praktisi 4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
5	Praktisi 5	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
6	Praktisi 6	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2
7	Praktisi 7	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3
8	Praktisi 8	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4
9	Praktisi 9	3	3	2	3	4	4	4	2	4	4	2	3	2	3	4	3	3	3	4	3
10	Praktisi 10	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4
11	Praktisi 11	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3
12	Praktisi 12	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
13	Praktisi 13	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4
14	Praktisi 14	4	3	2	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2
15	Praktisi 15	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3	3	3	4	3
16	Praktisi 16	4	3	3	3	3	3	4	2	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4
17	Praktisi 17	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	3	3
18	Praktisi 18	3	3	2	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
19	Praktisi 19	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
20	Praktisi 20	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	2	3	2	3	4	3	3	3	4	3
21	Praktisi 21	3	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
22	Praktisi 22	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	2	3	2	3	4	3	3	4	4	3
23	Praktisi 23	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3
24	Praktisi 24	4	3	3	4	3	2	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
25	Praktisi 25	3	3	4	3	4	4	3	2	3	4	2	3	2	4	4	3	4	3	4	3
26	Praktisi 26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
27	Praktisi 27	3	3	4	3	4	4	3	2	3	4	2	3	3	4	4	3	4	3	4	3
28	Praktisi 28	3	2	3	4	2	3	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
29	Praktisi 29	3	3	2	3	4	4	3	2	3	4	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3
30	Praktisi 30	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
	Σ Skor 4	9	1	5	6	17	13	7	5	10	19	5	4	5	9	9	13	10	4	14	10
	Σ Skor 3	21	25	15	24	11	16	23	14	20	11	17	26	18	19	21	17	20	26	16	18
	Σ Skor 2	0	4	10	0	2	1	0	11	0	0	8	0	7	2	0	0	0	0	0	2
	Σ Skor 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Praktisi = Kepala SMA/MA, Guru, dan Tenaga Administrasi (Staf Tata Usaha).
2. Skor 4 = Sangat setuju; Skor 3 = Setuju; Skor 2 = Kurang setuju; dan Skor 1 = Tidak setuju.

Lampiran 4. Bahan *Focus Group Discussion* (FGD) Tahap 1

BAGIAN I STANDAR AKREDITASI

A. Pengertian Standar Akreditasi

Standar akreditasi adalah parameter kelayakan sekolah/madrasah yang bersifat komprehensif yang menggambarkan/mencerminkan mutu sekolah/madrasah yang diakreditasi. Deskripsi standar akreditasi dalam konsep model akreditasi ini mengacu pada standar nasional pendidikan ditambah dan/atau dikombinasikan dengan standar akreditasi sekolah sebagaimana digunakan oleh lembaga akreditasi sekolah di beberapa negara maju.

B. Standar-standar Akreditasi

1. Standar Akreditasi 1: Isi Kurikulum

Nomor	Deskripsi
1.1	Sekolah/Madrasah menerapkan Kurikulum Nasional yang ditetapkan Pemerintah.
1.2	Sekolah/Madrasah menerapkan Kurikulum lainnya yang dikembangkan berdasarkan karakteristik tertentu, antara lain: kurikulum keagamaan, kurikulum keunggulan/muatan lokal, dan kurikulum sekolah internasional.

2. Standar Akreditasi 2: Proses Pembelajaran

Nomor	Deskripsi
2.1	Semua guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Standar Proses yang ditetapkan Pemerintah.
2.2	Setiap proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan serta adanya transformasi nilai dan pengetahuan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2.3	Peserta didik puas dengan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah/madrasah.

3. Standar Akreditasi 3: Penilaian

Nomor	Deskripsi
3.1	Semua guru mampu membuat rancangan penilaian proses dan hasil belajar sesuai Standar Penilaian yang ditetapkan Pemerintah.
3.2	Semua guru mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar sesuai Standar Penilaian yang ditetapkan Pemerintah.
3.3	Hasil penilaian proses dan hasil belajar ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh guru sebagai acuan dalam mempertahankan/meningkatkan mutu proses pembelajaran.

4. Standar Akreditasi 4: Kompetensi Lulusan

Nomor	Deskripsi
4.1	Peserta didik memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan Pemerintah.
4.2	Orang tua/wali peserta didik puas dengan kompetensi yang dimiliki anaknya.
4.3	Rerata nilai semua mata pelajaran di kelas XII lebih besar sama dengan 75,00 (Skala 0 – 100).

5. Standar Akreditasi 5: Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nomor	Deskripsi
5.1	Semua guru memiliki standar kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
5.2	Semua guru mampu membuat program perencanaan pembelajaran/layanan bimbingan dan melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan serta terampil mengembangkan instrumen penilaian peserta didik sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
5.3	Semua guru mampu melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
5.4	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

6. Standar Akreditasi 6: Pengelolaan

Nomor	Deskripsi
6.1	Sekolah/Madrasah menerapkan manajemen sekolah/madrasah sesuai Standar Pengelolaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
6.2	Sekolah/Madrasah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
6.3	Sekolah/Madrasah menerapkan Sistem Manajemen Keuangan Berbasis Bank.
6.4	Sekolah/Madrasah memiliki dokumen Laporan Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah/Madrasah yang dipublikasikan melalui Websitemilik Sekolah/Madrasah.
6.5	Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya Baik.
6.6	Hasil Penilaian Kinerja semua Guru dan Guru Pembimbing sekurang-kurangnya Baik.
6.7	Hasil Penilaian Kinerja semua tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium sekurang-kurangnya Baik.

7. Standar Akreditasi 7: Sarana dan Prasarana

Nomor	Deskripsi
7.1	Sekolah/madrasah memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah.
7.2	Sekurang-kurangnya 85 persen sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah/madrasah digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik.
7.3	Setiap penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tercatat dalam buku jurnal (<i>log book</i>).

8. Standar Akreditasi 8: Budaya Mutu

Nomor	Deskripsi
8.1	Sekolah/madrasah memiliki pengembangan budaya mutu yang terprogram dan berkelanjutan.
8.2	Sekolah/madrasah memiliki slogan dan atribut mutu.
8.3	Sekolah/madrasah memiliki prestasi akademik dan non akademik yang mengindikasikan kemampuan daya saing sekolah/madrasah.
8.4	Sekolah/madrasah memiliki hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dan alumni terkait dengan pengembangan budaya mutu sekolah/madrasah.

BAGIAN II

PERANGKAT AKREDITASI

A. Instrumen Akreditasi

Instrumen Akreditasi dikembangkan berdasarkan standar-standar akreditasi. Prinsip penilaian kelayakan sekolah/madrasah yang diakreditasi adalah membandingkan antara kondisi riil yang ada di sekolah/madrasah dengan standar-standar akreditasi. Komponen-komponen yang diakreditasi dalam instrumen akreditasi ini terdiri atas 8 (delapan) komponen standar, yaitu:

1. Isi Kurikulum
2. Proses Pembelajaran
3. Penilaian
4. Kompetensi Lulusan
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Pengelolaan
7. Sarana dan Prasarana
8. Budaya Mutu

Butir-butir pertanyaan/ Pernyataan dalam instrumen akreditasi disusun berdasarkan indikator-indikator kunci dari setiap standar akreditasi.

Rumusan Indikator Kunci untuk Setiap Akreditasi sebagai berikut:

Komponen	Standar	Indikator Kunci
Isi Kurikulum	1.1	- Sekolah/Madrasah memiliki dokumen kurikulum nasional yang sistematikanya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. - Kurikulum nasional yang digunakan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. - Dokumen kurikulum nasional yang digunakan dipublikasikan di Website Sekolah/Madrasah.
	1.2	- Sekolah/Madrasah memiliki dokumen kurikulum tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah /madrasah yang sistematikanya mengacu pada dokumen kurikulum nasional. - Kurikulum sesuai karakteristik sekolah/madrasah yang digunakan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

		Dokumen kurikulum sesuai karakteristik sekolah/madrasah yang digunakan dipublikasikan di Website Sekolah/Madrasah.
Proses Pembelajaran	2.1	- Prasyarat proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Standar Proses yang ditetapkan oleh Pemerintah. - Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Proses yang ditetapkan Pemerintah.
	2.2	- Setiap pelaksanaan proses pembelajaran guru berorientasi pada pendekatan pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan. - Setiap pelaksanaan proses pembelajaran terdapat indikasi guru menanamkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
	2.3	- Setiap pelaksanaan proses pembelajaran, aktivitas di kelas didominasi oleh peserta didik. - Survei terhadap peserta didik menunjukkan bahwa lebih dari 85 persen peserta didik menyatakan puas mengikuti proses pembelajaran.
Penilaian	3.1	- Rancangan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan ketentuan dalam Standar Penilaian yang ditetapkan Pemerintah. - Setiap guru dapat menunjukkan contoh instrumen yang digunakan dalam penilaian proses dan hasil belajar.
	3.2	- Setiap guru memiliki catatan/bukti-bukti pernah melakukan penilaian proses dan hasil belajar. - Setiap guru memiliki contoh hasil analisis data nilai hasil belajar.
	3.3	- Setiap guru dapat menunjukkan contoh program perbaikan dan pengayaan yang dibuat berdasarkan hasil analisis data nilai hasil belajar. - Siswa dapat mengakses nilai hasil belajar melalui Website Sekolah/Madrasah.
Kompetensi Lulusan	4.1	- Survei terhadap peserta didik menunjukkan bahwa lebih dari 85 persen peserta didik mengaku memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan Pemerintah. - Sampel rerata nilai rapor peserta didik lebih besar sama dengan 75,00 (Skala 0 – 100).

	4.2	• Survei terhadap orang tua/wali menunjukkan bahwa lebih dari 85 persen orang tua/walimengaku puas dengan kompetensi yang dikuasaianaknya.
	4.3	• Rerata nilai mata pelajaran di Kelas XII yang diuji oleh Pihak Eksternal (Ujian Nasional) lebih besar sama dengan 75,00 (Skala 0 – 100). • Rerata nilai mata pelajaran di Kelas XII yang diujikan oleh Pihak Sekolah/Madrasah lebih besar sama dengan 75,00 (Skala 0 – 100).
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1	• Sekolah/Madrasah memiliki data dan bukti-bukti kompetensi guru sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru yang ditetapkan Pemerintah. • Sekolah/Madrasah memiliki data dan bukti-bukti kompetensi guru pembimbing/konselor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pembimbing yang ditetapkan Pemerintah.
	5.2	• Semua guru mata pelajaran mempunyai tugas mengajar yang relevan dengan kualifikasi dan sertifikasinya. • Semua guru yang bertugas memberikan layanan bimbingan konseling memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai konselor (guru pembimbing).
	5.3	• Semua guru mata pelajaran mampu menyiapkan penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Proses yang ditetapkan Pemerintah. • Semua guru pembimbing mampu membuat program layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Kompetensi Guru Pembimbing yang ditetapkan Pemerintah.
	5.4	• Semua guru melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dibuktikan dengan laporan kegiatan dan karya publikasi ilmiah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah. • Rata-rata guru dapat naik pangkat/naik jabatan dalam kurun waktu 4 – 5 tahun.
	5.5	• Semua tenaga administrasi mampu melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah. • Semua tenaga administrasi memiliki nilai kinerja minimal baik.

Pengelolaan	6.1	• Memiliki visi dan misi sesuai tujuan pendidikan jenjang menengah. • Memiliki program kerja tahunan dan program kerja 4 tahunan. • Memiliki pedoman pengelolaan sekolah sesuai dengan Standar Pengelolaan yang ditetapkan Pemerintah. • Memiliki struktur organisasi dan uraian pembagian tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Pengelolaan sumber daya yang dimiliki dilakukan secara efektif dan efisien. • Setiap implementasi program selalu ada laporan kegiatan disertai bukti-bukti yang akurat.
	6.2	• Menerapkan manajemen berbasis sekolah. • Memiliki manual mutu dan prosedur mutu yang dibuat mengacu pada ISO 9001:2008. • Memiliki dokumen/catatan dan bukti-bukti pelaksanaan pengawasan/monitoring dan evaluasi.
	6.3	• Transaksi keuangan dilakukan menggunakan jasa perbankan. • Catatan pengeluaran biaya anggaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran sekolah/madrasah (RKA-S/M).
	6.4	• Memiliki laporan akuntabilitas pengelolaan sekolah/madrasah setiap semester. • Laporan akuntabilitas pengelolaan sekolah/madrasah dipublikasikan melalui website sekolah/madrasah.
	6.5	• Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah selama 2 tahun berturut-turut sekurang-kurangnya Baik. • Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dipublikasikan melalui website sekolah/madrasah.
	6.6	• Hasil penilaian kinerja semua guru/guru pembimbing selama 3 tahun berturut-turut sekurang-kurangnya Baik. • Hasil penilaian kinerja guru/guru pembimbing dipublikasikan melalui website sekolah/madrasah.
	6.7	• Hasil penilaian kinerja semua tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium selama 3 tahun berturut-

		turutsekurang-kurangnya baik. • Hasil penilaian kinerja tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium dipublikasikan melalui website sekolah/madrasah.
Sarana dan Prasarana	7.1	• Sekolah/madrasah memiliki sarana dan prasarana yang disertai dengan dokumen/bukti-bukti yang sah.
		• Data sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah/madrasah dipublikasikan melalui website sekolah/madrasah.
	7.2	• Lebih besar sama dengan 85 persen sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah/madrasah digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik. • Survei terhadap peserta didik menunjukkan bahwa lebih besar sama dengan 85 persen peserta didik mengaku sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah/madrasah sudah memadai.
	7.3	• Memiliki catatan/bukti-bukti penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki. • Survei terhadap peserta didik menunjukkan bahwa lebih besar sama dengan 85 persen peserta didik mengaku telah menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah/madrasah.
Pengembangan Budaya Mutu	8.1	• Memiliki program pengembangan budaya mutu secara berkelanjutan. • Semua warga sekolah dilibatkan dalam pengembangan budaya mutu sekolah/madrasah.
	8.2	• Memiliki slogan dan atribut tentang mutu yang disosialisasikan kepada semua warga sekolah/madrasah. • Slogan dan atribut terpampang di semua ruangan dan lokasi di lingkungan sekolah. • Survei kepada warga sekolah/madrasah menunjukkan bahwa lebih besar 85 persen warga sekolah/madrasah mendukung program pengembangan budaya mutu.
	8.3	• Memiliki data lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. • Memiliki data disertai bukti-bukti prestasi di bidang akademik yang mengindikasikan

		kemampuan daya saing (misal: Juara LCT, Juara Olimpiade MIPA) sekurang-kurangnya tingkat Kabupaten/Kota Memiliki data disertai bukti-bukti prestasi di bidang non akademik (seni budaya dan olah raga) yang mengindikasikan kemampuan daya saing sekurang-kurangnya tingkat Kabupaten/Kota.
	8.4	- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan pengembangan budaya mutu. - Mendapat dukungan dari alumni terkait dengan pengembangan budaya mutu.

Berdasarkan kisi-kisi instrumen akreditasi di atas, akan dikembangkan instrumen akreditasi sebagaimana terlampir (Akan dibuat setelah pelaksanaan FGD Tahap I).

B. Pengembangan Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi

Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi ini berisi penjelasan cara pengisian instrumen dan penggunaan instrumen pengumpul data pendukung serta informasi tentang bukti dokumen, data dan/atau bukti-bukti fisik yang harus dipenuhi dan ditunjukkan oleh pihak Sekolah/Madrasah pada saat pelaksanaan akreditasi.

Setiap penilaian komponen akreditasi, mengacu pada standar-standar akreditasi dan indikator kunci. Ruang lingkup petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi sebagai berikut:

Komponen	Instrumen Utama	Instrumen Pendukung	Bukti Fisik
Isi Kurikulum	Instrumen Akreditasi	-	- Dokumen Kurikulum - Publikasi Dokumen Kurikulum di Website
Proses Pembelajaran	Instrumen Akreditasi	- Lembar Observasi Pembelajaran - Angket Kepuasan Siswa	- Contoh Silabus dan RPP - Contoh Video/Rekaman Kegiatan Pembelajaran - Data Angket
Penilaian Proses dan Hasil Belajar	Instrumen Akreditasi	Checlist Kegiatan Guru dalam	- Contoh Silabus dan RPP - Contoh Instrumen/

Komponen	Instrumen Utama	Instrumen Pendukung	Bukti Fisik
		Penilaian	Soal/Tugas • Contoh Video/ Rekaman Kegiatan Pembelajaran • Data Hasil Analisis Nilai Ulangan • Program Remedial/ Pengayaan
Kompetensi Lulusan	Instrumen Akreditasi	• Angket Kepuasan Siswa • Angket Kepuasan Orang Tua/Wali • Form Data Nilai Rapor & Nilai Ujian	• Data Angket • Data Angket • Data Nilai Rapor & Nilai Ujian
Kompetensi Guru	Instrumen Akreditasi	• Form Data Kompetensi Guru	• Data Terkait Kompetensi Guru • Program Pembelajaran/ Pembimbingan • Laporan Hasil Pengembangan Diri Guru • Karya Publikasi Ilmiah
Manajemen	Instrumen Akreditasi	• Form Data Kinerja Kepala Sekolah, Guru, dan Staf	• RKA-S/M • Laporan Akuntabilitas • Contoh Hasil Supervisi • Laporan Monev • Website
Sarana dan Prasarana	Instrumen Akreditasi	• Form Data Sarana dan Prasarana	• Data Sarana dan Prasarana • Bukti Kepemilikan • Buku Inventaris • Buku Jurnal Penggunaan

Komponen	Instrumen Utama	Instrumen Pendukung	Bukti Fisik
			Foto Sarana dan Prasarana
Pengembangan Budaya Mutu	Instrumen Akreditasi	- Angket Dukungan Warga Sekolah - Form Data Prestasi Sekolah	- Program Pengembangan Budaya Mutu - Data Prestasi Sekolah - Foto Terkait Budaya Mutu - Data Angket - Program Kerjasama & MoU

Petunjuk teknik pengisian instrumen akreditasi sebagaimana terlampir. (Akan dibuat setelah pelaksanaan kegiatan FGD Tahap I).

C. Instrumen Pendukung Akreditasi

1. Lembar Observasi Pembelajaran
2. Angket Kepuasan Siswa Terhadap Pembelajaran
3. Angket Kepuasan Orang Tua/Wali
4. Checklist Kegiatan Guru dalam Penilaian
5. Angket Kepuasan Siswa Terhadap Kompetensi yang Dimiliki
6. Angket Kepuasan Orang Tua/Wali Terhadap Kompetensi Anaknya
7. Form Data Nilai Rapor & Nilai Nilai Ujian
8. Form Data Kompetensi Guru
9. Form Data Kinerja Kepala Sekolah, Guru, dan Staf
10. Form Data Sarana dan Prasarana
11. Angket Dukungan Warga Sekolah
12. Form Data Prestasi Sekolah/Madrasah

Instrumen pendukung akreditasi akan dibuat setelah pelaksanaan kegiatan FGD Tahap I.

BAGIAN III

PROSEDUR AKREDITASI

A. Persyaratan Sekolah/Madrasah yang Akan Diakreditasi

Sekolah/Madrasah yang meminta untuk diakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Izin Pendirian/Operasional Sekolah/Madrasah (Khusus untuk Sekolah/Madrasah Baru)
2. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas.
3. Memiliki sarana dan prasarana yang relatif memadai
4. Memiliki Guru Tetap sekurang-kurang 80 persen dari jumlah guru yang ada.
5. Melaksanakan kurikulum yang berlaku secara nasional
6. Memiliki Website dan Alamat E-mail Sekolah/Madrasah.

B. Pendaftaran Akreditasi

Pendaftaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi diadakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu: (1) Periode Januari – Maret dan (2) Periode Juli – September.

Pendaftaran dilakukan secara **on-line** melalui website milik Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Adapun langkah-langkah pendaftaran sebagai berikut:

1. Membuka Website Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
2. Melakukan Register Keanggotaan (Khusus Sekolah/Madrasah yang belum pernah diakreditasi).
3. Login menggunakan Username dan Password yang dimiliki
4. Mengisi Form Aplikasi Pendaftaran (*On-line*)
5. Logout
6. Membuka e-mail milik Sekolah/Madrasah
7. Mengunduh (men-*download*) kiriman perangkat akreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
8. Mengisi instrumen akreditasi utama dan instrumen akreditasi pendukung.
9. Membuka kembali Website Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
10. Login menggunakan Username dan Password yang dimiliki
11. Mengunggah (meng-*upload*) instrumen akreditasi utama dan instrumen akreditasi pendukung disertai dengan bukti foto yang relevan seperlunya.
12. Logout (Proses Pendaftaran Selesai).

C. Verifikasi Kelayakan untuk Diakreditasi

Setelah sekolah/madrasah melakukan pendaftaran akreditasi, Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah akan melakukan verifikasi apakah sekolah/madrasah yang akan diakreditasi layak atau belum layak untuk diakreditasi.

Selanjutnya Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah akan mengirimkan pemberitahuan kepala Sekolah/Madrasah tentang hasil verifikasi kelayakan melalui e-mail dan informasi kapan akan divisitasi.

D. Visitasi Akreditasi

Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah akan menugaskan Asesor untuk visitasi ke sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.

Pada saat visitasi, Asesor akan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan awal guna menyampaikan maksud dan tujuan visitasi serta berkomunikasi dengan personalia yang disiapkan sekolah/madrasah untuk membantu memperlancar tugas Asesor.
2. Melakukan validasi dan verifikasi serta mengecek kesuaian antara data dan informasi yang diisikan pada instrumen akreditasi utama dan instrumen akreditasi pendukung pada saat pendaftaran akreditasi dengan kondisi yang ada.
3. Melakukan observasi dan wawancara dengan warga sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa data dan informasi yang ada di sekolah/madrasah dan akurat dan benar adanya.
4. Mengadakan pertemuan dengan perwakilan orang tua/wali siswa yang diundang secara oleh pihak sekolah/madrasah guna mengisi angket kepuasan dan meminta informasi berkenaan pengembangan budaya mutu di sekolah/madrasah.
5. Mengadakan pertemuan dengan warga sekolah/madrasah guna meminta informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah melalui pengisian angket.
6. Mengadakan pertemuan dengan perwakilan siswa guna mengisi angket kepuasan siswa.
7. Melakukan pertemuan akhir guna melakukan klarifikasi temuan-temuan yang berbeda atau adanya data/bukti-bukti yang kurang sesuai dengan yang diisikan pada instrumen akreditasi saat pendafataran.

E. Laporan Hasil Visitasi

Asesor membuat laporan hasil visitasi baik secara perorangan maupun tim secara tertulis. Laporan hasil visitasi dikirimkan/diserahkan ke Sekretariat Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

F. Verifikasi Laporan Hasil Visitasi

Berdasarkan laporan hasil visitasi dari Asesor, Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah melakukan verifikasi apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan visitasi.

G. Penetapan Hasil Akreditasi

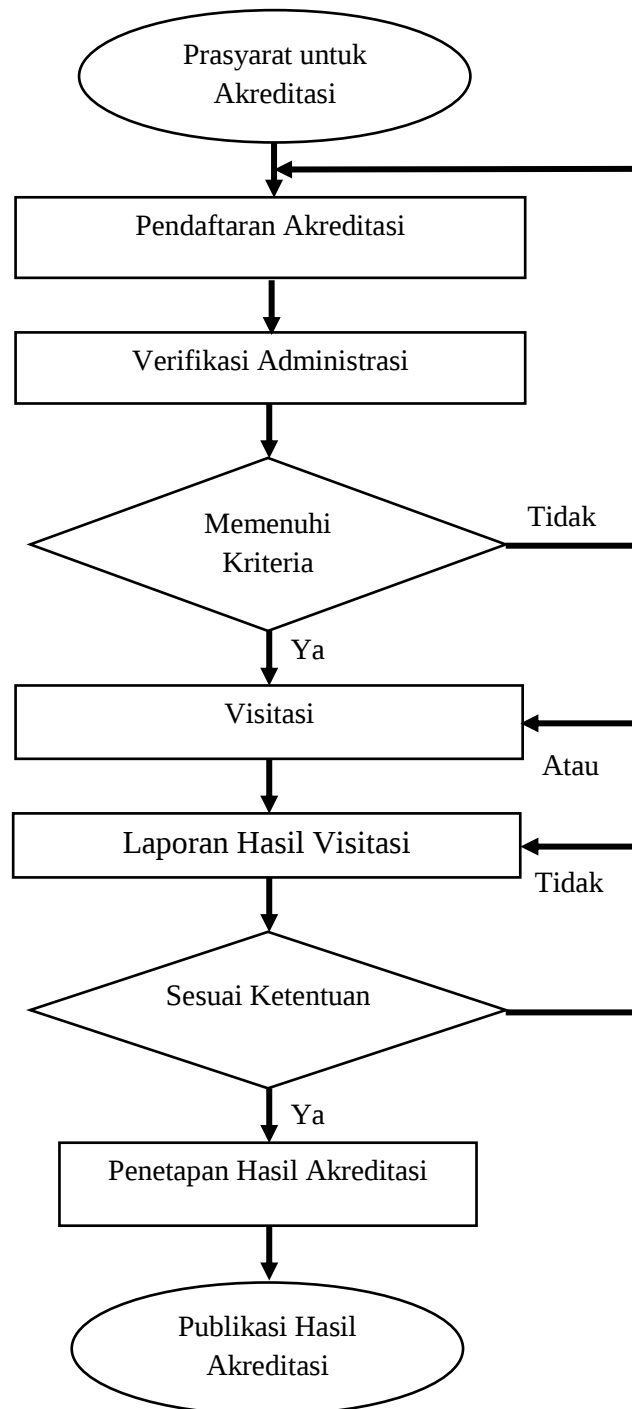
Penetapan hasil akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah melalui Sidang Pleno.

H. Publikasi Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi dipublikasikan secara terbuka melalui Website Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan akreditasi. Hasil akreditasi dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pengakuan kelayakan sekolah/madrasah yang diberikan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah dan dipublikasikan secara on-line dan bersifat terbuka merupakan bentuk penjaminan mutu secara eksternal.

Flow Chart Prosedur Akreditasi



BAGIAN IV

PEDOMAN PENSKORAN DAN PENILAIAN

A. Penskoran

Setiap butir dalam instrumen akreditasi utama diberi skor terendah = 1 dan skor tertinggi = 4, sedangkan butir instrumen pendukung tidak diberi skor. Jumlah skor (S) untuk masing-masing komponen akreditasi diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh untuk setiap butir instrumen. Selanjutnya untuk setiap komponen akreditasi diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingan komponen.

Bobot untuk masing-masing komponen akreditasi sebagai berikut:

No.	Komponen Akreditasi	Jumlah Skor (S)	Bobot (B)	Skor Tertimbang (S x B)
1	Kurikulum		10	
2	Proses Pembelajaran		30	
3	Penilaian Proses dan Hasil Belajar		10	
4	Kompetensi Lulusan		20	
5	Kompetensi Guru		20	
6	Manajemen		15	
7	Sarana dan Prasarana		15	
8	Pengembangan Budaya Mutu		10	

Catatan:

Secara rinci akan dirumuskan setelah instrumen akreditasi selesai dibuat.

B. Penilaian

1. Nilai Komponen Akreditasi:

$$\text{Nilai Komponen} = \frac{\text{Skor Tertimbang yang Diperoleh}}{\text{Skor Tertimbang Maksimum}} \times 100$$

2. Nilai Akreditasi:

$$\text{Nilai Akreditasi} = \frac{NK1+NK2+NK3+NK4+NK5+NK6+NK7+NK8}{8}$$

C. Petunjuk Penggunaan Program Aplikasi

Petunjuk penggunaan program aplikasi berisi penjelasan teknis langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh pengguna program aplikasi (pihak sekolah/madrasah dan asesor) untuk mengetahui nilai akhir akreditasi.

(Petunjuk penggunaan akan dibuat setelah program aplikasi penilaian akreditasi selesai dikembangkan).

Lampiran 5. Lembar Telaah Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA

Nama	
Jabatan	
Tempat Tugas	

**LEMBAR TELAAH
KONSEP PENGEMBANGAN MODEL AKREDITASI SMA/MA**

No.	Aspek yang Ditelaah	Komentar dan Masukan/Saran
1	Standar Akreditasi	Komentar:
		Masukan/Saran:
2	Perangkat Akreditasi	Komentar:
		Masukan/Saran:
3	Prosedur Akreditasi	Komentar:
		Masukan/Saran:
4	Penskoran dan Penilaian Akreditasi	Komentar:
		Masukan/Saran:

_____, _____ 2013
Peserta FGD Tahap 1,

(Tanda Tangan & Nama)

Lampiran 6. Bahan *Focus Group Discussion* (FGD) Tahap 2

BAGIAN I KONSEP STANDAR AKREDITASI SMA/MA

A. Pengertian Standar Akreditasi

Standar akreditasi adalah parameter kelayakan sekolah/madrasah yang menggambarkan/mencerminkan mutu sekolah/madrasah secara komprehensif berdasarkan kriteria tertentu.

Deskripsi standar akreditasi dalam konsep standar akreditasi dalam penelitian ini dirumuskan/mengacu pada regulasi yang terkait Standar Nasional Pendidikan.

B. Nama Standar Akreditasi

Merujuk pada nama standar akreditasi yang digunakan pada perguruan tinggi (Model BAN-PT) yang tidak secara eksplisit menggunakan nama 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka dengan mengadopsi nama standar akreditasi yang digunakan pada perguruan tinggi tersebut peneliti mengubah nama standar akreditasi sebagai komponen penilaian akreditasi untuk jenjang SMA/MA yang semula identik dengan nama-nama 8 SNP berubah menjadi nama-nama sebagai berikut:

- a. Standar 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- b. Standar 2. Proses Pembelajaran
- c. Standar 3. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
- d. Standar 4. Kompetensi Lulusan
- e. Standar 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar 6. Sarana dan Prasarana
- g. Standar 7. Pengelolaan dan Pembiayaan
- h. Standar 8. Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan

Adapun argumentasi perubahan nama standar akreditasi di atas, antara lain: (1) adanya perubahan regulasi terkait 8 SNP, (2) nama komponen standar penilaian akreditasi agar bersifat generik, (3) standar penilaian akreditasi dapat dikembangkan dengan mengakomodir regulasi lain yang terkait dengan SNP dimana regulasi 8 SNP tetap sebagai kriteria utama penilaian, dan (4) perlunya standar penilaian baru untuk mendorong sekolah/madrasah melakukan penjaminan mutu secara berkelanjutan.

C. Standar Akreditasi SMA/MA

1. Standar Akreditasi 1. Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Nomor	Deskripsi Indikator Kunci
1.1	Sekolah/Madrasah memiliki dokumen KTSP yang isinya memuat kurikulum yang berlaku secara nasional (saat ini berlaku Kurikulum 2013).
1.2	Dokumen KTSP yang dimiliki Sekolah/Madrasah disusun/dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Sekolah/Madrasah.
1.3	KTSP yang digunakan telah disahkan oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Sekolah Negeri) atau Pejabat Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (Madrasah Negeri) atau Yayasan Penyelenggara Pendidikan (Sekolah/Madrasah Swasta).
1.4	Komponen dan sistematika penyusunan KTSP sesuai dengan peraturan atau pedoman penyusunan yang ditetapkan pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah (BSNP).
1.5	Mekanisme penyusunan/ pengembangan KTSP mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah (BSNP).
1.6	Penyusunan/pengembangan KTSP melibatkan unsur Komite Sekolah/Madrasah, Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag/Yayasan, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.

2. Standar Akreditasi 2. Proses Pembelajaran

Nomor	Deskripsi Indikator Kunci
2.1	Sekolah/Madrasah memiliki Silabus untuk semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran muatan lokal dan mata pelajaran sesuai karakteristik sekolah/madrasah.
2.2	Isi silabus memuat komponen sesuai dengan yang ditentukan Pemerintah.
2.3	Sekolah/Madrasah memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran muatan lokal.
2.4	Isi RPP memuat komponen-komponen sesuai dengan yang ditentukan.
2.5	RPP dibuat/dikembangkan sendiri oleh guru/keompok guru.
2.6	Guru memahami prinsip-prinsip penyusunan RPP.
2.7	Alokasi waktu 1 jam tatap muka selama 45 menit.
2.8	Setiap siswa memiliki minimal 1 buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran.
2.9	Guru mampu melaksanakan pengelolaan kelas dengan baik.
2.10	Guru mampu melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang dibuat dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang mencakup: pendahuluan, inti, dan penutup.

2.11	Guru mampu menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran.
2.12	Guru mampu menerapkan model pembelajaran <i>discovery learning</i> , <i>problem based learning</i> , dan <i>project based learning</i> .
2.13	Guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang tepat dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu.
2.14	Kepala Sekolah/Madrasah melakukan proses pengawasan pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2.15	Pengawas Sekolah/Madrasah pernah melakukan proses pengawasan pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Standar Akreditasi 3. Penilaian Proses dan Hasil Belajar

Nomor	Deskripsi Indikator Kunci
3.1	Guru melakukan penilaian Otentik dan hasil penilaiannya digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (<i>remedial</i>), pengayaan (<i>enrichment</i>), atau pelayanan konseling.
3.2	Guru melakukan penilaian proses saat pembelajaran berlangsung dengan angket, lembar observasi, catatan anekdot atau melalui refleksi.
3.3	Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3.4	Sekolah/Madrasah memiliki dokumen terkait dengan pelaksanaan penilaian, yaitu: Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Ujian Tingkat Kompetensi (UTK), dan Ujian Sekolah/ Madrasah (US/UM)
3.5	Sekolah/Madrasah memiliki dokumen terkait dengan pelaksanaan penilaian Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK) dan Ujian Nasional (UN).

4. Standar Akreditasi 4. Kompetensi Lulusan

Nomor	Deskripsi Indikator Kunci
4.1	Lulusan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab yang dibuktikan dari hasil penilaian diri tentang kompetensi sikap dan hasil penilaian sikap yang diberikan guru, komite sekolah, dan orang tua.
4.2	Lulusan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dibuktikan dengan pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
4.3	Lulusan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif ranah abstrak dan konkret dibuktikan dengan pencapaian KKM.

5. Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nomor	Deskripsi Indikator Kunci
5.1	Kualifikasi Pendidikan Guru (termasuk Konselor/Guru Bimbingan Konseling) dan Tenaga Kependidikan di Sekolah/Madrasah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
5.2	Hasil Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) rata-rata baik.
5.3	Guru memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
5.4	Guru memiliki kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
5.5	Guru mampu melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
5.6	Tenaga Administrasi memiliki kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
5.7	Tenaga Perpustakaan memiliki kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
5.8	Tenaga Laboratorium (Bahasa, IPA, IPS, Multi Media) memiliki kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

6. Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana

Nomor	Deskripsi Indikator Kunci
6.1	Sekolah/madrasah memiliki sarana dan prasarana sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.
6.2	Sekolah/Madrasah mendayagunakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik.

7. Standar Akreditasi 7. Pengelolaan dan Pembiayaan

Nomor	Deskripsi Indikator Kunci
7.1	Pengelolaan Sekolah/ Madrasah sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
7.2	Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.
7.3	Sekolah/Madrasah melibatkan peran serta masyarakat dan mampu menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, sekolah/madrasah lain, dunia usaha/industri, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
7.4	Sekolah/Madrasah menerapkan Sistem Manajemen Keuangan Berbasis Perbankan.
7.5	Sekolah/Madrasah memiliki alokasi Biaya Operasi Non Personalia minimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
7.6	Laporan Akuntabilitas Pengelolaan dan Pembiayaan Sekolah/ Madrasah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.

8. Standar Akreditasi 8. Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan

Nomor	Deskripsi Indikator Kunci
8.1	Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan Evaluasi Diri setiap tahun dan berkelanjutan.
8.2	Sekolah/Madrasah melakukan analisis data hasil Evaluasi Diri setiap tahun.
8.3	Sekolah/Madrasah menetapkan target pencapaian/pemenuhan 8 SNP tahun berikutnya berdasarkan hasil analisis data ED S/M.
8.4	Sekolah/Madrasah mampu membuat kriteria mutu di atas kriteria SNP berbasis keunggulan lokal dan berdaya saing nasional/internasional.
8.5	Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah selalu disusun mengacu pada hasil analisis data ED S/M

BAGIAN II

RANCANGAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

A. Dasar Pemikiran

Rumusan indikator yang tepat untuk setiap standar akreditasi yang akan digunakan sebagai kriteria penilaian mutu SMA/MA. Berdasarkan rumusan indikator yang tepat akan dapat dirumuskan butir-butir pertanyaan untuk keperluan penilaian akreditasi secara objektif dan akurat.

Adanya kebijakan dan regulasi baru tentang parameter mutu pendidikan nasional yakni terkait dengan Standar Nasional Pendidikan, peneliti telah melakukan telaah bahwa rumusan butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi SMA/MA saat ini sebagian sudah tidak relevan dengan kebijakan dan regulasi baru tersebut. Untuk itu, sebelum mengembangkan instrumen akreditasi yang baru, perlu terlebih dahulu dilakukan pengembangan standar akreditasi sebagai komponen penilaian akreditasi.

Berdasar pemikiran di atas, peneliti ingin mengetahui apakah konsep standar akreditasi baru yang dikembangkan dalam penelitian ini secara akademik dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena prinsip penilaian kelayakan sekolah/madrasah yang diakreditasi adalah membandingkan antara kondisi riil di sekolah/madrasah berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan standar-standar akreditasi, maka rumusan indikator setiap komponen penilaian akreditasi harus valid.

Selain untuk menentukan validitas indikator dari setiap standar akreditasi, teknik penilaian yang tepat, dan bukti fisik/bukti penilaian yang akurat, rancangan instrumen akreditasi juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepentingan setiap indikator. Data skor tingkat kepentingan indikator selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penentuan pembobotan untuk masing-masing komponen penilaian akreditasi.

B. Rancangan Pengembangan Instrumen Akreditasi SMA/MA

No.	Komponen	Jumlah Indikator	Bentuk Instrumen	Jumlah Butir
1	Standar Akreditasi 1	6	Pilihan & Isian	6
2	Standar Akreditasi 2	15	Pilihan & Isian	15
3	Standar Akreditasi 3	5	Pilihan & Isian	5
4	Standar Akreditasi 4	3	Pilihan & Isian	3
5	Standar Akreditasi 5	8	Pilihan & Isian	8
6	Standar Akreditasi 6	2	Pilihan & Isian	2
7	Standar Akreditasi 7	6	Pilihan & Isian	6
8	Standar Akreditasi 8	5	Pilihan & Isian	5

BAGIAN III
ACUAN PENGEMBANGAN KOMPONEN
PENILAIAN AKREDITASI SMA/MA

No.	Komponen Penilaian Mutu SMA/MA (Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA)		Alasan Pengembangan
	Nama Komponen	Acuan Kriteria Penilaian	
1	Standar 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	- Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA - Permendikbud No.81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum	- Ada perubahan regulasi terkait 8 SNP. - Nama komponen standar penilaian akreditasi agar bersifat generik. - Standar penilaian akreditasi dapat dikembangkan dengan mengakomodir regulasi lain yang terkait dengan SNP dimana regulasi 8 SNP tetap sebagai kriteria utama penilaian. - Perlunya standar penilaian baru untuk mendorong sekolah/madrasah melakukan penjaminan mutu secara berkelanjutan.
2	Standar 2. Proses Pembelajaran	- Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah - Permendikbud No.81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum	
3	Standar 3. Penilaian Proses dan Hasil Belajar	- Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan - Permendikbud No.81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum	
4	Standar 4. Kompetensi Lulusan	- Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah - Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah - Peremene PAN & RB No. 16 Tahun 2009 tentang	
5	Standar 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Permendiknas No. 13 Tahun 2006 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah - Permendiknas No. 16 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru - Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor - Permendiknas No. 24 Tahun	

No.	Komponen Penilaian Mutu SMA/MA (Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA)		Alasan Pengembangan
	Nama Komponen	Acuan Kriteria Penilaian	
		2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah • Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah • Permendiknas No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah	
6	Standar 6. Sarana dan Prasarana	• Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA	
7	Standar 7. Pengelolaan dan Pembiayaan	• Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah • Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009	
8	Standar 8. Penjaminan Mutu	• Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan • Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah	

BAGIAN IV
KISI-KISI PENGEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI SMA/MA

A. Standar Akreditasi 1: Isi KTSP

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
1	Sekolah/Madrasah memiliki dokumen KTSP yang isinya memuat kurikulum yang berlaku secara nasional (saat ini berlaku Kurikulum 2013).	☐ Dokumen	Naskah KTSP (Isinya memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA/MA yang berlaku secara nasional)	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
2	Dokumen KTSP yang dimiliki Sekolah/Madrasah disusun/dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Sekolah/Madrasah.	☐ Dokumen	- SK Tim Pengembang Kurikulum (TPK) - Berita Acara/Daftar Hadir Rapat Tim Pengembangan	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
3	KTSP yang digunakan telah disahkan oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota (Sekolah Negeri) atau Pejabat Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota (Madrasah Negeri) atau Yayasan Penyelenggara Pendidikan (Sekolah/ Madrasah Swasta).	☐ Dokumen	Ada halaman pengesahan dan bukti pengesahan (legalisasi) dalam Naskah KTSP	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
4	Komponen dan sistematika penyusunan KTSP sesuai dengan peraturan atau pedoman penyusunan yang ditetapkan pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah.	☐ Dokumen	Isi Komponen dan Sistematika dalam Naskah KTSP sesuai peraturan/ pedoman	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
5	Mekanisme penyusunan/ pengembangan KTSP mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah (BSNP).	☐ Dokumen	- Program dan Jadwal Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Naskah Analisis Konteks, Catatan Review/Revisi/Finalisasi, Legalisasi, Bukti Pendistribusian/ Sosialisasi - Foto-foto Kegiatan terkait Penyusunan KTSP	Pilihan Alternatif Jawaban
6	Penyusunan/pengembangan KTSP melibatkan unsur Komite Sekolah/ Madrasah, Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag/Yayasan, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.	☐ Dokumen	Daftar hadir/Ada catatan saran dan masukan/Ada bukti keterlibatan para pemangku kepentingan	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

B. Standar Akreditasi 2: Proses Pembelajaran

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
1	Sekolah/Madrasah memiliki Silabus untuk semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran muatan lokal dan mata pelajaran sesuai karakteristik sekolah/madrasah.	☐ Dokumen	Naskah Silabus (Fisiknya)	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
2	Isi Silabus memuat komponen-komponen sesuai dengan yang ditentukan Pemerintah.	☐ Dokumen	Naskah Silabus (Isi komponen-komponennya)	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
3	Sekolah/Madrasah memiliki Rencana	☐ Dokumen	Naskah RPP (Tampilan	Pilihan 5 Alternatif

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
	Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran muatan lokal.		Fisiknya)	Jawaban
4	Isi RPP memuat komponen-komponen sesuai dengan yang ditentukan Pemerintah.	☐ Dokumen	• Naskah RPP (Isi komponen-komponennya)	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
5	RPP dibuat/ dikembangkan sendiri oleh guru/ kelompok guru.	☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Guru	
6	Guru memahami prinsip-prinsip penyusunan RPP.	☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Guru	
7	Alokasi waktu 1 jam tatap muka selama 45 menit.	☐ Dokumen	• Jadwal Pelajaran	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
8	Setiap siswa memiliki minimal 1 buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran.	☐ Angket Siswa	• Isian Angket oleh Siswa	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Siswa	
9	Guru mampu melaksanakan pengelolaan kelas dengan baik.	☐ Dokumen	• Catatan Hasil Supervisi (Pengawas/Kepala Sekolah) • Video Rekaman Pembelajaran	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Observasi	• Catatan Hasil Observasi Kunjungan Kelas	
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara	

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
			dengan Siswa	
		☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru • Isian Angket oleh Siswa	
10	Guru mampu melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang dibuat dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang mencakup: pendahuluan, inti, dan penutup.	☐ Dokumen	• Catatan Hasil Supervisi (Pengawas/Kepala Sekolah) • Video Rekaman Pembelajaran	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Observasi	• Catatan Hasil Observasi Kunjungan Kelas	
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Siswa	
		☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru • Isian Angket oleh Siswa	
11	Guru mampu menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran.	☐ Dokumen	• Catatan Hasil Supervisi (Pengawas/Kepala Sekolah) • Video Rekaman Pembelajaran	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Observasi	• Catatan Hasil Observasi Kunjungan Kelas	
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Siswa	
		☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru • Isian Angket oleh Siswa	
12	Guru mampu menerapkan model pembelajaran <i>discovery</i>	☐ Dokumen	• Catatan Hasil Supervisi (Pengawas/Kepa	Pilihan 5 Alternatif

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
	<i>learning, problem based learning, dan project based learning.</i>		la Sekolah) • Video Rekaman Pembelajaran	Jawaban
		☐ Observasi	• Catatan Hasil Observasi Kunjungan Kelas	
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Siswa	
		☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru • Isian Angket oleh Siswa	
13	Guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang tepat dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu.	☐ Dokumen	• Catatan Hasil Supervisi (Pengawas/Kepala Sekolah) • Video Rekaman Pembelajaran	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Observasi	• Catatan Hasil Observasi Kunjungan Kelas	
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Siswa	
		☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru • Isian Angket oleh Siswa	
14	Kepala Sekolah/ Madrasah melakukan proses pengawasan pembelajaran melalui kegiatan pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.	☐ Dokumen	• Naskah Program/ Catatan Kegiatan Pengawasan • Foto-foto kegiatan terkait Pengawasan	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Guru	
		☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru	
15	Pengawas Sekolah/Madrasah pernah melakukan proses pengawasan pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.	☐ Dokumen	• Catatan /bukti pernah dilakukan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pembelajaran yang dilakukan Pengawas Sekolah/Madrasah. • Foto-foto kegiatan terkait Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pembelajaran	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Guru	
		☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru	
		☐ Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Guru	
		☐ Angket	• Isian Angket oleh Guru	

C. Standar Akreditasi 3: Penilaian

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
1	Guru melakukan penilaian Otentik dan hasil penilaiannya digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (<i>remedial</i>), pengayaan	☐ Dokumen	• Data/Catatan Hasil Penilaian Otentik • Hasil Analisis Ulangan (Data Hasil Penilaian	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
	(<i>enrichment</i>), atau pelayanan konseling.		Otentik) Program Perbaikan/Pengayaan	
2	Guru melakukan penilaian proses saat pembelajaran berlangsung dengan angket, lembar observasi, catatan anekdot atau melalui refleksi.	☐ Dokumen	- Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses selama pelaksanaan pembelajaran yang sudah diisi. - Data/Catatan Hasil Penilaian Proses Pembelajaran	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
3	Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	☐ Dokumen	- Instrumen Penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan yang sudah diisi guru dan/atau dikerjakan oleh siswa - Data Nilai Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan.	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Angket	- Isian Angket oleh Guru - Isian Angket oleh Siswa	
4	Sekolah/Madrasah memiliki dokumen terkait dengan pelaksanaan penilaian, yaitu: Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Ujian Tingkat Kompetensi (UTK), dan	☐ Dokumen	- Instrumen Penilaian UH, UTS, UAS, UTK, US/UM - Data Nilai UH, UTS, UAS, UTK, dan US/UM	Isian/Cek

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
	ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dibuktikan dengan pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).		Buku Leger Sekolah/ Madrasah. • Data Nilai UAS, UTK, UMTK, US/UM, dan UN (Dimensi Pengetahuan) • Data Alumni yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi • Piagam/Sertifikat/Piala/Foto Prestasi Bidang Akademik dari Hasil Lomba/Kompetisi (Kompetensi Pengetahuan)	
		☐ Angket	• Isian Angket Sikap Siswa (Diisi oleh Siswa Kelas XII) • Isian Angket Penilaian Sikap Siswa (Diisi oleh Guru, Komite Sekolah/Madrasah, dan Orang Tua Siswa)	
3	Lulusan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret dibuktikan dengan pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).	☐ Dokumen	• Data Nilai Keterampilan (Rapor Alumni) dilihat pada Buku Leger Sekolah/ Madrasah. • Data Nilai UAS, UTK, UMTK, US/UM, dan UN (Kompetensi	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
			Keterampilan) • Data Alumni yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi • Piagam/ Sertifikat/Piala/ Foto Prestasi Bidang Akademik dari Hasil Lomba/ Kompetisi (Kompetensi Keterampilan)	
		☐ Angket	• Isian Angket Sikap Siswa (Diisi oleh Siswa Kelas XII) • Isian Angket Penilaian Sikap Siswa (Diisi oleh Guru, Komite Sekolah/Madrasah, dan Orang Tua Siswa)	

E. Standar Akreditasi 5: Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
1	Kualifikasi Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan di Sekolah/Madrasah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Dokumen ☐ Angket	• Database Guru • Database Tenaga Kependidikan • Isian Angket Guru	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
2	Hasil Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) rata-rata baik.	☐ Dokumen	• Laporan Hasil PK Guru	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Angket	• Isian Angket Siswa	
3	Guru memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Dokumen	• Data Hasil Uji Kompetensi Guru	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Angket	• Isian Angket Siswa	
4	Guru memiliki kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Angket	• Isian Angket Siswa	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
5	Guru mampu melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Dokumen	• Data/Laporan Kegiatan PKB • Piagam/Sertifikat/STTPL Diklat/TOT/Workshop/IHT/Seminar Ilmiah • Data/Laporan Hasil Publikasi Ilmiah (Laporan Penelitian/Artikel Ilmiah/Buku/<i>Best Practice</i>)	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Angket	• Isian Angket Guru	
6	Tenaga Administrasi memiliki kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Dokumen	• Data/Catatan Kinerja Tenaga Administrasi • Piagam/Sertifikat/STTPL yang relevan dengan tugasnya.	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
		☐ Angket	Isian Angket Tenaga Administrasi	
7	Tenaga Perpustakaan memiliki kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Dokumen	- Data/Catatan Kinerja Tenaga Perpustakaan - Piagam/ Sertifikat/ STTPL yang relevan dengan tugasnya.	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Angket	Isian Angket Tenaga Perpustakaan	
8	Tenaga Laboratorium (Bahasa, IPA, IPS, Multi Media) memiliki kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Dokumen	- Data/Catatan Kinerja Tenaga Laboratorium - Piagam/Sertifikat/STTPL yang relevan dengan tugasnya.	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Angket	Isian Angket Tenaga Laboratorium	

F. Standar Akreditasi 6: Sarana dan Prasarana

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
1	Sekolah/Madrasah memiliki sarana dan prasarana sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Dokumen	- Data Sarana dan Prasarana - Buku Inventaris - Bukti Kepemilikan	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Observasi	Catatan Hasil Observasi	
2	Sekolah/Madrasah mendayagunakan dan/atau memanfaatkan	☐ Dokumen	Buku Log/Jurnal Penggunaan Sarana dan Prasarana	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

	sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik.		• Catatan Pendayagunaan/ Pemanfaatan • Foto Aktivitas Pembelajaran, Kegiatan Ekstrakurikuler, Kegiatan lainnya.	
		☐ Angket	• Isian Angket Sikap Siswa	

G. Standar Akreditasi 7: Pengelolaan dan Pembiayaan

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
1	Pengelolaan Sekolah/ Madrasah sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Dokumen	• Bukti Perencanaan Program, antara lain: - Naskah Program Kerja 4 Tahunan - Naskah Program Kerja Tahunan - Naskah Program Pengawasan • Bukti Pelaksanaan Program Kerja, antara lain: - Daftar Hadir Rapat Dinas - Notulen Rapat Dinas - Buku Pedoman Pengelolaan - Peraturan Akademik - Struktur Organisasi	Isian/Cek

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
			- Uraian Tugas - SK dan Jadwal Kegiatan - Laporan/ Foto-foto Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler - Arsip Penilaian Hasil Belajar - Arsip Persuratan - Arsip Kepegawaian - Arsip Kegiatan Umum - Arsip Pengelolaan Sarana dan Prasarana - Arsip Pengelolaan Keuangan - Arsip PK Guru dan PKB • Bukti Kegiatan Pengawasan, antara lain: - Laporan/Catatan Hasil Pemantauan dan Supervisi Akademik - Data Hasil Evaluasi Diri Sekolah/ Madrasah	

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
			(ED S/M) - Laporan Hasil Evaluasi dan Pengembangan KTSP - Laporan Hasil Evaluasi dan Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan - Data/Dokumen untuk Bukti Fisik Akreditasi	
		☐ Angket	• Isian Angket (Guru/Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan Siswa)	
2	Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.	☐ Dokumen	• Naskah Prosedur Penciptaan Budaya Sekolah/Madrasah • Tata Tertib Sekolah Pedoman/Kode Etik/Norma Bagi Warga Sekolah/Madrasah • Slogan/Atribut Budaya Sekolah/Madrasah	Isian/Cek
		☐ Angket	• Isian Angket (Guru/Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan Siswa)	
3	Sekolah/Madrasah	☐ Dokumen	• Bukti/Catatan	Isian/Cek

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
	melibatkan peran serta masyarakat dan mampu menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, sekolah/madrasah lain, dunia usaha/industri, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.		adanya pengelolaan yang melibatkan masyarakat. • Naskah Program Komite Sekolah/Madrasah • Daftar Hadir Rapat/Pertemuan dengan Orang Tua/Wali • Arsip MoU Kemitraan • Laporan/Foto Kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat	
		☐ Angket	• Isian Angket (Guru/Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan Siswa)	
4	Sekolah/Madrasah menerapkan Sistem Manajemen Keuangan Berbasis Perbankan.	☐ Dokumen	• Laporan Keuangan yang dilampiri <i>print-out</i> rekening koran dari Bank • Contoh Slip Setoran dan Slip Pengambilan Uang dari Bank	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Angket	• Isian Angket (Guru/Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan Siswa)	

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
5	Sekolah/Madrasah memiliki alokasi Biaya Operasi Non Personalia minimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.	☐ Dokumen	• Naskah Rencana Kerja Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA S/M) • Buku Kas/Laporan/Catatan Penggunaan Biaya Operasi Non Personalia	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
6	Laporan Akuntabilitas Pengelolaan dan Pembiayaan Sekolah/Madrasah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.	☐ Dokumen	• Naskah Laporan Akuntabilitas Pengelolaan dan Pembiayaan disampaikan dalam pertemuan dengan Komite Sekolah/Madrasah dan Orang Tua/Wali • Dimuat dalam Web Sekolah/Madrasah (Jika punya Web)	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

H. Standar Akreditasi 8: Penjaminan Mutu

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
1	Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan Evaluasi Diri setiap tahun dan berkelanjutan.	☐ Dokumen	• Data Isian Instrumen Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah • Catatan/Laporan Pelaksanaan ED S/M	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Angket	• Isian Angket (Guru/Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, dan Siswa)	

No.	Indikator Kunci	Teknik Penilaian	Bukti Fisik/ Bukti Penilaian	Bentuk Instrumen
2	Sekolah/Madrasah melakukan analisis data hasil Evaluasi Diri setiap tahun.	☐ Dokumen	• Rangkuman Hasil Analisis ED S/M • Profil Mutu Sekolah/Madrasah	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
		☐ Angket	• Isian Angket Guru	
3	Sekolah/Madrasah menetapkan target pencapaian/pemenuhan 8 SNP tahun berikutnya berdasarkan hasil analisis data ED S/M.	☐ Dokumen	• Rumusan target pencapaian/pemenuhan 8 SNP	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
4	Sekolah/Madrasah mampu membuat kriteria mutu di atas kriteria SNP berbasis keunggulan lokal dan berdaya saing nasional/internasional.	☐ Dokumen	• Rumusan kriteria mutu di atas SNP. • Program untuk mewujudkan pencapaian kriteria mutu di atas SNP. • Bukti/catatan keterlaksanaan program berdasarkan kriteria mutu di atas SNP.	Pilihan 5 Alternatif Jawaban
5	Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah selalu disusun mengacu pada hasil analisis data ED S/M	☐ Dokumen	• Naskah Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RK S/M) dilihat kesesuaiannya dengan hasil analisis data ED S/M.	Pilihan 5 Alternatif Jawaban

Lampiran 7. Lembar Telaah Pengembangan Instrumen Akreditasi SMA/MA

Nama	
Bidang Keahlian	
Tempat Tugas	

LEMBAR TELAAH PENGEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI SMA/MA

A. Acuan Pengembangan

No.	Standar Akreditasi	Komentar/Masukan
1	Standar Akreditasi 1. Isi KTSP	
2	Standar Akreditasi 2. Proses Pembelajaran	
3	Standar Akreditasi 3. Penilaian	
4	Standar Akreditasi 4. Kompetensi	
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
6	Standar Akreditasi 6. Pengelolaan	
7	Standar Akreditasi 7. Sarana dan Prasarana	
8	Standar Akreditasi 8. Penjaminan Mutu	

B. Indikator Kunci, Teknik Penilaian, dan Bukti Fisik Penilaian**1. Standar Akreditasi 1: Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

No.	Aspek	Komentar/Masukan	
1	Indikator Kunci		
2	Teknik Penilaian		
3	Bukti Fisik/Bukti Penilaian		
4	Tingkat Kepentingan	☐ Sangat Penting ☐ Penting ☐ Cukup Penting	☐ Kurang Penting ☐ Tidak Penting

2. Standar Akreditasi 2: Proses Pembelajaran

No.	Aspek	Komentar/Masukan	
1	Indikator Kunci		
2	Teknik Penilaian		
3	Bukti Fisik/Bukti Penilaian		
4	Tingkat Kepentingan	☐ Sangat Penting ☐ Penting ☐ Cukup Penting	☐ Kurang Penting ☐ Tidak Penting

3. Standar Akreditasi 3: Penilaian

No.	Aspek	Komentar/Masukan
1	Indikator Kunci	
2	Teknik Penilaian	

3	Bukti Fisik/Bukti Penilaian	
4	Tingkat Kepentingan	☐ Sangat Penting ☐ Penting ☐ Cukup Penting ☐ Kurang Penting ☐ Tidak Penting

4. Standar Akreditasi 4: Kompetensi Lulusan

No.	Aspek	Komentar/Masukan
1	Indikator Kunci	
2	Teknik Penilaian	
3	Bukti Fisik/Bukti Penilaian	
4	Tingkat Kepentingan	☐ Sangat Penting ☐ Penting ☐ Cukup Penting ☐ Kurang Penting ☐ Tidak Penting

5. Standar Akreditasi 5: Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Aspek	Komentar/Masukan
1	Indikator Kunci	
2	Teknik Penilaian	
3	Bukti Fisik/Bukti Penilaian	
4	Tingkat Kepentingan	☐ Sangat Penting ☐ Penting ☐ Cukup Penting ☐ Kurang Penting ☐ Tidak Penting

6. Standar Akreditasi 6: Sarana dan Prasarana

No.	Aspek	Komentar/Masukan	
1	Indikator Kunci		
2	Teknik Penilaian		
3	Bukti Fisik/Bukti Penilaian		
4	Tingkat Kepentingan	☐ Sangat Penting ☐ Penting ☐ Cukup Penting	☐ Kurang Penting ☐ Tidak Penting

7. Standar Akreditasi 7: Pengelolaan dan Pembiayaan

No.	Aspek	Komentar/Masukan	
1	Indikator Kunci		
2	Teknik Penilaian		
3	Bukti Fisik/Bukti Penilaian		
4	Tingkat Kepentingan	☐ Sangat Penting ☐ Penting ☐ Cukup Penting	☐ Kurang Penting ☐ Tidak Penting

8. Standar Akreditasi 8: Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan

No.	Aspek	Komentar/Masukan	
1	Indikator Kunci		
2	Teknik Penilaian		

3	Bukti Fisik/Bukti Penilaian		
4	Tingkat Kepentingan	☐ Sangat Penting ☐ Penting ☐ Cukup Penting	☐ Kurang Penting ☐ Tidak Penting

Komentar/Masukan Umum

Yogyakarta, 7 Oktober 2013
 Peserta FGD Tahap 2,

Tanda Tangan & Nama Terang

Lampiran 8. Lembar Validasi Indikator, Teknik Penilaian, dan Bukti Fisik

Nama	
Tempat Tugas	
Bidang Keahlian	

LEMBAR VALIDASI INDIKATOR KUNCI, TEKNIK PENILAIAN, DAN BUKTI FISIK

Petunjuk Pengisian:

1. Pada kolom Skor Tingkat Kepentingan (Skor):

- a. Mohon Bapak/Ibu memberikan skor tingkat kepentingan indikator kunci dengan cara memberi tanda cek (✓) pada kotak yang tersedia.
- b. Skor tingkat kepentingan indikator kunci, dengan alternatif pilihan:
 - 1) Skor = 5, bila indikator kunci dinilai sangat penting (sangat esensial) atau sangat tepat digunakan untuk menilai mutu sekolah/madrasah dan terkait langsung dengan tujuan pendidikan di SMA/MA.
 - 2) Skor = 4, bila indikator kunci dinilai penting (esensial) atau tepat digunakan untuk menilai mutu sekolah/madrasah dan terkait langsung dengan tujuan pendidikan di SMA/MA.
 - 3) Skor = 3, bila indikator kunci dinilai cukup penting (cukup esensial) atau cukup tepat digunakan untuk menilai mutu sekolah/madrasah dan terkait langsung dengan tujuan pendidikan di SMA/MA.
 - 4) Skor = 2, bila indikator kunci dinilai tidak penting (tidak esensial) atau tidak tepat digunakan untuk menilai mutu sekolah/madrasah dan tidak terkait langsung dengan tujuan pendidikan di SMA/MA.
 - 5) Skor = 1, bila indikator kunci dinilai sangat tidak penting (sangat tidak esensial) atau sangat tidak tepat digunakan untuk menilai mutu sekolah/madrasah dan tidak terkait langsung dengan tujuan pendidikan di SMA/MA.

2. Pada kolom Pendapat:

- a. Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat tentang substansi isi atau kesesuaian antara teknik penilaian dan bukti fisik dengan indikator kunci.
- b. Berikan pendapat, dengan alternatif pilihan:
 - ☐ SS (Sangat Sesuai), Skor = 5;
 - ☐ S (Sesuai), Skor = 4;
 - ☐ CS (Cukup Sesuai), Skor = 3;
 - ☐ TS (Tidak Sesuai), Skor = 2;
 - ☐ STS (Sangat Tidak Sesuai), Skor = 1.

3. Pada kolom Komentar/saran/pendapat lainnya:

- Mohon Bapak/Ibu memberikan komentar terkait dengan indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti fisik.
- Apabila menurut Bapak/Ibu indikator kunci, teknik penilaian, dan bukti fisik tersebut kurang sesuai, silahkan memberikan komentar/saran/pendapat lainnya dengan cara menulis pada kolom yang tersedia.

A. Standar Akreditasi 1: Kompetensi Lulusan

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
1.1	Lulusan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab.	☐ 5	Dokumen	Data Nilai Sikap (Rapor Alumni) pada Buku Leger	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 4	Angket	- Isian Angket Penilaian Diri tentang Sikap Siswa (Diisi oleh Siswa Kelas 12) - Isian Angket Persepsi terhadap Sikap Siswa (Diisi oleh Guru, Komite Sekolah/ Madrasah, dan Orang Tua/Wali Siswa).	
		☐ 3			
		☐ 2			
☐ 1	Observasi/ Wawancara	Hasil pengamatan dan wawancara terkait iklim dan budaya sekolah/madrasah yang relevan dengan pengembangan sikap siswa..			
Komentar/saran/pendapat lainnya:					
1.2	Lulusan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Data Nilai Pengetahuan (Rapor Alumni) pada Buku Leger - Data Rekap Nilai Ujian Sekolah/Madrasah (Aspek Pengetahuan) - Data Rerata Nilai	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
				Ujian Nasional (UN) • Data Kelulusan • Piagam/Sertifikat/ Piala/Foto Prestasi Bidang Akademik dari Hasil Lomba/Kompetisi yang relevan dengan aspek pengetahuan (Misal: Lomba Cerdas Cermat, Olimpiade MIPA).	
			Tes Uji Kompetensi	• Hasil Tes Uji Kompetensi Siswa (Dikerjakan oleh Siswa Kelas 12).	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
1.3	Lulusan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Data Nilai Keterampilan (Rapor Alumni) pada Buku Leger. • Data Rekap Nilai Ujian Sekolah/Madrasah (Aspek Keterampilan) • Piagam/Sertifikat/ Piala/Foto Prestasi Bidang Akademik/ Non-Akademik yang relevan dengan aspek keterampilan (Misal: Lomba Pidato, Debat dalam Bahasa Inggris, LKIR, Lomba Paduan Suara, Lomba Pembuatan Robot).	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
1.4	Sebagian besar lulusan setiap tahunnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi lebih $\geq 75\%$).	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Data Jejak Alumni (Daftar Nama-nama Lulusan dan Nama Perguruan Tinggi disertai Program Studinya).	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			

B. Standar Akreditasi 2: Penilaian

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
2.1	Guru dapat membuat beragam instrumen untuk keperluan penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, dan penilaian aspek keterampilan.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Contoh Instrumen Penilaian Sikap. • Contoh Instrumen Penilaian Pengetahuan • Contoh Instrumen Penilaian Keterampilan.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
			Wawancara	• Hasil Wawancara dengan Guru (Ada catatan yang meyakinkan bahwa guru dapat membuat instrumen penilaian)	
			Komentar/saran/pendapat lainnya:		
2.2	Guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan menggunakan beragam teknik penilaian, yakni: observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Data hasil penilaian proses dan hasil belajar siswa. • Daftar Nilai Sikap (Hasil Observasi, Penilaian Diri, Penilaian Antar Peserta Didik, dan Catatan dalam	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
	didik, jurnal, tes tertulis, tes lisan, penugasan, praktik (kinerja), proyek/produk, dan portofolio.			Jurnal) - Daftar Nilai Tes Tertulis/Lisan dan Penugasan - Daftar Nilai Praktik, Proyek/Produk, dan Portofolio	
			Wawancara	Hasil Wawancara dengan Guru (Ada catatan yang meyakinkan bahwa guru menggunakan beragam teknik penilaian)	
			Angket	Isian Angket Pendapat Siswa tentang Teknik Penilaian yang digunakan Guru.	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
2.3	Guru melakukan analisis hasil Ulangan Harian (UH) untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dan sebagai acuan dalam membuat program dan pelaksanaan remedial/ pengayaan.	☐ 5☐ 4☐ 3☐ 2☐ 1	Dokumen	- Data Hasil Analisis Ulangan Harian - Program Remedial/Pengayaan an	☐ SS☐ S☐ CS☐ TS☐ STS
			Wawancara	Hasil Wawancara dengan Guru (Ada catatan yang meyakinkan bahwa guru melakukan Analisis Hasil UH)	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
2.4	Sekolah/Madrasah menyelenggarakan Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Ujian	☐ 5☐ 4☐ 3☐ 2☐ 1	Dokumen	- Instrumen/Naskah Soal UTS, UAS, UTK, UMTK, dan US/UM. - Data Nilai Hasil UTS, UAS, UTK,	☐ SS☐ S☐ CS☐ TS☐ STS

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
	Tingkat Kompetensi (UTK), Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK), dan Ujian Sekolah/ Madrasah (US/UM)			UMTK, dan US/UM. • Laporan penyelenggaraan UTS, UAS, UTK, UMTK, dan US/UM.	
	Catatan: Istilah UTS, UAS, UTK, UMTK, US/UM mengacu Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Penilaian.	Komentar/saran/pendapat lainnya:			

C. Standar Akreditasi 3: Proses Pembelajaran

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
3.1	Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk semua mata pelajaran sesuai Kurikulum yang berlaku secara nasional dan isinya sesuai dengan yang dikembangkan/dibuat Pemerintah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Naskah Silabus setiap Mata Pelajaran (Sesuai Kurikulum yang berlaku secara nasional).	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
3.2	Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk mata pelajaran muatan lokal yang isinya dikembangkan sendiri oleh sekolah/madrasah dan/atau oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan format penulisan mengacu pada silabus mata pelajaran yang dibuat pemerintah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Naskah Silbus Mata Pelajaran Muatan Lokal.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
3.3	Sekolah/Madrasah memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3	Dokumen	• RPP untuk setiap mata pelajaran sesuai Kurikulum yang berlaku	☐ SS ☐ S ☐ CS

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
3.10	Guru melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah mencakup: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.	☐ 5	Dokumen	• Video/Rekaman Pelaksanaan Pembelajaran di kelas.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 4			
		☐ 3	Angket	• Isian Angket tentang pemahaman guru terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran yang di kelas.	
☐ 2					
		☐ 1	Komentar/saran/pendapat lainnya:		
3.11	Setiap kali melaksanakan pembelajaran, guru menerapkan pendekatan saintifik (selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ mencoba, menalar /mengasosiasi, dan dapat mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan).	☐ 5	Dokumen	• Video/Rekaman Pelaksanaan Pembelajaran di kelas.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 4			
		☐ 3	Angket	• Isian Angket pendapat siswa tentang pengalamannya dalam pembelajaran saintifik.	
☐ 2					
		☐ 1	Komentar/saran/pendapat lainnya:		
3.12	Guru menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang tepat dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang disesuaikan dengan	☐ 5	Dokumen	• Video/Rekaman Pelaksanaan Pembelajaran.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 4			
		☐ 3	Angket	• Isian Angket pendapat siswa tentang kemampuan guru menggunakan metode, media, dan sumber belajar.	
☐ 2					
		☐ 1			

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
	karakteristik peserta didik.	Komentar/saran/pendapat lainnya:			
3.13	Semua guru pernah disupervisi oleh Kepala sekolah/Madrasah dan/atau oleh Pengawas Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun terakhir.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Video/Rekaman Pelaksanaan Supervisi pelaksanaan pembelajaran. • Instrumen Supervisi yang diisi pada saat pelaksanaan supervisi. • Catatan hasil pemantauan pelaksanaan pembelajaran. • Data/Catatan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
			Angket	• Isian Angket pendapat guru tentang manfaat supervisi pelaksanaan pembelajaran.	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
3.14	Ada tindak lanjut dari hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Catatan tindak lanjut hasil supervisi..	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
			Angket	• Isian Angket pendapat guru tentang efektivitas pelaksanaan supervisi pembelajaran.	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			

Standar Akreditasi 4: Isi KTSP

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
4.1	Sekolah/Madrasah memiliki KTSP yang memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum sesuai kurikulum yang berlaku secara nasional.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Naskah KTSP	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
4.2	KTSP yang dimiliki sekolah/madrasah berisi sejumlah kompetensi dan ruang lingkup materi sesuai tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Naskah KTSP (untuk sekolah/madrasah yang sudah mengimplementasikan kurikulum 2013, maka KTSP harus memuat sejumlah kompetensi tingkat 5 dan 6 dan ruang lingkup materi untuk setiap mata pelajaran).	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
4.3	Dokumen KTSP yang dimiliki Sekolah/Madrasah disusun/dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Sekolah/Madrasah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• SK Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah/Madrasah • Berita Acara/Daftar Hadir Rapat Tim Pengembangan	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
4.4	KTSP yang digunakan telah diketahui dan	☐ 5 ☐ 4	Dokumen	• Dalam Naskah KTSP ada	☐ SS ☐ S

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
	ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Sekolah Negeri) atau Pejabat Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (Madrasah Negeri) atau Yayasan Penyelenggara Pendidikan (Sekolah/Madrasah Swasta).	☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		halaman pengesahan dan bukti tandatangan dan stempel basah dari pejabat yang relevan.	☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
4.5	Komponen dan sistematika penyusunan KTSP sesuai dengan pedoman penyusunan KTSP berdasarkan peraturan Menteri dan/atau Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	Isi Komponen dan Sistematika dalam Naskah KTSP sesuai peraturan/pedoman yang ditetapkan pemerintah atau BSNP.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
4.6	Mekanisme penyusunan/ pengembangan KTSP mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan/atau BSNP.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Program dan Jadwal Kegiatan - Daftar Hadir Peserta dalam penyusunan/ pengembangan KTSP. - Naskah Analisis Konteks. - Catatan/Review/Revisi/ Finalisasi, Legalisasi, Bukti Pendistribusian/Sosialisasi - Foto-foto Kegiatan terkait Penyusunan/Pengembangan KTSP.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
4.7	Penyusunan/pengembangan KTSP	☐ 5 ☐ 4	Dokumen	Daftar hadir rapat penyusunan/ pengembangan KTSP	☐ SS ☐ S

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
	melibatkan unsur Komite Sekolah/Madrasah, Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag/Yayasan, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.	☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		mbanan KTSP yang melibatkan Komite Sekolah/Madrasah, pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pejabat Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan Pengurus Yayasan penyelenggaraan pendidikan. • Ada catatan saran dan masukan dari peserta rapat.	☐ CS ☐ TS ☐ STS
			Komentar/saran/pendapat lainnya:		
4.8	Sekolah/Madrasah mempunyai program layanan bimbingan konseling (berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial siswa, pengembangan potensi diri dan prestasi belajar siswa, dan pengembangan karir siswa) yang bersinergi dengan isi kurikulum sebagaimana tertuang dalam KTSP.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Program Layanan Bimbingan Konseling (Isi Program mencakup: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tinfak lanjut).	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
			Komentar/saran/pendapat lainnya:		
4.9	Sekolah/Madrasah mempunyai program dan kegiatan ekstrakurikuler yang diperuntukkan kepada semua siswa sesuai dengan minat dan bakat serta disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Program dan Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler (Isi Program mencakup: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tinfak lanjut).	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
			Komentar/saran/pendapat lainnya:		

D. Standar Akreditasi 5: Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
5.1	Kualifikasi pendidikan yang dimiliki guru (termasuk konselor/guru bimbingan konseling) dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah/madrasah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Database Guru - Database Tenaga Kependidikan	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
5.2	Hasil Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) rata-rata baik.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	Laporan Hasil PK Guru	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Angket	Isian Angket pendapat siswa tentang kinerja gurunya.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
5.3	Guru memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Tes Uji Kompetensi	Data Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG)	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Angket	Isian Angket pendapat siswa tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional gurunya.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
5.4	Guru memiliki kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Angket	Isian Angket pendapat siswa tentang kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian gurunya.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
5.5	Guru melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5	Dokumen	• Data/laporan kegiatan pengembangan diri • Piagam/Sertifikat/ STTPL Diklat/TOT/ Workshop/IHT/ Seminar Ilmiah yang relevan dengan kegiatan pengembangan diri. • Karya tulis/karya inovatif yang telah dipublikasikan.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 4			
		☐ 3	Tes Uji Kompetensi	• Hasil Tes Uji Kompetensi Tenaga Administrasi	
		☐ 2	Komentar/saran/pendapat lainnya:		
		☐ 1			
5.6	Tenaga Administrasi memiliki kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5	Dokumen	• Data kualifikasi tenaga Administrasi. • Piagam/Sertifikat/ STTPL dimiliki tenaga Administrasi yang relevan dengan tugasnya.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 4			
		☐ 3	Tes Uji Kompetensi	• Hasil Tes Uji Kompetensi Tenaga Administrasi	
		☐ 2	Komentar/saran/pendapat lainnya:		
		☐ 1			
5.7	Tenaga Perpustakaan memiliki kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5	Dokumen	• Data kualifikasi tenaga Perpustakaan. • Piagam/Sertifikat/	☐ SS ☐ S ☐ CS
		☐ 4			
		☐ 3			

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
		☐ 2 ☐ 1		STTPL yang dimiliki tenaga Perpustakaan yang relevan dengan tugasnya. Tes Uji Kompetensi Hasil Tes Uji Kompetensi Tenaga Perpustakaan	☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
5.8	Tenaga Laboratorium memiliki kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen - Data kualifikasi tenaga Laboratorium. - Piagam/Sertifikat/ STTPL yang dimiliki tenaga Laboratorium yang relevan dengan tugasnya.	Tes Uji Kompetensi Hasil Tes Uji Kompetensi Tenaga Laboratorium.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			

E. Standar Akreditasi 6: Sarana dan Prasarana

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
6.1	Sekolah/Madrasah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen - Data Sarana dan Prasarana - Buku Inventaris Barang - Bukti Kepemilikan	Observasi Catatan hasil pengamatan (untuk mengecek keakuratan data sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah/	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
				madrasah)	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
6.2	Sebagian besar sarana dan yang dimiliki Sekolah/ Madrasah dalam kondisi baik dan berfungsi (Persentase sarana dan prasarana yang kondisinya baik dan berfungsi $\geq 85\%$).	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Observasi	Catatan hasil pengamatan (untuk mengecek keakuratan data sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah/ madrasah)	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
			Angket	Isian Angket pendapat guru, tenaga kependidikan, dan siswa tentang kondisi sarana dan prasarana.	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
6.3	Sekolah/Madrasah mendayagunakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Buku Log/Jurnal Penggunaan Alat/Fasilitas - Catatan Pendayagunaan/ Pemanfaatan Alat/Fasilitas - Foto Aktivitas Pembelajaran, Kegiatan Ekstrakurikuler, Kegiatan lainnya dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yang dimiliki.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
			Angket	Isian Angket pendapat guru dan siswa terkait pendayagunaan sarana dan prasarana guna menunjang	

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
				kelancaran pembelajaran.	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			

F. Standar Akreditasi 7: Pengelolaan

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
7.1	Sekolah/ Madrasah memiliki program yang jelas.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Naskah Program Kerja 4 Tahunan - Naskah Program Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RK S/M)	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
7.2	Sekolah/Madrasah melaksanakan program tahunan sesuai dengan yang direncanakan.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Daftar Hadir Rapat Dinas - Notulen Rapat Dinas - Buku Pedoman Pengelolaan Sekolah/Madrasah - Peraturan Akademik - Struktur Organisasi - Uraian Tugas - SK dan Jadwal Kegiatan - Laporan/Foto-foto/Video Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran - Laporan/Foto-foto/Video Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling - Laporan/Foto-foto/Video	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
				Kegiatan Ekstrakurikuler • Data/Laporan Hasil Supervisi Akademik • Arsip PK Guru dan PKB • Data/Arsip Nilai Hasil Belajar • Data/Arsip Persuratan • Data/Arsip Kepegawaian (PTK) • Data/Arsip Pengelolaan Sarana dan Prasarana • Data/Arsip Kegiatan Sekolah/Madrasah • Data/Arsip Pengelolaan Keuangan	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
7.3	Kepala Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengawasan (pemantauan, supervisi, dan evaluasi).	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Laporan/Catatan Hasil Pemantauan dan Supervisi Akademik • Data Hasil Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (ED S/M) • Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan /Pengembangan KTSP • Laporan Hasil Evaluasi dan Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
				Data Bukti Fisik untuk Persiapan Akreditasi	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
7.4	Sekolah/Madrasah menciptakan budaya sekolah/madrasah (suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif) untuk mendukung terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisien.	☐ 5	Dokumen	- Naskah prosedur penciptaan budaya sekolah/madrasah - Tata tertib sekolah/madrasah - Pedoman/kde etik/norma bagi warga sekolah/madrasah - Slogan/atribut terkait dengan budaya sekolah/madrasah	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 4			
		☐ 3	Angket	Isian Angket pendapat guru dan siswa tentang budaya yang diciptakan di sekolah/madrasah.	
☐ 2					
		☐ 1	Komentar/saran/pendapat lainnya:		
7.5	Sekolah/Madrasah melibatkan peran serta masyarakat dan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, sekolah/madrasah lain, dunia usaha/industri, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.	☐ 5	Dokumen	- Bukti/Catatan Peran Serta Masyarakat. - Naskah Program Komite Sekolah/Madrasah - Daftar Hadir Rapat/Pertemuan dengan Orang Tua/Wali - Arsip MoU Kemitraan	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		☐ 4			
		☐ 3	Angket	Isian Angket pendapat guru, komite sekolah, dan siswa tentang peran serta masyarakat dan adanya kemitraan antara	
☐ 2					
		☐ 1	Komentar/saran/pendapat lainnya:		

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
				sekolah/madrasah dengan pihak luar.	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
7.6	Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan Evaluasi Diri setiap tahun dan berkelanjutan.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Data Isian Instrume Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - Catatan/Laporan Pelaksanaan ED S/M	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
7.7	Sekolah/Madrasah melakukan analisis data hasil Evaluasi Diri setiap tahun.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Rangkuman Hasil Analisis ED S/M - Profil Mutu Sekolah/Madrasah	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
7.8	Sekolah/Madrasah menetapkan target pencapaian/ pemenuhan 8 SNP tahun berikutnya berdasarkan hasil analisis data ED S/M.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	Rumusan target pencapaian/ pemenuhan 8 SNP	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
7.9	Sekolah/Madrasah membuat kriteria mutu di atas kriteria SNP berbasis keunggulan lokal dan berdaya saing nasional/internasional.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Rumusan kriteria mutu di atas SNP. - Program untuk mewujudkan pencapaian kriteria mutu di atas SNP. - Bukti/catatan	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
				keterlaksanaan program berdasarkan kriteria mutu di atas SNP.	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
7.10	Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah disusun mengacu pada hasil analisis data ED S/M	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	Naskah Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RK S/M) sesuai dengan hasil analisis Data ED S/M.	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			

G. Standar Akreditasi 8: Pembiayaan

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
8.1	Sekolah/Madrasah menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis perbankan.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	- Laporan Keuangan yang dilampiri <i>print-out</i> rekening koran dari Bank - Contoh Slip Setoran dan Slip Pengambilan Uang dari Bank	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
			Angket	Isian Angket pendapat guru, tenaga kependidikan, komite sekolah/madrasah, dan siswa tentang sistem manajemen keuangan.	
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			

No.	Indikator Kunci	Skor	Teknik Penilaian dan Bukti Fisik		Pendapat
8.2	Sekolah/Madrasah memiliki alokasi Biaya Operasi Non Personalia minimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Nakah Rencana Kerja Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA S/M) • Buku Kas/Laporan/Catatan Penggunaan Biaya Operasi Non Personalia	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			
8.3	Laporan Akuntabilitas Pengelolaan dan Pembiayaan Sekolah/ Madrasah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	Dokumen	• Naskah Laporan Akuntabilitas Pengelolaan dan Pembiayaan disampaikan dalam pertemuan dengan Komite Sekolah/ Madrasah dan Orang Tua/Wali • Laporan pengelolaan dan pembiayaan sekolah/madrasah dimuat dalam Web Sekolah/ Madrasah (Jika punya Web)	☐ SS ☐ S ☐ CS ☐ TS ☐ STS
		Komentar/saran/pendapat lainnya:			

_____, _____ 20__
 Responden,

Lampiran 9. Data Hasil Validasi Instrumen Akreditasi

DATA HASIL VALIDASI INSTRUMEN AKREDITASI (MODEL AKREDITASI SMART)

Standar Akreditasi	No. Butir	Rater 1	Rater 2	Rater 3
Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	1.1	4	4	5
	1.2	5	4	4
	1.3	4	4	4
	1.4	5	5	5
Standar Akreditasi 2. Penilaian	2.1	5	4	5
	2.2	5	5	5
	2.3	5	4	4
	2.4	4	4	4
Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	3.1	4	4	3
	3.2	3	3	4
	3.3	4	4	4
	3.4	5	4	5
	3.5	5	4	5
	3.6	5	4	5
	3.7	4	4	5
	3.8	5	5	4
	3.9	4	4	4
	3.10	5	5	5
	3.11	5	4	4
	3.12	5	5	5
	3.13	5	4	5
	3.14	4	4	4
Standar Akreditasi 4. Isi KTSP	4.1	5	5	4
	4.2	4	4	4
	4.3	4	4	4
	4.4	3	3	4
	4.5	4	5	5
	4.6	5	5	5
	4.7	4	4	4
	4.8	4	5	4
	4.9	5	5	4
Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1	5	5	5
	5.2	5	4	4
	5.3	5	5	5
	5.4	5	5	5
	5.5	4	4	4

Standar Akreditasi	No. Butir	Rater 1	Rater 2	Rater 3
	5.6	4	4	4
	5.7	4	4	4
	5.8	4	5	5
Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	6.1	5	4	5
	6.2	4	5	5
	6.3	5	4	5
Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	7.1	4	4	4
	7.2	5	5	5
	7.3	4	4	4
	7.4	5	5	5
	7.5	4	4	4
	7.6	4	5	4
	7.7	3	3	4
	7.8	4	4	4
	7.9	3	4	4
	7.10	4	4	5
Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	8.1	4	3	4
	8.2	5	4	5
	8.3	5	5	5

Keterangan:

Rater 1: Soeharto, M.SOE, Ed.D. (Pakar Akreditasi/Anggota BAN-S/M)

Rater 2: Dr. Heri Retnowati (Pakar Evaluasi/Dosen Pascasarjana UNY)

Rater 3: Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd. (Pakar Manajemen Pendidikan/Guru Besar UNIB)

Lampiran 10. Penilaian tentang Tingkat Kepentingan Indikator Kunci

DATA PENILAIAN PRAKTIKI (ASESOR AKREDITASI SMA/MA) TENTANG TINGKAT KEPENTINGAN INDIKATOR KUNCI (DIGUNAKAN UNTUK DASAR PEMBOBOTAN)

No.	Standar Akreditasi	Butir Indikator	Penilaian (R)											
			R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
1	Standar Akreditasi 1.	1.1	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4
	Kompetensi Lulusan	1.2	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5
		1.3	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4
		1.4	4	5	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4
2	Standar Akreditasi 2.	2.1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5
	Penilaian	2.2	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4
		2.3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4
		2.4	4	3	4	4	3	3	3	5	4	5	3	3
3	Standar Akreditasi 3.	3.1	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
	Proses Pembelajaran	3.2	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3
		3.3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		3.4	4	4	3	2	4	3	2	4	2	4	4	3
		3.5	3	3	3	5	3	4	4	3	3	5	4	5
		3.6	3	4	5	3	3	3	5	4	3	5	3	5
		3.7	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4
		3.8	3	5	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3
		3.9	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
		3.10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		3.11	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
		3.12	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4
		3.13	4	2	3	4	2	3	2	3	4	4	2	4
		3.14	4	2	2	2	4	3	3	3	4	4	4	3
4	Standar Akreditasi 4.	4.1	2	3	2	2	3	3	4	3	3	2	3	2
	Isi KTSP	4.2	4	2	2	3	4	4	3	2	3	3	3	2
		4.3	2	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	4
		4.4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	2	4
		4.5	2	2	3	3	4	2	3	4	2	2	3	2
		4.6	2	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4
		4.7	4	3	2	4	2	2	4	2	3	2	4	3
		4.8	3	5	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4
		4.9	4	5	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4

No.	Standar Akreditasi	Butir Indikator	Penilaian (R)											
			R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
5	Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
		5.2	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3
		5.3	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5
		5.4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4
		5.5	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4
		5.6	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
		5.7	2	2	4	2	3	2	2	3	2	4	3	3
		5.8	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4
6	Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	6.1	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4
		6.2	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3
		6.3	4	4	5	4	3	3	4	3	3	3	5	5
7	Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	7.1	4	5	4	5	3	3	4	3	3	4	4	4
		7.2	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
		7.3	3	4	3	5	3	4	5	5	5	3	5	5
		7.4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
		7.5	5	4	5	5	3	4	5	4	4	5	5	4
		7.6	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4
		7.7	3	5	4	3	5	4	4	5	5	3	3	5
		7.8	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3
		7.9	5	5	4	4	4	4	5	3	3	4	4	3
		7.10	4	5	5	5	4	5	3	5	4	5	3	4
8	Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	8.1	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3
		8.2	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4
		8.3	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5

Keterangan:

Responden yang memberikan penilaian adalah Asesor Akreditasi SMA/MA pada BAP-S/M Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lampiran 11. Lembar Validasi Prosedur Akreditasi SMA/MA

	Nama	
	Jabatan	Asesor Akreditasi SMA/MA
	Tempat Tugas	

LEMBAR VALIDASI PROSEDUR AKREDITASI SMA/MA

Petunjuk:

1. Setelah Bapak/Ibu membaca prosedur akreditasi SMA/MA (terlampir), Bapak/Ibu diminta untuk memvalidasi prosedur akreditasi tersebut.
2. Berikan penilaian dengan cara memberi tanda silang (X) atau melingkari angka 4, 3, 2, atau 1 pada kolom skor nilai.
3. Apabila Bapak/Ibu ingin memberikan komentar atau saran untuk perbaikan, silahkan tuliskan pada kolom komentar/saran.

No.	Aspek yang Dinilai	Skor Nilai				Komentar/ Saran
1	Prosedur praktis	4	3	2	1	
2	Prosedur dapat menjamin pihak sekolah bertindak jujur dan transparan.	4	3	2	1	
3	Prosedur dapat menjamin asesor bertindak jujur, adil, dan objektif.	4	3	2	1	
4	Proses verifikasi dan validasi mudah dikerjakan	4	3	2	1	
5	Fisibilitas (dapat diterapkan)	4	3	2	1	

_____, _____ 20__

Responden/Penilai,

Lampiran 12. Data Validasi Prosedur Akreditasi SMART

DATA HASIL VALIDASI PROSEDUR AKREDITASI (MODEL AKREDITASI SMART)

No.	Responden	Aspek yang Dinilai				
		1	2	3	4	5
1	Responden 1	3	3	4	3	4
2	Responden 2	4	3	3	3	4
3	Responden 3	3	2	3	3	3
4	Responden 4	4	3	3	4	4
5	Responden 5	3	3	3	3	4
6	Responden 6	3	3	3	3	2
7	Responden 7	4	2	2	3	3
8	Responden 8	4	3	4	3	4
9	Responden 9	3	3	3	3	3
10	Responden 10	3	3	3	3	4
11	Responden 11	3	2	3	3	4
12	Responden 12	3	3	3	4	3
13	Responden 13	3	3	3	2	3
14	Responden 14	4	3	3	4	3
	Rerata	3,36	2,79	3,07	3,14	3,43
	Rerata Keseluruhan	3,16				

Keterangan:

Responden adalah Asesor Akreditasi SMA/MA

1	Prosedur praktis
2	Prosedur dapat menjamin pihak sekolah bertindak jujur dan transparan.
3	Prosedur dapat menjamin asesor bertindak jujur, adil, dan objektif.
4	Proses verifikasi dan validasi mudah dikerjakan
5	Fisibilitas (dapat diterapkan)

Lampiran 13. Lembar Penilaian Keefektifan Model Akreditasi SMART

	Nama	
	Jabatan	Kepala SMA/MA/ Wakil Kepala Sekolah/ Guru/Tenaga Kependidikan *)
	Tempat Tugas	

LEMBAR PENILAIAN KEEFEKTIFAN MODEL AKREDITASI SMART

Petunjuk:

1. Setelah Bapak/Ibu membaca dan/atau menggunakan Model Instrumen Akreditasi SMA/MA (Model Akreditasi SMART), mohon memberikan penilaian tentang keefektifan model tersebut.
2. Berikan penilaian dengan cara memberi tanda silang (X) atau melingkari angka 4, 3, 2, atau 1 pada kolom skor nilai.
3. Apabila Bapak/Ibu ingin memberikan komentar atau saran untuk perbaikan, silahkan tuliskan pada kolom komentar/saran.

No.	Aspek yang Dinilai	Skor Nilai				Komentar/ Saran
1	Tampilan/desain Instrumen Akreditasi SMA/MA	4	3	2	1	
2	Tampilan/desain Aplikasi Isian Data Akreditasi SMA/MA	4	3	2	1	
3	Kejelasan Petunjuk Teknis Pengisian Data Akreditasi SMA/MA	4	3	2	1	
4	Ketepatan substansi data akreditasi yang diisikan	4	3	2	1	
5	Keakuratan data akreditasi yang diisikan	4	3	2	1	
6	Obyektivitas data akreditasi yang diisikan	4	3	2	1	
7	Kepraktisan dalam penggunaan	4	3	2	1	
8	Bahasa yang digunakan	4	3	2	1	
9	Fisibilitas (kemungkinan dapat diterapkan)	4	3	2	1	

Lampiran 14. Penilaian Keefektifan Model Akreditasi SMART Uji Coba 1

**Data Penilaian Keefektifan Model Akreditasi SMART
(Uji Coba Tahap 1)**

No.	Responden	Aspek yang Dinilai								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Responden 1	3	2	3	4	4	3	4	4	2
2	Responden 2	2	4	2	3	4	3	2	3	3
3	Responden 3	4	2	4	3	4	4	3	3	3
4	Responden 4	2	2	2	4	4	4	4	3	2
5	Responden 5	3	4	4	4	3	3	3	4	2
6	Responden 6	3	4	2	3	3	3	2	4	2
7	Responden 7	2	4	4	4	4	3	3	4	4
8	Responden 8	4	3	3	3	3	4	3	3	4
9	Responden 9	3	2	4	4	4	4	4	4	2
10	Responden 10	4	3	4	4	4	3	3	3	3
11	Responden 11	2	2	3	4	4	3	2	3	4
12	Responden 12	4	4	4	3	3	4	2	4	4
13	Responden 13	4	4	4	4	4	4	2	3	4
14	Responden 14	3	2	3	3	3	3	3	4	3
15	Responden 15	3	3	4	3	4	4	3	4	3
16	Responden 16	4	2	2	3	4	4	3	4	3
17	Responden 17	3	3	2	3	3	4	2	3	2
18	Responden 18	2	4	2	3	3	4	4	3	3
19	Responden 19	3	4	3	4	4	3	3	3	2
20	Responden 20	2	3	3	3	3	3	4	4	4
21	Responden 21	4	2	4	3	4	3	3	4	4
22	Responden 22	4	3	3	4	3	3	3	3	2
23	Responden 23	3	4	4	4	3	3	4	4	4
	Rerata	3,09	3,04	3,17	3,48	3,57	3,43	3,00	3,52	3,00

Keterangan:

1	Tampilan/desain Instrumen Akreditasi SMA/MA
2	Tampilan/desain Aplikasi Isian Data Akreditasi SMA/MA
3	Kejelasan Petunjuk Teknis Pengisian Data Akreditasi SMA/MA
4	Ketepatan substansi data akreditasi yang diisikan
5	Keakuratan data akreditasi yang diisikan
6	Obyektivitas data akreditasi yang diisikan
7	Kepraktisan dalam penggunaan
8	Bahasa yang digunakan
9	Fisibilitas (kemungkinan dapat diterapkan)

Lampiran 15. Penilaian Keefektifan Model Akreditasi SMART Uji Coba 2

**Data Penilaian Keefektifan Model Akreditasi SMART
(Uji Coba Tahap 2)**

No.	Responden	Aspek yang Dinilai								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Responden 1	2	2	4	4	3	3	4	3	2
2	Responden 2	2	3	3	4	3	4	4	3	3
3	Responden 3	3	3	4	3	3	3	2	3	2
4	Responden 4	4	3	4	3	3	3	4	4	3
5	Responden 5	3	2	3	3	4	4	2	4	3
6	Responden 6	2	2	3	3	4	3	3	4	4
7	Responden 7	3	3	3	3	4	4	4	3	3
8	Responden 8	4	4	4	3	3	4	4	3	2
9	Responden 9	2	4	4	4	3	3	2	3	4
10	Responden 10	2	2	4	4	4	4	2	3	2
11	Responden 11	3	3	3	4	3	3	4	4	2
12	Responden 12	3	4	3	3	4	4	3	4	2
13	Responden 13	3	4	3	3	3	3	3	4	2
14	Responden 14	3	3	3	3	3	4	3	3	4
15	Responden 15	2	3	4	3	3	4	3	3	2
16	Responden 16	3	3	3	4	3	4	4	4	2
17	Responden 17	3	3	4	3	3	4	2	4	4
18	Responden 18	4	3	3	3	4	4	4	4	2
19	Responden 19	2	4	4	4	3	3	4	4	3
20	Responden 20	2	2	3	4	3	3	4	3	3
21	Responden 21	4	4	4	3	3	3	3	3	4
22	Responden 22	3	4	4	4	3	4	4	3	3
23	Responden 23	2	4	4	4	4	3	2	3	4
24	Responden 24	4	2	3	3	4	4	4	4	3
25	Responden 25	4	4	3	4	3	4	2	3	2
26	Responden 26	4	3	3	4	3	3	4	3	2
27	Responden 27	4	2	4	3	3	3	3	4	2
28	Responden 28	2	3	3	3	3	4	3	4	4
29	Responden 29	2	4	4	4	3	3	3	3	4
30	Responden 30	3	2	3	4	3	3	2	4	4

No.	Responden	Aspek yang Dinilai								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Responden 31	2	3	4	4	3	4	4	3	2
32	Responden 32	2	2	3	4	4	4	4	3	2
33	Responden 33	4	2	3	3	3	3	4	4	3
34	Responden 34	4	3	4	4	3	4	4	4	2
35	Responden 35	3	2	4	4	4	3	2	4	2
36	Responden 36	3	4	3	4	4	4	4	3	3
37	Responden 37	3	3	3	3	3	4	2	4	4
38	Responden 38	2	4	4	4	3	3	2	4	4
39	Responden 39	4	4	3	4	3	4	3	4	4
40	Responden 40	3	2	3	3	4	4	2	4	4
41	Responden 41	3	3	4	3	4	3	3	4	3
42	Responden 42	4	4	3	3	4	3	2	4	3
	Rerata	3,35	3,4	3,38	3,47	3,57	3,45	3,35	3,55	3,00

Keterangan:

1	Tampilan/desain Instrumen Akreditasi SMA/MA
2	Tampilan/desain Aplikasi Isian Data Akreditasi SMA/MA
3	Kejelasan Petunjuk Teknis Pengisian Data Akreditasi SMA/MA
4	Ketepatan substansi data akreditasi yang diisikan
5	Keakuratan data akreditasi yang diisikan
6	Obyektivitas data akreditasi yang diisikan
7	Kepraktisan dalam penggunaan
8	Bahasa yang digunakan
9	Fisibilitas (kemungkinan dapat diterapkan)

Lampiran 16. Surat Keterangan dari BAP-S/M Bengkulu



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI BENGKULU**

Sekretariat: Kompleks Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Jl. S. Parman No. 7 Bengkulu
Telp. (0736)21785 Fax. (0736)21785 Website: www.ban-sm.or.id Email: bapbengkulu@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0/0/BAP-SM/TU/IV/2014

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : MARJUKI
Nomor Registrasi : 07701261004
Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan,
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka penelitian Disertasi yang berjudul "Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA" pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 April 2013
Waktu : 09.00 – 12.00
Tempat : Ruang Sidang Sekretariat BAP-S/M Provinsi Bengkulu
Bahan Diskusi : Konsep Model Akreditasi SMA/MA

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 11 April 2013
Ketua BAP-S/M Provinsi Bengkulu,

Drs. H. Firmansyah, M.Pd.

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Bengkulu
2. Ketua BAN-S/M di Jakarta.

Lampiran 17. Surat Keterangan dari BAP-S/M D.I. Yogyakarta



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
**BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta 55166 Telepon (0274) 541322, 513005 Fax 513132
Website : www.ban-sm.or.id Email : bas_diy@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 20.01 /BAP-SM/TU/I/2014

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : MARJUKI
Nomor Registrasi : 07701261004
Program Studi : Penelitian dan Evaluasi Pendidikan,
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan Disertasi yang berjudul "Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA" dengan subjek penelitian Asesor Akreditasi SMA/MA pada BAP-S/M Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BAP-S/M DIY
Drs. Suhadi

Lampiran 18. Surat Keterangan dari SMAN 3 Kota Bengkulu



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3

Jln. RE. Martadinata No 41 Telp. (0736) 51991 Bengkulu
website :www.smantibengkulu.sch.id Email: sman3bengkulu@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070 /140.b/ SMA N.3/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SARJONO,S.Pd
N I P : 197108111994031002
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Negeri 3 Kota Bengkulu

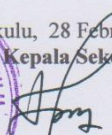
Dengan ini menerangkan :

N a m a : MARJUKI
NPM : 07701261004
Program Studi : S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Telah melaksanakan penelitian di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu pada tanggal 24 s.d 26 Februari 2014 dengan

Judul : “ **PENGEMBANGAN MODEL AKREDITASI SMA/MA**”.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 28 Februari 2014
Kepala Sekolah

SARJONO, S.Pd
NIP. 197108111994031002



Lampiran 19. Surat Keterangan dari SMAN 10 Kota Bengkulu

	PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 10 KOTA BENGKULU Jalan Padang Cengkeh Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu	
---	--	---

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070/289/SMAN.10/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. BIHANUDIN, S.Pd, M.Pd
NIP	: 19690806 199412 1 003
Pangkat/Gol	: Pembina / IV.a
Jabatan	: Kepala Sekolah
Unit Kerja	: SMA Negeri 10 Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan :

Nama	: MARJUKI
NPM	: 07701261004
Program Studi	: S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Telah melaksanakan Penelitian di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu dengan judul :

“ Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA “ pada 24 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 28 Februari 2014
Kepala Sekolah


Dr. BIHANUDIN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19690806 199412 1 003

Lampiran 20. Surat Keterangan dari SMAN 7 Kota Bengkulu



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA PLUS NEGERI 7
TERAKREDITASI : A

Jl. Jenggala No. 1 Lingshar Barat Kota Bengkulu 38225 Telp/FAX (0736) - 25355 Web: <http://www.smaplus7bengkulu.sch.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/ 121.a /SMA7

Kepala SMA Plus Negeri 7 Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : **MARJUKI**
NPM : 07701261004
Program Studi : S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Universitas : Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Benar telah melakukan penelitian/pengambilan data pada SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu untuk Disertasi dengan Judul "**Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA**" yang dilakukan pada tanggal 7 s.d. 12 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 15 April 2014

Kepala SMA Plus Negeri 7 Bengkulu,



Hj. NISMAH, M.Pd

Pembina Tk. I / NIP. 19621211 198501 2 003

Lampiran 21. Surat Keterangan dari SMAN 3 Kota Bengkulu



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3

Jln. RE. Martadinata No 41 Telp. (0736) 51991 Bengkulu
website :www.smantibengkulu.sch.id Email: sman3bengkulu@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070 / 273 / SMA N.3/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SARJONO,S.Pd**
N I P : 197108111994031002
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Negeri 3 Kota Bengkulu

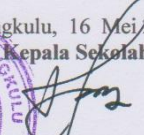
Dengan ini menerangkan :

N a m a : **MARJUKI**
NPM : 07701261004
Program Studi : S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Dinas Diknas Kota Bengkulu Nomor: 421.3/183/V. Dikbud tanggal 8 Mei 2014 , yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu dari 9 s/d 12 Mei 2014 dengan

Judul : **“ PENGEMBANGAN MODEL AKREDITASI SMA/MA”**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 16 Mei 2014
Kepala Sekolah

SARJONO, S.Pd
NIP. 197108111994031002



Lampiran 22. Surat Keterangan dari SMAN 7 Kota Bengkulu

 **PEMERINTAH KOTA BENGKULU**
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA PLUS NEGERI 7
TERAKREDITASI : A
R. Jenggala No. 1 Lingshar Barat Kota Bengkulu 38225 Telp/FAX (0736) - 25355 Web: <http://www.smaplus7bengkulu.sch.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.3/ 161. a /SMA7

Kepala SMA Plus Negeri 7 Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : **MARJUKI**
NPM : 07701261004
Program Studi : S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Universitas : Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Benar telah melakukan penelitian/pengambilan data (uji coba model) pada SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu untuk Disertasi dengan Judul **"Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA"** yang dilakukan pada tanggal 19 s.d. 24 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 26 Mei 2014
Kepala SMA Plus Negeri 7 Bengkulu,


H. NISMAH, M.Pd
Pembina Tk. I / NIP. 19621211 198501 2 003

Lampiran 23. Surat Keterangan dari SMAN 10 Kota Bengkulu

	PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 10 KOTA BENGKULU Jalan Padang Cengkeh Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu	
---	---	---

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070/301/SMAN.10/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. BIHANUDIN, S.Pd, M.Pd
NIP	: 19690806 199412 1 003
Pangkat/Gol	: Pembina / IV.a
Jabatan	: Kepala Sekolah
Unit Kerja	: SMA Negeri 10 Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan :

Nama	: MARJUKI
NPM	: 07701261004
Program Studi	: S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

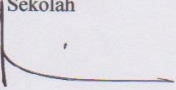
Telah melaksanakan Penelitian di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu dengan judul :

“ Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA “ pada Mei 2014 s/d Juni 2014

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 28 Mei 2014
Kepala Sekolah

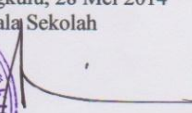



Dr. BIHANUDIN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19690806 199412 1 003

Lampiran 24. Surat Keterangan dari SMAN 5 Kota Bengkulu

	PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMA NEGERI 5 KOTA BENGKULU TERAKREDITASI "A"	
<i>Jl. Cendana No.20 Kec.Ratu Saman Tlp. (0736) 21433 – Fax (0736) 346952 Sawah Lebar Kode Pos 38227 Email: info@smn5bengkulu.sch.id – Website: http://www.sman5bengkulu.sch.id</i>		
<u>SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN</u> Nomor : 074 / 311 /SMAN.5/2014		
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota Bengkulu, menerangkan bahwa :		
Nama	: MARJUKI	
NPM	: 07701261004	
Program Studi	: S3. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	
telah selesai melaksanakan penelitian di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dengan judul penelitian : "Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA".		
Penelitian dilaksanakan berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Nomor : 421.3/183/V.Dikbud, tertanggal 08 Mei 2014. Adapun penelitian dilaksanakan mulai tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2014.		
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Bengkulu, 26 Juni 2014 Kepala Sekolah  Dra. DARMAWATI, M.Pd NIP. 19581028 1984032.005		
		
<u>Tembusan :</u> 1. Kasubdin Dikmen Dinas Dikbud Kota Bengkulu 2. Yang bersangkutan 3. Arsip		

Lampiran 25. Surat Keterangan dari SMAN 10 Kota Bengkulu

	PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 10 KOTA BENGKULU Jalan Padang Cengkeh Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu	
<u>SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN</u> Nomor : 070/301/SMAN.10/2014		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	: Dr. BIHANUDIN, S.Pd, M.Pd	
NIP	: 19690806 199412 1 003	
Pangkat/Gol	: Pembina / IV.a	
Jabatan	: Kepala Sekolah	
Unit Kerja	: SMA Negeri 10 Kota Bengkulu	
Dengan ini menerangkan :		
Nama	: MARJUKI	
NPM	: 07701261004	
Program Studi	: S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	
Telah melaksanakan Penelitian di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu dengan judul :		
“ Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA “ pada Mei 2014 s/d Juni 2014		
Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Bengkulu, 28 Mei 2014 Kepala Sekolah		
 Dr. BIHANUDIN, S.Pd, M.Pd NIP. 19690806 199412 1 003		
		

Lampiran 26. Surat Keterangan dari SMAN 9 Kota Yogyakarta

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 9
Jl. Sagan No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 513434, Fax : (0274) 520346
Website : www.sma9jogja.com E-mail : sma9yk@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/..249...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Maman Surakhman, M Pd I
NIP : 19600607 198101 1 008
Pangkat : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Sekolah

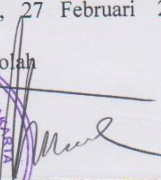
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Marjuki
NIM : 07701261004
Pekerjaan : Mahasiswa PPs, UNY

telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul
"PENGEMBANGAN MODEL AKREDITASI SMA/MA" yang telah dilaksanakan di SMA
Negeri 9 Yogyakarta pada tanggal 17 s.d 19 Februari 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Februari 2014.

Kepala Sekolah

Drs. H. MAMAN SURAKHMAN, M.Pd.I.
NIP. 19600607 198103 1 008



**SEGORO AMARTO**
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran 27. Surat Keterangan dari SMAN 1 Kabawetan

	PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS PENDIDIKAN PENUDA DAN OLAH RAGA SMA NEGERI 1 KABAWETAN AKREDITASI BAN-SM 2009 : B PLUS Alamat : Km. Tangsi Batu Ane. Kabawetan Telp. (0732) 700277	
---	--	---

SURAT KETERANGAN
No : 84/L22.16.02/SMA / KIE/2014

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 1 Kabawetan, Kabupaten Kepahiang.
Memperhatikan :

1. Surat : Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3053/UN34.17/LT/2014 tertanggal 25 April 2014.

2. Perihal : Surat ijin penelitian a.n. Marjuki

3. Judul Tesis : "Pengembangan Model Akreditasi SMA/MA"

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama : Marjuki

2. NPM : 07701261004

3. Program Studi : S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Telah melakukan penelitian/wawancara/pengambilan data yang berkenaan dengan penelitian tersebut di SMA Negeri 1 Kabawetan mulai : *Senin-Rabu, 28-30 April 2014.*

Demikianlah surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabawetan, 30 April 2014


NIP.19650103 199303 1 007